



PEMERINTAH PROVINSI
BAPPEDA

Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah

RPJPD 2025-2045

Pemerintah Provinsi
BENGKULU





GUBERNUR BENGKULU

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan



GOVERNOR OF BENGKULU

- 2 -

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);



GOVERNOR OF BENGKULU

- 3 -

10. Regulation of the Province of Bengkulu Number 2 Year 2022 regarding the Bengkulu Environment and Environmental Management Plan for the Province of Bengkulu Year 2022-2052 (Bengkulu Province Regulation Year 2022 Number 2);
11. Regulation of the Province of Bengkulu Number 3 Year 2023 regarding the Bengkulu Regional Spatial Plan for the Province of Bengkulu Year 2023-2043 (Bengkulu Province Regulation Year 2023 Number 3, Addition of Bengkulu Province Regulation Year 2023 Number 3);

With Joint Approval
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU
and
GOVERNOR OF BENGKULU

DECIDES:

Enacts : REGIONAL REGULATION CONCERNING LONG-TERM REGIONAL
REGIONAL YEAR 2025-2045.

CHAPTER I GENERAL PROVISIONS

Article 1

In this Regional Regulation is intended with:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu.
5. Kepala Badan adalah Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah Provinsi.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut dengan RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut dengan RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.



GOVERNOR OF BENKULU

- 4 -

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut dengan RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut dengan RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Bengkulu untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II RPJP DAERAH Pasal 2

RPJP Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran umum kondisi Daerah;
- c. BAB III : Permasalahan dan isu strategis Daerah;
- d. BAB IV : Visi dan misi Daerah;
- e. BAB V : Arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah;
- f. BAB VI : Penutup

Pasal 3

RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi pedoman dalam:
 - a. Penyusunan RPJM Daerah; dan
 - b. Penyusunan RPJP Daerah Kabupaten/Kota
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat Visi, Misi, dan Program Gubernur dan/atau materi muatan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.



GOVERNOR BENGKULU

- 5 -

BAB III PERUBAHAN RPJP DAERAH Pasal 5

- (1) Perubahan RPJP Daerah dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJP Daerah kurang dari 7 (tujuh) tahun.
- (3) Pembatasan jangka waktu perubahan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku jika terjadi perubahan mendasar.
- (4) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (3), mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (5) Perubahan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan dan/atau perubahan RPJM Daerah.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 6

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJP Daerah lingkup mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJP Daerah.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah, telah dipedomani dalam merumuskan penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJM Daerah.



GUBERNUR BENGKULU

- 6 -

- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah, telah dilaksanakan melalui RPJM Daerah.

Pasal 7

- (1) Kepala Badan melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Badan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Badan melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah kepada Gubernur.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi RPJP Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Dokumen Perencanaan yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



GUBERNUR BENGKULU

- 7 -

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 2024

GUBERNUR BENGKULU,

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
Pada tanggal 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

ISNAN FAJRI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024 NOMOR

KATA SAMBUTAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Buku Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu 2025-2045 ini dapat disusun dan diterbitkan. Dokumen ini akan menjadi pedoman penting dalam mengarahkan pembangunan Provinsi Bengkulu selama dua dekade mendatang.

Visi "Bengkulu Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan" yang diusung dalam RPJPD ini mencerminkan aspirasi kita semua untuk melihat Provinsi Bengkulu berkembang pesat, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan menjaga kelestarian lingkungan. Visi ini juga selaras dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, yaitu "Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan."

Keberhasilan pelaksanaan RPJPD ini tentunya membutuhkan kerja sama dan dukungan dari semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, maupun seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, saya mengajak semua pihak untuk bersama-sama berperan aktif dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Provinsi Bengkulu.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang telah bekerja keras dalam penyusunan Buku RPJPD Provinsi Bengkulu 2025-2045 ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi panduan yang efektif dalam mengarahkan pembangunan daerah kita menuju masa depan yang lebih baik. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

GUBERNUR BENGKULU

DR. H. ROHIDIN MERSYAH

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Dengan segala puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami sampaikan kata sambutan untuk penerbitan Buku Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu 2025-2045. Dokumen ini merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan berbagai pihak untuk merumuskan arah pembangunan yang strategis dan berkelanjutan bagi Provinsi Bengkulu.

RPJPD ini dirancang untuk menjadi panduan dalam mengarahkan pembangunan di Provinsi Bengkulu selama dua dekade mendatang. Dokumen ini tidak hanya mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, tetapi juga sejalan dengan arah kebijakan nasional. Visi "Bengkulu Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan" yang terkandung dalam RPJPD ini menggarisbawahi komitmen kita untuk mencapai kemajuan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan lingkungan.

Penyusunan RPJPD ini dilakukan melalui pendekatan partisipatif, melibatkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, akademisi, masyarakat, dan sektor swasta. Proses ini memastikan bahwa setiap kebijakan yang dirumuskan relevan dan dapat diimplementasikan secara efektif untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan RPJPD ini sangat bergantung pada kolaborasi dan sinergi dari semua pihak. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh komponen masyarakat, pemerintah pusat, dunia usaha, dan akademisi untuk berpartisipasi aktif dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Provinsi Bengkulu. Kerja sama yang baik akan menjadi kunci untuk mencapai tujuan yang telah kita tetapkan bersama.

Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada tim penyusun RPJPD serta semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungan dalam proses penyusunan dokumen ini. Semoga Buku RPJPD Provinsi Bengkulu 2025-2045 ini dapat menjadi panduan yang efektif dan inspiratif dalam mengarahkan pembangunan daerah kita menuju masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

KEPALA BAPPEDA PROVINSI BENGKULU

Hj. YULISWANI, SE, MM

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Hubungan Antar Dokumen	6
1.4.1 Hubungan RPJPD Provinsi Bengkulu dengan RPJPN Tahun 2025- 2045	8
1.4.2. Hubungan RPJPD Provinsi Bengkulu dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	9
1.4.3. Hubungan RPJPD Provinsi Bengkulu dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional dan Provinsi Bengkulu	10
1.4.4. Hubungan RPJPD Provinsi Bengkulu dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Bengkulu.....	11
1.4.5. Hubungan RPJPD Provinsi Bengkulu dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Panjang Daerah Sekitar serta Dokumen Perencanaan Lainnya	12
1.5. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II. GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH.....	16
2.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	16
2.1.1. Geografi.....	16
2.1.2. Demografi	22
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	27
2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi	27
2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya	47
2.3. Aspek Pelayanan Umum.....	50
2.3.1. Pelayanan Umum Urusan Wajib Pelayanan Dasar.....	50
2.3.2. Pelayanan Umum Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	73
2.3.3. Pelayanan Umum Urusan Pilihan.....	90
2.3.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan.....	98
2.3.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan.....	100
2.3.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	103
2.3.7. Unsur Pemerintahan Umum	105
2.4. Aspek Daya Saing Daerah	106
2.4.1. Daya Saing Ekonomi Daerah	106
2.4.2. Daya Saing SDM	108
2.4.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah.....	108
2.4.4. Daya Saing Iklim Investasi	111
2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025	113
2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik.....	146

2.6.1.	Proyeksi Jumlah Pertumbuhan Penduduk dan Total Penduduk	146
2.6.2.	Proyeksi Jumlah Pertumbuhan Penduduk dan Total Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	147
2.6.3.	Analisis Kependudukan	149
2.6.4.	Kebutuhan sarana dan prasarana dasar	150
2.7.	Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah.....	156
2.7.1	Rencana Struktur Ruang Berdasarkan RTRW	156
2.7.1.1	Rencana Sistem Pusat Permukiman.....	156
2.7.1.2	Rencana Sistem Jaringan Transportasi	162
2.7.1.2.1	Gambaran Umum Rencana Jaringan Transportasi Pulau Sumatera	162
2.7.1.2.2	Rencana Pengembangan Sistem jaringan Transportasi Provinsi Bengkulu	168
2.7.1.2.3	Sistem Jaringan Kereta Api	194
2.7.1.2.4	Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan.....	197
2.7.1.2.5	Sistem jaringan Transportasi Laut	198
2.7.1.2.6	Bandar Udara.....	201
2.7.1.3	Rencana Sistem Jaringan Energi.....	202
2.7.1.4	Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi	209
2.7.1.5	Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air	210
2.7.1.5.1	Air Tanah dan Air Permukaan (Wilayah Sungai).....	212
2.7.1.5.2	Air Baku	213
2.7.1.6	Rencana Pengembangan Daerah Irigasi	214
2.7.1.7	Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya	218
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH		223
3.1.	Permasalahan Pembangunan Daerah	223
3.1.1.	Permbangunan Manusia yang Belum Optimal	223
3.1.2.	Angka Kemiskinan yang Masih Cukup Tinggi	231
3.1.3.	Pertumbuhan Ekonomi Cenderung Stagnan.....	232
3.1.4.	Hilirisasi Komoditas Unggulan dan Pengembangan Pariwisata Masih Belum Optimal.....	232
3.1.5.	ASN yang Belum Sepenuhnya Berkualitas dan Profesional.....	234
3.1.6.	Pelayanan Publik Belum Optimal	235
3.1.7.	Belum Kondusifnya Atmosfir Pembangunan	235
3.1.8.	Rendahnya Pengelolaan Lingkungan Hidup	236
3.1.9.	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Belum Optimal.....	237
3.1.10.	Pembangunan Perdesaan Belum Optimal	238
3.1.11.	Konektivitas dan Pengembangan Infrastruktur Strategis Masih Terbatas.....	238
3.1.12.	Kurangnya Pusat-Pusat Pertumbuhan/Ekonomi Baru	239
3.1.13.	Belum kuatnya sinergi Pembangunan Pusat – Daerah.....	239
3.2.	Isu Strategis Daerah.....	241
3.2.1.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi.....	241
3.2.2.	Hilirisasi Komoditas Unggulan dan Pengembangan Pariwisata yang Komprehensif dan Kompetitif	242

3.2.3.	Pengembangan Konektivitas Daerah serta Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan.....	244
3.2.4.	Kemiskinan, Kesejahteraan dan Daya Saing SDM	244
3.2.5.	Pembangunan Peran Perempuan pada Sektor Formal di Provinsi Bengkulu Masih Relatif Rendah	246
3.2.6.	Peningkatan Kinerja Birokrasi	247
3.2.7.	Pembangunan Rendah Karbon dan Emisi GRK	248
BAB IV.	VISI DAN MISI DAERAH.....	251
4.1.	Visi	251
4.2.	Sasaran Visi	256
4.2.1.	Pendapatan per Kapita Setara Negara Maju.....	259
4.2.2.	Kemiskinan Menuju 0% dan Ketimpangan Berkurang	259
4.2.3.	Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat.....	259
4.2.4.	Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat.....	259
4.2.5.	Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission	259
4.2.	Misi.....	260
BAB V	ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK	274
5.1.	Arah Kebijakan Pentahapan Pembangunan	274
5.1.1.	Arah Kebijakan I (2025 – 2029): Penguatan Pondasi Transformasi.....	281
5.1.2.	Arah Kebijakan II (2030 – 2034): Akselerasi Transformasi	283
5.1.3.	Arah Kebijakan III (2035 – 2039): Ekspansi dan Kerjasama Regional	285
5.1.4.	Arah Kebijakan IV (2040 – 2045): Perwujudan Bengkulu, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan	287
5.2.	Arah Kebijakan Transformasi.....	290
5.3.	Sasaran Pokok Pembangunan	297
5.3.	Muatan Ekonomi Syariah dalam RPJPD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045.....	331
BAB VI	PENUTUP	332
6.1.	Manajemen Resiko Pembangunan	332
6.2.	Kesimpulan	332

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Hubungan Antar Dokumen.....	6
Gambar 2. 1	Peta Administrasi Provinsi Bengkulu	18
Gambar 2. 2	Ketinggian Tempat di Provinsi Bengkulu	19
Gambar 2. 3	Distribusi Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Agustus 2022	45
Gambar 2. 4	Perkembangan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	47
Gambar 2. 5	Sebaran Pembangkit Listrik di Provinsi Bengkulu.....	110
Gambar 2. 6	Peta Rencana Jaringan Jalan Provinsi Bengkulu	178
Gambar 5. 1	Tahapan Periodisasi RPJPD	274

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Luas Wilayah Provinsi Bengkulu dirinci menurut Kabupaten/Kota	17
Tabel 2. 2	Perkembangan Kehutanan di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022.....	20
Tabel 2. 3	Luas Hutan Menurut Fungsinya di Provinsi Bengkulu.....	21
Tabel 2. 4	Luas Hutan per Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu	21
Tabel 2. 5	Perkembangan Lahan Kritis Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2021	21
Tabel 2. 6	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2022	23
Tabel 2. 7	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2022	23
Tabel 2. 8	Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019-2022	24
Tabel 2. 9	Kepadatan Penduduk Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2021	24
Tabel 2. 10	Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2022	25
Tabel 2. 11	Jumlah Penduduk yang Telah Memiliki KTP Elektronik Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu	26
Tabel 2. 12	Jumlah Penduduk yang Telah Memiliki KTP Elektronik dan Jumlah Kepemilikan Dokumen Kependudukan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu	26
Tabel 2. 13	PDRB ADHB Lapangan Usaha 2018 - 2022.....	27
Tabel 2. 14	PDRB ADHB Pengeluaran Provinsi Bengkulu 2018 – 2022	29
Tabel 2. 15	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Lapangan Usaha 2018-2022	30
Tabel 2. 16	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Pengeluaran 2018-2022	32
Tabel 2. 17	Distribusi PDRB menurut Lapangan Usaha Per Sektor 2018-2022.....	32
Tabel 2. 18	Distribusi Persentase PDRB atas dasar harga berlaku menurut Pengeluaran Tahun 2018-2022.....	33
Tabel 2. 19	Laju Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022	33
Tabel 2. 20	Laju Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran (Persen) Tahun 2018-2022	34
Tabel 2. 21	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Persen) 2018-2022	34
Tabel 2. 22	PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022	35
Tabel 2. 23	PDRB Perkapita ADHB Kabupaten/Kota Tahun 2018-2022 (dalam ribu rupiah)	35
Tabel 2. 24	PDRB Perkapita ADHK Kabupaten/Kota 2018-2022 (dalam ribu rupiah)	36
Tabel 2. 25	Perkembangan Inflasi Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022	37
Tabel 2. 26	Perkembangan Gini Ratio Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022	37
Tabel 2. 27	Perkembangan Penduduk Miskin di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022	38

Tabel 2. 28	Indeks Kedalaman Kemiskinan Menurut Daerah, Maret 2018 - September 2022	39
Tabel 2. 29	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Daerah, Maret 2018 - September 2022.....	39
Tabel 2. 30	Perkembangan Garis Kemiskinan Provinsi Bengkulu Menurut Kabupaten/Kota, 2020 – 2022 (rupiah/kapita/bulan).....	40
Tabel 2. 31	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bengkulu Menurut Kabupaten/Kota, 2020 – 2022 (ribu).....	41
Tabel 2. 32	Persentase Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bengkulu Menurut Kabupaten/Kota, 2020 – 2022 (ribu)	41
Tabel 2. 33	Perkembangan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2022	43
Tabel 2. 34	Perkembangan Ketenagakerjaan di Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2022	44
Tabel 2. 35	Perkembangan Ketenagakerjaan di Provinsi Bengkulu menurut Kabupaten/Kota, Agustus 2022.....	45
Tabel 2. 36	Penduduk Bekerja di Provinsi Bengkulu menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan, Agustus 2018 – Agustus 2022	46
Tabel 2. 37	Perkembangan Penanganan PMKS dan Fakir Miskin di Provinsi Bengkulu Tahun 2021	48
Tabel 2. 38	Perkembangan Jumlah Sanggar/Grup Kesenian di Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2021	48
Tabel 2. 39	Perkembangan Indeks Pembangunan Kebudayaan di Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2021	49
Tabel 2. 40	Perkembangan Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan di Kota Bengkulu Tahun 2018-2022	49
Tabel 2. 41	Perkembangan Persentase Nomor Lomba Olahraga Prestasi yang dimenangkan Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2021	49
Tabel 2. 42	Perkembangan Jumlah Organisasi Olahraga yang dibina di Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2021	50
Tabel 2. 43	Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Bengkulu Tahun 2018–2022	50
Tabel 2. 44	Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022	51
Tabel 2. 45	Perkembangan APS Jenjang Pendidikan Menengah di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022	51
Tabel 2. 46	Perkembangan APM Jenjang Pendidikan Menengah di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022	52
Tabel 2. 47	Perkembangan APK Jenjang Pendidikan Menengah di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022	52
Tabel 2. 48	Perkembangan Murid Putus Sekolah di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020	53
Tabel 2. 49	Perkembangan APM Jenjang Pendidikan Menengah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022.....	53
Tabel 2. 50	Perkembangan APK Jenjang Pendidikan Menengah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022.....	54
Tabel 2. 51	Jumlah SMA, SMK dan SLB di Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2022	54
Tabel 2. 52	Perkembangan Sekolah yang Sudah Akreditasi di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022	55

Tabel 2. 53	Jumlah Ruang Kelas Per Kab/Kota Se-Provinsi Bengkulu Jenjang SMA, SMK, dan SLB Tahun 2022	55
Tabel 2. 54	Perkembangan Rasio Ruang Kelas terhadap Rombongan Belajar di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022	56
Tabel 2. 55	Data Jumlah Guru di Provinsi Bengkulu Tingkat SMA, SMK Dan SLB Tahun 2022	56
Tabel 2. 56	Perkembangan Rasio Guru terhadap Murid di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022	56
Tabel 2. 57	Perkembangan Guru yang Sudah Sertifikasi di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022	57
Tabel 2. 58	Perkembangan Angka Kematian Bayi per 1000 KH Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2022.....	58
Tabel 2. 59	Perkembangan Angka Kematian Ibu per 100,000 KH Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2022.....	59
Tabel 2. 60	Perkembangan Angka Harapan Hidup per Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2022	60
Tabel 2. 61	Perkembangan Angka Harapan Hidup Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022	60
Tabel 2. 62	Perkembangan Stunting di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022.....	61
Tabel 2. 63	Perkembangan Sarana Kesehatan di Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2022	61
Tabel 2. 64	Klasifikasi Rumah Sakit dan Akreditasi Rumah Sakit di Provinsi Bengkulu Tahun 2022	61
Tabel 2. 65	Rumah Sakit yang telah Akreditasi di Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2022	62
Tabel 2. 66	Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Rumah Sakit/Rumah Bersalin, Puskesmas, Klinik/Balai Kesehatan	62
Tabel 2. 67	Persentase Penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan terakhir menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2015-2021	63
Tabel 2. 68	Persentase Penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan berobat jalan selama sebulan	63
Tabel 2. 69	Kasus Penyakit Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Penyakit	63
Tabel 2. 70	Persentase Jalan dalam Kondisi Baik/Mantap di Provinsi BengkuluTahun 2017-2022	64
Tabel 2. 71	Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik/Mantap di Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2022	65
Tabel 2. 72	Persentase Irigasi dalam Kondisi Baik/Mantap di Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2022	65
Tabel 2. 73	Persentase Luas Kawasan yang Peruntukannya sesuai dengan RTRW di Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2022.....	66
Tabel 2. 74	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak di	66
Tabel 2. 75	Perkembangan Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2017- 2022.....	67
Tabel 2. 76	Perkembangan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak di Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2022	67
Tabel 2. 77	Perkembangan Rumah Tangga yang menempati RLH di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022	68

Tabel 2. 78	Luasan areal kumuh di provinsi Bengkulu berdasarkan kepala daerah masing-masing kabupaten/kota.....	SK 69
Tabel 2. 79	Perkembangan Penanganan Kasus Pelanggaran Perda dan Ketertiban Umum di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022	71
Tabel 2. 80	Perkembangan Rasio Satlinmas di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022	71
Tabel 2. 81	Perkembangan Penanganan PMKS dan Fakir Miskin di Provinsi Bengkulu Tahun 2020	72
Tabel 2. 82	Perkembangan Indeks Resiko Bencana di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022	73
Tabel 2. 83	Perkembangan Ketenagakerjaan di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2022	74
Tabel 2. 84	Perkembangan Ketenagakerjaan di Provinsi Bengkulu menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022	75
Tabel 2. 85	Penduduk Bekerja di Provinsi Bengkulu menurut Pendidikan Tahun 2018-2022	76
Tabel 2. 86	Perkembangan Indeks Pembangunan Gender di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022	76
Tabel 2. 87	Perkembangan IPG Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2022	77
Tabel 2. 88	Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022	77
Tabel 2. 89	Perkembangan IDG Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2021	78
Tabel 2. 90	Perkembangan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022	78
Tabel 2. 91	Perkembangan Ketahanan Pangan di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022	79
Tabel 2. 92	Perkembangan Lingkungan Hidup di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022	80
Tabel 2. 93	Perkembangan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022	81
Tabel 2. 94	Perkembangan Jumlah Penduduk yang Sudah Rekam KTP-elektronik Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2021.....	81
Tabel 2. 95	Jumlah Kepemilikan Dokumen Kependudukan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2021	81
Tabel 2. 96	Perkembangan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022	82
Tabel 2. 97	Perkembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022	83
Tabel 2. 98	Perkembangan Perhubungan di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022.....	84
Tabel 2. 99	Perkembangan Komunikasi dan Informasi di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022	85
Tabel 2. 100	Perkembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022	86
Tabel 2. 101	Perkembangan Penanaman Modal di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022	87

Tabel 2. 102	Perkembangan Kepemudaan dan Olahraga di Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2021	88
Tabel 2. 103	Perkembangan Statistik di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022	88
Tabel 2. 104	Perkembangan Kebudayaan di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022.....	89
Tabel 2. 105	Perkembangan Perpustakaan di Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2021.....	90
Tabel 2. 106	Perkembangan Kearsipan di Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2021.....	90
Tabel 2. 107	Perkembangan Kelautan dan Perikanan di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022	91
Tabel 2. 108	Perkembangan Pariwisata di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022.....	91
Tabel 2. 109	Perkembangan Pertanian di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022.....	93
Tabel 2. 110	Perkembangan Kehutanan di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022.....	93
Tabel 2. 111	Perkembangan Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022	94
Tabel 2. 112	Perkembangan Rasio Elektrifikasi Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022	95
Tabel 2. 113	Perkembangan Perdagangan di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022.....	96
Tabel 2. 114	Perkembangan Perindustrian di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022.....	96
Tabel 2. 115	Perkembangan Industri Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022	96
Tabel 2. 116	Perkembangan Transmigrasi di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022.....	98
Tabel 2. 117	Perkembangan Kesekretariatan Daerah di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022	99
Tabel 2. 118	Perkembangan Kesekretariatan DPRD di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022	100
Tabel 2. 119	Perkembangan Perencanaan Daerah di Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2022	101
Tabel 2. 120	Perkembangan Keuangan Daerah di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022	101
Tabel 2. 121	Perkembangan Kepegawaian di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022.....	102
Tabel 2. 122	Perkembangan Pendidikan dan Pelatihan di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020	102
Tabel 2. 123	Perkembangan Penelitian dan Pengembangan di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022	103
Tabel 2. 124	Perkembangan Penghubung di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022.....	103
Tabel 2. 125	Perkembangan Pengawasan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2021	105
Tabel 2. 126	Perkembangan Kesatuan Bangsa dan Politik di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022	106

Tabel 2. 127	Perkembangan Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022	107
Tabel 2. 128	Perkembangan Pengeluaran per Kapita di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022	108
Tabel 2. 129	Perkembangan Fokus Sumber Daya Manusia di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022	108
Tabel 2. 130	Perkembangan Fokus Fasilitas Infrastruktur di Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2023	110
Tabel 2. 131	Perkembangan Investasi Penanaman Modal Asing di Provinsi Bengkulu Tahun 2020 – 2022	111
Tabel 2. 132	Perkembangan Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri di Provinsi Bengkulu Tahun 2020 – 2022	111
Tabel 2. 133	Statistik Kriminalitas di Provinsi Bengkulu Tahun 2018 – 2021	112
Tabel 2. 134	Perkembangan Fokus Iklim Investasi di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022	113
Tabel 2. 135	Proyeksi Penduduk Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2045 (Ribu Orang)	146
Tabel 2. 136	Proyeksi Penduduk Berjenis Kelamin Laki-laki Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2045 (Ribu Orang)	147
Tabel 2. 137	Proyeksi Penduduk Berjenis Kelamin Perempuan Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2045 (Ribu Orang)	148
Tabel 2. 138	Proyeksi Kepadatan Penduduk Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2045.....	149
Tabel 2. 139	Proyeksi Rasio Ketergantungan Penduduk Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2045 (Ribu Orang)	150
Tabel 2. 140	Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal di Provinsi Bengkulu.....	151
Tabel 2. 141	Proyeksi Pertumbuhan Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Trend Jumlah Rumah Tangga Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2023 Sampai Dengan Tahun 2045 (dalam Ribu).....	152
Tabel 2. 142	Proyeksi Kebutuhan Rumah Akibat Proyeksi Pertumbuhan Rumah Tangga Tahun 2030-2045 (dalam Ribu).....	152
Tabel 2. 143	Perkembangan Rumah Tangga yang menempati RLH di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022	153
Tabel 2. 144	Perkembangan Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak di Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2022	154
Tabel 2. 145	Perkembangan Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2022.....	154
Tabel 2. 146	Proyeksi Jumlah Rumah Tangga dengan Air Minum Layak	155
Tabel 2. 147	Perkembangan Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022	156
Tabel 2. 148	Perkembangan Rasio Elektrifikasi Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022	156
Tabel 2. 149	Sistem Pusat Permukiman Provinsi Bengkulu	159
Tabel 2. 150	Rencana Sistem Perkotaan dan Fungsinya di Provinsi Bengkulu	159
Tabel 2. 151	Pengembangan Jaringan Jalan Nasional di Provinsi Bengkulu Berdasar Keputusan Menteri PUPR Nomor: 430/KPTS/M/2022	171

Tabel 2. 152	Usulan Rencana Peningkatan Jaringan Jalan Nasional (JKP-1 menjadi JAP) di Provinsi Bengkulu untuk Mendukung Fungsi	174
Tabel 2. 153	Nama Ruas Jalan yang merupakan Rencana Pembangunan Jalan Baru, pemantapan, dan peningkatan di Provinsi Bengkulu	174
Tabel 2. 154	Pengembangan dan Peningkatan Fungsi Jaringan Jalan sebagai Jalan Penghubung	176
Tabel 2. 155	Terminal penumpang di Provinsi Bengkulu	180
Tabel 2. 156	Data Dasar (DD2) Jembatan Wilayah II Provinsi Bengkulu Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Muko Muko Dan Kota Bengkulu	182
Tabel 2. 157	Rekapitulasi Data Kondisi Jembatan Jalan Provinsi Bengkulu Wilayah Kabupaten Lebong, Kepahiang Dan Rejang Lebong Tahun 2021	190
Tabel 2. 158	Proyeksi Kebutuhan Daya Listrik Provinsi Bengkulu s.d 2032 (dalam MWatt)	203
Tabel 2. 159	Rekapitulasi Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Bengkulu.....	206
Tabel 2. 160	Rincian Rencana Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik	206
Tabel 2. 161	Potensi Pembangkit Tenaga Listrik di Wilayah Provinsi Bengkulu	207
Tabel 2. 162	Rencana Pembangunan Jaringan Transmisi s.d Tahun 2030	208
Tabel 2. 163	Kebutuhan Pelayanan Telepon di Provinsi Bengkulu Tahun 2032	210
Tabel 2. 164	Prakiraan Kebutuhan Penyediaan Air Minum Provinsi Bengkulu Tahun 2032 (liter/hari)	214
Tabel 2. 165	Produksi Sampah dan Kebutuhan Fasilitas Pengangkutan Sampah di Provinsi Bengkulu Tahun 2032	222
Tabel 3. 1	Permasalahan Pembangunan Provinsi Bengkulu	240
Tabel 3. 2	Isu Strategis Daerah.....	249
Tabel 4. 1	Penyelerasan Visi RPJPN 2025-2045 dan Visi RPJPD Provinsi Bengkulu 2025-2045	253
Tabel 4. 2	Perumusan Visi berdasarkan Isu Strategis	254
Tabel 4. 3	Penyelerasan Sasaran Visi RPJPN 2025-2045 dan Sasaran Visi Provinsi Bengkulu RPJPD 2025-2045.....	257
Tabel 4. 4	Penyelarasan Agenda/Misi RPJPN 2025-2045 dengan Misi RPJPD Provinsi Bengkulu 2025-2045.....	261
Tabel 4.5	Permasalahan Daerah dan Rumusan Misi RPJPD Provinsi Bengkulu 2025-2045	268
Tabel 5. 1	Tahapan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025 – 2045.....	276
Tabel 5. 2	Arah Kebijakan Transformasi Daerah Provinsi Bengkulu	290
Tabel 5. 3	Sasaran Pokok Pembangunan Provinsi Bengkulu 2025-2045.....	313



BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang suatu daerah untuk periode 20 tahun. RPJPD merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang berkelanjutan serta berkesinambungan.

Menurut amanat undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bagian kedua tentang perencanaan pembangunan daerah, Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas yang disusun tersebut terdiri dari RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Dalam pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diatur bahwa kurun waktu RPJPD sesuai dengan kurun waktu RPJPN. Sehingga dapat diartikan bahwa periodisasi RPJPD sama dengan periodisasi RPJPN 2005-2025 yang akan berakhir pada tahun 2025. RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka Panjang untuk 20 tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu 2023-2043 serta memperhatikan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS RPJPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045.

Selain itu, dengan diterbitkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024, yang menekankan pentingnya sinkronisasi dan percepatan perencanaan pembangunan daerah, penyusunan dokumen RPJPD menjadi semakin krusial. Dokumen RPJPD yang disusun harus dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan dokumen ini harus dilakukan secara transparan,

responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan, dengan memperhatikan percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 menegaskan bahwa setiap daerah harus memastikan bahwa RPJPD yang disusun mampu menjawab tantangan pembangunan dan mendorong percepatan pembangunan di berbagai sektor, termasuk infrastruktur, ekonomi, dan sumber daya manusia, untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan dan merata.

RPJPD Provinsi Bengkulu 2025-2045 ini disusun dengan menggunakan: a) Pendekatan teknokratik, dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah; b) Pendekatan partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan; c) Pendekatan politis dengan memastikan bahwa dokumen ini tidak hanya mencerminkan kebutuhan pembangunan masyarakat, tetapi juga memperhitungkan dinamika politik lokal. Keseimbangan antara kepentingan politis dan keberlanjutan pembangunan tetap menjadi kunci dalam perencanaan jangka panjang; dan d) Pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Kebijakan dirancang dari atas ke bawah sekaligus memperhitungkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang dari bawah ke atas. Pendekatan ini dapat membantu mencapai kesinambungan pembangunan yang ditetapkan secara strategis dan kebutuhan riil di masyarakat di tingkat lokal. Kombinasi dari seluruh pendekatan ini dapat menciptakan rencana pembangunan yang lebih holistik dan inklusif.

1.2. Dasar Hukum

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045 ini disusun dengan menggunakan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. **Undang-Undang Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);**

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah:
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042):
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

- Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 3);
 21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah Tahun 2025 - 2045;
 22. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100A.4/110/SJ tentang Penyelarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 23. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
 24. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS RPJPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) menjadi landasan utama bagi seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Bengkulu dalam menjalankan pembangunan menuju perubahan kondisi (Visi) pada Tahun 2045. RPJPD tidak hanya sekadar dokumen strategis, tetapi juga menjadi peta jalan yang jelas bagi pembangunan daerah selama dua dekade ke depan. Dalam proses penyusunannya, RPJPD harus dipersiapkan dengan cermat, mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, dan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak.

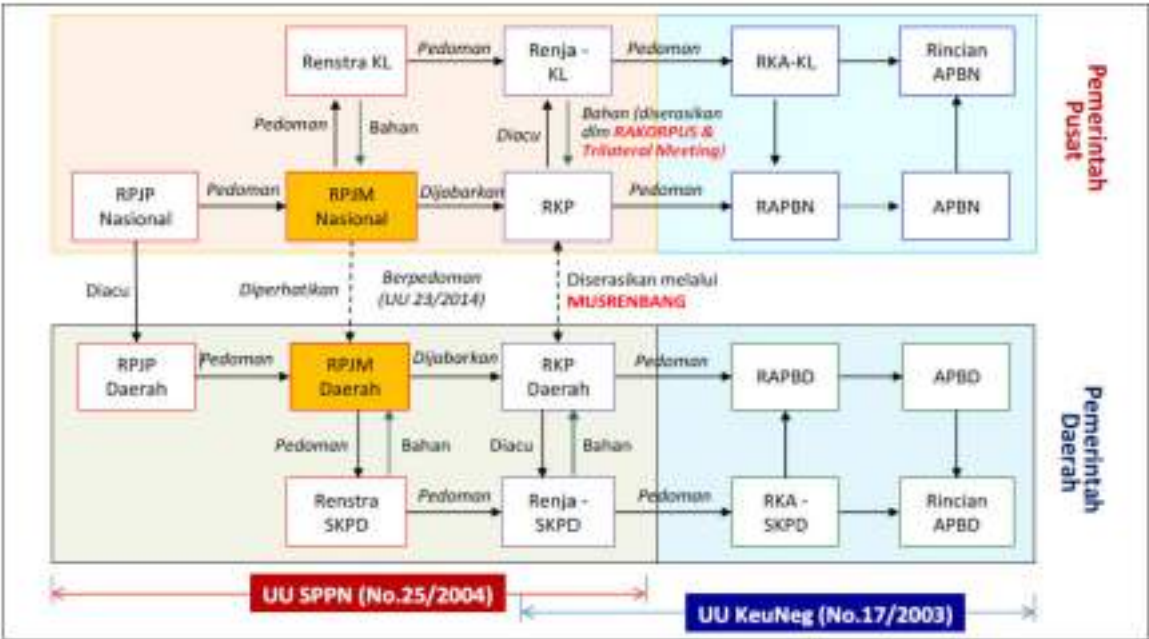
RPJPD merupakan langkah yang sangat penting. Dokumen ini bertujuan untuk menggambarkan secara detail kondisi aktual daerah, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta merumuskan visi, misi, dan arah kebijakan

pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Melalui proses penyempurnaan yang melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, RPJPD akan menjadi instrumen yang lebih kokoh dan dapat diandalkan dalam menentukan prioritas pembangunan yang mendasar bagi Provinsi Bengkulu.

Dengan penyempurnaan yang matang, RPJPD akan menjadi pijakan yang mendalam dan mengakar bagi seluruh stakeholder dalam merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan yang berdampak jangka panjang. Dokumen ini tidak hanya menjadi panduan, tetapi juga cerminan dari visi, komitmen, dan harapan bersama untuk masa depan Provinsi Bengkulu. Melalui RPJPD, akan tercipta kerangka kerja yang holistik dan terintegrasi, yang memungkinkan pengembangan sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, serta penguatan infrastruktur yang memadai.

Selain itu, RPJPD menjadi sarana untuk memperkuat sinergi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil, sehingga memungkinkan terciptanya kemitraan yang kokoh dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan Provinsi Bengkulu menuju visi tahun 2045. Dengan demikian, RPJPD bukan hanya menjadi dokumen formal, tetapi juga cerminan dari tekad bersama untuk meraih masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi seluruh warga Provinsi Bengkulu.

1.4. Hubungan Antar Dokumen



Gambar 1. 1 Hubungan Antar Dokumen

Gambar di atas menunjukkan hubungan antar dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah di Indonesia,

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU KeuNeg).

Pemerintah Pusat:

1. **RPJP Nasional (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional):** Pedoman utama bagi seluruh perencanaan pembangunan nasional.
2. **RPJM Nasional (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional):** Dokumen yang menjabarkan RPJP Nasional dan menjadi dasar penyusunan RKP.
3. **RKP (Rencana Kerja Pemerintah):** Rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan RPJM Nasional.
4. **Renstra KL (Rencana Strategis Kementerian/Lembaga):** Pedoman bagi kementerian/lembaga dalam penyusunan Renja-KL.
5. **Renja-KL (Rencana Kerja Kementerian/Lembaga):** Dokumen yang menyusun program dan kegiatan tahunan kementerian/lembaga, diacu dalam RKP.
6. **RKA-KL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga):** Anggaran kementerian/lembaga yang disusun berdasarkan Renja-KL.
7. **Rincian APBN:** Penyusunan APBN berdasarkan RAPBN yang disusun dari RKA-KL.
8. **APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara):** Anggaran negara yang mencakup seluruh rencana penerimaan dan pengeluaran pemerintah pusat.

Pemerintah Daerah:

1. **RPJP Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah):** Pedoman utama bagi perencanaan pembangunan daerah, diacu dari RPJP Nasional.
2. **RPJM Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah):** Dokumen yang menjabarkan RPJP Daerah dan menjadi dasar penyusunan RKP Daerah.
3. **RKP Daerah (Rencana Kerja Pemerintah Daerah):** Rencana kerja tahunan yang **disusun** berdasarkan RPJM Daerah.
4. **Renstra SKPD (Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah):** Pedoman bagi SKPD dalam penyusunan Renja-SKPD.
5. **Renja-SKPD (Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah):** Dokumen yang menyusun program dan kegiatan tahunan SKPD, diacu dalam RKP Daerah.
6. **RKA-SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah):** Anggaran SKPD yang disusun berdasarkan Renja-SKPD.

7. **Rincian APBD:** Penyusunan APBD berdasarkan RAPBD yang disusun dari RKA-SKPD.
8. **APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah):** Anggaran daerah yang mencakup seluruh rencana **penerimaan** dan pengeluaran pemerintah daerah.

Hubungan Antar Dokumen:

1. **RPJP Nasional** menjadi pedoman bagi **RPJP Daerah**.
2. **RPJM Nasional** menjabarkan **RPJP Nasional** dan memberikan pedoman untuk **RPJM Daerah**.
3. **RPJM Daerah** disusun dengan memperhatikan **RPJM Nasional** dan dijabarkan dalam **RKP Daerah**.
4. **RKP Nasional** dijabarkan dari **RPJM Nasional** dan memberikan pedoman untuk **RKP Daerah**.
5. **Renstra KL** dan **Renja-KL** merupakan dasar bagi penyusunan **RKA-KL** yang menjadi bahan untuk **RAPBN** dan akhirnya **APBN**.
6. **Renstra SKPD** dan **Renja-SKPD** merupakan dasar bagi penyusunan **RKA-SKPD** yang menjadi bahan untuk **RAPBD** dan akhirnya **APBD**.

Proses penyelarasan ini dilakukan melalui mekanisme seperti Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) untuk memastikan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dan daerah, serta antara rencana strategis dengan anggaran.

1.4.1 Hubungan RPJPD Provinsi Bengkulu dengan RPJPN Tahun 2025- 2045

Seiring dengan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Nomor: 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 10 Januari 2024, yang menekankan pentingnya penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Bengkulu dituntut untuk secara cermat melakukan penyesuaian pada visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok agar senantiasa sejalan dengan visi, misi, arah pembangunan, dan arah kebijakan kewilayahan nasional.

RPJPD Provinsi Bengkulu disusun dengan berpedoman pada RPJPN Tahun 2025-2045. RPJPD Bengkulu memuat visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan yang diselaraskan dengan RPJPN, sehingga arah pembangunan daerah mendukung tujuan nasional. Penyelarasan ini memastikan bahwa setiap langkah pembangunan di Bengkulu berkontribusi dalam mencapai visi besar Indonesia Emas 2045.

Dalam tahapan penyusunan, visi dan misi Provinsi Bengkulu diterjemahkan dengan mempertimbangkan kebutuhan penyelesaian permasalahan dan isu

pembangunan yang unik di tingkat lokal. Meskipun demikian, perumusan visi dan misi Provinsi Bengkulu tetap merujuk pada visi dan misi Indonesia Emas 2045 sebagai panduan utama, dengan tujuan mengintegrasikan aspirasi provinsi ke dalam visi nasional yang lebih luas. Lebih lanjut, penentuan berbagai arah kebijakan dipandu oleh Bab V Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana Menuju Indonesia Emas, khususnya arah kebijakan kewilayahan Pulau Sumatera, sebagaimana dijelaskan dalam RPJPN Tahun 2025-2045.

Penyelarasan ini mencakup pemaduan antara tujuan strategis nasional dan kebutuhan khusus Provinsi Bengkulu. Visi dan misi yang disusun dengan mempertimbangkan keduanya menghasilkan kerangka kerja ideologis yang sejalan, memungkinkan RPJPD Provinsi Bengkulu untuk berkontribusi secara signifikan dalam mencapai cita-cita Indonesia Emas Tahun 2045.

Dengan adanya hubungan kerangka kerja ideologis yang selaras melalui penyelarasan ini, RPJPD Provinsi Bengkulu menjadi instrumen yang mampu mendukung sinergi antara pembangunan nasional dan lokal, memperkuat koordinasi antar tingkat pemerintahan, dan memberikan kontribusi berarti dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas Tahun 2045.

1.4.2. Hubungan RPJPD Provinsi Bengkulu dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Hubungan RPJPD Provinsi Bengkulu dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sangat penting dalam menentukan arah pembangunan jangka panjang dan menengah di provinsi ini. RPJPD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045 menjadi acuan utama bagi Bakal Calon Kepala Daerah dalam menyusun visi, misi, dan programnya. Dalam proses penyusunan visi dan misi tersebut, perlu memperhatikan detail perencanaan selama empat periode, yakni Tahun 2025-2029, 2030-2034, 2035-2039, dan 2040-2045. RPJMD kemudian akan merujuk pada arah kebijakan dan target sasaran pokok yang telah ditetapkan dalam RPJPD, mengikuti tahapan pembangunan dokumen yang telah disusun dengan seksama.

RPJMD memiliki peran krusial sebagai panduan bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra tersebut menjadi landasan bagi setiap perangkat daerah dalam mengimplementasikan program-program pembangunan dan mencapai visi serta misi yang telah dirumuskan oleh Kepala Daerah. Penyusunan Renstra ini akan mengacu pada kewenangan penyelenggaraan urusan masing-masing perangkat daerah, memastikan sinergi antara prioritas nasional dan kebutuhan lokal.

Dengan demikian, RPJPD Provinsi Bengkulu menjadi panduan jangka panjang yang tidak hanya memberikan arah bagi kepemimpinan masa kini, tetapi juga bagi calon kepala daerah yang akan memimpin pada periode-periode selanjutnya. Hubungan erat antara RPJPD dan RPJMD menciptakan koordinasi yang efektif antara perencanaan strategis tingkat provinsi dan rencana pembangunan daerah yang lebih terperinci, memastikan kesinambungan visi pembangunan yang terintegrasi secara menyeluruh. Hal ini memungkinkan Provinsi Bengkulu untuk terus berkembang secara berkelanjutan dan responsif terhadap dinamika lokal maupun nasional.

1.4.3. Hubungan RPJPD Provinsi Bengkulu dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional dan Provinsi Bengkulu

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Provinsi Bengkulu memiliki peran sentral dalam memandu pengelolaan ruang dan lahan di tingkat nasional dan provinsi. Hubungan yang terjalin antara RPJPD Provinsi Bengkulu dan RTRWN serta Rencana Tata Ruang Provinsi (RTRP) Bengkulu menciptakan kerangka kerja yang saling mendukung untuk optimalisasi pemanfaatan lahan dan penataan ruang.

1. Koordinasi Penggunaan Lahan:

- RPJPD Provinsi Bengkulu memastikan bahwa kebijakan dan arah pembangunan yang diusungnya sejalan dengan ketentuan tata ruang wilayah nasional dan provinsi.
- Penyesuaian dan koordinasi penggunaan lahan di Provinsi Bengkulu harus memperhatikan prinsip-prinsip tata ruang yang tertuang dalam RTRWN dan RTRP, menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan pelestarian lingkungan.

2. Pengembangan Wilayah:

- RPJPD Provinsi Bengkulu mengintegrasikan strategi pengembangan wilayah dengan arah yang telah ditetapkan dalam RTRWN dan RTRW Provinsi.
- Penetapan prioritas lokasi pembangunan dan pengembangan infrastruktur di Provinsi Bengkulu sejalan dengan visi tata ruang nasional dan provinsi, memastikan kesinambungan antar tingkat pemerintahan.

3. Pembangunan Berkelanjutan:

- Keberlanjutan pembangunan yang diusung oleh RPJPD Provinsi Bengkulu harus sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang telah tertanam dalam RTRW.

- Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan mencakup aspek-aspek seperti konservasi alam, pelestarian lingkungan hidup, dan pemanfaatan lahan yang bijaksana.

4. **Penanganan Konflik Lahan:**

- Koordinasi yang baik antara RPJPD dan RTRW membantu mengidentifikasi dan menangani potensi konflik terkait penggunaan lahan di Provinsi Bengkulu.
- Melalui pendekatan terintegrasi, upaya penyelesaian konflik terkait tata ruang dapat diarahkan sesuai dengan visi dan tujuan nasional dan provinsi.

Dengan demikian, integrasi antara RPJPD Provinsi Bengkulu dan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional serta Provinsi Bengkulu menjamin bahwa pembangunan daerah berlangsung sesuai dengan kerangka tata ruang yang berlaku, mendukung keberlanjutan, dan memperhitungkan aspek-aspek penting dalam pengelolaan ruang dan lahan.

1.4.4. **Hubungan RPJPD Provinsi Bengkulu dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Bengkulu**

1. **Integrasi Pemikiran Lingkungan dalam Perencanaan:**

- RPJPD Provinsi Bengkulu diharapkan mencerminkan komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan dan memperhatikan hasil KLHS Provinsi Bengkulu.
- KLHS memberikan pandangan menyeluruh tentang dampak pembangunan terhadap lingkungan, dan RPJPD menggunakan pemikiran ini dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

2. **Perlindungan Sumber Daya Alam:**

- RPJPD Provinsi Bengkulu perlu mempertimbangkan hasil KLHS untuk melindungi sumber daya alam yang penting bagi keberlanjutan ekosistem dan kehidupan masyarakat setempat.
- Pemanfaatan lahan, air, dan hutan perlu diatur dengan bijaksana agar tetap seimbang dengan prinsip keberlanjutan yang dianjurkan dalam KLHS.

3. **Penilaian Dampak Lingkungan (ANDAL) dan Rencana Mitigasi:**

- RPJPD Provinsi Bengkulu dapat mengintegrasikan hasil penilaian dampak lingkungan dan rencana mitigasi yang dihasilkan dari KLHS.
- Langkah-langkah pencegahan dan mitigasi yang diidentifikasi dalam KLHS menjadi acuan bagi RPJPD untuk menghindari atau meminimalkan dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan.

4. **Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat:**

- Hasil KLHS dapat menjadi dasar untuk menyusun strategi sosialisasi dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJPD.
- Memastikan bahwa aspirasi dan kekhawatiran masyarakat sekitar terhadap dampak lingkungan dipertimbangkan secara serius dalam rencana pembangunan yang tercantum dalam RPJPD.

5. **Sinergi dengan Program Konservasi dan Pelestarian:**

- RPJPD Provinsi Bengkulu dapat menjalin sinergi dengan program-program konservasi dan pelestarian yang teridentifikasi dalam KLHS.
- Memastikan bahwa rencana pembangunan daerah mendukung upaya konservasi, mengintegrasikan koridor ekologis, dan mempertahankan keanekaragaman hayati setempat.

6. **Kesesuaian dengan Standar Lingkungan:**

- RPJPD harus memastikan kesesuaian dengan standar lingkungan yang telah ditetapkan dalam KLHS, sehingga setiap kebijakan dan program pembangunan mematuhi ketentuan keberlanjutan lingkungan.

Melalui integrasi yang erat antara RPJPD Provinsi Bengkulu dan KLHS, diharapkan pembangunan dapat berlangsung secara harmonis dengan keberlanjutan lingkungan, menghasilkan dampak positif bagi ekosistem dan kesejahteraan masyarakat seiring dengan pemenuhan kebutuhan pembangunan daerah.

1.4.5. Hubungan RPJPD Provinsi Bengkulu dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Panjang Daerah Sekitar serta Dokumen Perencanaan Lainnya

RPJPD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045 disusun dengan mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan dari daerah sekitar, seperti Provinsi Lampung, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, dan Provinsi Sumatera Barat. Langkah ini tidak hanya menetapkan dasar kerjasama lintas daerah dalam menangani permasalahan strategis bersama, tetapi juga menciptakan embrio untuk pelaksanaan perjanjian kerja sama antardaerah.

RPJPD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045 juga senantiasa memperhatikan berbagai dokumen perencanaan spasial sektoral di tingkat nasional maupun provinsi. Beberapa dokumen tersebut mencakup:

- a. **Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDG's):** Menyelaraskan rencana pembangunan daerah dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, memastikan

bahwa setiap langkah pembangunan mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDG's).

- b. **Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK):** Berfokus pada upaya mitigasi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendukung strategi nasional dalam mengatasi perubahan iklim.
- c. **Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG):** Memastikan ketahanan pangan dan gizi di tingkat daerah, sejalan dengan program nasional.
- d. **Rencana Aksi Daerah Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (RAD-MAPI):** Menyusun strategi konkret untuk mengatasi dampak perubahan iklim, dengan memperhatikan karakteristik khusus daerah.
- e. **Rencana Aksi Daerah Penurunan Gas Rumah Kaca (RAD-GRK):** Mendorong upaya daerah dalam menekan emisi gas rumah kaca dan berkontribusi pada upaya nasional.

Dengan memperhitungkan semua aspek tersebut, RPJPD Provinsi Bengkulu menciptakan kerangka perencanaan yang terintegrasi, mendukung harmonisasi antara kepentingan lokal dan nasional, serta memperkuat kesiapan daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan yang kompleks.

1.5. Sistematika Penulisan

RPJPD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I - PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas mengenai isi dokumen secara keseluruhan meliputi: latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan dan sistematika penyusunan dokumen RPJPD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045.

BAB II - GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH

Menjelaskan gambaran umum tentang kondisi Provinsi Bengkulu sebagai salah satu pertimbangan dalam perumusan kebijakan RPJPD yang meliputi: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing, evaluasi hasil RPJPD Tahun 2005-2025, tren demografi dan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik, dan pengembangan pusat pertumbuhan wilayah.

BAB III - PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Menjelaskan hasil olahan data kinerja dan informasi pembangunan lainnya untuk memahami permasalahan daerah paling utama yang merupakan faktor penghambat yang mengikat dan isu strategis yang akan dipecahkan hingga akhir masa periode pembangunan jangka panjang disertai isu-isu pembangunan terkini beserta analisis terhadap amanat dokumen atau tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi (nasional).

BAB IV - VISI DAN MISI DAERAH

Menjelaskan dan menjabarkan visi dan misi daerah secara terukur dan spesifik yang akan dicapai selama periode 2025-2045.

BAB V - ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Memuat dan menjabarkan Arah Kebijakan pentahapan pembangunan selama 20 tahun kedepan yang disertai dengan gambaran ukuran keberhasilan pelaksanaan pembangunan jangka panjang dengan penargetan kuantitatif tertentu yang berimplikasi pada pencapaian visi dan misi daerah, sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 yang merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045 dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif.

BAB VI - PENUTUP

Memuat salah satunya tentang pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, diantaranya melalui manajemen risiko pembangunan daerah dan nasional sebagai bagian dari upata pencapaian sasaran pembangunan di Provinsi Bengkulu.



BAB I - PENDAHULUAN

- Latar Belakang
- Dasar Hukum
- Hubungan Antar Dokumen
- Maksud dan Tujuan
- Sistematika Penulisan

BAB II - GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH

- Aspek Geografi dan Demografi
- Aspek Kesejahteraan Rakyat
- Aspek Pelayanan Umum
- Aspek Daya Saing Daerah
- Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2025-2045
- Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik
- Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

BAB III - PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

- Permasalahan Pembangunan Daerah
- Isu Strategis Daerah

BAB IV - VISI DAN MISI DAERAH

- Visi
- Sasaran Visi
- Misi

BAB V - ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

- Arah Kebijakan Pentahapan Pembangunan
- Sasaran Pokok Pembangunan
- Muatan Ekonomi Syariah dalam RPJPD Provinsi Bengkulu 2025-2045

BAB VI - PENUTUP

- Manajemen Resiko Pembangunan
- Kesimpulan



BAB II

GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH



BAB II

GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Analisis pada aspek geografi menyajikan gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana di wilayah Provinsi Bengkulu. Sedangkan gambaran kondisi demografi memberikan gambaran mengenai kondisi daerah yang mencakup perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu pada Provinsi Bengkulu.

2.1.1. Geografi

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Provinsi Bengkulu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828). Pada awalnya, Provinsi Bengkulu merupakan Karesidenan yang tergabung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Sejak Tahun 1967, Provinsi Bengkulu mengalami beberapa kali pemekaran. Semula Provinsi Bengkulu terdiri dari 3 (tiga) Kabupaten dan 1 (satu) kota, akan tetapi sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur kemudian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng), maka Provinsi Bengkulu terdiri dari 9 (sembilan) Kabupaten dan 1 (satu) Kota, 129 (seratus dua puluh sembilan) Kecamatan, dan 1.514 (seribu lima ratus empat belas) desa/kelurahan.

Provinsi Bengkulu terletak di wilayah pantai barat Pulau Sumatera yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia dengan garis pantai sepanjang 525 km. Wilayah di bagian timur merupakan daerah berbukit-bukit yang merupakan bagian dari Bukit Barisan yang membentang di sepanjang Pulau Sumatera dan bagian lainnya merupakan wilayah yang relatif datar. Secara astronomis, Provinsi Bengkulu terletak di pantai barat Pulau Sumatera pada garis lintang $2^{\circ}16' - 3^{\circ}31'$ LS dan garis bujur $101^{\circ}1' - 103^{\circ}41'$ BT, sedangkan secara administratif berbatasan dengan wilayah-wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Barat
2. Sebelah Selatan dengan Samudera Hindia dan Provinsi Lampung.
3. Sebelah Barat dengan Samudera Hindia.
4. Sebelah Timur dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan.

Adapun luas wilayahnya 32.225,24 Km² yang terdiri atas luas daratan lebih kurang 20.210,38Km² (dihitung berdasar hasil updating peta 2019) dan luas laut ± 11.667,6Km² (dihitung dari 12 Mil laut = 22,224 Km dikali panjang garis pantai 525 Km). Garis pantai sepanjang ± 525 km seluruhnya terletak di bagian barat Provinsi Bengkulu. Dengan aturan 12 Mil Laut yang ditetapkan sebagai wilayah otoritas Provinsi maka antara Pulau Enggano yang jarak lurusnya ke pantai Provinsi Bengkulu (pantai Manna) 120 Km (atau 64,79 Mil) terdapat wilayah yang di luar otoritas wilayah otonomi Provinsi Bengkulu seluas ± 52.332,4 Km² (525 X (120 – 22,224) Km). Selain itu, Provinsi Bengkulu memiliki pulau kecil yang berpenghuni yaitu Pulau Enggano, serta pulau-pulau lain yang tidak berpenghuni seperti Pulau Mega, Pulau Tikus, dan pulau-pulau kecil lainnya yang belum diberi nama.

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Provinsi Bengkulu dirinci menurut Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/ kota	Luas darat (km2)	Ibukota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan
1	Kota Bengkulu	150,31	Bengkulu	9	67
2	Bengkulu Selatan	1.220,21	Manna	11	158
3	Rejang Lebong	1.548,99	Curup	15	156
4	Bengkulu Utara	4.481,99	Argamakmur	19	220
5	Kaur	2.608,91	Bintuhan	15	195
6	Seluma	2.432,81	Tais	14	202
7	Mukomuko	4.138,68	Mukomuko	15	152
8	Lebong	1.666,62	Tubei	12	104
9	Kepahiang	749,39	Kepahiang	8	117
10	Bengkulu Tengah	1.132,30	Karang Tinggi	11	143
	Jumlah	20.210,38		129	1514

Sumber: Provinsi Bengkulu Dalam Angka Tahun 2024

Berdasarkan luas wilayah, Kabupaten Bengkulu Utara merupakan Kabupaten yang paling luas yang mencapai 4.481,99 km², atau sebesar 22,25% dari total wilayah Provinsi Bengkulu. Sedangkan Kota Bengkulu memiliki wilayah terkecil dan menjadi satu-satunya kota administratif di Provinsi Bengkulu, yang juga menjadi Ibukota Provinsi.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2022, tidak ada perubahan jumlah kabupaten/kota, kecamatan, maupun desa/kelurahan di Provinsi Bengkulu. Kabupaten/kota dengan jumlah kecamatan terbanyak terdapat pada

Kabupaten Bengkulu Utara yaitu sebanyak 19 kecamatan, sedangkan yang paling sedikit pada Kabupaten Kepahiang yaitu sebanyak 8 kecamatan. Sama dengan jumlah kecamatan, Kabupaten Bengkulu Utara juga memiliki jumlah desa/kelurahan terbanyak di Provinsi Bengkulu sampai dengan tahun 2023 yaitu sebanyak 220 desa/kelurahan, namun jumlah desa/ kelurahan yang paling sedikit dimiliki oleh Kota Bengkulu yaitu sebanyak 67 kelurahan.



Gambar 2. 1 Peta Administrasi Provinsi Bengkulu

Secara geografis, Provinsi Bengkulu terletak di Pantai Barat Pulau Sumatera, membujur dari utara ke selatan. Di sebelah Timur merupakan hutan suaka alam dan hutan lindung, dan Samudera Indonesia di sebelah Barat serta dataran tinggi yang membentang dari ujung utara sampai ujung selatan dengan lebar +50 Km. Dataran tinggi merupakan bagian dari Pegunungan Bukit Barisan. Provinsi Bengkulu memiliki bentuk wilayah relatif memanjang sejajar garis pantai, dengan panjang garis pantai +525 Km. Wilayah Provinsi Bengkulu memiliki kontur yang bergelombang dengan ketinggian tempat (altitude) berkisar antara 0-1.938 meter di atas permukaan laut (dpl). Titik terendah dijumpai di sepanjang pantai sedang titik tertinggi terletak di Puncak Gunung Kaba. Ditinjau berdasarkan kelas ketinggian tempat, maka wilayah Provinsi Bengkulu dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- Wilayah dengan ketinggian tempat 0 - 250 m dpl, meliputi areal seluas 976.624 ha yang menyebar disepanjang pantai dari utara sampai bagian selatan yang merupakan dataran aluvium;

hutan dengan luas wilayah administratif kota. Hutan di Provinsi Bengkulu ini terdiri dari hutan lindung, hutan produksi dan konservasi. Kawasan hutan di Provinsi Bengkulu sebagian besar merupakan kawasan lindung, yang berupa kawasan suaka dan pelestarian alam serta hutan lindung. Kondisi ini tentu memiliki tantangan sendiri dan memerlukan penanganan pengelolaan yang spesifik yang berbeda dengan pengelolaan kawasan yang didominasi hutan produksi. Dominannya keberadaan hutan konservasi dan lindung ini seringkali memang dianggap sebagai beban dari pada peluang untuk berinovasi.

Luasan lahan kritis pada tahun 2021 sebesar 713.985,48 Ha, Luasan Lahan kritis berkurang karena adanya kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, dan pemberdayaan masyarakat, tetapi kegiatan dalam rangka penurunan lahan kritis belum begitu luas. Laju deforestasi berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu pada tahun 2021 cenderung menurun diakibatkan oleh kurangnya kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, pemberdayaan masyarakat melalui program perhutanan sosial, serta pemeliharaan batas kawasan hutan. Perkembangan Kinerja Urusan Kehutanan di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Perkembangan Kehutanan di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	Data awal (2018)	2019	2020	2021	2022
Indeks Tutupan Lahan	55,52	55,78	53,15	55,52	58,84
Luas Lahan Kritis (Ha)	719,384.59	716,284.59	713.985,48	713.985,48	524.709
Laju Deforestasi	0,96	0,23	0,22	0,045	n/a

Sumber: Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu.

*n/a = data belum tersedia/belum rilis

Luas kawasan hutan di Provinsi Bengkulu, sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 420/ Kpts-II/1999 junto Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 643/Menhut-II/2011 junto Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.784/Menhut-II/2012 adalah 924.631 hektar atau 46.16 % dari luas wilayah daratannya; yang terdiri dari fungsi hutan konservasi, lindung, dan produksi. Sebagian besar, luas kawasan hutan di Provinsi Bengkulu ini berupa hutan dengan fungsi konservasi, yaitu sekitar 462.075,39 diikuti oleh luasan hutan lindung sekitar 256.109,44 dan hutan produksi sekitar 208.536,73 Ini berarti sebagian besar fungsi hutan yang berada di Provinsi Bengkulu adalah Hutan Konservasi yang digunakan untuk Taman Nasional.

Tabel 2. 3 Luas Hutan Menurut Fungsinya di Provinsi Bengkulu

No.	Fungsi Kawasan Hutan	Luasan (Ha)
1.	Hutan Konservasi	462.965
	Cagar Alam	4.300
	Taman Nasional	412.325
	Taman Wisata Alam	27.630
	Taman Hutan Raya	1.748
	Taman Buru	16.962
2.	Hutan Lindung (HL)	250.750
3.	Hutan Produksi	210.916
	Hutan Produksi Tetap	25.873
	Hutan Produksi Terbatas	173.280
	Hutan Produksi Yang Dapat di Konversi	11.763
Total		924.631

Sumber: Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu, 2022

Tabel 2. 4 Luas Hutan per Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu

No.	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)	Presentase
1	Bengkulu Selatan	49.300	5,33 %
2	Bengkulu Tengah	27.330	2,96%
3	Bengkulu Utara	194.622	21,05 %
4	Kaur	144.780	15,66 %
5	Kepahiang	17.702	1,91 %
6	Kota Bengkulu	1.783	0,19 %
7	Lebong	118.887	12,86 %
8	Muko-muko	228.378	24,70 %
9	Rejang Lebong	53.448	5,78 %
10	Seluma	88.400	9,56 %
Total		924.631	100 %

Sumber: Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu.

Kawasan hutan Provinsi Bengkulu tersebar di seluruh Kabupaten/Kota dengan luasan arealnya bervariasi menurut fungsinya. Kabupaten Mukomuko memiliki kawasan hutan yang terluas yakni sekitar 228.957,98 Ha.

Tabel 2. 5 Perkembangan Lahan Kritis Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2021

Kabupaten	Lahan Kritis 2017(data awal)		Lahan Kritis2018		Lahan Kritis 2019		Lahan Kritis 2020		Lahan Kritis 2021 (data termutakhir)	
	Dalam Kawasan	Luar Kawasan	Dalam Kawasan	Luar Kawasan	Dalam Kawasan	Luar Kawasan	Dalam Kawasan	Luar Kawasan	Dalam Kawasan	Luar Kawasan
Bengkulu Selatan	16,382.11	44,391.45	16,132.11	44,291.45	16,132.11	44,291.45	16,132.11	44.541,90	16.571,88	44.541,90
Bengkulu Tengah	20,860.78	72,562.74	20,860.78	72,562.74	20,860.78	71,462.74	20,860.78	72.562,75	20,860.77	72.562,75
Bengkulu Utara	14,061.16	163,031.99	13,811,16	162,931.99	13,811.16	162.781,99	16.250,47	176.282,70	16.250,70	176.282,70
Kaur	23,730.58	69,379.23	23,555,58	69,379.23	22,805,58	68.754,23	35.338,48	70.839,00	35.338,48	70.839,00
Kota Bengkulu	5.80	4,283.58	5.80	4,283.58	5.80	4,283.58	5.80	4,283.58	5.80	4,283.58
Lebong	20,181.21	44,735.43	20,181.21	44,585,43	20,181.21	44,360,43	20.178,25	28.226,24	20.178,25	28.226,24
Mukomuko	21,589.20	65,276.41	21,589.20	65,276.41	21,539,20	65,076,41	21,591,38	65.300,98	21.591,38	65.300,98
Rejang Lebong	16,138.04	9,986.17	15,843,04	9,986.17	15,843,04	9,986.17	554,86	908,48	554.86	908,48
Seluma	19,058.86	82,943.79	19,058.86	82,943,79	19,058,86	82,943,79	20,936,18	86.645,73	20.936,18	86.645,73
Kepahiang	7,138.38	5,067.67	7,138.38	4,967,67	7,138.38	4,967,67	7,138.38	4,967,67	7,138.38	4,967,67

Kabupaten	Lahan Kritis 2017(data awal)		Lahan Kritis2018		Lahan Kritis 2019		Lahan Kritis 2020		Lahan Kritis 2021 (data termutakhir)	
	Dalam Kawasan	Luar Kawasan	Dalam Kawasan	Luar Kawasan	Dalam Kawasan	Luar Kawasan	Dalam Kawasan	Luar Kawasan	Dalam Kawasan	Luar Kawasan
TOTAL	139.146,13	561.658,46	158.176,13	561.208,46	157.376,13	558.908,46	159.426,45	554.559,03	159.426,45	554.559,03

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu.

Hutan merupakan salah satu komponen yang penting dalam ekosistem. Selain berfungsi sebagai penjaga tata air, hutan juga mempunyai fungsi mencegah terjadinya erosi tanah, mengatur iklim, dan tempat tumbuhnya berbagai plasma nutfah yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perhitungan indeks tutupan hutan merupakan perbandingan langsung antara luas hutan dengan luas wilayah administratif kota.

Luasan Lahan kritis berkurang karena adanya kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, dan pemberdayaan masyarakat, tetapi kegiatan dalam rangka penurunan lahan kritis belum begitu luas, dari data tabel di atas pada tahun 2017, lahan kritis di dalam kawasan hutan seluas 139.146,13 Ha dan di luar kawasan hutan seluas 561.658,46 Ha dan pada tahun 2019 lahan kritis di dalam kawasan hutan seluas 157.376,13 Ha dan di luar kawasan hutan seluas 558.426,45 Ha. Terjadi peningkatan dari tahun 2017-2019 untuk lahan kritis di dalam kawasan hutan seluas 18.230 Ha dan di luar kawasan hutan terjadi penurunan seluas 2.750 Ha. Berdasarkan data, pada tahun 2021 lahan kritis terluas di dalam kawasan hutan berada di kabupaten Kaur seluas 35.338,48 Ha dan di luar kawasan hutan berada di kabupaten Bengkulu Utara seluas 176.282,70 Ha, dan untuk lahan kritis didalam kawasan hutan terendah berada diKota Bengkulu seluas 5,80 Ha, dan untuk luar kawasan hutan berada dikabupaten Rejang Lebong.

Produksi kayu hutan di Provinsi Bengkulu berupa kayu bulat padat tahun 2021 sebesar 6.966,83 m³, mengalami penurunan dari tahun 2020. Produksi Kayu bulat berasal dari Kabupaten Mukomuko sebesar 5.503,23m³, dari Kabupaten Bengkulu Utara sebesar 1.355,34m³ dan Kabupaten Bengkulu Selatan sebanyak 108,26m³. Sedangkan untuk Kayu gergajian dan kayu lapis untuk tahun 2020 sampai dengan 2022 tidak tersedia untuk Provinsi Bengkulu.

2.1.2. Demografi

Demografi atau ilmu kependudukan adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Jumlah penduduk Provinsi Bengkulu Tahun 2022 sebanyak 2.060,09 ribu jiwa yang terdiri atas 1.053,19 ribu jiwa penduduk laki-laki dan 1006,89 ribu jiwa penduduk perempuan.

Tabel 2. 6 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2022

No	Kabupaten/Kota	Penduduk (ribu)			
		2019 (data awal)	2020	2021	2022
1.	Bengkulu Selatan	142,9	166,3	168,0	170,09
2.	Rejang Lebong	246,8	276,7	278,8	281,28
3.	Bengkulu Utara	257,7	296,5	299,4	302,83
4.	Kaur	107,9	126,6	128,0	129,66
5.	Seluma	173,5	207,9	210,5	213,76
6.	Mukomuko	155,8	190,5	193,2	196,57
7.	Lebong	99,2	106,3	106,8	107,25
8.	Kepahiang	124,9	149,7	151,6	154
9.	Bengkulu tengah	98,3	116,7	118,1	119,81
10.	Kota Bengkulu	308,5	373,6	378,6	384,84
Provinsi Bengkulu		1.715,5	2.010,7	2.032,9	2.060,09

Sumber: Provinsi Bengkulu Dalam Angka Tahun 2023

Tabel 2. 7 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2022

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-4	89.956	85.982	175.938
2.	5-9	88.955	85.298	174.253
3.	10-14	88.660	83.755	172.415
4.	15-19	88.673	82.721	171.394
5.	20-24	88.162	84.353	173.515
6.	25-29	88.491	84.789	173.280
7.	30-34	86.730	83.201	169.931
8.	35-39	82.669	79.466	162.135
9.	40-44	77.141	74.031	151.172
10.	45-49	69.852	66.936	136.788
11.	50-54	59.875	57.045	116.920
12.	55-59	49.346	46.469	95.815
13.	60-64	37.942	35.514	73.456
14.	65-69	27.127	25.638	52.765
15.	70-74	16.112	16.172	32.284
16.	75 +	12.505	15.526	28.031
Provinsi Bengkulu		1.053.196	1.006.896	2.060.092

Sumber: Provinsi Bengkulu Dalam Angka Tahun 2023

Dari tabel di atas, komposisi penduduk Provinsi Bengkulu pada Tahun 2022 menurut kelompok usia, menunjukkan bahwa jumlah tertinggi ada pada kelompok penduduk usia (0-4 tahun) yaitu sebanyak 175.938 jiwa dan paling rendah ada pada kelompok penduduk usia (75 tahun ke atas) yaitu sebanyak 28.031 jiwa. Berdasarkan hasil

analisa Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), bahwa penduduk Provinsi Bengkulu didominasi kelompok usia muda.

Kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dan luas daerah yang ditempati, dihitung dengan cara jumlah penduduk suatu wilayah dibagi dengan luas wilayah. Semakin besar angkanya maka semakin padat wilayahnya, sebaliknya semakin kecil angkanya maka semakin renggang penduduknya. Kepadatan penduduk masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 8 Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019-2022

No	Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Penduduk per tahun (%)		
		2010-2020 (data awal)	2020-2021	2020-2022
1.	Bengkulu Selatan	1,47	1,40	1,31
2.	Rejang Lebong	1,11	1,04	0,95
3.	Bengkulu Utara	1,37	1,29	1,21
4.	Kaur	1,56	1,48	1,40
5.	Seluma	1,76	1,69	1,61
6.	Mukomuko	1,97	1,89	1,81
7.	Lebong	0,67	0,60	0,51
8.	Kepahiang	1,77	1,70	1,62
9.	Bengkulu tengah	1,67	1,60	1,51
10.	Kota Bengkulu	1,87	1,79	1,71
Provinsi Bengkulu		1,55	1,48	1,40

Sumber: Provinsi Bengkulu Dalam Angka Tahun 2022 dan 2023

Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan persentase pertambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Kabupaten dengan laju pertumbuhan tertinggi yaitu Kabupaten Mukomuko sebesar 1,81 dan terendah yaitu Kabupaten Lebong 0,51. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk Provinsi Bengkulu sepanjang Tahun 2020-2022 sebesar 1,40. Nilai tersebut menurun sebesar 0,15 jika dibandingkan dengan periode tahun 2010-2020. Laju pertumbuhan penduduk terjadi karena dipengaruhi faktor kematian, kelahiran, dan migrasi.

Tabel 2. 9 Kepadatan Penduduk Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2021

No	Kabupaten/Kota	Kepadatan Penduduk per km2		
		2020 (data awal)	2021	2022
1.	Bengkulu Selatan	136,25	141,63	139,40
2.	Rejang Lebong	178,60	170,00	181,59
3.	Bengkulu Utara	66,16	69,23	67,57
4.	Kaur	48,51	54,01	49,70
5.	Seluma	85,45	87,69	87,86

No	Kabupaten/Kota	Kepadatan Penduduk per km2		
		2020 (data awal)	2021	2022
6.	Mukomuko	46,03	47,86	47,50
7.	Lebong	63,78	55,56	64,35
8.	Kepahiang	199,81	228,03	205,49
9.	Bengkulu tengah	103,07	96,49	105,81
10.	Kota Bengkulu	2.485,47	2.495,74	2.560,32
Provinsi Bengkulu		99,88	102,06	102,34

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bengkulu, 2022 dan 2023

Kepadatan penduduk terbesar di Provinsi Bengkulu ada di Kota Bengkulu, yaitu berjumlah 2.560,32 jiwa/km². Wilayah kabupaten terpadat ada di Kabupaten Kepahiang, sebesar 205,49 jiwa/km² dan terkecil yaitu Kabupaten Mukomuko sebesar 47,50 jiwa/km². Tingkat kepadatan penduduk rata-rata di Provinsi Bengkulu Tahun 2022 yaitu 102,34 jiwa/km². Suatu wilayah tumbuh lebih padat dibanding daerah lain karena didorong beberapa faktor. Selain karena pertumbuhan alami, pemusatan penduduk di suatu wilayah juga didorong oleh beberapa faktor, diantaranya Fisiografis, Ekonomi, Sosial, dan budaya.

Rumah tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan makan dari satu dapur. Yang dimaksud makan dari satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola bersama-sama menjadi satu. Anggota rumah tangga adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang berada di rumah pada waktu pencacahan maupun yang sementara tidak ada. Rata-rata anggota rumah tangga adalah angka yang menunjukkan rata-rata jumlah anggota rumah tangga per rumah tangga.

Tabel 2. 10 Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2022

No	Kabupaten/Kota	Rumah Tangga (Ribuan)			Rata-rata banyaknya anggota Rumah Tangga		
		2020 (data awal)	2021	2022	2020 (data awal)	2021	2022
1.	Bengkulu Selatan	34,30	40,14	40,65	4,20	4,18	4,18
2.	Rejang Lebong	63,50	71,44	72,08	3,90	3,90	3,90
3.	Bengkulu Utara	67,20	77,70	78,58	3,90	3,85	3,85
4.	Kaur	26,50	31,38	31,80	4,10	4,08	4,08
5.	Seluma	44,10	53,42	54,26	3,90	3,94	3,94
6.	Mukomuko	38,20	47,07	47,88	4,10	4,10	4,11
7.	Lebong	26,00	27,87	28,00	3,80	3,83	3,83
8.	Kepahiang	31,70	38,33	38,92	4,00	3,96	3,96

No	Kabupaten/Kota	Rumah Tangga (Ribu)			Rata-rata banyaknya anggota Rumah Tangga		
		2020 (data awal)	2021	2022	2020 (data awal)	2021	2022
9.	Bengkulu tengah	24,40	29,25	29,67	4,00	4,04	4,04
10.	Kota Bengkulu	78,60	95,40	96,90	3,90	3,97	3,97
Provinsi Bengkulu		434,60	512,00	518,73	4,00	3,97	3,97

Sumber: Provinsi Bengkulu Dalam Angka Tahun 2022 dan 2023

Tabel 2. 11 Jumlah Penduduk yang Telah Memiliki KTP Elektronik Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu

Kabupaten/ Kota	2017 (data awal)	2018	2019	2020	2021	2022
BengkuluSelatan	102.216	109.984	113.193	115.612	118.424	122.475
RejangLebong	155.361	169.542	179.129	181.512	188.996	195.681
BengkuluUtara	177.708	189.845	195.479	200.813	205.620	209.991
Kaur	68.316	77.518	82.061	84.704	87.619	89.777
Seluma	108.356	123.467	130.763	135.906	139.423	142.893
Mukomuko	114.590	121.259	124.342	127.539	130.336	134.393
Lebong	65.253	72.889	75.297	77.400	79.244	81.491
Kepahiang	87.715	93.382	96.916	98.649	101.057	103.503
BengkuluTengah	69.234	76.638	77.826	80.676	82.850	84.933
KotaBengkulu	207.910	231.380	244.194	246.371	254.998	265.554
ProvinsiBengkulu	1.156.659	1.265.904	1.319.200	1.349.182	1.388.567	1.430.691

Sumber: Provinsi Bengkulu Dalam Angka Tahun 2022 dan 2023

Tabel 2. 12 Jumlah Penduduk yang Telah Memiliki KTP Elektronik dan Jumlah Kepemilikan Dokumen Kependudukan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu

No	Kabupaten/ Kota	2020 (data awal)		2021		2022	
		Telah memiliki Akta Kelahiran	Telah memiliki Kartu Identitas Anak	Telah memiliki Akta Kelahiran	Telah memiliki Kartu Identitas Anak	Telah memiliki Akta Kelahiran	Telah memiliki Kartu Identitas Anak
1.	Bengkulu Selatan	74.024	21.411	77.709	29.190	49.241	31.468
2.	Rejang Lebong	119.644	32.893	123.628	43.259	77.293	46.375
3.	Bengkulu Utara	118.823	39.908	124.425	52.338	87.853	65.850
4.	Kaur	52.838	11.776	56.856	25.634	37.227	34.681
5.	Seluma	89.484	56.342	96.254	64.597	62.087	68.443
6.	Mukomuko	91.471	33.189	96.318	41.446	60.868	48.215
7.	Lebong	48.998	24.684	50.570	27.933	31.072	30.900
8.	Kepahiang	60.226	20.576	63.505	27.419	41.959	30.838
9.	Bengkulu tengah	50.398	17.548	53.690	23.268	35.281	27.966
10.	Kota Bengkulu	173.268	31.107	184.874	55.429	110.198	68.763
Provinsi Bengkulu		879.174	289.434	927.829	390.513	593.079	453.499

Sumber: Provinsi Bengkulu Dalam Angka Tahun 2022 dan 2023

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kartu ini wajib dimiliki Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP) yang

sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau telah kawin dan orang asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 tahun ke atas (UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Selain KTP, dokumen kependudukan yang harus dimiliki sesuai peraturan perundang-undangan adalah Kartu Identitas Anak (KIA) dan Akta Kelahiran.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

2.2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Jika dilihat dari perkembangan PDRB mulai tahun 2018-2022, kinerja perekonomian Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan indikator faktor produksi lainnya untuk memberikan nilai tambah yang diperoleh dari seluruh aktifitas perekonomian disuatu daerah. Nilai PDRB Atas dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan di Provinsi Bengkulu dari tahun 2018-2022 untuk jelasnya dapat dilihat pada indikator dibawah ini.

Tabel 2. 13 PDRB ADHB Lapangan Usaha 2018 - 2022

No	Lapangan Usaha		2018 (data awal)	2019	2020	2021*	2022**
A	Pertanian, Kehuatanan dan perikanan		19.029,34	20.314,89	20.782,22	22.532,99	24.951,08
	1.	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan jasa Pertanian	14.256,79	15.151,47	15.504,44	16.723,93	18.398,07
		a. Tanaman Pangan	6.040,07	6.365,84	6.330,19	6.249,30	6.964,22
		b. Tanaman Holtikultura	2.443,21	2.588,74	2.638,95	2.807,64	2.944,06
		c. Tanaman Perkebunan	2.679,21	2.823,69	3.046,00	3.951,75	4.377,71
		d. Peternakan	2.681,81	2.928,19	3.036,81	3.213,01	3.553,19
		e. Jasa Pertanian dan Perburuan	412,50	445,00	452,49	502,22	558,89
	2.	Kehuatanan dan Penebangan Kayu	359,89	370,27	368,74	363,20	372,34
	3.	Perikanan	4.412,66	4.793,15	4.909,04	5.445,86	6.180,67
B.	Pertambangan dan Penggalian		2.286,84	2.410,38	2.392,82	3.944,49	6.711,36
	1.	Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	-	-	-	-	-
	2.	Pertambangan Batubara dan Lignit	933,35	960,05	930,52	2.442,38	5.160,01
	3.	Pertambangan Bijih Logam	21,76	22,31	22,61	25,13	26,15
	4.	Pertambangan dan Penggalian Lainnya	1.331,73	1.428,01	1.439,69	1.476,98	1.525,20
C.	Industri Pengolahan		4.030,51	4.296,77	4.385,81	4.628,45	4.942,40
	1.	Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-	-	-	-	-

No	Lapangan Usaha		2018 (data awal)	2019	2020	2021*	2022**
	2.	Industri Makanan dan Minuman	3.580,51	3.817,27	3.910,44	4.116,69	4.421,18
	3.	Industri Pengolahan Tembakau	-	-	-	-	-
	4.	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	1,84	1,92	1,98	2,04	2,19
	5.	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0,58	0,60	0,61	0,61	0,65
	6.	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus; dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya	2,36	2,48	2,48	2,48	2,54
	7.	Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	3,63	3,90	3,92	4,12	4,53
	8.	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0,44	0,47	0,47	0,51	0,54
	9.	Industri Karet; Barang dari Karet dan Plastik	287,84	306,52	297,64	327,53	333,18
	10.	Industri Barang Galian Bukan Logam	2,12	2,28	2,40	2,49	2,55
	11.	Industri Logam Dasar	0,22	0,23	0,23	0,24	0,26
	12.	Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	121,34	128,89	131,95	138,40	141,38
	13.	Industri Mesin dan Perlengkapan	-	-	-	-	-
	14.	Industri Alat Angkutan	0,33	0,35	0,35	0,35	0,37
	15.	Industri Furnitur	25,36	27,56	29,06	28,59	28,46
	16.	Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	3,94	4,29	4,29	4,40	4,56
D.	Pengadaan Listrik dan Gas		61,89	69,45	78,70	85,99	93,81
	1.	Ketenagalistrikan	60,94	68,40	77,64	84,90	92,67
	2.	Pengadaan Gas dan Produksi Es	0,95	1,05	1,06	1,09	1,14
E.	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang		130,54	141,06	145,73	149,56	158,86
F.	Konstruksi		3.408,72	3.808,24	3.869,51	4.142,80	4.404,41
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor		9.851,04	10.877,43	10.592,33	11.457,52	12.631,28
	1.	Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	2.186,15	2.322,65	2.306,23	2.782,56	3.056,69
	2.	Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	7.664,89	8.554,77	8.286,10	8.674,96	9.574,58
H.	Transportasi dan Pergudangan		5.413,79	6.048,92	6.031,09	6.303,42	8.245,02

No	Lapangan Usaha		2018 (data awal)	2019	2020	2021*	2022**
	1.	Angkutan Rel	-	-	-	-	-
	2.	Angkutan Darat	2.968,80	3.352,51	3.588,42	3.883,19	4.409,24
	3.	Angkutan Laut	648,82	686,75	708,29	763,01	775,05
	4.	Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	55,44	57,89	59,07	60,91	71,73
	5.	Angkutan Udara	1.633,53	1.831,64	1.543,99	1.455,17	2835,86
	6.	Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	107,21	120,12	131,32	141,14	153,14
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum		1147,01	1.314,13	1.331,70	1377,35	1.517,52
	1.	Penyediaan Akomodasi	68,83	78,72	77,57	82,45	85,63
	2.	Penyediaan Makan Minum	107,21	1.235,40	1.254,13	1.294,90	1.431,90
J	Informasi dan Komunikasi		2.393,24	2.647,48	2.784,29	3.000,65	3.317,23
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi		2.101,32	2.144,25	2.464,65	2.763,78	2.872,83
	1.	Jasa Perantara Keuangan	1652,82	1661,17	1.966,64	2.244,46	2.307,21
	2.	Asuransi dan Dana Pensiun	11,85	12,45	12,83	14,60	15,34
	3.	Jasa Keuangan Lainnya	435,48	469,28	483,78	503,25	548,73
	4.	Jasa Penunjang Keuangan	1,24	1,35	1,40	1,48	1,56
L.	Real Estat		2.564,28	2.752,22	2.797,39	2.842,81	3.000,27
M, N	Jasa Perusahaan		1.483,28	1.631,04	1.600,21	1.665,78	1.939,82
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib		6.648,90	7.241,28	7.429,98	7.660,69	7.685,56
P	Jasa Pendidikan		4.153,35	4.472,34	4.578,90	4.776,65	5.193,69
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial		1.138,30	1.294,76	1.403,21	1.589,77	1.685,48
R,S T,U	Jasa Lainnya		560,58	633,62	636,74	679,92	761,34
Produk Domestik Regional Bruto			66.402,99	72.098,24	73.305,27	79.602,64	90.111,95

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu

Tabel 2. 14 PDRB ADHB Pengeluaran Provinsi Bengkulu 2018 – 2022

No	Pengeluaran		2018 (data awal)	2019	2020	2021*	2022**
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga		42.192,93	45.559,12	46.310,87	48.151,63	53.229,38
	a.	Makanan dan Minuman selain restoran	21.104,89	22,715,84	23.271,42	24,035,92	26.519,73
	b.	Pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya	2.483,53	2.727,83	2.712,36	2.809,63	3.001,46
	c.	Perumahan dan perlengkapan rumah tangga	4.812,95	5.111,07	5.202,76	5.256,30	5.520,54
	d.	Kesehatan dan Pendidikan	3.211,97	3.444,41	3.665,39	4.020,48	4.304,93
	e.	Transportasi dan Komunikasi	7.758,96	8.492,87	8.385,45	8.770,45	10.286,64
	f.	Restoran dan Hotel	1.861,76	2.033,77	1.979,78	2.062,57	2.338,61
	g.	Lainnya	958,87	1.033,33	1.093,71	1.196,29	1.257,47
2.	Pengeluaran Konsumsi LNPRT		1.604,09	1.810,55	1.721,94	1.705,97	1.936,14
	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah		13.051,20	13.880,34	14.261,87	14.773,05	15.214,76

No	Pengeluaran		2018 (data awal)	2019	2020	2021*	2022**
	a.	Konsumsi Kolektif	7.584,43	8.070,98	8.088,94	7.913,75	8.160,66
	b.	Konsumsi Individu	5.466,77	5.809,36	6.172,93	6.859,29	7.054,10
3.	Pembentukan Modal Tetap Bruto		27.469,46	29.683,67	30.102,40	32.798,37	35.890,61
	a.	Bangunan	7.142,11	7.778,13	7.898,81	8.467,50	9.001,06
	b.	Non-Bangunan	20.327,35	21.905,55	22.203,59	24.330,87	26.889,55
4.	Perubahan Inventori		415,51	1.481,95	960,38	28,89	522,31
	Ekspor Luar Negeri		4.681,21	3.556,46	2.562,90	3.510,16	4.729,42
	a.	Barang	4.538,03	3.428,88	2.447,21	3.386,01	4.604,40
	b.	Jasa	143,17	127,59	115,69	124,15	125,03
5.	Impor Barang dan Jasa		1.660,33	544,03	72,00	48,97	23,36
	a.	Barang	1.474,39	400,28	50,13	27,61	0,00
	b.	Jasa	185,94	143,75	21,87	21,36	23,36
6.	Net Eksport Antar Daerah		-21.351,07	-23.329,83	-22.543,09	-21.316,44	-21.387,32
	a.	Ekspor	19.496,17	21.079,84	21.888,50	24.929,19	27.807,61
	b.	Impor	40.847,24	44.409,68	44.431,59	46.245,63	49.194,93
	Produk Domestik Regional Bruto		66.402,99	72.098,24	73.305,27	79.602,64	90.111,95

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu

Tabel 2. 15 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Lapangan Usaha 2018-2022

No	Lapangan Usaha		2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan dan perikanan		3,19	3,56	0,38	2,45	4,50
	1.	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan jasa Pertanian	3,22	3,13	0,49	2,04	4,68
	a.	Tanaman Pangan	3,16	2,06	-1,02	-0,58	3,60
	b.	Tanaman Holtikultura	3,50	3,10	0,68	2,42	4,81
	c.	Tanaman Perkebunan	3,19	3,67	1,79	5,81	5,33
	d.	Peternakan	2,66	4,46	1,88	2,46	5,81
	e.	Jasa Pertanian dan Perburuan	6,47	4,78	0,41	2,20	4,68
	2.	Kehutanan dan Penebangan Kayu	-1,57	-0,49	-1,78	-2,11	-1,44
	3.	Perikanan	3,50	5,30	0,22	4,12	4,40
B.	Pertambangan dan Penggalian		2,75	2,51	-1,70	6,47	-2,82
	1.	Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	-	-	-	-	-
	2.	Pertambangan Batubara dan Lignit	1,28	0,88	-3,44	14,87	-7,72
	3.	Pertambangan Bijih Logam	0,30	-0,19	-3,15	-1,99	1,13
	4.	Pertambangan dan Penggalian Lainnya	3,82	3,67	-0,52	1,25	0,68
C.	Industri Pengolahan		3,56	2,31	-2,44	2,37	3,08
	1.	Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-	-	-	-	-
	2.	Industri Makanan dan Minuman	3,52	2,25	-2,57	2,37	3,67
	3.	Industri Pengolahan Tembakau	-	-	-	-	-
	4.	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	1,11	2,22	1,05	2,02	4,15
	5.	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0,27	0,94	1,12	-0,76	3,26
	6.	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus; dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya	0,39	3,18	0,03	-1,15	-0,70
	7.	Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	3,09	5,09	-0,93	0,60	1,86

No	Lapangan Usaha		2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022
	8.	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional/Manufacture of Chemicals, Pharmaceuticals and Botanical Products	0,69	2,65	-2,13	4,67	1,96
	9.	Industri Karet; Barang dari Karet dan Plastik	5,41	2,95	-2,72	3,19	-1,69
	10.	Industri Barang Galian Bukan Logam	2,25	3,81	2,06	0,33	0,27
	11.	Industri Logam Dasar	1,34	1,67	0,69	1,12	1,56
	12.	Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	0,89	1,93	0,65	1,46	-1,26
	13.	Industri Mesin dan Perlengkapan	-	-	-	-	-
	14.	Industri Alat Angkutan	1,03	0,97	-1,07	-0,49	2,99
	15.	Industri Furnitur/Manufacture of Furniture	2,10	3,62	3,27	-2,52	-1,90
	16.	Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	3,57	5,63	-1,59	1,68	3,08
D.	Pengadaan Listrik dan Gas		7,67	5,28	12,04	8,09	8,02
	1.	Ketenagalistrikan	7,68	5,27	12,23	8,18	8,11
	2.	Pengadaan Gas dan Produksi Es	6,45	5,93	-0,22	1,08	0,82
E.	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang		4,62	3,82	0,85	1,24	5,23
F.	Konstruksi		7,24	7,66	0,35	2,75	0,25
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor		7,81	6,81	3,88	5,26	4,11
	1.	Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	4,09	2,55	-3,48	14,94	5,19
	2.	Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	8,82	7,92	-3,97	2,86	3,81
H.	Transportasi dan Pergudangan		6,12	7,25	-2,86	1,82	13,45
	1.	Angkutan Rel	-	-	-	-	-
	2.	Angkutan Darat	6,09	8,86	1,94	4,44	6,61
	3.	Angkutan Laut	1,71	1,59	-0,72	4,71	-3,08
	4.	Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	0,99	1,04	-2,21	-1,86	13,97
	5.	Angkutan Udara	8,84	6,08	-18,19	-9,14	54,90
	6.	Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	9,05	8,70	2,21	1,79	4,06
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum		7,98	10,10	-1,04	1,44	8,39
	1.	Penyediaan Akomodasi	7,71	9,24	-2,59	3,02	2,59
	2.	Penyediaan Makan Minum	7,99	10,15	-0,95	1,35	8,73
J.	Informasi dan Komunikasi		7,47	7,49	3,73	6,36	8,24
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi		-0,23	-0,25	15,50	6,90	-4,40
	1.	Jasa Perantara Keuangan	-1,18	-1,18	19,14	7,76	-6,46
	2.	Asuransi dan Dana Pensiun	1,82	2,20	1,29	2,61	2,35
	3.	Jasa Keuangan Lainnya	3,65	3,37	2,11	3,23	4,92
	4.	Jasa Penunjang Keuangan	4,09	3,93	2,01	2,84	2,53
L.	Real Estat		3,88	4,14	0,98	0,12	3,86
M,N	Jasa Perusahaan		5,25	5,03	-2,85	-0,81	11,34
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib		6,25	4,93	1,55	2,42	0,20

No	Lapangan Usaha	2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022
P	Jasa Pendidikan	3,56	3,90	1,21	2,45	4,90
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,03	8,73	5,96	10,58	3,38
R,S,T,U	Jasa Lainnya	7,65	8,05	-0,50	1,41	8,13
Produk Domestik Regional Bruto		4,97	4,94	-0,02	3,27	4,31

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu

Tabel 2. 16 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Pengeluaran 2018-2022

No	Pengeluaran		2018 (data awal)	2019	2020	2021*	2022**
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga		4,96	4,82	0,15	2,75	5,47
	a.	Makanan dan Minuman selain restoran	4,02	4,16	0,51	2,94	3,99
	b.	Pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya	6,05	6,15	-2,43	2,74	4,30
	c.	Perumahan dan perlengkapan rumah tangga	5,16	4,76	0,74	-1,34	2,93
	d.	Kesehatan dan Pendidikan	5,81	5,40	3,68	7,82	4,09
	e.	Transportasi dan Komunikasi	6,30	5,77	-0,72	2,67	11,36
	f.	Restoran dan Hotel	6,33	6,20	-3,72	1,58	8,70
	g.	Lainnya	5,88	4,08	-0,65	3,47	3,59
2.	Pengeluaran Konsumsi LNPRT		8,03	8,83	-6,12	-3,04	8,94
	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah		5,23	3,84	0,58	3,30	0,82
	a.	Konsumsi Kolektif	5,27	3,92	-1,81	-2,58	2,98
	b.	Konsumsi Individu	5,18	3,73	3,85	10,89	-1,62
3.	Pembentukan Modal Tetap Bruto		5,60	5,00	-1,65	4,13	3,49
	a.	Bangunan	2,38	6,13	0,27	2,68	0,22
	b.	Non-Bangunan	6,81	4,59	-2,34	4,67	4,69
4.	Perubahan Inventori		-	-	-	-	-
	Ekspor Luar Negeri		-3,43	-9,45	-25,71	16,06	-5,48
	a.	Barang	-3,66	-9,30	-25,99	16,34	-5,58
	b.	Jasa	8,63	-16,42	-11,78	4,19	-0,57
5.	Impor Barang dan Jasa		284,36	-64,65	-82,81	-38,58	-67,87
	a.	Barang	466,71	-69,26	-82,18	-46,72	-100,00
	b.	Jasa	5,11	-26,55	-84,99	-5,21	6,19
6.	Net Ekspor Antar Daerah		-2,67	5,43	-4,64	2,55	3,54
	a.	Ekspor	3,01	5,52	3,18	4,74	4,76
	b.	Impor	-0,25	5,47	-1,20	3,55	4,11
	Produk Domestik Regional Bruto		4,97	4,94	-0,02	3,27	4,31

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu

Tabel 2. 17 Distribusi PDRB menurut Lapangan Usaha Per Sektor 2018-2022

Lapangan Usaha	2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022
A, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	28,66	28,18	28,35	28,31	27,69
B, Pertambangan dan Penggalan	3,44	3,34	3,26	4,96	7,45
C, Industri Pengolahan	6,07	5,96	5,98	5,81	5,48
D, Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,10	0,11	0,11	0,10
E, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,20	0,20	0,20	0,19	0,18
F, Konstruksi	5,13	5,28	5,28	5,20	4,89
G, Perdagangan Besar dan Eceran;	14,84	15,09	14,45	14,39	14,02

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor					
H, Transportasi dan Pergudangan	8,15	8,39	8,23	7,92	9,15
I, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,73	1,82	1,83	1,73	1,68
J, Informasi dan Komunikasi	3,60	3,67	3,80	3,77	3,68
K, Jasa Keuangan dan Asuransi	3,16	2,97	3,36	3,47	3,19
L, Real Estate	3,86	3,82	3,82	3,57	3,33
M,N, Jasa Perusahaan	2,23	2,26	2,18	2,09	2,15
O, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10,01	10,04	10,14	9,62	8,53
P, Jasa Pendidikan	6,25	6,20	6,25	6,00	5,76
Q, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,71	1,80	1,91	2,00	1,87
R,S,T,U, Jasa lainnya	0,84	0,88	0,87	0,85	0,84
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu

Tabel 2. 18 Distribusi Persentase PDRB atas dasar harga berlaku menurut Pengeluaran Tahun 2018-2022

Sektor PDRB Pengeluaran	2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	63,54	63,19	63,18	60,49	59,07
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,42	2,51	2,35	2,14	2,15
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	19,65	19,25	19,46	18,56	16,88
Pembentukan Modal Tetap Bruto	41,37	41,17	41,06	41,20	39,83
Perubahan Inventori	0,63	2,06	1,31	0,04	0,58
Ekspor Luar Negeri	7,05	4,93	3,50	4,41	5,25
Impor Barang dan Jasa	2,50	0,75	0,10	0,06	0,03
Net Ekspor Antar Daerah	-32,15	-32,36	-30,75	-26,78	-23,73
PDRB Pengeluaran	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu

Tabel 2. 19 Laju Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022

Lapangan Usaha	2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022
A, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,19	3,56	0,38	2,45	4,50
B, Pertambangan dan Penggalian	2,75	2,51	-1,70	6,47	-2,82
C, Industri Pengolahan	3,56	2,31	-2,44	2,37	3,08
D, Pengadaan Listrik dan Gas	7,67	5,28	12,04	8,09	8,02
E, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,62	3,82	0,85	1,24	5,23
F, Konstruksi	7,24	7,66	0,35	2,75	0,25
G, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,81	6,81	-3,88	5,26	4,11
H, Transportasi dan Pergudangan	6,12	7,25	-2,86	1,82	13,45
I, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,98	10,10	-1,04	1,44	8,39
J, Informasi dan Komunikasi	7,47	7,49	3,73	6,36	8,24
K, Jasa Keuangan dan Asuransi	-0,23	-0,25	15,50	6,90	-4,40

Lapangan Usaha	2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022
L, Real Estate	3,88	4,14	0,98	0,12	3,86
M,N, Jasa Perusahaan	5,25	5,03	-2,85	-0,81	11,34
O, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,25	4,93	1,55	2,42	0,20
P, Jasa Pendidikan	3,56	3,90	1,21	2,45	4,90
Q, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,03	8,73	5,96	10,58	3,38
R,S,T,U, Jasa lainnya	7,65	8,05	-0,5	1,41	8,13
PDRB	4,97	4,94	-0,02	3,27	4,31

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu

Tabel 2. 20 Laju Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran (Persen) Tahun 2018-2022

Sektor PDRB Pengeluaran	2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,96	4,82	0,15	2,75	5,47
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	8,03	8,83	-6,12	-3,04	8,94
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5,23	3,84	0,58	3,30	0,82
Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,60	5,00	-1,65	4,13	3,49
Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
Ekspor Luar Negeri	-3,43	-9,45	-25,71	16,06	-5,48
Impor Barang dan Jasa	284,36	- 64,65	-82,81	- 38,58	- 67,87
Net Ekspor Antar Daerah	-2,67	5,43	-4,64	2,55	3,54
PDRB Pengeluaran	4,97	4,94	-0,02	3,27	4,31

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu

Tabel 2. 21 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Persen) 2018-2022

Kabupaten/Kota	2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022
Bengkulu Selatan	4,95	4,97	0,26	3,25	3,45
Rejang Lebong	4,96	4,96	0,07	3,14	4,30
Bengkulu Utara	4,81	4,92	0,23	4,01	3,14
Kaur	4,98	4,98	0,12	3,08	3,78
Seluma	4,80	4,93	-0,01	2,18	2,92
Mukomuko	5,01	5,03	0,06	3,35	4,33
Lebong	5,01	4,97	0,10	3,08	2,98
Kepahiang	5,00	4,89	0,06	3,16	4,19
Bengkulu Tengah	4,97	4,97	-0,06	2,29	3,03
Kota Bengkulu	5,48	5,41	-0,25	3,47	5,69

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu

Tabel 2. 22 PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022

Uraian	2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022
PDRB ADHB (Miliar Rupiah)	66.402,99	72.098,24	73.305,27	79.602,64	90.111,95
PDRB ADHK 2010 (Miliar Rupiah)	44.164,11	46.345,45	46.338,43	47.853,78	49.916,06
PDRB perkapita ADHB (Juta Rupiah)	33,8	36,5	36,5	39,1	43,7
PDRB perkapita ADHK (Juta Rupiah)	22,4	23,5	23,1	23,5	24,2
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,97	4,94	-0,02	3,27	4,31

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB pada tahun 2022 mengalami kenaikan dibanding tahun 2021 dimana pada tahun 2021 PDRB ADHB mencapai Rp79,602,64 miliar sedangkan pada tahun 2022 sebesar Rp90,111,95 miliar, Nilai PDRB ADHK tahun 2022 sebesar Rp49,916,06 miliarlebih tinggi dari tahun 2021 sebesar Rp47,853,78 miliar Selain itu, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2021 dengan nilai sebesar 3,27% tahun 2021, sedangkan pada tahun 2022 tumbuh sebesar 4,31%.

Walaupun data menunjukan angka yang positif namun kondisi pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan akibat pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, Pandemi Covid-19 terjadi di lebih dari 200 negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, Bahkan, di penghujung Maret 2020, Provinsi Bengkulu masuk dalam zona merah, Dampak Covid-19 terbesar adalah mengganggu proses produksi, distribusi, dan konsumsi akibat tingkat dan skema penularan virus yang menyerang aspek paling fundamental dari seluruh aktivitas kita, yaitu interaksi fisik antar manusia hingga memaksa kita menerapkan kebijakan social/phsyscal distancing,

Ekonomi Provinsi Bengkulu Tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 4,31 persen (c-to-c), Dari sisi produksi, lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,91 persen. Dari sisi pengeluaran, komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,04 persen.

Tabel 2. 23 PDRB Perkapita ADHB Kabupaten/Kota Tahun 2018-2022
(dalam ribu rupiah)

Kabupaten/Kota	2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022
Bengkulu Selatan	33.791	34.048	35.090	36.887	39.465

Kabupaten/Kota	2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022
Rejang Lebong	33.411	34.904	34.525	36.197	39.081
Bengkulu Utara	24.999	27.416	28.443	32.915	40.678
Kaur	27.007	29.053	28.618	30.487	32.597
Seluma	21.965	23.721	22.827	24.007	25.433
Mukomuko	25.014	27.811	27.749	29.468	31.628
Lebong	26.940	29.255	32.006	33.978	36.261
Kepahiang	29.255	31.128	29.543	31.314	33.513
Bengkulu Tengah	37.594	40.816	40.149	46.285	54.623
Kota Bengkulu	56.372	63.133	63.112	65.966	72.992

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu

Tabel 2. 24 PDRB Perkapita ADHK Kabupaten/Kota 2018-2022 (dalam ribu rupiah)

Kabupaten/Kota	2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022
Bengkulu Selatan	21.946	21.565	21.565	22.278	22.762
Rejang Lebong	22.281	22.647	22.647	22.505	23.265
Bengkulu Utara	16.296	17.295	17.295	17.121	18.479
Kaur	17.953	18.636	18.636	18.236	18.675
Seluma	14.256	14.761	14.761	13.933	14.122
Mukomuko	16.692	17.939	17.939	17.799	18.250
Lebong	17.632	18.575	18.575	20.533	21.050
Kepahiang	19.641	20.208	20.208	19.087	19.582
Bengkulu Tengah	24.309	25.580	25.580	24.991	25.381
Kota Bengkulu	38.654	41.723	41.723	41.820	43.483

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu

PDRB Per kapita di Provinsi Bengkulu terus menunjukkan peningkatan, PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah, PDRB perkapita ini bisa diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Hal ini berarti nilai rata-rata pendapatan masyarakat Bengkulu terus meningkat setiap tahunnya, Peningkatan PDRB Perkapita ADHK tertinggi masih di berada di wilayah Kota Bengkulu dengan angka 43.483 (Ribu Rupiah) di tahun 2022 sedangkan PDRB Perkapita terendah berada di Kabupaten Seluma dengan angka 14.122 (Ribu Rupiah) di tahun 2022.

2.2.1.2. Laju Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus, Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan, naiknya harga barang dan jasa

tersebut menyebabkan turunnya nilai uang, dengan demikian inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

Tabel 2. 25 Perkembangan Inflasi Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022

Bulan	2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022
Januari	0,99	0,88	0,14	0,39	0,54
Februari	-0,30	-0,28	0,09	0,14	-0,10
Maret	0,37	-0,23	-0,02	0,23	0,74
April	0,26	0,54	-0,35	0,10	1,45
Mei	0,32	1,11	0,41	0,11	0,53
Juni	0,81	0,76	0,04	0,31	0,60
Juli	0,87	0,56	-0,23	-0,12	0,91
Agustus	-1,80	0,86	-0,22	0,16	-0,24
September	0,59	0,64	0,08	0,17	1,22
Oktober	-0,74	0,56	0,02	-0,02	-0,14
November	0,20	0,27	0,35	0,52	0,05
Desember	0,79	0,59	0,14	0,39	0,23
Tahunan	2,35	2,91	0,89	2,42	5,92

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu

Laju inflasi tahun kalender 2022 sebesar 5,92 persen lebih tinggi dari tahun 2021 dengan laju inflasi sebesar 2,42 persen. Kondisi Inflasi cukup dinamis dikarenakan banyak faktor salah satunya yang paling berpengaruh dikarenakan pandemi covid-19, berdampak sangat besar di sektor harga barang jasa dan sektor lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel diatas perkembangan inflasi di Provinsi Bengkulu.

2.2.1.3. Indeks Gini

Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Indeks gini Provinsi Bengkulu pada tahun 2022 sebesar 0,315 menurun sebesar 0,011 dari tahun 2021 yang sebesar 0,326.

Tabel 2. 26 Perkembangan Gini Ratio Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022

Tahun	Periode	Rasio Gini		
		Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
2018	Maret	0,39	0,32	0,36
	September	0,39	0,32	0,36
2019	Maret	0,36	0,29	0,34
	September	0,37	0,28	0,33
2020	Maret	0,38	0,28	0,33

Tahun	Periode	Rasio Gini		
		Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
2021	September	0,38	0,27	0,32
	Maret	0,38	0,26	0,33
	September	0,38	0,26	0,32
2022	Maret	0,370	0,262	0,315
	September	0,371	0,264	0,315

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu

2.2.1.4. Kemiskinan

Pada bulan September 2022, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Bengkulu mencapai 292,93 ribu orang (14,34 persen), berkurang sebesar 0,09 % poin dibanding dengan kondisi September 2021 yang sebesar 14,43 persen (291,79 ribu orang).

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2021 sebesar 14,73 persen turn menjadi 14,53 persen pada September 2022. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2021 sebesar 14,28 persen turn menjadi 14,24 persen pada September 2022.

Selama periode Maret 2022-September 2022, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sekitar 1.600 orang (dari 100,69 ribu orang pada Maret 2022 menjadi 99,08 ribu orang pada September 2022), begitu juga di daerah perdesaan berkurang sekitar 2,7 ribu orang (dati 196,54 ribu orang pada Maret 2022 menjadi 193,85 ribu orang pada September 2022).

Tabel 2. 27 Perkembangan Penduduk Miskin di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022

Tahun		Persentase Penduduk Miskin		
		Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
2018 (data awal)	Maret	15,25	15,52	15,43
	September	14,94	15,64	15,41
2019	Maret	14,70	15,49	15,23
	September	14,13	15,30	14,91
2020	Maret	14,77	15,16	15,03
	September	15,06	15,42	15,30
2021	Maret	15,10	15,28	15,22
	September	14,73	14,28	14,43
2022	Maret	14,88	14,49	14,62
	September	14,53	14,24	14,34

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan

keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan pemerintah juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Pada periode September 2021 - Maret 2022 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami penurunan yaitu dari 2,45 menjadi 2,43. Sebaliknya, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami peningkatan dari 0,55 menjadi 0,58.

Pada periode Maret 2022 - September 2022, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada September 2022 sebesar 2,17 turun dibandingkan Maret 2022 sebesar 2,43. Demikian juga dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan dari 0,58 menjadi 0,47 pada periode yang sama.

Tabel 2. 28 Indeks Kedalaman Kemiskinan Menurut Daerah, Maret 2018 - September 2022

Tahun		Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
2018 (data awal)	Maret	2,51	2,64	2,59
2018	September	2,18	2,43	2,35
2019	Maret	2,44	2,50	2,48
2019	September	2,13	1,95	2,01
2020	Maret	2,44	2,38	2,40
2020	September	2,49	2,52	2,51
2021	Maret	2,78	2,47	2,58
2021	September	2,56	2,39	2,45
2022	Maret	2,61	2,34	2,43
2022	September	2,06	2,23	2,18

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu

Tabel 2. 29 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Daerah, Maret 2018 - September 2022

Tahun		Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
2018 (data awal)	Maret	0,56	0,63	0,61
2018	September	0,42	0,56	0,51
2019	Maret	0,53	0,61	0,58
2019	September	0,47	0,44	0,45
2020	Maret	0,58	0,56	0,56
2020	September	0,59	0,67	0,64
2021	Maret	0,68	0,59	0,62

Tahun		Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
2021	September	0,59	0,52	0,55
2022	Maret	0,68	0,54	0,58
2022	September	0,43	0,49	0,47

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu

Apabila dibandingkan antara daerah perkotaan dan pedesaan, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di daerah perkotaan relatif lebih tinggi daripada di daerah pedesaan. Pada Maret 2022, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk daerah perkotaan sebesar 2,61 sementara di daerah pedesaan sebesar 2,34. Sementara itu nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan adalah 0,68 sedangkan di daerah pedesaan mencapai sebesar 0,54.

Jika dibandingkan dengan angka Nasional, kemiskinan di Provinsi Bengkulu selalu berada di atas kemiskinan nasional, namum secara ketimpangan pengeluaran yang diukur dengan rasio gini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran di Provinsi Bengkulu lebih rendah dari ketimpangan pengeluaran yang terjadi secara Nasional. Gini Ratio menggambarkan ketimpangan pendapatan/pengeluaran di suatu wilayah, Indeks ini berada pada nilai 0 - 1, dimana bila mendekati 0 berarti tidak ada sama sekali ketimpangan, dan ketimpangan sempurna bila nilai indeks sebesar 1. Sejak Maret 2018 hingga Maret 2022 angka Gini Ratio di Provinsi Bengkulu relatif mengalami penurunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Provinsi Bengkulu.

Dari data persentase penduduk miskin menurut kabupaten/kota tahun 2022, terlihat bahwa kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Provinsi Bengkulu berada di Kabupaten Seluma sebesar 18,36% dan terendah berada di Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar 9,76%.

Tabel 2. 30 Perkembangan Garis Kemiskinan Provinsi Bengkulu Menurut Kabupaten/Kota, 2020 – 2022 (rupiah/kapita/bulan)

No	Kabupaten/Kota	Maret		
		2020 (data awal)	2021	2022
1.	Bengkulu Selatan	394.513	408.904	435.955
2.	Rejang Lebong	472.555	487.490	530.029
3.	Bengkulu Utara	387.881	398.746	423.857
4.	Kaur	338.451	350.794	371.660
5.	Seluma	400.090	414.446	444.931
6.	Mukomuko	448.127	464.473	494.426

7.	Lebong	424.637	440.127	472.738
8.	Kepahiang	396.184	410.569	433.660
9.	Bengkulu tengah	431.688	447.435	512.084
10.	Kota Bengkulu	702.578	740.612	785.905
Provinsi Bengkulu		527.031	548.934	590.754

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu

Tabel 2. 31 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bengkulu Menurut Kabupaten/Kota, 2020 – 2022 (ribu)

No	Kabupaten/Kota	Maret		
		2020 (data awal)	2021	2022
1.	Bengkulu Selatan	28,41	31,65	31,83
2.	Rejang Lebong	41,47	43,30	43,18
3.	Bengkulu Utara	36,67	35,55	35,51
4.	Kaur	22,57	22,99	22,57
5.	Seluma	36,23	37,05	36,71
6.	Mukomuko	23,10	22,50	21,81
7.	Lebong	13,97	13,97	14,14
8.	Kepahiang	20,27	20,94	20,73
9.	Bengkulu tengah	10,79	11,12	11,33
10.	Kota Bengkulu	69,11	66,94	59,43
Provinsi Bengkulu		302,58	306,00	297,23

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu

Tabel 2. 32 Persentase Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bengkulu Menurut Kabupaten/Kota, 2020 – 2022 (ribu)

No	Kabupaten/Kota	Maret		
		2020 (data awal)	2021	2022
1.	Bengkulu Selatan	17,82	18,16	17,86
2.	Rejang Lebong	15,85	15,85	15,65
3.	Bengkulu Utara	11,67	11,61	11,48
4.	Kaur	18,47	18,62	18,10
5.	Seluma	18,56	18,72	18,36
6.	Mukomuko	11,72	11,93	11,44
7.	Lebong	11,85	12,00	12,03
8.	Kepahiang	14,69	14,83	14,53
9.	Bengkulu tengah	9,30	9,68	9,76
10.	Kota Bengkulu	17,65	17,89	15,73
Provinsi Bengkulu		15,03	15,22	14,62

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu

2.2.1.5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Dimensi dasar yang digunakan dalam mengukur IPM adalah umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Pada tahun 2014, Indonesia secara resmi melakukan penghitungan IPM dengan metode baru. Untuk mengaplikasikan metode baru, sumber data yang tersedia di Indonesia antara lain:

1. Umur harapan hidup saat lahir (Sensus Penduduk 2010/SP2010, Proyeksi Penduduk);
2. Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (Survei Sosial Ekonomi Nasional/SUSENAS);
3. PNB perkapita diproksi dengan pengeluaran per kapita disesuaikan menggunakan SUSENAS.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Secara umum, pembangunan manusia Indonesia dan Provinsi Bengkulu terus mengalami peningkatan selama periode 2012 hingga 2022. Selama periode tersebut, IPM Provinsi Bengkulu belum mampu melampaui IPM Indonesia.

Dilihat dari perkembangannya, IPM Provinsi Bengkulu meningkat dari 66,61 pada tahun 2012 menjadi 72,16 pada tahun 2022. Peningkatan paling tinggi terjadi pada tahun 2013, IPM Provinsi Bengkulu meningkat 0,89 poin dari IPM tahun 2012. Setelah itu, peningkatan IPM selalu berada di atas 0,50 poin sampai tahun 2019. Namun, pada tahun 2021 peningkatan IPM Provinsi Bengkulu melambat. Dari tahun 2019 ke tahun 2021 IPM Provinsi Bengkulu hanya meningkat rata-rata 0,2 poin. Pada tahun 2018, IPM Provinsi Bengkulu telah mencapai 70,64 yang berarti IPM Provinsi Bengkulu berhasil masuk dalam kategori IPM “TINGGI”.

Berdasarkan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bengkulu, IPM tahun 2022 tertinggi dicapai oleh Kota Bengkulu sebesar 80,99. Selain itu, Kota Bengkulu merupakan satu-satunya Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu dengan IPM yang telah mencapai 80,99, yang berarti hanya Kota Bengkulu yang menyandang IPM dengan kategori “SANGAT TINGGI”. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kualitas hidup dengan kriteria pendidikan, kesehatan dan pendapatan di wilayah Kota Bengkulu lebih baik

daripada wilayah lain di Provinsi Bengkulu. Sementara itu, terdapat dua kabupaten dengan IPM berstatus “TINGGI” yaitu Bengkulu Selatan dan Rejang Lebong. Selain ketiga kabupaten/kota tersebut, IPM Kabupaten/Kota masih berstatus “SEDANG”. Sementara itu, Kabupaten dengan IPM terendah adalah Kabupaten Seluma, dengan indeks sebesar 67,76.

Dilihat dari peningkatan IPM dari tahun 2021 ke tahun 2022, Kabupaten Seluma dengan pertumbuhan sebesar 0,73 poin merupakan kabupaten/kota dengan pertumbuhan yang tertinggi, diikuti Rejang Lebong (0,68 poin) dan Bengkulu Selatan (0,67 poin). Sementara itu, Kepahiang (0,47poin) dan Kota Bengkulu (0,45 poin) merupakan Kabupaten/Kota dengan pertumbuhan IPM terendah.

Tabel 2. 33 Perkembangan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2022

No	Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Bengkulu Selatan	68,71	69,04	69,85	70,27	70,63	70,75	71,42
2.	Rejang Lebong	68,34	68,61	69,40	70,10	70,44	70,77	71,45
3.	Bengkulu Utara	67,63	67,80	68,36	68,80	68,82	69,28	69,77
4.	Kaur	64,95	65,28	66,20	66,78	66,99	67,17	67,77
5.	Seluma	64,04	65,00	65,99	66,69	66,89	67,03	67,76
6.	Mukomuko	66,52	67,07	67,47	68,12	68,45	68,64	69,12
7.	Lebong	65,58	65,87	66,28	66,84	67,01	67,46	68,12
8.	Kepahiang	66,35	66,60	67,14	67,67	68,17	68,62	69,09
9.	Bengkulu tengah	65,44	65,80	66,65	67,30	67,61	67,96	68,47
10.	Kota Bengkulu	77,94	78,82	79,67	80,35	80,36	80,54	80,99
Provinsi Bengkulu		69,33	69,95	70,64	71,21	71,40	71,64	72,16

Sumber: BDA Provinsi Bengkulu Tahun 2022

2.2.1.6. Ketenagakerjaan

Sampai dengan rilis Sakernas Februari 2020, penghitungan indikator masih menggunakan penimbang dari proyeksi penduduk hasil Sensus Penduduk 2010 (SP2010). Penimbang adalah faktor pengali sampel suatu survei untuk menghasilkan estimasi populasi penduduk. Pada tahun 2015, Badan Pusat Statistik melaksanakan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS 2015). Hasil SUPAS 2015 digunakan untuk menghitung proyeksi penduduk sampai dengan tahun 2045 dan mengoreksi proyeksi penduduk hasil SP 2010. Dengan adanya koreksi tersebut, maka sejak Sakernas Agustus 2020 dan selanjutnya, penghitungan indikator akan menggunakan proyeksi penduduk hasil SUPAS 2015. Untuk menjaga keterbandingan, penyajian series data (tahun 2021 dan 2022) akan menggunakan penimbang dari proyeksi penduduk hasil SUPAS 2015.

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Provinsi Bengkulu. Penduduk usia kerja pada Agustus 2022 sebanyak 1.541.550 orang, naik sebanyak 21.120 orang dibanding Agustus 2021 dan naik sebanyak 13.000 orang jika dibanding Februari 2022. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 69,81 persen (1.076.120 orang), sisanya termasuk bukan angkatan kerja.

Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2022 terdiri atas 1.037.500 orang penduduk yang bekerja dan 38.620 orang pengangguran. Apabila dibandingkan kondisi Februari 2022 jumlah angkatan kerja juga mengalami penurunan sebanyak 16.660 orang. Penduduk bekerja mengalami penurunan sebanyak 18.270 orang demikian halnya pengangguran mengalami peningkatan sebanyak 1.610 orang.

Tabel 2. 34 Perkembangan Ketenagakerjaan di Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2022

Tenaga Kerja	2019 (data awal)		2020		2021		2022	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
Penduduk Usia Kerja (000 jiwa)	1.466,82	1.477,99	1.489,12	1.499,57	1.510,61	1.520,43	1.528,55	1.541,55
Angkatan Kerja (000 Jiwa)	1.061,95	1.035,95	1.101,02	1.075,68	1.083,74	1.060,52	1.092,78	1.076,12
Bekerja (000 Jiwa)	1.036,32	1.002,16	1.067,13	1.031,88	1.043,41	1.021,78	1.055,77	1.037,50
Penganggur (000 Jiwa)	25,63	33,79	33,90	43,80	40,33	38,75	37,01	38,62
TPAK (%)	72,40	70,09	73,94	71,73	71,74	69,75	71,49	69,81
TPT (%)	2,41	3,26	3,08	4,07	3,72	3,65	3,39	3,59

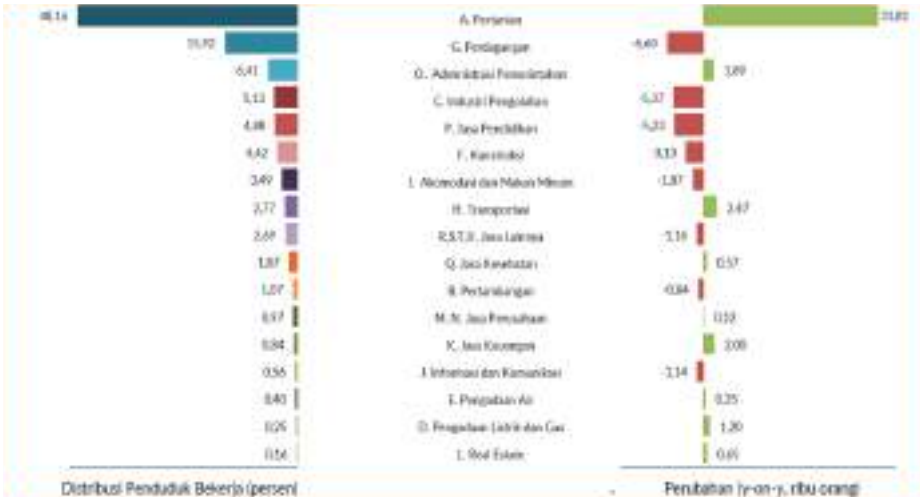
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu

Sejalan dengan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mempunyai pola yang serupa. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. TPAK pada Agustus 2022 sebesar 69,81persen, yaitu naik 0,06 persen poin dibanding Agustus 2021 sedangkan Februari 2022 turun sebesar 1,68 persen poin.

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan penyerapan masing-masing sektor dari seluruh penduduk yang bekerja di pasar kerja Provinsi Bengkulu. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2022, tiga lapangan pekerjaan yang memiliki distribusi tenaga kerja paling banyak adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 48,16 persen; Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 15,92 persen; dan Administrasi Pemerintah sebesar 6,41 persen.

Dibandingkan Agustus 2021, Lapangan pekerjaan mengalami peningkatan dan penurunan, peningkatan terbesar pada lapangan pekerjaan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (31,81 ribu orang); Transportasi (2,47 ribu orang); dan Jasa Keuangan (2,00 ribu orang). Sementara lapangan pekerjaan yang memiliki penurunan terbesar

yaitu Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor mengalami penurunan sebesar 6,6 ribu orang.



Gambar 2. 3 Distribusi Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Agustus 2022

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2022 sebesar 3,59 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar tiga sampai empat orang penganggur. Pada Agustus 2022, TPT mengalami penurunan sebesar 0,06 persen poin dibandingkan Agustus 2021 sedangkan jika dibandingkan dengan Februari 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,2 persen poin. Berdasarkan Kabupaten/Kota, TPT tertinggi terjadi di Kota Bengkulu dengan TPT sebesar 6,15 persen dan Kabupaten Bengkulu Utara sebesar 4,16 persen. Sementara itu TPT terendah berada di Kabupaten Seluma (1,74 persen), Rejang Lebong (2,28 persen) dan Bengkulu Tengah (2,48 persen). Jika dilihat jumlah pengangguran, di Kota Bengkulu ada sebanyak 11.839 orang yang tergolong sebagai pengangguran, angka ini merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Bengkulu, disusul Kabupaten Bengkulu Utara sebanyak 6.606 orang.

Tabel 2. 35 Perkembangan Ketenagakerjaan di Provinsi Bengkulu menurut Kabupaten/Kota, Agustus 2022

Kabupaten/ Kota	Bekerja	Pengangguran	Bukan Angkatan Kerja	Total Penduduk Usia Kerja	TPAK	TPT
Bengkulu Selatan	99.420	3.621	33.193	136.234	75,64	3,51
Rejang Lebong	153.568	3.588	53.909	211.065	74,46	2,28
Bengkulu Utara	152.216	6.606	75.705	234.527	67,72	4,16

Kaur	65.546	2.612	26.222	94.380	72,22	3,83
Seluma	104.732	1.854	44.457	151.043	70,57	1,74
Mukomuko	84.566	2.674	51.850	139.090	62,72	3,07
Lebong	63.628	2.073	24.543	90.244	72,8	3,16
Kepahiang	78.696	2.366	27.790	108.852	74,47	2,92
Bengkulu Tengah	54.466	1.386	29.861	85.713	65,16	2,48
Bengkulu	180.658	11.839	97.905	290.402	66,29	6,15
Total	1.037.496	38.619	465.435	1.541.550	69,81	3,59

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, BRS No. 67/11/17/Th. XVI, 7 November 2022

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Perkembangan Tenaga Kerja berdasarkan Jenjang Pendidikan di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 36 Penduduk Bekerja di Provinsi Bengkulu menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan, Agustus 2018 – Agustus 2022

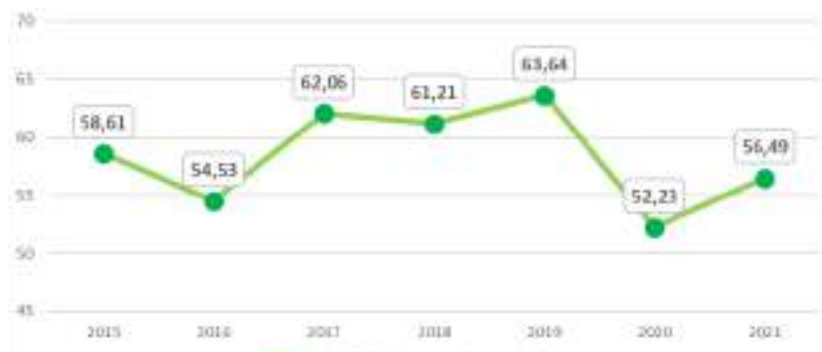
Pendidikan	2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022
<= SD	40,67	38,61	37,52	36,96	38,38
SMP	20,10	17,59	18,29	17,16	18,16
SMA Umum	18,98	20,84	22,46	22,51	21,23
SMA Kejuruan	8,38	9,00	7,59	8,30	7,61
Diploma I/II/III	2,59	2,48	2,69	2,69	2,17
Universitas	9,28	11,47	11,46	12,38	12,45

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, BRS No. 67/11/17/Th. XVI, 7 November 2022

Pada Agustus 2022, penduduk bekerja masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD ke bawah yaitu sebanyak 38,38 persen. Sedangkan tenaga kerja yang berpendidikan tinggi yaitu Diploma dan Universitas sebesar 14,62 persen. Kontribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama pada Agustus 2021.

Kementerian Ketenagakerjaan menggunakan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) untuk mengukur keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan nasional maupun di setiap daerah provinsi. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdapat 9 (sembilan) indikator utama yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan. Hasil indeks pada setiap indikator utama memberikan informasi mengenai kinerja mesin-mesin pembangunan

ketenagakerjaan, termasuk informasi mengenai berbagai permasalahan dan tantangan ketenagakerjaan yang harus segera diselesaikan sehingga dapat diformulasikan berbagai kebijakan, strategi, dan program pembangunan ketenagakerjaan yang tepat guna mendekatkan Indonesia pada 4 (empat) tujuan utama pembangunan ketenagakerjaan. Perkembangan Tenaga Kerja berdasarkan Jenjang Pendidikan di Provinsi Bengkulu Tahun 2015-2021 adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 4 Perkembangan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan

Sumber: Kemenaker, Buku IPK Tahun 2021 (terbit Desember 2022)

2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya

2.2.2.1. Kesejahteraan Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Penanganan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sudah seharusnya menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam UU tersebut dijabarkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup; memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan

kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Perkembangan Penanganan PMKS dan Fakir Miskin di Provinsi Bengkulu Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 37 Perkembangan Penanganan PMKS dan Fakir Miskin di Provinsi Bengkulu Tahun 2021

Nama Wilayah	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM)		Jumlah Anggaran (Rupiah)	
	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
Bengkulu Selatan	13.990	12.400	2.798.000.000	2.480.000.000
Rejang Lebong	21.740	22.915	4.348.000.000	4.583.000.000
Bengkulu Utara	22.957	23.541	4.591.400.000	4.708.200.000
Kaur	10.941	9.695	2.188.200.000	1.939.000.000
Seluma	15.373	14.392	3.074.600.000	2.878.400.000
Mukomuko	10.660	12.489	2.132.000.000	2.497.800.000
Lebong	7.932	8.454	1.586.400.000	1.690.800.000
Kepahiang	11.393	10.646	2.278.600.000	2.129.200.000
Bengkulu Tengah	8.113	9.998	1.622.600.000	1.999.600.000
Kota Bengkulu	20.447	18.775	4.089.400.000	3.755.000.000
Provinsi Bengkulu	143.546	143.305	28.709.200.000	28.661.000.000

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Bengkulu

2.2.2.2. Seni, Budaya, dan Olahraga

Mewujudkan pembangunan suatu daerah atau bangsa dan negara, tentu hal ini harus dibarengi dengan membangun dan melestarikan budaya-budaya yang mengandung nilai-nilai luhur kehidupan yang bepacu pada agama dan falsafah suatu negara. Seni budaya menduduki poin penting yang mendasar dalam pembangunan suatu daerah. Karena peran seni budaya adalah sebagai pembangunan karakter untuk terus mendidik dan mengajarkan tentang kearifan-kearifan lokal pada generasi dengan dasar kesenangan dan kebutuhan untuk memahami seni budaya sebagai identitas pada daerahnya. Pembangunan seni dan Budaya pada dasarnya ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Total grup kesenian di Provinsi bengkulu pada tahun 2021 adalah sebanyak sebanyak 166 sanggar/grup.

Tabel 2. 38 Perkembangan Jumlah Sanggar/Grup Kesenian di Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2021

Indikator	Tahun				
	2017 (data awal)	2018	2019	2020	2021 (data termutakhir)
Jumlah Sanggar/Guru Kesenian	166	166	166	166	166

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu

Pembangunan kebudayaan di Provinsi Bengkulu sudah menunjukkan kinerja yang baik, yang diukur dengan Indeks Pembangunan Kebudayaan. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan suatu instrumen yang disusun bersama antara Kemendikbud, Kementerian PPN/Bappenas, dan Badan Pusat Statistik untuk mengukur capaian pembangunan kebudayaan. Instrumen ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Terdapat 31 indikator penyusun indeks tersebut yang dirangkum dalam tujuh dimensi pengukuran ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi, dan gender. Adapun metodologi dan sumber data dikembangkan untuk menghitung angka IPK secara nasional dan 34 provinsi di Indonesia. Pada Tahun 2021, Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Bengkulu mencapai sebesar 54,56%, capaian tertinggi ke-empat nasional.

Tabel 2. 39 Perkembangan Indeks Pembangunan Kebudayaan di Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2021

Indikator	2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022
Indeks Pembangunan Kebudayaan	59,95	61,13	56,59	54,56	57.28

Sumber: ipk.kemdikbud.go.id

Selain karya seni budaya, peninggalan cagar budaya memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan. Pada tahun 2022, Persentase cagar budaya (benda, struktur, situs, kawasan) yang dipelihara/ dilestarikan di Bengkulu adalah sebanyak 5 Cagar Budaya, yaitu Benteng Marlborough, Makam Inggris, Rumah Pengasingan Bung Karno, Tugu Thomas Parr, dan Makam Sentot Alibasyah.

Tabel 2. 40 Perkembangan Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan di Kota Bengkulu Tahun 2018-2022

Indikator	2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022
Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	5	5	5	5	5

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu

Tabel 2. 41 Perkembangan Persentase Nomor Lomba Olahraga Prestasi yang dimenangkan Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2021

Indikator	2017 (data awal)	2018	2019 (data terakhir)
Nomor Lomba Olahraga Prestasi yang dimenangkan	69,23	44,44	38,89

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu

Olahraga adalah suatu aktivitas fisik yang bersifat positif yang dapat menyehatkan jasmani maupun rohani serta dapat mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Prestasi olahraga dapat dilihat dari perkembangan persentase nomor lomba olahraga prestasi yang dimenangkan. Pada

tahun 2016 sebesar 46,67% nomor lomba dimenangkan dan pada tahun 2019 menjadi sebesar 38,89%. Selain itu, dalam kurun waktu tahun 2017-2021, terdapat sebanyak 3 (tiga) organisasi olahraga yang dibina oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Tabel 2. 42 Perkembangan Jumlah Organisasi Olahraga yang dibina di Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2021

Indikator	2017 (data awal)	2018	2019	2020	2021 (data termutakhir)
Jumlah Organisasi Olahraga yang dibina	3	3	3	3	n/a

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Pelayanan Umum Urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.3.1.1. Pendidikan Menengah

Kinerja pelayanan umum wajib pelayanan dasar urusan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dapat dilihat melalui beberapa indikator sebagai berikut:

a. Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Bengkulu

Rata-rata lama sekolah (RLS/MYS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator RLS ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Standar UNDP (Badan Program Pembangunan PBB) adalah minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Selama periode 2018 hingga 2022, rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Provinsi Bengkulu tumbuh 0,1 persen pertahun. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Provinsi Bengkulu yang lebih baik. Pada tahun 2022, secara rata-rata lama sekolah penduduk Provinsi Bengkulu usia 25 tahun ke atas mencapai 8,91 tahun, atau telah menyelesaikan pendidikan hingga kelas VIII (SMP kelas II).

Tabel 2. 43 Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Bengkulu Tahun 2018–2022

Indikator	2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022
Rata-rata Lama Sekolah	8,61	8,73	8,84	8,87	8,91

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu

b. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Provinsi Bengkulu Tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 44 Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022

Indikator	2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022
Harapan Lama Sekolah	13,58	13,59	13,61	13,67	13,68

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu

c. Angka Partisipasi Sekolah

Seperti halnya pada pendidikan dasar, dalam melihat seberapa besar tingkat partisipasi penduduk usia 16-18 tahun dalam kegiatan belajar/ sekolah dapat dilihat dari besaran Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS usia 16 – 18 tahun adalah jumlah penduduk kelompok usia pendidikan menengah (16-18 tahun) yang masih menempuh pendidikan per jumlah penduduk usiapendidikan 16-18 tahun. Angka partisipasi sekolah usia 16 – 18 tahun di Provinsi Bengkulu dalam tujuh tahun terakhir (tahun 2014-2020) menunjukkan nilai yang semakin meningkat. Meningkatnya APS usia 16 – 18 tahun ini merupakan gambaran semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi terutama jenjang SMA/SMK/MA. Pada tahun 2022 APS sebesar 79,31 persen. Peningkatan APS pada pendidikan menengah ini tidak terlepas dari banyaknya program yang diluncurkan oleh pemerintah dalam memudahkan mereka bersekolah, terutama bagi golongan yang kurang dengan adanya program Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) maupun Program Indonesia Pintar.

Tabel 2. 45 Perkembangan APS Jenjang Pendidikan Menengah di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022

Indikator	2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022
APS Dikmen	79,33	79,39	79,72	79,75	79,31

Sumber: BDA Provinsi Bengkulu 2023

d. Angka Partisipasi Murni

APM adalah perbandingan penduduk yang sedang sekolah dengan usia tertentu pada jenjang tertentu pula sesuai dengan peruntukannya. Dengan

kata lain APM dapat digunakan untuk mengetahui kesesuaian usia dengan tingkat pendidikan yang dijalannya. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut.Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan dan juga merupakan salah satu indikator tonggak kunci keberhasilan (Key Development Milestones) terhadap pemerataan serta perluasan akses pendidikan. Perkembangan APM Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 46 Perkembangan APM Jenjang Pendidikan Menengah di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022

Indikator	2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022
APM Dikmen	65,45	65,51	65,82	66,08	66,61

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu

e. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid penduduk yang menempuh pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dan dinyatakan dalam persentase. Perkembangan APM Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 47 Perkembangan APK Jenjang Pendidikan Menengah di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022

Indikator	2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022
APK Dikmen	85,57	93,8	94,14	93,79	93,97

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu

f. Murid Putus Sekolah

Gangguan belajar pada siswa sekolah, baik yang disebabkan oleh faktor internal (kurangnya motivasi sekolah, keterbatasan kemampuan belajar), maupun yang disebabkan faktor eksternal, dapat mengakibatkan siswa menjadi putus/berhenti sekolah. Kondisi ekonomi keluarga yang minim, menuntut siswa untuk bekerja membantu mencari nafkah keluarga, cara pandang yang sempit terhadap pendidikan menganggap pendidikan bukanlah yang utama, tidak ada sarana dan prasarana yang memadai merupakan beberapa alasan banyaknya siswa memutuskan untuk berhenti sekolah/putus

sekolah. Perkembangan Murid Putus Sekolah di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 48 Perkembangan Murid Putus Sekolah di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020

Indikator	2016 (data awal)	2017	2018	2019	2020 (data termutakhir)
Murid Putus Sekolah SMA	398	359	162	202	162
Murid Putus Sekolah SMK	463	678	346	296	346

Sumber: Buku Statistik SMA dan SMK Provinsi Bengkulu

Pada tahun 2018-2022, APM SMA/MA/SMK mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah penduduk yang bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya. Peningkatan APM SMA/MA/SMK ini memberikan gambaran adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya sekolah. Sebaran APM jenjang pendidikan menengah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 49 Perkembangan APM Jenjang Pendidikan Menengah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022

No	Kabupaten/Kota	Indikator Data				
		2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022
1.	Bengkulu Selatan	63,82	69,08	75,04	63,84	64,93
2.	Rejang Lebong	61,65	70,31	72,76	62,95	62,91
3.	Bengkulu Utara	58,76	67,66	67,54	59,78	n/a
4.	Kaur	69,73	67,88	70,23	71,00	71,89
5.	Seluma	69,16	54,85	58,01	70,58	71,73
6.	Mukomuko	62,6	70,33	65,23	n/a	64,15
7.	Lebong	61,44	67,27	77,21	62,04	64,67
8.	Kepahiang	70,85	58,98	64,3	70,85	69,22
9.	Bengkulu tengah	75,19	44,31	48,47	75,98	75,72
10.	Kota Bengkulu	67,93	85,73	87,86	68,11	70,09

Sumber: Bengkulu Dalam Angka Kabupaten/Kota

Pada tahun 2018-2022, APK SMA/MA/SMK mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah penduduk yang menempuh pendidikan tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolahnya di jenjang pendidikan tertentu. Sebaran APM jenjang pendidikan menengah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 50 Perkembangan APK Jenjang Pendidikan Menengah
Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022**

No	Kabupaten/Kota	Indikator Data				
		2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022
1.	Bengkulu Selatan	98,62	97,09	97,09	104,21	99,57
2.	Rejang Lebong	84,65	89,2	89,2	90,17	89,62
3.	Bengkulu Utara	67,97	89,65	89,65	77,10	n/a
4.	Kaur	94,7	99,42	99,42	108,19	107,07
5.	Seluma	88,76	75,72	75,72	94,61	96,25
6.	Mukomuko	69,61	87,31	87,31	n/a	77,02
7.	Lebong	91,43	96,59	96,56	91,42	92,70
8.	Kepahiang	84,33	81,61	81,61	90,17	89,62
9.	Bengkulu tengah	84,62	61,38	61,38	93,40	93,87
10.	Kota Bengkulu	94,27	110,52	110,52	101,35	103,00

Sumber: Bengkulu Dalam Angka Kabupaten/Kota

- g. Data Jumlah Sekolah SMA, SMK, dan SLB Se-Provinsi Bengkulu
- Jumlah sekolah SMA Negeri dan Swasta di Wilayah Provinsi Bengkulu. Data jumlah sekolah di Provinsi Bengkulu ada beberapa sekolah dihapuskan karena tidak ada lagi siswa yang bersekolah di sekolah tersebut. Berikut daftar sekolah SMA, SMK dan SLB yang kami dapat datanya pada data pokok pendidikan (DAPODIK).

**Tabel 2. 51 Jumlah SMA, SMK dan SLB di Kabupaten/Kota di
Provinsi Bengkulu Tahun 2022**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah SMA	Jumlah Sekolah SMK	Jumlah Sekolah SLB
1	Kota Bengkulu	27	25	7
2	Kab. Bengkulu Utara	20	14	1
3	Kab. Seluma	12	6	1
4	Kab. Bengkulu Selatan	15	7	1
5	Kab. Muko-muko	20	8	3
6	Kab. Kaur	14	11	1
7	Kab. Rejang Lebong	18	15	1
8	Kab. Bengkulu Tengah	9	6	1
9	Kab. Lebong	6	7	1
10	Kab. Kepahiang	8	6	1
Jumlah		149	105	18

Sumber: <https://dapo.kemdikbud.go.id/sp/1/260000>

- h. Akreditasi Sekolah SMA dan SMK
- Kualitas pelayanan umum pendidikan juga dinilai dari akreditasi sekolah. Akreditasi sekolah adalah kegiatan penilaian (asesmen) sekolah

secarasistematis dan komprehensif melalui kegiatan evaluasi diri dan evaluasi eksternal (visitasi) untuk menentuksn kelayakan dan kinerja sekolah. Akreditasi sekolah bertujuan untuk memperoleh gambaran kinerja sekolah yang dapat digunakan sebagai alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan mutu serta menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan. Pada tahun 2019, akreditasi sekolah pada setiap jenjang sudah semakin baik, yang dilihat dari makin sedikitnya sekolah yang belum melakukan akreditasi. Perkembangan Akreditasi Sekolah di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 52 Perkembangan Sekolah yang Sudah Akreditasi di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022

Indikator	2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022
SMA yang telah Akreditasi %	94,2	95	93,6	92,3	95,5
SMK yang telah Akreditasi %	63,9	88,3	86,7	87,6	91,5

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah Kemendikbud.

i. Data Jumlah Ruang Kelas Se-Provinsi Bengkulu

Tabel 2. 53 Jumlah Ruang Kelas Per Kab/Kota Se-Provinsi Bengkulu Jenjang SMA, SMK, dan SLB Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Ruang kelas SMA	Jumlah Ruang kelas SMK	Jumlah Ruang Kelas SLB
1	Kota Bengkulu	381	346	122
2	Kab. Seluma	170	77	17
3	Kab. Bengkulu Selatan	251	103	26
4	Kab. Kaur	133	89	9
5	Kab. Bengkulu Tengah	118	55	9
6	Kab. Kepahiang	113	74	9
7	Kab. Rejang Lebong	246	199	27
8	Kab. Lebong	76	78	10
9	Kab. Bengkulu Utara	223	177	14
10.	Kab. Mukomuko	205	99	15
Jumlah		1925	1297	258

Sumber: dapodik

j. Rasio Ruang Kelas terhadap Rombongan Belajar

Rasio kelas terhadap rombongan belajar menggambarkan kondisi kapasitas 1 unit kelas untuk menampung 1 rombongan belajar yang Pasal 24 Permendikbud No. 17 Tahun 2017 adalah 28 siswa untuk SD, 32 siswa untuk SMP, 36 siswa untuk SMA dan 36 siswa untuk SMK. Perkembangan Rasio Ruang Kelas terhadap Rombongan Belajar Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 54 Perkembangan Rasio Ruang Kelas terhadap Rombongan Belajar di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022

Indikator	2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022
Rasio Kelas: Rombel SMA	1:1	1:1	1 : 1	1:1	1 : 1
Rasio Kelas: Rombel SMK	1:1	1:1,1	1 : 1,1	1:1,1	1 : 1,1

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu

Tabel 2. 55 Data Jumlah Guru di Provinsi Bengkulu Tingkat SMA, SMK Dan SLB Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Guru SMA	Jumlah Guru SMK	Jumlah Guru SLB
1	Kota Bengkulu	847	736	146
2	Seluma	331	157	11
3	BengkuluSelatan	529	244	28
4	Kaur	284	175	12
5	BengkuluTengah	261	115	8
6	Kepahiang	216	210	12
7	RejangLebong	480	440	20
8	Lebong	145	187	13
9	BengkuluUtara	509	412	24
10	Mukomuko	418	200	19
Jumlah		4020	2876	293

Sumber: dapodik

k. Rasio Guru terhadap Murid

Pelayanan wajib pendidikan juga dapat dilihat pada data rasio guru terhadap siswa. Perkembangan Rasio Guru terhadap Murid di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 56 Perkembangan Rasio Guru terhadap Murid di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022

Indikator	2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022
Rasio Guru : Murid SMA	1:13	1:12	1 : 12	1:12	1 : 12
Rasio Guru : Murid SMK	1:12	1:11	1 : 11	1:11	1 : 11

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah Kemendikbud

*n/a=data belum tersedia/belum rilis

l. Guru yang Sudah Sertifikasi

Guru merupakan salah satu unsur terpenting dalam pendidikan. Baik buruknya kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh standar kualitas guru. Oleh karena itu, guru perlu meningkatkan kompetensinya seperti tercantum dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Ada empat kompetensi yang harus dipenuhi guru, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan kompetensi sosial. Salah satu upaya dalam peningkatan kualitas guru ada melalui sertifikasi guru.

Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Guru profesional merupakan syarat mutlak untuk

menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Sertifikasi guru di Provinsi Bengkulu pada setiap jenjang pendidikan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Perkembangan Guru yang Sudah Sertifikasi di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 57 Perkembangan Guru yang Sudah Sertifikasi di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022

Indikator	2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022
Guru SMA	44,1	49,5	47,8	43,4	50,5
Guru SMK	36,3	41,2	38,8	35,6	44,32

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah Kemendikbud

*n/a=data belum tersedia/belum rilis

2.3.1.2. Kesehatan

Pembangunan kesehatan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Hal ini menuntut adanya dukungan sumber daya yang cukup, serta arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan yang tepat. Namun, seringkali para pembuat kebijakan di bidang kesehatan mengalami kesulitan dalam hal pengambilan keputusan yang tepat karena keterbatasan atau ketidakterediaan data dan informasi yang akurat, tepat, dan cepat. Kinerja pelayanan umum wajib pelayanan dasar urusan kesehatan di Provinsi Bengkulu kurun waktu tahun 2018-2022 dapat dilihat melalui beberapa indikator sebagai berikut:

a. Angka Kematian Bayi

Kejadian kematian dalam masyarakat dari waktu ke waktu dapat memberi gambaran perkembangan derajat kesehatan masyarakat atau dapat digunakan sebagai indikator penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan lainnya. Tinggi rendahnya angka kematian, secara umum dipengaruhi erat dengan tingkat kesakitan golongan bayi, balita dan ibu maternal (hamil, melahirkan, nifas). Angka kematian bayi merupakan indikator penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan pemerintah khususnya di bidang kesehatan, data

kematian bayi disini adalah hasil rilis Dinas Kesehata Provinsi Bengkulu kurun waktu 2018 – 2022.

Perkembangan Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup di Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 58 Perkembangan Angka Kematian Bayi per 1000 KH Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2022

No	Kabupaten/Kota	Tahun					
		2017 (data awal)	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Bengkulu Selatan	11	10	17	7,8	9	8,3
2.	Rejang Lebong	8	4	7	5,5	7	5,8
3.	Bengkulu Utara	7	6	5	9,9	14	17,5
4.	Kaur	13	4	7	6,1	7	6,4
5.	Seluma	13	7	16	11,7	6	6,3
6.	Mukomuko	11	8	8	5,6	7	10,5
7.	Lebong	7	10	4	8,5	13	18,3
8.	Kepahiang	21	14	14	11,8	16	12,7
9.	Bengkulu tengah	15	12	4	7,2	9	11,9
10.	Kota Bengkulu	4	5	10	2,3	3	2,8
Provinsi Bengkulu		1	7	8	7,7	8,32	9,1

Sumber: Profil Kesehatan tahun 2022

b. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (Maternal Mortality Rate) adalah Jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan paska persalinan per 100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu. Angka pengukuran risiko kematian wanita yang berkaitan dengan peristiwa kehamilan. Kematian ibu adalah kematian wanita dalam masa kehamilan, persalinan dan dalam masa 42 hari (6 minggu) setelah berakhirnya kehamilan tanpa memandang usia kehamilan maupun tempat melekatnya janin, oleh sebab apa pun yang berkaitan dengan atau diperberat oleh kehamilan atau pengelolaannya, bukan akibat kecelakaan. Angka Kematian Ibu (AKI) atau Maternal Mortality Rate (MMR) berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu melahirkan dan masa nifas. Perkembangan Angka Kematian Ibu di Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 59 Perkembangan Angka Kematian Ibu per 100,000 KH Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2022

No	Kabupaten/ Kota	Tahun					
		2017 (data awal)	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Bengkulu Selatan	37	0	76	72	0	37
2.	Rejang Lebong	163	83	42	218	22	163
3.	Bengkulu Utara	126	111	175	188	137	126
4.	Kaur	89	90	91	135	49	89
5.	Seluma	62	118	123	96	63	62
6.	Mukomuko	56	116	0	268	248	56
7.	Lebong	102	57	218	164	123	102
8.	Kepahiang	0	178	88	190	195	0
9.	Bengkulu tengah	153	306	150	49	155	153
10.	Kota Bengkulu	175	57	59	98	49	175
Provinsi Bengkulu		79	111	100	93	152	95

Sumber: Profil Kesehatan tahun 2022

c. Angka Harapan Hidup

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk suatu Negara atau wilayah. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui Puskesmas, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mencapai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya. Definisi Angka Harapan Hidup (AHH) pada suatu umur x adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Idealnya Angka Harapan Hidup dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari

catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat Tabel Kematian. Tetapi karena sistem registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan dengan baik maka untuk menghitung Angka Harapan Hidup digunakan cara tidak langsung dengan program Mortpak Lite. Perkembangan Angka Harapan Hidup di Provinsi Bengkulu Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 60 Perkembangan Angka Harapan Hidup per Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2022

No	Kabupaten/Kota	Tahun					
		2017 (data awal)	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Bengkulu Selatan	67,24	67.45	67.79	67.90	67.93	68.15
2.	Rejang Lebong	67,65	67.65	68.37	68.57	68.75	69.00
3.	Bengkulu Utara	67,42	67.42	68.04	68.19	68.27	68.53
4.	Kaur	66,15	66.15	66.50	66.63	66.73	67.01
5.	Seluma	67,14	67.14	67.56	67.75	67.90	68.13
6.	Mukomuko	66,16	66.16	66.51	66.64	66.73	67.00
7.	Lebong	62,73	62.73	63.12	63.29	63.40	63.68
8.	Kepahiang	67,39	67.39	67.78	67.95	68.08	68.28
9.	Bengkulu tengah	67,82	67.82	68.12	68.19	68.19	68.37
10.	Kota Bengkulu	69,72	69.72	70.04	70.13	70.20	70.46

Tabel 2. 61 Perkembangan Angka Harapan Hidup Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022

Tahun				
2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022
68.84	69.21	69.35	69.42	69.69

d. Stunting

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia dua tahun. Kekurangan gizi pada usia dini meningkatkan angka kematian bayi dan anak, menyebabkan penderitanya mudah sakit dan memiliki postur tubuh tak maksimal saat dewasa. Kemampuan kognitif para penderita juga berkurang, sehingga mengakibatkan kerugian ekonomi jangka panjang bagi Indonesia. Prevalensi balita stunting mengalami penurunan tiap tahun, yaitu dari 27,98 persen pada tahun 2018 menjadi 26,86 persen pada tahun 2019. Sementara itu pada tahun 2021, persentasenya turun menjadi 22,1 persen, dan pada tahun 2022 kembali turun menjadi 19,8 persen.

Tabel 2. 62 Perkembangan Stunting di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022

Indikator	2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022
Stunting	27,98	26,86	n/a	22,1	19,8

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Bengkulu

e. Fasilitas Kesehatan

Fasilitas Kesehatan adalah salah satu indikator yang menentukan derajat kesehatan masyarakat. Pada bagian ini diuraikan tentang sarana kesehatan diantaranya Puskesmas (rawat inap dan non rawat inap) beserta jejaringnya dan Rumah Sakit (baik RS umum maupun RS khusus) yang ada di Provinsi Bengkulu. Perkembangan Jumlah Sarana Kesehatan di Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 63 Perkembangan Sarana Kesehatan di Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2022

Indikator	2017 (data awal)	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Puskesmas	180	179	179	179	179	179
Jumlah Rumah Sakit	21	23	23	23	24	24

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Bengkulu

Akreditasi rumah sakit adalah pengakuan terhadap rumah sakit yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh menteri kesehatan, setelah dinilai bahwa rumah sakit itu memenuhi standar pelayanan rumah sakit yang berlaku untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit secara berkesinambungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali. Akreditasi wajib bagi semua rumah sakit baik rumah sakit publik/pemerintah maupun rumah sakit privat/swasta/BUMN. Perkembangan Rumah Sakit yang Terakreditasi di Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 64 Klasifikasi Rumah Sakit dan Akreditasi Rumah Sakit di Provinsi Bengkulu Tahun 2022

No.	Rumah Sakit	Kabupaten/Kota	Pemilik	Kelas	Akreditasi
1.	RSUD dr. M. Yunus	Kota Bengkulu	Pemprov	B	Paripurna
2.	RS Jiwa Soeprapto	Kota Bengkulu	Pemprov	B	Paripurna
3.	RSUD Harapan dan Doa	Kota Bengkulu	Pemda Kota	C	Madya
4.	RS Rafflesia	Kota Bengkulu	Organisasi Sosial	C	Perdana
5.	RS Tiara Sella	Kota Bengkulu	Swasta	C	Paripurna
6.	RS Bayangkara Jitra	Kota Bengkulu	POLRI	C	Utama

No.	Rumah Sakit	Kabupaten/Kota	Pemilik	Kelas	Akreditasi
7.	RS TkIV Bengkulu	Kota Bengkulu	TNI AD	D	Madya
8.	RSU Ummi	Kota Bengkulu	Swasta	C	Perdana
9.	RS Gading Medika	Kota Bengkulu	Swasta	C	Madya
10.	RSUD Bengkulu Tengah	Bengkulu Tengah	Pemkab Benteng	D	Perdana
11.	RSUD Kepahiang	Kepahiang	Pemkab Kepahiang	C	Utama
12.	RSUD Lebong	Lebong	Pemkab Lebong	D	Perdana
13.	RSUD Curup	Rejang Lebong	Pemkab Rejang Lebong	C	Dasar

Sumber: Laporan Tahunan Bidang Yankes Dinkes Provinsi Bengkulu

Tabel 2. 65 Rumah Sakit yang telah Akreditasi di Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2022

2017 (data awal)	2018	2019	2020	2021	2022
12	17	23	23	23	24

Sumber: Profil Kesehatan Kab/kota Provinsi Bengkulu

Tabel 2. 66 Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Rumah Sakit/Rumah Bersalin, Puskesmas, Klinik/Balai Kesehatan

No	Kabupaten/Kota	Rumah Sakit Umum		Rumah Sakit Khusus		Rumah Sakit Bersalin		Puskesmas		Klinik		Posyandu		Posbindu	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	Bengkulu Selatan	2	2	1	1	-	-	14	14	6	6	109	121	104	117
2	Rejang Lebong	1	1	-	-	-	-	21	21	15	15	174	348	190	274
3	Bengkulu Utara	4	4	-	-	-	-	22	22	7	7	145	216	267	195
4	Kaur	1	1	-	-	-	-	16	16	2	2	13	176	195	170
5	Seluma	1	1	-	-	1	1	22	22	3	3	82	226	187	98
6	Mukomuko	1	1	1	1	-	-	17	17	11	11	73	216	148	184
7	Lebong	1	1	-	-	-	-	13	13	1	1	34	247	129	214
8	Kepahiang	1	1	-	-	-	-	14	14	8	8	60	168	102	168
9	Bengkulu tengah	1	1	-	-	-	-	20	20	2	2	76	198	159	151
10	Kota Bengkulu	9	9	1	1	-	-	20	20	11	11	63	121	96	109
Provinsi Bengkulu		22	22	3	3	1	1	179	179	66	66	829	2037	1579	1680

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Bengkulu dan Laporan Tahunan Dinkes Provinsi Bengkulu

Disesuaikan dengan Format BDA

Ket: n/a data belum rilis

f. Keluhan kesehatan

Keluhan adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena penyakit akut, penyakit kronis (meskipun selama sebulan terakhir tidak mempunyai keluhan), kecelakaan, kriminal atau hal lain, untuk mengetahui keluhan kesehatan terhadap penduduk/masyarakat adalah dengan cara melakukan survey terhadap masyarakat, hal ini dapat dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Di Provinsi Bengkulu Penduduk yang mengalami keluhan selama sebulan dan berobat jalan selama sebulan terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 67 Persentase Penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan terakhir menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2015-2021

No	Kabupaten/Kota	Tahun						
		2015 (data awal)	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (data termutakhir)
1	Bengkulu Selatan	25,76	33,62	31,95	38,8	30,13	34,51	22,62
2	Rejang Lebong	29,54	27,91	19,57	24,47	28,25	29,93	23,55
3	Bengkulu Utara	33,36	27,13	22,24	23,9	30,8	31,87	18,54
4	Kaur	27,26	25,2	26,52	26,7	32,14	24,49	24,21
5	Seluma	25,66	24,09	24,99	28,5	25,7	25,05	24,19
6	Mukomuko	28,8	23,27	23,27	24,97	25,84	29,98	21,60
7	Lebong	18,48	27,09	27,09	25,57	26,92	32,46	25,06
8	Kepahiang	29,15	30,29	30,23	32,09	26,97	29,60	25,06
9	Bengkulu tengah	28,84	25,98	25,98	37,84	41	34,05	31,04
10	Kota Bengkulu	26,62	24,75	24,75	22,38	31,38	30,31	42,08
Provinsi Bengkulu		27,96	24,83	24,83	27,07	29,72	30,23	26,63

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Tabel 2. 68 Persentase Penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan berobat jalan selama sebulan

No	Kabupaten/Kota	Tahun						
		2015 (data awal)	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (data termutakhir)
1	Bengkulu Selatan	51,81	57,06	43,53	34,01	41,55	40,35	37,49
2	Rejang Lebong	53,62	57,36	49,02	40,78	46,74	37,18	36,95
3	Bengkulu Utara	55,19	47,24	44,57	29,45	47,89	44,77	37,26
4	Kaur	42,87	50,57	32,26	40,80	36,68	48,83	37,05
5	Seluma	40,02	37,19	27,82	44,92	53,03	58,18	32,97
6	Mukomuko	49,10	54,79	48,26	58,14	58,14	58,80	55,12
7	Lebong	40,06	43,44	32,91	33,59	32,86	29,78	28,11
8	Kepahiang	55,71	52,38	46,56	53,60	56,63	48,47	45,23
9	Bengkulu tengah	52,64	56,80	34,99	29,16	29,12	36,55	26,99
10	Kota Bengkulu	54,48	49,12	50,30	40,74	44,67	41,35	42,64
Provinsi Bengkulu		51,18	50,69	42,73	40,14	45,40	44,14	39,16

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

g. Kasus Penyakit

Kasus penyakit adalah orang yang menderita suatu penyakit atau masalah, dimana sudah ditegakkan diagnosa penyakit padanya. Dalam epidemiologi, kasus adalah merumuskan masalah untuk dicari penyebabnya dalam upaya pengembangan suatu strategi pencegahan, di Provinsi Bengkulu ada beberapa jenis penyakit yang jadi program prioritas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 69 Kasus Penyakit Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Penyakit

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2020					
		Jumlah semua kasus Tuberkulosis	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC	Jumlah kasus baru AIDS	Penemuan kasus baru Kusta per 100.000	Angka Kesakitan Malaria per 1.000 Penduduk	Angka Kesakitan DBD per 100.000 Penduduk
1	Bengkulu Selatan	167	91	0	5,3	0,02	96
2	Rejang Lebong	203	100	0	0,4	0,32	45
3	Bengkulu Utara	135	96	13	0,3	0,00	64
4	Kaur	57	53	0	0,0	0,00	51
5	Seluma	103	100	0	0,5	0,00	15
6	Mukomuko	167	99	1	0,5	0,01	67
7	Lebong	0	0	0	0,0	0,00	113
8	Kepahiang	324	96	1	0,0	0,05	124

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2020					
		Jumlah semua kasus Tuberkulosis	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC	Jumlah kasus baru AIDS	Penemuan kasus baru Kusta per 100.000	Angka Kesakitan Malaria per 1.000 Penduduk	Angka Kesakitan DBD per 100.000 Penduduk
9	Bengkulu tengah	148	100	0	0,0	0,08	70
10	Kota Bengkulu	339	83	19	0,3	0,01	44
Provinsi Bengkulu		1.643	97	34	0,7	0,06	62

2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja pelayanan umum wajib pelayanan dasar urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Provinsi Bengkulu kurun waktu tahun 2017-2022 dapat dilihat melalui beberapa indikator sebagai berikut:

2.3.1.3.1. Infrastruktur Dasar

Kinerja pelayanan umum wajib pelayanan dasar urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Provinsi Bengkulu kurun waktu tahun 2016-2021 dapat dilihat melalui beberapa indikator sebagai berikut:

a. Jalan dalam Kondisi Baik/Mantap

Jalan dalam Kondisi Baik/Mantap adalah jalan provinsi yang memiliki kerataan permukaan jalan memadai untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman. Nilai kondisi jalannya diukur menggunakan alat ukur kerataan jalan (menghasilkan nilai IRI) atau diukur secara visual (menghasilkan nilai RCI). Nilai maksimum IRI adalah 8 atau RCI minimum nilainya sedang. Menurut Peraturan Menteri PU No. 13 Tahun 2011 disebutkan kriteria kondisi jalan mantap meliputi kondisi jalan baik dan sedang, kriteria kondisi jalan tidak mantab meliputi kondisi rusak ringan dan rusak berat. Perkembangan Jalan dalam Kondisi Baik/Mantap yang menjadi kewenangan provinsi di Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 70 Persentase Jalan dalam Kondisi Baik/Mantap di Provinsi BengkuluTahun 2017-2022

Indikator	2017 (data awal)	2018	2019	2020	2021	2022
Jalan dalam Kondisi Baik/Mantap	54,50	58,50	66,29	68,29	75,92	57,25

Sumber: Dinas PUPR Provinsi Bengkulu
 *Dilaksanakan survey dan penghitungan ulang di tahun 2022

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : L.444.DPU.TR Tahun 2019 tentang Penetapan Ruas, Kelas dan Fungsi Jalan Provinsi pada Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Bengkulu dimana total Panjang Jalan Provinsi sepanjang 1.562,67 km. Pada tahun 2022 dilaksanakan survey dan penghitungan ulang dan mendapatkan data status kondisi jalan mantap sebesar 57,25%.

b. Jembatan dalam Kondisi Baik/Mantap

Jembatan merupakan prasarana penting yang menjadi penghubung antar kedua jalan yang terpisah oleh sungai/danau/rintangan lainnya. Perkembangan jembatan dalam Kondisi Baik/Mantap yang menjadi kewenangan provinsi di Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 71 Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik/Mantap di Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2022

Indikator	2017 (data awal)	2018	2019	2020	2021	2022
Jembatan dalam Kondisi Baik/Mantap	54,5	58,5	66,29	68,14	68,14	68,14

Sumber: Dinas PUPR Provinsi Bengkulu
Catatan: n/a data belum rilis

c. Irigasi dalam Kondisi Baik/Mantap

Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan oprasi dan mempertahankan kelestariannya. Perkembangan Irigasi dalam Kondisi Baik/Mantap yang menjadi kewenangan Provinsi di Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 72 Persentase Irigasi dalam Kondisi Baik/Mantap di Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2022

Indikatro	2017 (data awal)	2018	2019	2020	2021	2022
Irigasi dalam Kondisi Baik/Mantap	59,45	66,1	66,1	56,07	56,72	n/a

Sumber: Dinas PUPR Provinsi Bengkulu
Catatan: n/a data belum rilis

d. Luas Kawasan yang Peruntukannya sesuai dengan RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah pada dasarnya merupakan arah kebijakan pembangunan daerah berwawasan tata ruang wilayah yang digunakan untuk pedoman pemanfaatan dan pengendalian ruang. Berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat harus mengacu pada arahan pemanfaatan ruang, sehingga ruang yang terbatas dapat dimanfaatkan secara optimal. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032. Perkembangan Luas Kawasan yang Peruntukannya sesuai dengan RTRW di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 73 Persentase Luas Kawasan yang Peruntukannya sesuai dengan RTRW di Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2022

Indikator	2017 (data awal)	2018	2019	2020	2021	2022
Luas Kawasan yang Peruntukannya sesuai dengan RTRW	Kawasan budidaya 64%; Kawasan Lindung 36 %	Kawasan budidaya 64%; Kawasan Lindung 36 %	Kawasan budidaya 64%; Kawasan Lindung 36 %	Kawasan budidaya 64%; Kawasan Lindung 36 %	Kawasan budidaya 64%; Kawasan Lindung 36 %	Kawasan budidaya 64%; Kawasan Lindung 36 %

Sumber: Dinas PUPR Provinsi Bengkulu

2.3.1.3.2. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kinerja pelayanan umum wajib pelayanan dasar urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Bengkulu kurun waktu tahun 2016-2021 dapat dilihat melalui beberapa indikator sebagai berikut:

- a. Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak

Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak adalah perbandingan antara rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase.

Perkembangan Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak di Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 74 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak di Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun					
	2017 (data awal)	2018	2019	2020	2021	2022
Rumah Tangga dengan akses air minum layak	28,54	49,37	46,17	62,47	67,39	73,07

Sumber: Dinas PUPR Provinsi Bengkulu

Berdasarkan data Dinas PUPR Provinsi Bengkulu Tahun 2022 bahwa Akses Air Minum Layak Provinsi Bengkulu sebesar 73,07 persen artinya peningkatan cukup signifikan dalam rentang waktu 5 tahun dengan peningkatan sebesar 44,53. Perbedaan yang cukup mencolok terlihat pada akses air minum layak antar kabupaten/kota. Kota Bengkulu merupakan daerah dengan akses air

minum layak tertinggi di Provinsi Bengkulu yaitu mencapai 94,51 %. Sementara itu, pada Kabupaten Bengkulu Tengah, akses air minum layak baru dinikmati oleh 51,89 % rumah tangga. Sebaran Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 75 Perkembangan Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2022

No	Kabupaten/Kota	2017 (data awal)	2018	2019	2020	2021	2022
1	Bengkulu Selatan	67,27	49,54	65,85	45,78	58,22	65,00
2	Rejang Lebong	50,60	60,93	56,63	45,24	65,07	57,25
3	Bengkulu Utara	44,43	44,40	41,21	56,24	53,11	82,64
4	Kaur	62,34	62,15	66,42	79,40	86,20	83,94
5	Seluma	20,48	47,85	33,38	37,54	47,04	71,59
6	Mukomuko	66,43	62,66	53,32	79,41	75,99	75,73
7	Lebong	42,67	56,89	65,81	61,16	57,37	54,85
8	Kepahiang	61,55	67,18	46,19	63,82	62,65	61,81
9	Bengkulu tengah	56,92	55,73	44,82	49,32	63,06	51,89
10	Kota Bengkulu	87,87	86,92	85,16	88,77	92,21	94,51
Provinsi Bengkulu		58,02	61,22	57,60	62,47	67,39	73,07

Sumber: Dinas PUPR Provinsi Bengkulu

b. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak

Akses sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik atau sistem pengolahan air limbah (SPAL)/Sistem Terpusat. Akses aman merupakan bagian dari akses sanitasi layak, yaitu fasilitas sanitasi yang dimiliki oleh satu rumah tangga sendiri yang terhubung pada SPAL atau menggunakan tangki septik dengan jenis kloset leher angsa, yang disedot minimal 1x dalam jangka waktu 3-5 tahun dan dibuang ke IPLT. Perkembangan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 76 Perkembangan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak di Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2022

No.	Kab/Kota	Tahun				
		2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022
1	Bengkulu Selatan	58,15	40,39	77,57	78,18	84,09
2	Rejang Lebong	35,97	40,50	70,59	75,44	70,20
3	Bengkulu Utara	18,53	27,53	74,17	78,12	83,44
4	Kaur	47,30	54,78	77,04	77,78	81,23
5	Seluma	39,14	24,22	74,87	76,15	86,16
6	Mukomuko	50,94	49,84	76,73	77,55	79,12
7	Lebong	18,53	17,17	54,61	60,96	51,92
8	Kepahiang	7,62	8,75	68,66	71,49	64,58

No.	Kab/Kota	Tahun				
		2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022
9	Bengkulu Tengah	36,95	39,78	79,92	79,94	74,65
10	Kota Bengkulu	88,83	93,13	89,68	89,76	94,49
	Provinsi Bengkulu	n/a	75,91	78,1	79,81	79,58

Sumber: Bengkulu Dalam Angka 2023

c. Rumah Tangga yang Menempati Rumah Layak Huni

Rumah tangga dikatakan menempati rumah layak huni apabila memenuhi 4 (empat) kriteria yaitu, kecukupan luas tempat tinggal (sufficientliving space) minimal 7,2 per kapita, memiliki akses air minum dan sanitasilayak, serta memenuhi kriteria ketahanan bangunan (durable housing) yaituatap terluas berupa beton, genteng, seng dan kayu/sirap; dinding terluas berupa tembok, plesteran anyaman bambu/kawat, anyaman bambu dan batang kayu; dan lantai terluas berupa marmer/granit, keramik, parket/vinil/karpet, ubin/tegel/teraso, kayu/papan dan semen/bata merah. Perkembangan Rumah Tangga yang menempati Rumah Layak Huni di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 77 Perkembangan Rumah Tangga yang menempati RLH di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022
Rumah Tangga yang menempati RLH (%)	40,52	52,06	53,33	53,83	57,16

Dinas Perkim Provinsi Bengkulu

d. Luasan Kumuh di Provinsi Bengkulu

Pada dasarnya permukiman kumuh terdiri dari beberapa aspek penting, yaitu lahan, rumah, perumahan, komunitas, sarana dan prasarana dasar, yang terjalin dalam suatu sistem sosial, ekonomi dan budaya baik dalam suatu ekosistem lingkungan permukiman kumuh itu sendiri atau ekosistem kota. Permukiman kumuh harus dipandang secara utuh dan intégral dalam dimensi yang lebih luas. Beberapa dimensi permukiman kumuh yang senantiasa harus mendapat perhatian serius adalah permasalahan lahan di perkotaan, permasalahan prasarana dan sarana dasar, permasalahan sosial ekonomi, permasalahan sosial budaya, permasalahan tata ruang kota, permasalahan aksesibilitas.

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman telah mengamanahkan bahwa penyelenggaraan permukiman

layak dilaksanakan pemerintah pusat, pemerintah daerah atau setiap orang, untuk menjamin hak menempati lingkungan layak, sehat, aman, serasi dan teratur. Selain itu, pada UU tersebut juga menjelaskan jika terdapat dua bentuk penanganan permukiman kumuh yang dapat dilakukan, yaitu pencegahan dan peningkatan kualitas.

Luasan areal kumuh di provinsi Bengkulu berdasarkan SK kepala daerah masing-masing kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 78 Luasan areal kumuh di provinsi Bengkulu berdasarkan SK kepala daerah masing-masing kabupaten/kota

No.	SK Kepala Daerah	Luas	Jumlah
1	Kota Bengkulu No. 81 Tahun 2021		91,55 Ha
	Bentiring Permai	13,65 Ha	
	Kebun Tebeng	14,13 Ha	
	Panorama	13,99 Ha	
	Sumber Jaya	13,03 Ha	
	Lempuing	10,74 Ha	
	Tanah Patah	12,55 Ha	
	Teluk Sepang	13,46 Ha	
2	Kab. Kaur No. 188.4.45-706 Tahun 2018		66 Ha
	Nasal	10 Ha	
	Kaur Selatan	14 Ha	
	Kaur Tengah	11 Ha	
	Tanjung Kemuning	10 Ha	
	Kaur Utara	11 ha	
	Padang Guci	10 Ha	
3	Kab. Bengkulu Tengah No. 760-369 Tahun 2017		137,45 Ha
	Kembang Seri	11,24 Ha	
	Nakau	11,86 Ha	
	Taba Pasemah	13,45 ha	
	Harapan Makmur	11, 54 Ha	
	Dusun Anyar	10,55 Ha	
	Harapan	12,78 Ha	
	Rindu Hati	13,25 Ha	
	Pematang Tiga	13,68 Ha	
	Pematang Tiga Lama	10,78 Ha	
	Komering	14,65 Ha	
	Pungguk Beringin	13,67 Ha	
4	Kab Bengkulu Selatan No. 600/458 Tahun 2020		15, 20 Ha
	Kota Padang	15,20 Ha	
5	Kab Seluma No. 470-341 Tahun 2020		94,98 Ha
	Pasar Tais Blok 2	10,75 Ha	
	Puguk Blok 2	10,29 Ha	
	Tumbuan Blok 2	11,7 Ha	
	Talang Benuang Blok 1	10,94 Ha	
	Talang Benuang Blok 2	14,39 Ha	
	Air Periukan Blok 2	11,39 Ha	
	Cahaya Negeri Blok 1	13,03 Ha	

No.	SK Kepala Daerah	Luas	Jumlah
6	Mas Mambang Blok 1	12,49 Ha	67,5 Ha
	Kab Rejang Lebong No. 180-26.1 Tahun 2019		
	Pasar Baru	10, 54 Ha	
	Air Rumbai	12,94 Ha	
	Tanjung Dalam	10,22 Ha	
	Lubuk Kembang	13,80 Ha	
	Kepal Curup	10,00 Ha	
7	Bedeng SS	10,00 Ha	15,02 Ha
	Kab. Bengkulu Utara No. 660/730/BAPPEDA/ Th 2016		
	Lubuk Durian	15,02 Ha	

2.3.1.4. Kententraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Kinerja pelayanan umum wajib pelayanan dasar urusan Kententraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Bengkulu dapat dilihat melalui beberapa indikator sebagai berikut:

- a. Penanganan Kasus Pelanggaran Perda dan Ketertiban Umum

Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan satu kesatuan frase yang tidak dapat dipisahkan yang merupakan suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan didaerah secara berkesinambungan. Ketenteraman dan ketertiban umum merupakan prasyarat atau kebutuhan dasar dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Daerah bertanggungjawab sepenuhnya untuk menciptakan dan memelihara kondisi tersebut, dengan melibatkan peran serta stakeholder lainnya, termasuk seluruh warga masyarakat sebagai upaya membangun kesadaran yang baik. Terhadap perilaku tidak tertib dan juga kerawanan gangguan ketertiban yang dilakukan secara terus menerus sehingga akan diketahui pola ketidaktertiban yang berlangsung dalam hal ini mengetahui apa yang menjadi penyebab perilaku tidak tertib, apa yang menyebabkan sebagian masyarakat sering melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah, mengapa sebagian masyarakat mengabaikan peraturan daerah.

Perkembangan Penanganan Kasus Pelanggaran Perda dan Ketertiban Umum di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 79 Perkembangan Penanganan Kasus Pelanggaran Perda dan Ketertiban Umum di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022
Penanganan kasus pelanggaran Perda/Pergub (%)	30	30	50	20	20
Penanganan kasus pelanggaran Ketertiban Umum (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Satpol PP Provinsi Bengkulu 2023

b. Satuan Perlindungan Masyarakat

Satlinmas merupakan kekuatan utama dalam upaya perlindungan masyarakat pada saat terjadi bencana, pengungsi, kamtibmas dan sosial kemasyarakatan. Tugas dari Satlinmas adalah melaksanakan kegiatan perlindungan masyarakat dalam rangka penanggulangan dan penanganan pengungsi, membantu aparat pemerintah dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat serta membantu kegiatan sosial kemasyarakatan di desa/kelurahan. Perkembangan Rasio Satlinmas di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 80 Perkembangan Rasio Satlinmas di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022
Rasio Satlinmas (%)	61/10000 penduduk	61/10000 penduduk	61/10000 penduduk	61/10000 penduduk	n/a

Sumber: Satpol PP Provinsi Bengkulu.

*n/a = data belum tersedia/belum rilis

2.3.1.5. Sosial

Kinerja pelayanan umum wajib pelayanan dasar urusan Sosial di Provinsi Bengkulu kurun waktu tahun 2016-2021 dapat dilihat melalui beberapa indikator sebagai berikut:

a. Penanganan PMKS dan Fakir Miskin

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Penanganan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sudah seharusnya menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang

Kesejahteraan Sosial. Dalam UU tersebut dijabarkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup; memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Perkembangan Penanganan PMKS dan Fakir Miskin di Provinsi Bengkulu Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 81 Perkembangan Penanganan PMKS dan Fakir Miskin di Provinsi Bengkulu Tahun 2020

Nama Wilayah	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM)		Jumlah Anggaran (Rupiah)	
	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
Bengkulu Selatan	13.990	12.400	2.798.000.000	2.480.000.000
Rejang Lebong	21.740	22.915	4.348.000.000	4.583.000.000
Bengkulu Utara	22.957	23.541	4.591.400.000	4.708.200.000
Kaur	10.941	9.695	2.188.200.000	1.939.000.000
Seluma	15.373	14.392	3.074.600.000	2.878.400.000
Mukomuko	10.660	12.489	2.132.000.000	2.497.800.000
Lebong	7.932	8.454	1.586.400.000	1.690.800.000
Kepahiang	11.393	10.646	2.278.600.000	2.129.200.000
Bengkulu Tengah	8.113	9.998	1.622.600.000	1.999.600.000
Kota Bengkulu	20.447	18.775	4.089.400.000	3.755.000.000
Provinsi Bengkulu	143.546	143.305	28.709.200.000	28.661.000.000

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Bengkulu

b. Indeks Resiko Bencana

Kajian Risiko Bencana dilakukan dengan melakukan perhitungan pada komponen bahaya (hazard), kerentanan (vulnerabilities), dan kapasitas (capacities) di masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota. Komponen bahaya adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, dan lainnya. Komponen kerentanan adalah (1) kondisi fisik, (2) sosial budaya, (3) Ekonomi, dan (4) lingkungan yang rentan terpapar bencana. Sementara komponen kapasitas

adalah dari unsur ketahanan daerah seperti kelembagaan, kapasitas mitigasi, pencegahan, dan lainnya. Indeks Risiko Bencana ini bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana tiap-tiap Kabupaten/Kota di Indonesia. Perhitungan tingkat risiko di tiap Kabupaten/Kota dilakukan dengan memperhatikan faktor Hazard, Vulnerability, dan Capacity. Selanjutnya, disajikan tingkat risiko bencana di Kabupaten/Kota sesuai dengan bahaya yang dimiliki dan gabungan dari bahaya tersebut.

Perkembangan Indeks Resiko Bencana di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 82 Perkembangan Indeks Resiko Bencana di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022
Indeks Resiko Bencana	163,29	162,00	162,00	163,20	163,15

Sumber: BPBD Provinsi Bengkulu

2.3.2. Pelayanan Umum Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

2.3.2.1. Ketenagakerjaan

Sampai dengan rilis Sakernas Februari 2020, penghitungan indikator masih menggunakan penimbang dari proyeksi penduduk hasil Sensus Penduduk 2010 (SP2010). Penimbang adalah faktor perkalian sampel suatu survei untuk menghasilkan estimasi populasi penduduk. Pada tahun 2015, Badan Pusat Statistik melaksanakan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS 2015). Hasil SUPAS 2015 digunakan untuk menghitung proyeksi penduduk sampai dengan tahun 2045 dan mengoreksi proyeksi penduduk hasil SP2010. Dengan adanya koreksi tersebut, maka sejak Sakernas Agustus 2020 dan selanjutnya, penghitungan indikator akan menggunakan proyeksi penduduk hasil SUPAS 2015. Untuk menjaga keterbandingan, penyajian series data (tahun 2020 dan 2021) akan menggunakan penimbang dari proyeksi penduduk hasil SUPAS 2015.

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Provinsi Bengkulu. Penduduk usia kerja pada Agustus 2022 sebanyak 1.541.550 orang, naik sebanyak 21.120 orang dibanding Agustus 2021. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 69,81 persen (1.076.115 orang), sisanya termasuk bukan angkatan kerja.

Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2022 terdiri atas 1.037.496 orang penduduk yang bekerja dan 38.619 orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2021,

terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja sebanyak 54.340 orang. Penduduk bekerja mengalami peningkatan sebanyak 15.721 orang demikian halnya pengangguran juga mengalami penurunan sebanyak 140 orang. Sementara itu apabila dibandingkan kondisi Februari 2021 jumlah angkatan kerja juga mengalami penurunan sebanyak 7.650 orang. Penduduk bekerja mengalami penurunan sebanyak 5.900 orang demikian halnya pengangguran yang juga mengalami penurunan sebanyak 1.700-an orang.

Sejalan dengan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mempunyai pola yang serupa. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah. TPAK pada Agustus 2022 sebesar 69,81 persen, yaitu turun 0,6 persen poin dibanding Agustus 2021.

Tabel 2. 83 Perkembangan Ketenagakerjaan di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2022

Tenaga Kerja	2020		2021		2022	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
Penduduk Usia Kerja (000 jiwa)	1.489,12	1.499,57	1.510,61	1.520,43	...	1.541,55
Angkatan Kerja (000 Jiwa)	1.101,02	1.075,68	1.083,74	1.060,52	...	1.076,11
Bekerja (000 Jiwa)	1.067,13	1.031,88	1.043,41	1.021,78	...	1.037,49
Penganggur (000 Jiwa)	33,90	43,80	40,33	38,75	...	38,61
TPAK (%)	73,94	71,73	71,74	69,75	...	69,81
TPT (%)	3,08	4,07	3,72	3,65	...	3,59

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan penyerapan masing-masing sektor dari seluruh penduduk yang bekerja di pasar kerja Provinsi Bengkulu. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2022, tiga lapangan pekerjaan yang memiliki distribusi tenaga kerja paling banyak adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 48,16 persen; Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 40,57 persen; dan Administrasi Pemerintah sebesar 11,27 persen.

Tiga kategori lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan kontribusi terbesar jika dibandingkan dengan Agustus 2022 adalah Perdagangan Besar dan Eceran (0,48 persen poin); Administrasi Pemerintah (0,39 persen poin); dan Industri Pengolahan (0,31 persen poin). Sementara tiga lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan terbesar adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (1,09 persen poin); Jasa Lainnya (0,48 persen poin); dan Transportasi Pergudangan (0,19 persen poin). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan

kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2022 sebesar 3,59 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar tiga sampai empat orang penganggur. Pada Agustus 2022, TPT mengalami penurunan sebesar 0,06 persen poin dibandingkan Agustus 2021 sama halnya dengan Agustus 2020 mengalami penurunan sebesar 0,52 persen poin.

Berdasarkan Kabupaten/Kota, TPT tertinggi terjadi di Kota Bengkulu dengan TPT sebesar 6,35 persen dan Kabupaten Bengkulu Utara sebesar 4,16 persen. Sementara itu TPT terendah berada di Kabupaten Seluma (1,74 persen), Rejang Lebong (2,28 persen) dan Bengkulu Tengah (2,48 persen). Jika dilihat jumlah pengangguran, di Kota Bengkulu ada sebanyak 11.839 orang yang tergolong sebagai pengangguran, angka ini merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Bengkulu, disusul Kabupaten Bengkulu Utara sebanyak 6.606 orang.

Tabel 2. 84 Perkembangan Ketenagakerjaan di Provinsi Bengkulu menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022

Nama Wilayah	Bekerja	Pengangguran		Bukan Angkatan Kerja	Total (Angkatan Kerja)
		Jumlah	TPT (%)		
Bengkulu Selatan	99.420	3.621	3,51	33.193	103.041
Rejang Lebong	153.568	3.588	2,28	53.909	157.156
Bengkulu Utara	152.216	6.606	4,16	75.705	158.822
Kaur	65.546	2.612	3,83	26.222	68.158
Seluma	104.732	1.854	1,74	44.457	106.586
Mukomuko	84.566	2.674	3,07	51.850	87.240
Lebong	63.628	2.073	3,16	24.543	65.701
Kepahiang	78.696	2.366	2,92	27.790	81.062
Bengkulu Tengah	54.466	1.386	2,48	29.861	55.852
Kota Bengkulu	180.658	11.839	6,15	97.905	192.497
Provinsi Bengkulu	1.037.496	38.619	3,59	465.435	1.076.115

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, diolah

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaganya. Perkembangan Tenaga Kerja berdasarkan Jenjang Pendidikan di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 85 Penduduk Bekerja di Provinsi Bengkulu menurut Pendidikan Tahun 2018-2022

Pendidikan	2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022
<= SD	40,67	38,61	37,52	36,96	38,38
SMP	20,10	17,59	18,29	17,16	18,16
SMA & SMK	27,36	29,84	30,05	30,81	28,84
Universitas (Diploma >)	13,95	14,15	15,07	12,38	14,62

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu diolah.

Pada Agustus 2022, penduduk bekerja masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD ke bawah yaitu sebanyak 38,38 persen. Sedangkan tenaga kerja yang berpendidikan tinggi yaitu Diploma dan Universitas sebesar 14,62 persen. Kontribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama, baik pada Agustus 2021 maupun Februari 2022. Kementerian Ketenagakerjaan menggunakan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) untuk mengukur keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan nasional maupun di setiap daerah provinsi. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdapat 9 (sembilan) indikator utama yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan. Hasil indeks pada setiap indikator utama memberikan informasi mengenai kinerja mesin-mesin pembangunan ketenagakerjaan, termasuk informasi mengenai berbagai permasalahan dan tantangan ketenagakerjaan yang harus segera diselesaikan sehingga dapat diformulasikan berbagai kebijakan, strategi, dan program pembangunan ketenagakerjaan yang tepat guna mendekatkan Indonesia pada 4 (empat) tujuan utama pembangunan ketenagakerjaan.

2.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indeks Pembangunan Gender merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Perkembangan IPG di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 86 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022
IPG	91,37	91,19	91,00	91,16	91,36

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu

*n/a = data belum tersedia/belum rilis

Sebaran IPG kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu kurun waktu tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 87 Perkembangan IPG Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2022

No.	Kab/Kota	Indikator Data					
		2017 (data awal)	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kab. Bengkulu Selatan	93,74	94,08	94,05	94,14	94,31	91,36
2	Kab. Kaur	86,91	87,20	87,13	87,12	87,17	87,51
3	Kab. Seluma	85,20	85,28	85,32	85,65	85,93	86,16
4	Kota Bengkulu	96,36	96,55	95,97	95,67	95,77	96,07
5	Kab. Rejang Lebong	94,15	94,59	94,15	93,78	93,72	93,83
6	Kab. Kepahiang	94,69	95,20	95,32	95,80	95,73	96,11
7	Kab. Bengkulu Tengah	85,77	86,36	86,55	86,83	87,04	87,29
8	Kab. Lebong	90,64	90,99	91,49	91,60	91,86	92,19
9	Kab. Bengkulu Utara	91,00	91,19	91,25	91,23	91,39	91,39
10	Kab. Mukomuko	83,98	84,18	83,95	83,88	84,03	84,22

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, SIPD diolah.

Selain IPG, indeks lain yang digunakan untuk mengukur kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks Pemberdayaan Gender merupakan indeks yang digunakan untuk mengkaji lebih jauh peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Dimensi dari Indeks Pemberdayaan Gender mencakup partisipasi berpolitik direpresentasikan dengan keterwakilan perempuan dalam parlemen; Partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan direpresentasikan sebagai perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi, kepemimpinan dan ketatalaksanaan; serta penguasaan sumber daya ekonomi yaitu sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. Perkembangan IDG di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 88 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022
IDG	69,60	71,21	70,48	70,22	70,13

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu

Sebaran IDG kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu kurun waktu tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 89 Perkembangan IDG Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2021

No.	Kab/Kota	Indikator Data				
		2017 (data awal)	2018	2019	2020	2021 (data termutakhir)
1	Kab. Bengkulu Selatan	54,75	54,89	55,2	55,03	54,62
2	Kab. Kaur	61,86	66,25	62,13	61,17	61,72
3	Kab. Seluma	65,15	61,95	65,68	65,6	61,92
4	Kota Bengkulu	76,46	76,61	77,58	77,68	77,67
5	Kab. Rejang Lebong	61,73	61,99	64,71	64,82	65,70
6	Kab. Kepahiang	73,29	73,63	65,09	66,27	66,96
7	Kab. Bengkulu Tengah	70,15	73,8	76,71	76,78	77,10
8	Kab. Lebong	79,39	79,68	67,14	70,74	70,41
9	Kab. Bengkulu Utara	65,76	65,92	65,77	62,32	62,52
10	Kab. Mukomuko	61,32	61,4	56,78	56,48	56,26

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, SIPD diolah.

Tindak kekerasan dan trafiking merupakan suatu permasalahan lama yang kurang mendapatkan perhatian sehingga keberadaannya tidak begitu nampak dipermukaan padahal dalam prakteknya sudah merupakan permasalahan sosial yang berangsur-angsur menjadi suatu kejahatan masyarakat dimana kedudukan manusia sebagai objek sekaligus sebagai subyek. Selain masalah utama kurangnya upaya hukum pencegahan yang kuat bagi para pelaku, masalah ini juga didasari oleh lemahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk mengerti dan paham akan adanya bahaya yang ditimbulkan. Perkembangan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 90 Perkembangan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022
Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	kasus	137	161	126	147	n/a

Sumber: LAKIP DP3APPKB Provinsi Bengkulu.

*n/a = data belum tersedia/belum rilis

2.3.2.3. Ketahanan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan manusia sehingga ketersediaan pangan bagi masyarakat harus selalu terjamin. Dalam perkembangan peradaban masyarakat untuk memenuhi kualitas hidup yang maju, mandiri, dalam suasana tenteram serta sejahtera lahir dan batin semakin dituntut penyediaan pangan yang cukup, berkualitas dan merata. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas sumbangan energinya, baik secara absolut maupun relatif terhadap total energi baik dalam hal ketersediaan

maupun konsumsi pangan, yang mampu mencukupi kebutuhan dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa. Selain PPH, indikator yang menjadi rujukan kinerja ketahanan pangan adalah Angka Stabilitas Harga Pangan. Harga pangan baik ditingkat produsen maupun konsumen. Stabilitas harga pangan sangat dibutuhkan pemerintah untuk menjamin agar roda perekonomian terus berputar. Kenaikan harga pangan yang sulit diantisipasi dapat menimbulkan gejolak keresahan ditengah masyarakat.

Stabilitas harga pangan pada sisi produksi harus dijaga ketersediaannya, agar tidak terjadi kekurangan pasokan. Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) peningkatan produksi berada di Kementerian Pertanian. Namun produksi pertanian kita sangat rentan terhadap iklim dan gangguan cuaca. Jika cuaca mendukung terkadang harga pangan rendah akibat produksi melimpah, namun jika cuaca ekstrem seperti fenomena cuaca El Nino dan La Nina produksi terganggu dan harga pangan tinggi.

Tabel 2. 91 Perkembangan Ketahanan Pangan di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022
Indeks Ketahanan Pangan	Angka	-	-	-	69,94	65,74
Skor PPH Ketersediaan Pangan	Angka	80,29	84,24	82	86,52	89,66
Skor PPH Konsumsi Pangan	Angka	82,7	85,60	82,60	84,50	83,70
Persentase Tingkat Keamanan Pangan Segar	%	-	-	-	80	98

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu, 2022.

*n/a = data belum tersedia/belum rilis

Stabilitas harga pangan pada sisi konsumsi atau hilir terkait stabilitas harga kebutuhan pokok menjadi tupoksi terbesar Kementerian Perdagangan. Jika ke dua sisi produksi dan konsumsi berjalan pada relnya, sebenarnya harga kebutuhan pokok di pasaran sudah pasti stabil. Namun jika harga terus mengalami kenaikan, maka harus dilakukan pengecekan pada dua sisi tersebut. Ada kemungkinan sisi produksi memang bermasalah karena gagal panen atau memang distribusi yang terhambat akibat infrastruktur yang rusak.

2.3.2.4. Lingkungan Hidup

Selama ini untuk mengukur kualitas lingkungan umumnya dilakukan secara parsial berdasarkan media, yaitu air, udara, dan lahan sehingga sulit untuk menilai apakah kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah bertambah baik atau sebaliknya. Salah satu cara untuk mereduksi banyak data dan informasi adalah dengan menggunakan indeks. IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. IKLH Provinsi Bengkulu kurun waktu tahun 2018-2022

cenderung naik turun. Pada tahun 2020, IKLH tercatat sebesar 61,16 dan meningkat menjadi 71,48 pada tahun 2021. IKLH dibentuk oleh 3 (tiga) indikator yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Tutupan Lahan. Perkembangan kinerja Lingkungan Hidup di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 92 Perkembangan Lingkungan Hidup di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022
IKLH	Angka	74,32	62,52	61,16	71,48	70,82
Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	82,08	44,74	42,5	49,81	46,18
Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	91,63	92,69	90,52	90,81	91,27

Sumber: DLHK Provinsi Bengkulu.

IKLH Tahun 2020 menurun hingga menjadi 61,16. IKA Tahun 2020 terjadi penurunan diakibatkan oleh terjadinya bencana banjir di beberapa lokasi di seluruh kabupaten dalam Provinsi Bengkulu. IKU dari tahun 2018-2022 berada pada kualitas udara di level sedang, tetapi nilai numerik cenderung naik apabila tidak ada aksi mitigasi dalam rangka penurunan emisi akan menyebabkan kualitas udara akan naik ke level berikutnya yaitu tidak sehat.

2.3.2.5. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagaibukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang wajib memiliki KTP adalah Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 tahun ke atas atau telah kawin/ pernah kawin dan orang asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 tahun keatas (UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Seiring dengan pentingnya kepemilikan identitas berupa e-KTP, maka sejak tahun 2013 di Provinsi Bengkulu penerapan e-KTP sudah meliputi 10 Kabupaten/Kota. Berdasarkan data yang dihimpun dari dinas/instansi terkait, persentase penduduk yang memiliki KTP-el di Provinsi Bengkulu Tahun 2021 sudah mencapai 99,9%. Selain KTP-el, dokumen kependudukan yang harus dimiliki sesuai peraturan perundang-undangan adalah Kartu Identitas Anak dan Akta Kelahiran. Pada tahun 2021, cakupan kepemilikan KIA di Provinsi Bengkulu baru mencapai 390.513 anak dan kepemilikan Akta Kelahiran mencapai 927.829 anak pada tahun 2021.Perkembangan kinerja urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 93 Perkembangan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022
Persentase penduduk yang memiliki KTP-el	94,00	96,24	99,9	100	100
Persentase Kepemilikan KIA bagi Anak usia 0-16 tahun	7,00	27,61	49,5	68,5	64,73
Persentase Anak Usia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran	40,04	41,59	97,83	95,29	97,62

Sumber: Diskdukcapil Provinsi Bengkulu.

*n/a = data belum tersedia/belum rilis

Sebaran penduduk yang memiliki KTP-el kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu kurun waktu tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 94 Perkembangan Jumlah Penduduk yang Sudah Rekam KTP-elektronik Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2021

No.	Kab/Kota	Indikator Data				
		2017 (data awal)	2018	2019	2020	2021 (data termutakhir)
1	Kab. Bengkulu Selatan	102.216	109.984	113.193	115.612	118.424
2	Kab. Kaur	155.361	169.542	179.129	181.512	188.996
3	Kab. Seluma	177.708	189.845	195.479	200.813	205.620
4	Kota Bengkulu	68.316	77.518	82.061	84.704	87.619
5	Kab. Rejang Lebong	108.356	123.467	130.763	135.906	139.423
6	Kab. Kepahiang	114.590	121.259	124.342	127.539	130.336
7	Kab. Bengkulu Tengah	65.253	72.889	75.297	77.400	79.244
8	Kab. Lebong	87.715	93.382	96.916	98.649	101.057
9	Kab. Bengkulu Utara	69.234	76.638	77.826	80.676	82.850
10	Kab. Mukomuko	207.910	231.380	244.194	246.371	254.998
Provinsi Bengkulu		1.156.659	1.265.904	1.319.200	1.349.182	1.388.567

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu

Tabel 2. 95 Jumlah Kepemilikan Dokumen Kependudukan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	Dokumen Kependudukan			
		KTP	KIA	Akta Kelahiran	KK
1	Bengkulu Selatan	118.424	29.190	77.709	51.962
2	Rejang Lebong	188.996	43.259	123.628	89.435
3	Bengkulu Utara	205.620	52.338	124.425	93.697
4	Kaur	87.619	25.634	56.856	39.850
5	Seluma	139.423	64.597	96.254	68.543
6	Mukomuko	130.336	41.446	96.318	56.686
7	Lebong	79.244	27.933	50.570	36.525
8	Kepahiang	101.057	27.419	63.505	47.443
9	Bengkulu Tengah	82.850	23.268	53.690	37.354
10	Kota Bengkulu	254.998	55.429	184.874	109.975
Provinsi Bengkulu		1.388.567	390.513	927.829	631.652

Sumber: Bengkulu Dalam Angka

2.3.2.6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh Kepala Desa. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Tujuannya untuk memampukan desa dalam melakukan tindakan bersama sebagai suatu kesatuan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan ditingkat pemerintah desa, masyarakat desa, maupun pihak lain untuk mendorong partisipasi mendayagunakan kemampuan masyarakat desa dalam proses pembangunan desa, menyusun perencanaan pembangunan yang berpihak pada kelompok miskin, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas sumberdaya manusia di desa. Berikut ini tercantum perkembangan kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Provinsi Bengkulu, periode tahun 2018 – 2022.

Tabel 2. 96 Perkembangan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022
Indeks Desa Membangun	Nilai	0,62	0,6246	0,6417	0,6559	0,6748
Jumlah Desa Tertinggal	Desa	403	285	290	213	142
Jumlah Desa Sangat Tertinggal	Desa	13	5	5	2	1

Sumber: Kemendes

Indeks Desa Membangun Provinsi Bengkulu pada Tahun 2022 sebesar 0,6748 nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,02 dari Tahun 2021. Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan dana desa serta pendamping desa.

2.3.2.7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor yang penting dalam masalah sosial ekonomi umumnya dan masalah penduduk pada khususnya. Karena di samping berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk juga akan berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi suatu daerah atau negara maupun dunia. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan penduduk yang dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk (migrasi). Dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk, pemerintah terus berupaya menggalakan program KB.

Program keluarga berencana (KB) merupakan program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk. Tujuan Program keluarga berencana yang dicanangkan oleh pemerintah adalah agar keluarga sebagai unit terkecil kehidupan bangsa diharapkan menerima Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) yang berorientasi pada pertumbuhan yang seimbang. Perkembangan kinerja urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 97 Perkembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022
TFR	Angka	2,34	2,39	2,44	2,30	2,35
Unmeet Need KB	%	7,5	10	12,10	12,50	12,20
Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR	%	64,6	68,05	10,05	65,00	66,40

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, BKKBN Provinsi Bengkulu.

TFR Provinsi Bengkulu pada tahun 2022 sebesar 2,35 meningkat dari tahun 2021 yang sebesar 2,30. TFR (Total Fertility Rate) adalah rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya. TFR digunakan sebagai indikator untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. Berdasarkan data tersebut, berarti bahwa wanita (usia 15-49 tahun) secara rata-rata mempunyai 2-3 anak selama masa usia suburnya. TFR yang tinggi merupakan cerminan rata-rata usia kawin yang rendah, tingkat pendidikan rendah terutama wanitanya dan tingkat sosial ekonomi rendah (tingkat kemiskinan tinggi). Selain itu, pada tahun 2022 tercatat sebesar 12,20 % keinginan Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap suatu jenis alat kontrasepsi yang tidak tersedia sehingga mereka mengambil keputusan tidak menggunakan alat atau metode kontrasepsi. Hal ini juga tercermin dari menurunnya m-CPR yang menjadi 66,40% pada tahun 2022 dari sebelumnya 65,00% pada tahun 2021.

2.3.2.8. Perhubungan

Peranan pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan Indonesia. Konektivitas dalam pembangunan perlu dilakukan agar Indonesia tidak menjadi negara yang bubar. Untuk mencapai konektivitas diperlukan koordinasi yang dijalankan secara

sebaik-baiknya agar pembangunan infrastruktur merata di seluruh Indonesia. Diantaranya dengan pembangunan infrastruktur di sektor perhubungan. Mengingat Indonesia adalah negara kepulauan. Pembangunan transportasi dalam negeri harus dibangun secara berkelanjutan Hal ini agar kelestarian lingkungan dapat terjaga walaupun bermunculan titik-titik perekonomian baru di daerah. Pembangunan transportasi secara berkelanjutan akan menjangkau kebutuhan dan akses dari masyarakat lebih luas. Dengan begitu, manfaat moda transportasi mampu mendukung pengembangan ekonomi baru bagi masyarakat setempat. Keberhasilan ekonomi juga diyakini sangat tergantung pada bagaimana layanan transportasi mampu mendukung dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi dunia usaha domestik.

Perkembangan kinerja urusan Perhubungan di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 98 Perkembangan Perhubungan di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022
Persentase Pemenuhan Fasilitas Kelengkapan Jalan	96,39	92,35	9,69	48,75	75
Persentase Pemenuhan Jasa Pelayanan Pelabuhan penyeberangan	90,49	82,52	54,7	55,84	58,50

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu.

2.3.2.9. Komunikasi dan Informasi

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Good governance akan terlaksana dengan baik apabila ada pengawasan publik, sehingga pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatanrakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dalam rangka meningkatkan kapasitas layanan informasi, memberdayakan potensi masyarakat serta kerjasama lembaga komunikasi dan informatika, Dinas Kominfotik Provinsi Bengkulu terus berupaya meningkatkan pengetahuan, kecerdasan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan komunikasi

dan informatika dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik. Hal ini untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan keterbukaan informasi dan tranparansi. Selain itu pola pikir masyarakat yang semakin maju dan berkembang akan semakin menuntut berbagai informasi yang dibutuhkan. Adapun strategi yang dijalankan adalah meningkatkan diseminasi informasi melalui pendayagunaan media informasi untuk mengurangi kesenjangan informasi. Semakin tingginya implementasi keterbukaan informasi publik mengindikasikan keterbukaan atau transparansi yang diberikan badan public kepada masyarakat berjalan dengan baik. Hal tersebut nantinya akan memberikan keuntungan baik bagi masyarakat maupun badan publik. Keterbukaan atau transparansi memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan peran serta mereka dalam penyelenggaraan negara, sedangkan bagi badan publik memberikan peluang untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi sebagai good governance.

Perkembangan kinerja urusan Komunikasi dan Informasi di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 99 Perkembangan Komunikasi dan Informasi di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022
Indeks SPBE	1,8	2,4	2,9	2,79	3,11
Indeks Keterbukaan Informasi Publik	40	70	88,2	76,67	79,10

Sumber: Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bengkulu.

Evaluasi SPBE Tahun 2022 dinilai berdasarkan Evaluasi Mandiri yang dilakukan evaluator internal instansi Pusat/Pemerintah Daerah dimana pada tahun 2022 Indeks SPBE sebesar 3,11 yang meningkat dari tahun sebelumnya dimana tahun 2021 sebesar 2,79. Hal ini menunjukkan semakin banyak implementasi aplikasi-aplikasi e-government yang digunakan oleh OPD dan kemudahan layanan pemerintah kepada pengguna sesuai dengan fungsi masing-masing dan adanya kebijakan-kebijakan/regulasi-regulasi yang mendukung penerapan Teknologi Informasi dan komunikasi.

2.3.2.10. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Posisi UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran penting dan strategis. Kondisi ini sangat dimungkinkan karena keberadaan UMKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia. UMKM setelah krisis ekonomi terus meningkat dari tahun ke tahun. Ini juga membuktikan bahwa UMKM mampu bertahan di tengah krisis ekonomi. UMKM juga terbukti menyerap tenaga kerja yang lebih besar dalam perekonomian nasional. Dengan banyaknya pekerja yang terserap, sektor UMKM

mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan demikian UMKM dianggap memiliki peran strategis dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Untuk kontribusi dan peran UMKM, penting bagi pemerintah untuk terus mendukung UMKM melalui penguatan sehingga peran mereka sebagai pilar dalam membangun ekonomi bangsa dapat berjalan optimal. Pembangunan sektor Koperasi dan UMKM di Provinsi Bengkulu terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2022, jumlah UKM di Provinsi Bengkulu meningkat menjadi 226.471, untuk koperasi yang sudah bersertifikasi sebanyak 547 tahun 2022. Saat ini, UMKM telah berkembang pesat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi sehingga UMKM lebih banyak bergerak melalui start up maupun media sosial.

Tabel 2. 100Perkembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022
Jumlah UMKM	UMKM	42.481	46.417	n/a	51.674	226.471
Jumlah Koperasi Aktif dan bersertifikat NIK	Koperasi	355	481	532	544	583
Volume Usaha Koperasi	Rupiah	338.493.455.389	397.099.367.206	458.776.060.393	471.101.413.083	386.116.229.398

Sumber: KUKM Provinsi Bengkulu

2.3.2.11. Penanaman Modal

Izin Prinsip adalah perizinan usaha pertama dari lembaga pemerintah yang harus dimiliki oleh setiap investor saat hendak memulai investasi di Indonesia. Untuk investor baru, diharuskan mengurus Izin Prinsip untuk memulai usaha baru dalam ruang lingkup penanaman modal PMDN atau PMA. Beberapa hal yang termasuk di dalamnya adalah pembuatan izin investasi, pemesanan nama perusahaan, pembuatan akta, pembuatan NPWP perusahaan, tanda daftar perusahaan, izin mengerjakan tenaga asing, dan lain-lain.

Kemudahan ijin investasi akan mempengaruhi nilai investasi disuatu daerah. Investasi atau penanaman modal adalah suatu penanaman modal yang diberikan oleh perseorangan atau perusahaan atau organisasi baik dalam negeri maupun luar negeri. Faktor yang dapat mempengaruhi investasi yang dijadikan bahan pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya, antara lain: Pertama faktor Sumber Daya Alam, Kedua faktor Sumber Daya Manusia, Ketiga faktor stabilitas politik dan perekonomian, guna menjamin kepastian dalam berusaha, Keempat faktor kebijakan pemerintah, Kelima faktor kemudahan dalam perizinan.

Kemudahan ijin investasi akan mempengaruhi nilai investasi disuatu daerah, Investasi atau penanaman modal adalah suatu penanaman modal yang diberikan oleh perseorangan atau perusahaan atau organisasi baik dalam negeri maupun luar

negeri, Faktor yang dapat mempengaruhi investasi yang dijadikan bahan pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya, antara lain : Pertama faktor Sumber Daya Alam, Kedua faktor Sumber Daya Manusia, Ketiga faktor stabilitas politik dan perekonomian, guna menjamin kepastian dalam berusaha, Keempat faktor kebijakan pemerintah, Kelima faktor kemudahan dalam perizinan.

Perkembangan kinerja urusan Penanaman Modal di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 101 Perkembangan Penanaman Modal di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022
Indeks Kepuasan Masyarakat bidang perizinan	89,21	89,39	89,44	89,49	89,60
Nilai Investasi	6,7	7,6	8,1	5,3	7,7

Sumber: DPMPTSP Provinsi Bengkulu

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan di Provinsi Bengkulu terus meningkat, Pada Tahun 2022, IKM Bidang Perizinan adalah sebesar 89,60 meningkat dari tahun 2021 yang sebesar 89,49. Selain itu, Nilai Investasi juga meningkat dari tahun 2021 sebesar 5,3 triliun rupiah menjadi 7,7 triliun pada tahun 2022.

2.3.2.12. Kepemudaan dan Olahraga

Pemuda merupakan penerus perjuangan generasi terdahulu untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Pemuda menjadi harapan dalam setiap kemajuan di dalam suatu bangsa, Pemuda lah yang dapat merubah pandangan orang terhadap suatu bangsa dan menjadi tumpuan para generasi terdahulu untuk mengembangkan suatu bangsa dengan ide-ide ataupun gagasan yang berilmu, wawasan yang luas, serta berdasarkan kepada nilai-nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Jumlah pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan di Provinsi Bengkulu terus meningkat. Pemuda binaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu terus meningkat dari sebesar 56 orang pada tahun 2016 menjadi 120 orang pemuda pada tahun 2020.

Olahraga adalah suatu aktivitas fisik yang bersifat positif yang dapat menyehatkan jasmani maupun rohani serta dapat mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Oleh sebab itu olahraga seharusnya dilakukan oleh umat manusia, dan pemerintah harus berperan untuk menjadikan olahraga sebagai ajang kompetisi dan prestasi. Setiap orang yang berolahraga tidak mempunyai tujuan yang sama, ada yang hanya untuk mencari kebugaran dan bagi

seorang atlet tujuan utama berolahraga ialah ingin mendapatkan prestasi yang tinggi, sering disebut dengan prestasi olahraga. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 5 (lima) nomor lomba olahraga yang dimenangkan di tingkat nasional. Perkembangan kinerja urusan Kepemudaan dan Olahraga di Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 102Perkembangan Kepemudaan dan Olahraga di Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017 (data awal)	2018	2019	2020	2021 (data termutakhir)
Jumlah Pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan	Orang	160	113	120	120	n/a
Jumlah Nomor Lomba Olahraga yang dimenangkan tingkat nasional	Nomor	5	4	5	5	n/a

Sumber: Dispora Provinsi Bengkulu
 *n/a = data belum tersedia/belum rilis

2.3.2.13. **Statistik**

Data ialah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan suatu pengolahan. Data bisa berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, obyek, kejadian ataupun suatu konsep. Data statistik yang lengkap, akurat dan tepat waktu yang sangat dibutuhkan dalam penyusunan perencanaan, baik itu instansi pemerintah maupun swasta/ investor. Jumlah perangkat daerah yang menyediakan data statistik sektoral terus meningkat menjadi 34 perangkat daerah pada tahun 2022.

Perkembangan kinerja urusan Statistik di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 103Perkembangan Statistik di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022
Jumlah Perangkat Daerah yang menyediakan statistik sektoral	26	30	32	34	34

Sumber: Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bengkulu

2.3.2.14. **Persandian**

Persandian memang identik dengan kerahasiaan, karena informasi yang disampaikan perlu diamankan dan harus sampai pada tujuan, sehingga jangan sampai gagal. Setiap warga negara Indonesia memiliki kebebasan untuk mengakses informasi seperti yang tertuang dalam Undang-undang keterbukaan informasi publik, bukan berarti kebebasan itu tanpa batas, akan tetapi informasi itu haruslah diamankan untuk menjaga stabilitas negara. Pemanfaatan ilmu dan teknologi

persandian dapat digunakan untuk menjamin keamanan informasi, karena itu perlu adanya payung hukum yang mengamankan informasi berklasifikasi. Salah satu misi dari Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Bengkulu adalah meningkatkan aplikasi, muatan layanan publik, standarisasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta pemanfaatan jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Ini merupakan suatu harapan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pemanfaatan TIK, menyediakan hosting dan colocation, membangun data center dalam rangka meningkatkan pelayanan publik berbasis TIK di era keterbukaan informasi. Selain itu Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Bengkulu meningkatkan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi (TIK) dalam pengamanan informasi.

Berdasarkan data dari Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Bengkulu bahwa penilaian audit persandian dilaksanakan mulai Tahun 2018 dengan capaian pada Tahun 2020 pada tingkat Cukup dengan nilai 66,35 untuk indek Pesandian. Untuk Tahun 2021 dan 2022 pengukuran indeks Persandian di ganti dengan CSM Indeks dengan nilai 2,27 tahun 2021 dan meningkat pada tahun 2022 dengan nilai 2,37.

2.3.2.15. Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan di Provinsi Bengkulu sudah menunjukan kinerja yang baik, yang diukur dengan Indeks Pembangunan Kebudayaan. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan suatu instrumen yang disusun bersama antara Kemendikbud, Kementerian PPN/Bappenas, dan Badan Pusat Statistik untuk mengukur capaian pembangunan kebudayaan. Instrumen ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Terdapat 31 indikator penyusun indeks tersebut yang dirangkum dalam tujuh dimensi pengukuran ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi, dan gender. Adapun metodologi dan sumber data dikembangkan untuk menghitung angka IPK secara nasional dan 37 provinsi di Indonesia. Pada Tahun 2018, Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Bengkulu mencapai sebesar 59,95%, capaian tertinggi ke-empat nasional.

Perkembangan kinerja urusan Kebudayaan di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 104 Perkembangan Kebudayaan di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022
Indeks Pembangunan Kebudayaan	59,95	61,13	56,59	54,56	(n/a)

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu

*n/a = data belum tersedia/belum rilis

2.3.2.16. Perpustakaan

Minat baca masyarakat adalah suatu cermin sikap dari masyarakat terhadap kemauan untuk mengetahui segala sesuatu informasi melalui media baca. Ditinjau dari segi pengamatan global tentang minat baca masyarakat, secara kasar sebenarnya masyarakat Provinsi Bengkulu minat bacanya cukup tinggi. Hal ini bisa dilihat dari antusias masyarakat terhadap pemanfaatan perpustakaan, taman bacaan, sudut baca, rumah baca dan sejenisnya selalu ramai dikunjungi masyarakat. Perkembangan kinerja urusan Perpustakaan di Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 105Perkembangan Perpustakaan di Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2021

Indikator	Tahun				
	2017 (data awal)	2018	2019	2020	2021 (data termutakhir)
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah	24.619	25.040	27.681	29.490	15.314

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu

2.3.2.17. Kearsipan

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Arsip sangatlah penting karena berfungsi untuk penunjang aktivitas informasi, dan wahana komunikasi. Perkembangan kinerja urusan Kearsipan di Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 106Perkembangan Kearsipan di Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2021

Indikator	Tahun				
	2017 (data awal)	2018	2019	2020	2021 (data termutakhir)
Persentase arsip statis dan dinamis yang terkumpul	28.050	28.200	28.570	29.550	27.296

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu

2.3.3. Pelayanan Umum Urusan Pilihan

2.3.3.1. Kelautan dan Perikanan

Sub sektor perikanan di Provinsi Bengkulu memiliki potensi yang cukup besar, terutama perikanan laut. Hal ini disebabkan letak wilayah Provinsi Bengkulu yang sebagian besar menghadap ke Samudera Hindia dengan panjang pantai yang diperkirakan sekitar 525 km, dengan luas Laut Teritorial sebesar 53.000 km2 dan luas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yaitu batas jarak 12-200 mil laut dari pantai dengan

luas sebesar 685.000 km2. Sebagai daerah maritim, sektor kelautan dan perikanan menjadi komoditas utama Provinsi Bengkulu. Perkembangan kinerja urusan Kelautan dan Perikanan di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 107 Perkembangan Kelautan dan Perikanan di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022
Produksi Perikanan Tangkap	Ton	69,10	38,15	65,75	35,31	41,64
Produksi Perikanan Budidaya	Ton	122.801	271.709	227.683	112.203	113.918

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu.

2.3.3.2. Pariwisata

Seiring dengan semakin menipisnya cadangan sumber daya alam yang menjadi tumpuan industri ekstraktif, maka pemerintah dipandang perlu untuk segera mengembangkan sektor lain yang terbarukan untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Pariwisata dianggap menjadi sektor yang cukup potensial untuk dikembangkan selain karena mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, juga cukup strategis bagi suatu negara atau daerah karena pariwisata dipandang sebagai penunjang sektor lainnya. Sektor pariwisata memiliki peran yang penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan kepariwisataan Bengkulu beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Perkembangan pariwisata ditandai dengan kemajuan di bidang transportasi dan telekomunikasi yang semakin memberikan kemudahan bagi mobilitas manusia dan pergerakan lintas negara, provinsi, serta kabupaten/kota.

Dalam mengukur perkembangan sektor pariwisata di Provinsi Bengkulu, wisatawan yang berkunjung ke Provinsi Bengkulu terus meningkat menjadi 1.682.470 orang wisman pada tahun 2022 dibandingkan 1.043.722 orang wisman pada tahun 2021. Kemudian rata-rata lama menginap pada tahun 2022 yaitu sebesar 1,43 hari dan tingkat hunian hotel mencapai 51,43%. Perkembangan kinerja urusan Pariwisata di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 108 Perkembangan Pariwisata di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022
Jumlah wisatawan	orang	2.155.241	2.057.651	456.708	1.043.722	1.682.470
Rata-rata Lama Menginap	hari	1,62	1,71	1,8	2,5	1.43
Persentase Tingkat Hunian Hotel	%	70,29	72,05	67,97	46,36	51,43

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu

Penurunan pada jumlah total kunjungan Provinsi Bengkulu ini terjadi akibat banyaknya pembatasan aktivitas perjalanan yang ditetapkan negara-negara di dunia akibat pandemi Covid-19. Pemerintah daerah telah merencanakan upaya pemulihan dalam sektor pariwisata ini dengan menumbuhkan kepercayaan pada wisatawan dikarenakan adanya lack of trust. Salah satu upaya dari Kemenparekraf yaitu telah disusunnya protokol Cleanliness, Healthy, Safety and Environment (CHSE) demi meningkatkan kembali kepercayaan wisatawan dan pariwisata nasional.

2.3.3.3. Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor utama yang berperan penting pada perekonomian nasional dalam menyerap tenaga kerja, sumber pertumbuhan ekonomi, dan penyumbang devisa. Di samping itu, sektor pertanian juga menggerakkan sektor lain dalam perekonomian nasional. Sektor pertanian berperan penting dalam perekonomian Provinsi Bengkulu karena merupakan sektor utama yang memberikan peranan terbesar dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada tahun 2022 peranan sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Bengkulu adalah 27,69 persen. Dengan nilai nominal 24,95 triliun rupiah (Atas Dasar Harga Berlaku). Cakupan kegiatan pertanian terdiri dari beberapa jenis kegiatan yaitu pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian, kehutanan dan penebangan kayu serta perikanan.

Provinsi Bengkulu juga mempunyai keragaman produksi tanaman hortikultura seperti sayuran dan buah-buahan. Selain sayuran dan buah-buahan, juga terdapat tanaman hias dan tanaman biofarmaka. Jenis tanaman hias yang ada antara lain anggrek, krisan, mawar, dan sedap malam. Sedangkan jenis tanaman biofarmaka yang menghasilkan antara lain jahe, kencur, lengkuas, dan kunyit. Pada sektor perkebunan, dukungan luas wilayah dan kondisi lahan di Provinsi Bengkulu terhadap komoditas tanaman perkebunan menjadikan wilayah ini banyak yang dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan. Selain dikelola oleh perusahaan pemerintah (Perkebunan Nusantara), terdapat juga perkebunan yang dimiliki dan dikelola rakyat. Komoditi yang dihasilkan antara lain kelapa sawit, karet, kopi, dan lain-lain. Data perkebunan rakyat yang ditampilkan adalah data tahun 2022 yang bersumber dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Bengkulu.

Pada sektor peternakan, hewan ternak dibagi dalam dua kelompok yaitu ternak besar dan ternak kecil serta unggas. Hewan yang masuk kategori ternak besar adalah sapi perah, sapi, kerbau, dan kuda. Sedangkan hewan yang masuk kategori ternak kecil dan unggas adalah kambing, domba, babi, itik, ayam ras, dan ayam kampung. Secara

umum, populasi ternak besar mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Perkembangan kinerja urusan Pertanian di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 109Perkembangan Pertanian di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022
Produksi padi	Ton GKG	288.811	296.472	290.413	272.773	290,156
Produksi jagung	TON PK	117.998	175.132	141.680	83.115	103.706
Produksi bawang merah	Kwintal	9.105	5.234	5.197	990	6430
Produksi cabai merah	Kwintal	397.936	378.118	114.926	48.868	863.057
Produksi kopi	Ton	61.591	61.528	62.759	62.215	56.029
Produksi karet	Ton	99.842	99.261	101.246	113.521	90.109
Produksi sawit	Ton	735.766	776.593	799.891	727.269	730.789
Jumlah produksi daging sapi	Ton	2.471,90	2.587,40	3.149,00	2.753	2.616
Jumlah Produksi daging kambing	Ton	99,90	94,90	114,40	102	176
Jumlah produksi daging unggas	Ton	8.057,90	14.083,80	13.881,80	16.451	13.282

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Pertanian Provinsi Bengkulu, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu, 2021. *n/a = data belum tersedia/belum rilis

2.3.3.4. Kehutanan

Hutan merupakan salah satu komponen yang penting dalam ekosistem. Selain berfungsi sebagai penjaga tata air, hutan juga mempunyai fungsi mencegah terjadinya erosi tanah, mengatur iklim, dan tempat tumbuhnya berbagai plasma nutfah yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuna dan teknologi. Perhitungan indeks tutupan hutan merupakan perbandingan langsung antara luas hutan dengan luas wilayah administratif kota. Luasan lahan kritis pada tahun 2022 sebesar 713.985 Ha, Luasan Lahan kritis berkurang karena adanya kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, dan pemberdayaan masyarakat, tetapi kegiatan dalam rangka penurunan lahan kritis belum begitu luas. Laju deforestasi berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu pada tahun 2021 cenderung menurun diakibatkan oleh kurangnya kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, pemberdayaan masyarakat melalui program perhutanan sosial, serta pemeliharaan batas kawasan hutan.

Tabel 2. 110Perkembangan Kehutanan di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022
Indeks Tutupan Lahan	Nilai	55,52	53,25	53,15	55,52	55,19
Luas Lahan Kritis	Ha	719,384.59	716,284.59	713.985	713.985	524.709
Laju Deforestasi	Nilai	0,96	0,23	0,22	0,045	n/a

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu.

*n/a = data belum tersedia/belum rilis

2.3.3.5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Peranan subsektor ini dalam perekonomian Provinsi Bengkulu sangat kecil. Selama kurun waktu 2018-2022 kontribusi subsektor listrik dalam PDRB kurang dari 1 persen per tahun. Pembangunan infrastruktur kelistrikan dalam upaya untuk mencukupi kebutuhan listrik di Provinsi Bengkulu terus diupayakan, baik melalui peningkatan kinerja pembangkit listrik tenaga diesel yang telah ada, penambahan mesin pembangkit listrik baru, serta melalui pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Kinerja Perusahaan Listrik Negara (PLN)cabang Bengkulu pada kurun waktu 2018-2022 relatif meningkat. Hal itu terlihat dari jumlah desa yang dialiri listrik pada tahun 2022 sebanyak 1511 desa, meningkat dari tahun sebelumnya.

Ketersediaan pasokan listrik merupakan salah satu faktor utama yang menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan pada berbagai sektor perekonomian (industri, perdagangan, dan sebagainya). Pengukuran ketersediaan pasokan listrik salah satunya dapat diketahui melalui nilai Rasio Elektrifikasi (RE). Rasio Elektrifikasi merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga yang sudah teraliri listrik dengan total rumah tangga. Sementara itu subsektor pertambangan juga merupakan subsektor yang kecil peranannya dalam perekonomian Provinsi Bengkulu seperti terlihat dari relatif rendahnya peranan subsektor pertambangan dalam PDRB Provinsi Bengkulu. Selama waktu 2018-2022 peranan subsektor pertambangan dalam PDRB rata-rata berkisar di 3 persen saja pertahun. Rendahnya peranan subsektor pertambangan dalam perekonomian disebabkan belum optimalnya eksploitasi bahan-bahan tambang yang terkandung di bumi Provinsi Bengkulu. Perkembangan kinerja urusan Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 111Perkembangan Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022
Rasio Elektrifikasi	94,88	99,99	99,99	99,04	99,61
Persentase Luas lahan Reklamasi	55,82	51,73	69,24	n/a	n/a

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu.

*n/a = data belum tersedia/belum rilis

Sebaran Rasio Elektrifikasi kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu kurun waktu tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 112Perkembangan Rasio Elektrifikasi Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022

No.	Kab/Kota	Indikator Data				
		2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022
1	Kota Bengkulu	100.00	99.73	99.78	99.78	99.94
2	Bengkulu Utara	99.22	99.24	99.58	99.29	99.85
3	Bengkulu Selatan	82.45	98.45	98.24	99.25	99.84
4	Kaur	97.11	97.62	99.31	98.36	99.76
5	Rejang Lebong	88.88	99.45	99.57	99.48	99.90
6	Seluma	89.47	99.82	100.00	99.99	99.06
7	Mukomuko	94.28	99.72	100.00	99.99	100.00
8	Kepahiang	100.00	91.18	91.21	92.28	98.44
9	Lebong	85.00	99.99	100.00	99.99	99.44
10	Bengkulu Tengah	100.00	99.99	100.00	99.99	100.00

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu

2.3.3.6. Perdagangan

Provinsi Bengkulu mempunyai potensi yang cukup besar dalam perdagangan luar negeri melalui ekspor berbagai komoditas, khususnya komoditas yang berasal dari sumber daya alam. Komoditas ekspor Provinsi Bengkulu antara lain cangkang sawit, CPO (Crude Palm Oil), batubara dan karet. Pada tahun 2022, total nilai ekspor mencapai 311,22 juta US\$. Jumlah ini meningkat signifikan sebesar 30,71% dibandingkan total nilai ekspor pada tahun 2021. Apabila ditinjau dari nilai ekspornya, batubara merupakan komoditas utama ekspor Provinsi Bengkulu, dengan nilai ekspor 261,85 juta US\$ atau 84,14 persen dari total ekspor, kemudian diikuti komoditas Karet 13,86 persen.

Berdasarkan pelabuhan muatnya, proporsi total nilai ekspor Provinsi Bengkulu terbesar disalurkan melalui pelabuhan Pulau Baai, yaitu sebesar 184,30 juta US\$ atau sebesar 59,22 persen terhadap keseluruhan ekspor dari Provinsi Bengkulu. Ekspor yang disalurkan melalui pelabuhan Teluk Bayur di Provinsi Sumatra Barat memiliki total nilai sebesar 34,49 juta US\$ atau 16,53 persen, menempati urutan kedua di bawah Pelabuhan Pulau Baai. Hal ini secara umum menunjukkan capaian pemerintah daerah dalam melakukan langkah-langkah optimalisasi ataupun peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelabuhan di Provinsi Bengkulu, sehingga tetap menjadikan pelabuhan pulau baii sebagai sarana utama ekspor impor. Perkembangan kinerja urusan Perdagangan di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 113Perkembangan Perdagangan di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022
Nilai Ekspor	US (dolar)	275,25	271,89	208,55	238,10	311,22
Nilai Perdagangan Besar dan Eceran	Rupiah (Milyar)	8.860,94	10.909,72	10,593	11.457	12.631

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu, 2020.

*n/a = data belum tersedia/belum rilis

2.3.3.7. Perindustrian

Sektor Industri merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam pembangunan nasional. Kontribusi sektor Industri terhadap pembangunan nasional dari tahun ke tahun menunjukkan kontribusi yang signifikan. Setiap wilayah memiliki potensi dan keunggulan sektoral yang menjadi basis perekonomian dalam mendorong pertumbuhan wilayah. Tak terkecuali Provinsi Bengkulu yang menjadikan industri kecil menengah dan industr besar dan sedangsebagai basis pertumbuhan ekonomi. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan mendorong pengembangan wilayah wilayah tertentusebagai pusat pertumbuhan kegiatan industri.

Pengembangan wilayah-wilayah tersebut diharapkan selain dapat sebagai kegiatan ekonomi utama (prime mover) juga dapat memberikan efek ganda (multipliereffect) terhadap tumbuhnya sektor sektor yang lain. Perkembangan kinerja urusan Perindustrian di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 114Perkembangan Perindustrian di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022
Jumlah Industri Kecil Menengah	IKM	6.048	6.491	6.491	6.491	6.491
Jumlah industri Sedang dan Besar	Industri	40	41	41	44	61

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu.

Sebaran Industri Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu kurun waktu tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 115Perkembangan Industri Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022

No.	Kab/Kota	Tahun				
		2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022
1	Kab. Bengkulu Selatan	369	470	470	470	470
2	Kab. Kaur	238	349	349	349	349
3	Kab. Seluma	665	660	660	660	660
4	Kota Bengkulu	611	707	707	707	707
5	Kab. Rejang Lebong	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
6	Kab. Kepahiang	303	329	329	329	329
7	Kab. Bengkulu Tengah	348	362	362	362	362

No.	Kab/Kota	Tahun				
		2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022
8	Kab. Lebong	689	638	638	638	638
9	Kab. Bengkulu Utara	1.003	1.035	1.035	1.035	1.035
10	Kab. Mukomuko	812	931	931	931	931

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu

2.3.3.8. Transmigrasi

Pembangunan transmigrasi sekarang lebih kepada bagaimana mengembangkan suatu kawasan. Maka dari itu perlu adanya perubahan upaya-upaya bagaimana membangun transmigrasi. Pemerintahan saat ini sangat mendukung Program Transmigrasi. Salah satu dukungan pemerintah tersebut telah dibuktikan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi. Hal ini menandakan keseriusan Pemerintah dalam menangani program transmigrasi yang secara nyata memberikan kontribusi dalam menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Seperti halnya teknologi yang terus berkembang sesuai jaman, transmigrasi juga mengalami transformasi dalam menjalankan kegiatannya, yang dikenal dengan Transpolitan 4.0. Transmigrasi bukan lagi untuk menjawab permasalahan distribusi penduduk, namun untuk menjawab pemerataan pertumbuhan berbasis pembangunan wilayah yang didukung dengan teknologi informasi.

Dengan arah kebijakan pokok pembangunan berbasis kewilayahan dalam kurun waktu 2020-2024. Fokus transmigrasi saat ini adalah untuk pemenuhan NSPK pada permukiman dan kawasan transmigrasi, revitalisasi terhadap kawasan yang sudah dibangun, dan mengembangkan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) melalui program kemitraan serta TORA di kawasan transmigrasi. Hal ini untuk memastikan keberhasilan transmigrasi melalui kolaborasi pemerintah dan swasta dalam pengembangan produk unggulan untuk kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya. Pemerintah dalam penyelenggaraan transmigrasi juga menargetkan perubahan paradigma baru terkait pengembangan transmigrasi bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang mental spiritual, bidangkelembagaan dan bidang pengelolaan Sumber Daya Alam. Pembangunan fisik di permukiman atau kawasan transmigrasi harus seiring dengan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Target tersebut diarahkan untuk mencapai kesejahteraan, kemandirian, integrasi transmigran dengan penduduk sekitar dan kelestarian fungsi lingkungan secara berkelanjutan.

Di Provinsi Bengkulu, terdapat 5 kawasan transmigrasi di Provinsi Bengkulu yaitu, di Kabupaten Bengkulu Utara yaitu kawasan transmigrasi Lagita dan Enggano, di

Kabupaten Kaur yaitu kawasan transmigrasi Muara Sahung/Maje, di Kabupaten Rejang Lebong yaitu kawasan transmigrasi Padang Ulak Tanding dan di Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu kawasan transmigrasi Kedurang. Perkembangan kinerja urusan Transmigrasi di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 116Perkembangan Transmigrasi di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022
Jumlah kawasan transmigrasi yang dikembangkan	Kawasan	5	5	5	5	5

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu

2.3.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

2.3.4.1. Kesekretariatan Daerah

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (OUTCOME). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai SAKIP Provinsi Bengkulu terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, Nilai SAKIP Provinsi Bengkulu 69,30.

LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat. Laporan ini menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah, untuk itu Kementerian Dalam Negeri RI menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan. Pemerintah Daerah harus mengisi realisasi capaian masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut. Kinerja yang terbaik bukan ditetapkan berdasarkan standard, melainkan melalui proses perbandingan antara Pemerintah Daerah, jadi bisa saja terjadi yang terbaik diantara yang terjelek dalam pengisian realisasi capaian masing-masing.

Selain itu untuk mengukur keberhasilan dalam pelaksanana Grand Design Reformasi Birokrasi dilakukan penilaian Indeks Reformasi Birokrasi. Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi ini berisi uraian atau penjabaran dari kriteria dan ukuran keberhasilan sebagaimana termuat di dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025dan Peratuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20

Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014. Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dimana uang tidak hanya efektif & efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi bengkulu terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, Indeks Reformasi Birokrasi di Provinsi Bengkulu mencapai 63,61 meningkat dari tahun 2020 yang sebesar 63,34.

Perkembangan kinerja urusan Kesekretariatan Daerah di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 117Perkembangan Kesekretariatan Daerah di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022
Nilai SAKIP	66,04	68,48	68,98	69,92	69,30
Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	60,18	60,52	63,34	63,61	n/a

Sumber: Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu

2.3.4.2. Kesekretariatan DPRD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPRD, DPD dan DPRD, salah satu fungsi DPRD adalah fungsi legislasi. Arti penting fungsi legislasi DPRD diantaranya bersama kepala daerah merupakan fungsi pembuat Perda. Yang mana Perda menentukan arah pembangunan dan pemerintahan di daerah. Perda sebagai dasar perumusan kebijakan publik di daerah. Perda sebagai kontrak sosial di daerah. Perda sebagai pendukung pembentukan perangkat daerah dan susunan organisasi perangkat daerah. Sedangkan penguatan Fungsi Legislasi, pada pasal 95 ayat (1) PP Nomor 25 tahun 2004 tentang Pedoman Tata Tertib DPRD disebutkan bahwa: "DPRD memegang kekuasaan membentuk Perda". Untuk mendukung pelaksanaan fungsi legislasi tersebut, pada pasal 24 PP Nomor 37 tahun 2005 dikemukakan ketentuan sebagai berikut:

- i. Bahwa belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD. Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan pimpinan DPRD

- ii. Rencana kerja DPRD dapat berupa kegiatan diantaranya rapat, kunjungan kerja, penyiapan rancangan peraturan daerah, pengkajian dan penelaahan peraturan daerah, peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme, dan koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.

Perkembangan kinerja urusan Kesekretariatan DPRD di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 118Perkembangan Kesekretariatan DPRD di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022
Jumlah Raperda yang ditetapkan menjadi Perda	Raperda	16	11	10	7	8

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu

2.3.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

2.3.5.1. Perencanaan

Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka mencapai kondisi yang lebih baik dibandingkan keadaan sebelumnya. Proses pembangunan dilaksanakan melalui optimalisasi sumberdaya dengan tetap menjaga kesinambungan serta kualitas lingkungan yang baik. Optimalisasi sumberdaya mempunyai arti bahwa pembangunan diharapkan dapat mendayagunakan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia agar memiliki nilai kemanfaatan lebih baik bagi masyarakat. Sedangkan kesinambungan dan kualitas lingkungan yang baik tidak hanya mengenai lingkungan alam namun juga lingkungan sosial, budaya dan politik. Pencapaian tujuan pembangunan dilaksanakan secara bertahap, mulai dari tahapan yang bersifat jangka panjang, menengah dan tahunan.

Proses pembangunan setiap tahunnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, harus dimulai dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju.

Dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dibutuhkan koordinasi antar instansi pemerintah serta partisipasi seluruh pelaku pembangunan dan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran. Dalam pelaksanaannya, koordinasi tersebut diwadahi dalam sebuah mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dimulai dari Tingkat

RT/RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi hingga Nasional yang dilaksanakan setiap Tahun untuk mengidentifikasi dan menentukan prioritas kebijakan pembangunan yang kemudian dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah untuk Pemerintah Pusat dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi/Kab/Kota.

Perkembangan kinerja urusan Perencanaan Daerah di Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 119Perkembangan Perencanaan Daerah di Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun					
	2017 (data awal)	2018	2019	2020	2021	2022
Nilai Perencanaan Kinerja	23,41	23,51	23,9	24,19	24,34	22,28
Nilai Pengukuran Kinerja	14,7	14,88	15,09	15,17	15,37	20,10

Sumber: Bappeda dan Litbang Provinsi Bengkulu

2.3.5.2. Keuangan

Provinsi Bengkulu memantapkan komitmennya untuk mencapai good governance dalam pengelolaan pemerintahan. Kerja keras ini membuahkan hasil dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pencapaian hasil audit BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Bengkulu mampu di pertahankan dengan predikat WTP selama 5 tahun terakhir.

PAD merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi daerah. PAD merupakan hal penting dalam mengukur kemandirian keuangan daerah. Semakin besar peranan PAD dalam APBD, maka dapat disimpulkan bahwa peranan pemerintah pusat, dalam hal ini transfer dana ke daerah semakin kecil. PAD dalam APBD Provinsi Bengkulu terus meningkat dari sebesar 795 miliar rupiah pada tahu 2021 menjadi 967 miliar rupiah pada tahun 2022. Perkembangan kinerja urusan Keuangan Daerah di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 120Perkembangan Keuangan Daerah di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022
Opini Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Nilai PAD	Rupiah	993.830.272.071	1.188.157.367.507,36	1.116.839.955.121,65	795.804.050.141,90	967.957.037.971

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bengkulu

2.3.5.3. Kepegawaian

Profesionalitas dalam birokrasi adalah sesuatu hal yang sudah tidak bisa ditawarkan lagi. Karena dengan profesional, birokrasi dapat ciptakan kinerja yang efektif dan efisiensi menuju layanan pemerintahan yang semakin berkualitas. Indeks Pengukuran

Profesionalitas (IPP) ASN yang saat ini digunakan oleh Badan Kepegawaian Negara sebagai pembina dan penyelenggara manajemen kepegawaian adalah dengan metode composite index. Indikator yang digunakan, antara lain: kompetensi, kompensasi, disiplin dan kinerja. Adapun premis indikator profesionalitas ASN adalah (individu) pegawai akan semakin profesional apabila kompetensinya semakin tinggi, kinerjanya semakin baik, organisasinya semakin modern dan pegawai yang semakin bersih. Data-data yang digunakan harus bersinggungan dengan individu karena profesionalitas dihitung berdasarkan individu. Penyusunan indeks profesionalitas ASN adalah suatu hal yang sangat penting untuk mengetahui potensi setiap ASN dalam pendidikan, pengalaman, pelatihan teknis dan kepemimpinannya agar disesuaikan dengan rencana pengembangan SDM yang jelas. Perkembangan kinerja urusan Kepegawaian di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 121 Perkembangan Kepegawaian di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022
Indeks Profesionalitas ASN	n/a	50,03	71,92	73,87	74,50

2.3.5.4. Pendidikan dan Pelatihan

Tujuan penyelenggaraan diklat adalah membentuk aparatur sipil negeri (ASN) yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas sebagai pelayan masyarakat. Saat ini tercatat sebanyak 25% Diklat yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Bengkulu dengan predikat Akreditas A. Kedepan, ditargetkan seluruh Diklat yang diselenggarakan akan memiliki predikat akreditasi A. Perkembangan kinerja urusan Pendidikan dan Pelatihan di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 122 Perkembangan Pendidikan dan Pelatihan di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016 (data awal)	2017	2018	2019	2020 (data termutakhir)
Persentase Diklat yang berkreditasi A	%	25%	25%	25%	n/a	n/a
Persentase jabatan struktural yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan	%	Eselon II: 27 Eselon III: 50 Eselon IV: 35	Eselon II: 30 Eselon III: 87 Eselon IV: 61	Eselon II: 42 Eselon III: 71 Eselon IV: 62	Eselon II: 42 Eselon III: 60 Eselon IV: 60	Eselon II: 70 Eselon III: 90 Eselon IV: 75

2.3.5.5. Penelitian dan Pengembangan

Peningkatan daya saing antar daerah merupakan agenda yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, inovasi dalam pembangunan yang berjalan secara komprehensif serta terjadinya kolaborasi antar aktor pembangunan merupakan faktor kunci peningkatan daya saing. Pengembangan

sistem inovasi daerah (SIDa) merupakan salah satu strategi utama dalam sistem inovasi nasional yang mewadahi proses interaksi antara komponen penguatan sistem inovasi. Pada tahun 2019, nilai Indeks Inovasi Daerah Provinsi Bengkulu adalah sebesar 280 sesuai dengan Kepmendagri No.002.6-5848 Tahun 2021 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2021. Perkembangan kinerja urusan Penelitian dan Pengembangan di Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 123Perkembangan Penelitian dan Pengembangan di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022
Nilai Indeks Inovasi Daerah	280	280	52.69	57,93	48,57

Sumber: Bappeda dan Litbang Provinsi Bengkulu

2.3.5.6. Penghubung

Salah satu upaya pemerintah daerah dalam melakukan promosi keunggulan daerah adalah melalui promosi potensi daerah di pusat ibukota. Badan Penghubung Provinsi Bengkulu memiliki anjungan di Taman Mini Indonesia Indah sebagai wadah promosi dan edukasi budaya dan potensi Bengkulu. Jumlah pengunjung anjungan Bengkulu di TMII tercatat sebesar 11.885 orang pada tahun 2021 dan Tahun 2022 sudah tercatat sebanyak 23.700 orang pengunjung. Perkembangan kinerja urusan Penghubung di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 124Perkembangan Penghubung di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022
Jumlah Pengunjungan Anjungan Bengkulu di TMII	101.683	128.957	13.750	11.885	23.700

Sumber: Badan Penghubung Provinsi Bengkulu

2.3.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

2.3.6.1. Pengawasan

Dengan adanya komitmen pemerintah untuk mewujudkan good governance maka kinerja atas penyelenggaraan organisasi pemerintah menjadi perhatian pemerintah untuk dibenahi, salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif, dengan meningkatkan peran dan fungsi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Pengawasan intern ini dilakukan mulai dari proses audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Untuk itu, APIP harus terus melakukan transformasi dalam menjalankan tugasnya guna memberi nilai tambah bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan fungsi dan peran APIP, yaitu melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (risk management), pengendalian (control) dan tata kelola (governanc) organisasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Maksud pengawasan dan pemeriksaan itu dalam rumusan yang sederhana adalah untuk memahami dan menemukan apa yang salah demi perbaikan di masa mendatang. Hal itu sebetulnya sudah menjadi hal yang lumrah dan harus dilaksanakan oleh semua pihak baik yang mengawasi maupun pihak yang diawasi termasuk masyarakat awam. Sedangkan tujuan pengawasan itu adalah untuk meningkatkan kinerja dan mendayagunakan para aparatur sipil negara (ASN) dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government).

Seiring dengan semakin kuatnya tuntutan dorongan arus reformasi ditambah lagi dengan semakin kritisnya masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi, maka rumusan pengawasan yang sederhana itu tidaklah cukup. Masyarakat mengharapkan lebih dari sekedar perbaikan kesalahan, melainkan harus diminta pertanggungjawaban kepada yang bersalah.

Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah berperan sebagai Quality Assurance yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan organisasi. Titik berat pelaksanaan tugas "pengawasan dan pemeriksaan" adalah melakukan tindakan preventif yaitu mencegah terjadinya kesalahan kesalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) serta memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah terjadi untuk dijadikan pelajaran agar kesalahan-kesalahan tersebut tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Perkembangan kinerja urusan Pengawasan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 125Perkembangan Pengawasan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017 (data awal)	2018	2019	2020	2021 (data termutakhir)
Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan	%	66,81	60,61	64,99	59,43 (Semester I Tahun 2020)	73,84
Tingkat Maturitas SPIP	Level	Level 2	Level 2	Level 2	Menuju Level 3 (dalam proses QA BPKP)	Level 2,8875
Tingkat Kapabilitas APIP	Level	Level 2	Level 2	Level 2	Menuju Level 3 (dalam proses QA BPKP)	Level 2,8875
Indeks Persepsi Korupsi	Nilai	63,77	66,47	n/a	n/a	n/a

Sumber: Inspektorat Provinsi Bengkulu

*n/a = data belum tersedia/belum rilis

2.3.7. Unsur Pemerintahan Umum

2.3.7.1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh pemerintah. Namun, untuk mengukur pencapaiannya baik di tingkat daerah maupun pusat bukan sesuatu hal yang mudah. Pembangunan demokrasi memerlukan data empirik untuk dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat. IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu adalah Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga-lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). Poleksosbud (Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya) adalah sebuah kesatuan dari beberapa aspek yang bisa menjadi sebuah potensi besar bagi Bangsa Indonesia. Peran dan efektifitas pemantauan perkembangan situasi terkait Poleksosbud harus terus dijaga yaitu dengan melakukan langkah perbaikan yang konkrit serta efektif demi perbaikan kualitas bangsa secara menyeluruh. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan kunci stabilitas daerah dan nasional. Strategisnya kedudukan Kesbangpol dalam stabilitas keamanan tersebut, Kesbangpol diharapkan turut mencermati dinamika dan perkembangan yang ada, serta turut andil dalam menghadapi tantangan bangsa. Tak hanya persoalan radikalisme dan terorisme, menurut Tjahjo, Kesbangpol juga turut dapat mengambil peranan dalam memberantas Narkoba yang mengancam generasi bangsa. Dalam hal membumikan

Pancasila, Kesbangpol harus bersinergi dengan pemangku kepentingan lain, Forkopimda termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan lainnya, termasuk dalam mencermati dinamika dan persoalan yang ada.

Perkembangan kinerja urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 126Perkembangan Kesatuan Bangsa dan Politik di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022
Rasio Stabilitas Kesatuan Bangsa	Nilai	0,63	0,63	0,65	0,67	Pengukuran batas 2021
Indeks Demokrasi	%	70,71	78,79	72,20	72,73	73,23

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah yang dimilikinya. Daya saing (competitiveness) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah karena akan bertumpu pada aspek-aspek kemampuan ekonomi daerah, penciptaan iklim berinvestasi, ketersediaan fasilitas wilayah/infrastruktur pendukung, dan ketersediaan sumberdaya manusia bagi pengembangan usaha.

2.4.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (attractiveness) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan multiplier effect bagi peningkatan daya saing daerah. Indikator yang mengukur Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah direspresentatifkan dengan indikator sebagai berikut:

- a) Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibanding

dengan barang/jasa yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga. Jika NTP lebih besar dari 100 maka periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar, sebaliknya jika NTP lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani. Perhitungan dan intepretasi data yang sama berlaku juga untuk Nilai Tukar Nelayan.

Perkembangan Nilai Tukar Petani dan Nelayan di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 127 Perkembangan Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022
NTP	%	94,01	104,82	114,07	132,56	134,16
NTN	%	97,56	97,88	99,25	100,34	n/a

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu

*n/a = data belum tersedia/belum rilis

b) Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan. Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan. Pengeluaran per kapita penduduk di Provinsi Bengkulu terus meningkat hingga mencapai Rp.10.840.000 yang artinya, secara rata-rata pengeluaran penduduk Provinsi Bengkulu selama setahun adalah Rp.10.840.000. Perkembangan Pengeluaran per Kapita di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 128 Perkembangan Pengeluaran per Kapita di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran per Kapita	ribu rupiah	10.162	10.409	10.380	10.487	10.840

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu.

2.4.2. Daya Saing SDM

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaganya. Perkembangan Fokus Sumber Daya Manusia di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 129 Perkembangan Fokus Sumber Daya Manusia di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022
Persentase Tenaga kerja dengan tingkat pendidikan SLTA ke atas	39,23	43,79	44,19	45,88	43,46

2.4.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

Daya saing suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas infrastruktur yang dibangun. Provinsi Bengkulu sebagai provinsi yang secara geografis terletak di paling barat Sumatera memiliki potensi yang untuk menjadi beranda baru di pesisir barat. Provinsi Bengkulu berbatasan langsung dengan 4 provinsi besar di Sumatera, serta berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Secara geografis, Provinsi Bengkulu sangatlah strategis karena memiliki potensi kerjasama di Afrika dan Asia Selatan, serta dapat menjadi jalur Tol Laut Indonesia. Saat ini Provinsi Bengkulu sedang gencar untuk mensejajarkan diri dengan provinsi lain di Indonesia, melalui pembangunan infrastruktur strategis yang berkelanjutan.

Saat ini tercatat ada 18 pembangkit listrik di Provinsi Bengkulu. Pembangkit Listrik sangat berperan penting dalam peningkatan daya saing infrastruktur dikarenakan menjadi suplai energi untuk produksi. Provinsi Bengkulu memiliki PLTP Hulu Lais berkekuatan 2 x 55 MW dan PLTU Pulau Baai dengan kapasitas 2 x 100 MW. Dengan

banyaknya pembangkit listrik, maka surplus listrik di Bengkulu akan dapat disalurkan sebagai interkoneksi Pulau Sumatera.

Energi yang potensial dikembangkan di Provinsi Bengkulu adalah energi kelistrikan, baik yang berasal dari pembangkit listrik tenaga air skala besar (PLTA), pembangkit listrik tenaga skala mikro hidro (PLTMH), pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), dan pembangkit listrik tenaga geothermal (PLTG). Sistem tenaga listrik Provinsi Bengkulu terdiri dari Sistem Interkoneksi 150 kv dan 70 kV serta sistem isolated. Pasokan utama sistem tenaga listrik Provinsi Bengkulu berasal dari sistem interkoneksi Sumbagselteng melalui transmisi 150 kV dan 70 kV. Provinsi Bengkulu memiliki potensi energi primer yang terdiri dari batubara yang diperkirakan mencapai 192,10 juta ton, panas bumi yang diperkirakan potensinya mencapai 1.362 MWE yang tersebar pada 5 lokasi antara lain tembang Sawah, B. Gedung Hulu Lais, Lebong Simpang, Suban Ayam dan Kepahiang/G. Kaba, serta tenaga air dilokasi tersebar.

Total DMN pembangkit tenaga listrik yang ada di Provinsi Bengkulu tahun 2018 adalah sekitar 272 MW yang didominasi oleh pembangkit perusahaan PT PLN (Persero) sekitar 269 MW (99%), dan Non PT PLN (Persero) sekitar 3 MW (1%). Adapun berdasarkan jenisnya, DMN pembangkit tersebut didominasi oleh PLTA sekitar 247 MW (90,7%), PLTD sekitar 16 MW (5,9%), PLTMH sekitar 6 MW (2,2%), PLTBg sekitar 3 MW (1,1%), dan PLTS sekitar 0,3 MW (0,1%). Konsumsi energi listrik di Provinsi Bengkulu tahun 2018 mencapai sekitar 913 GWh dengan komposisi konsumsi per sektor pemakai didominasi oleh sektor rumah tangga sekitar 669 GWh (73%), bisnis sekitar 120 GWh (13%), publik sekitar 71 GWh (8%), dan industri sekitar 53 GWh (6%). Adapun rasio elektrifikasi tahun 2018 mencapai sekitar 99,96%.

Sebaran pembangkit listrik di Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 5Sebaran Pembangkit Listrik di Provinsi Bengkulu

Sumber: RUPTL PLN 2019-2028

Selain pembangkit listrik, saat ini Provinsi Bengkulu tengah berfokus kepada pengembangan infrastruktur strategis. Adapun infrastruktur strategis tersebut adalah:

- 1) Pembangunan Jalan Tol Bengkulu – Lubuk Linggau;
- 2) Pengembangan Pelabuhan Pulau Baai sebagai Kawasan industri;
- 3) Pengembangan Bandara Fatmawati dan Bandara Enggano;
- 4) Pembangunan jalur KA Bengkulu – Lubuk Linggau yang merupakan bagian dari Trans Sumatera Railway;
- 5) Pembangunan SPAM Regional Benteng KOBEMA;
- 6) Pembangunan Jalan Trans Enggano;
- 7) Rehabilitasi Pelabuhan Malakoni dan Kahyapu.

Perkembangan Fokus Fasilitas Infrastruktur di Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 130Perkembangan Fokus Fasilitas Infrastruktur di Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Pembangkit Listrik yang dikembangkan	unit	18	18	18	18	18
Jumlah Infrastruktur Strategis yang dikembangkan	Proyek Strategis	5	5	5	5	7

Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu, diolah dari berbagai sumber.

2.4.4. Daya Saing Iklim Investasi

Iklim investasi pada suatu daerah harus ramah dan aman. Investor harus mempercayai suatu daerah memiliki prospek investasi yang bagus serta daerah mampu menjamin keamanan dalam berinvestasi. Pada tahun 2022, nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMA) di Provinsi Bengkulu mencapai angka Rp. 192.289 M US\$. Ribu dengan total proyek investasi sebanyak 102 proyek tahun 2020. Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Bengkulu terus mengalami peningkatan menjadi Rp. 6.9 Triliun pada tahun 2022 dengan 636 proyek.

Tabel 2. 131 Perkembangan Investasi Penanaman Modal Asing di Provinsi Bengkulu Tahun 2020 – 2022

Sektor	2020 (data awal)		2021		2022	
	Proyek	Investasi (US\$. Ribu)	Proyek	Investasi (US\$. Ribu)	Proyek	Investasi (US\$. Ribu)
Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	31	3.368,90	-	-	-	-
Pertambangan	9	51,7	-	-	-	-
Industri Makanan	23	7.701,60	-	-	-	-
Industri Kimia Dan Farmasi	2	0	-	-	-	-
Industri Karet dan Plastik			-	-	-	-
Industri Mineral Non Logam			-	-	-	-
Listrik, Gas dan Air	9	180.644,20	-	-	-	-
Perdagangan dan Reparasi	19	496,9	-	-	-	-
Hotel dan Restoran	1	0,2	-	-	-	-
Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	4	0	-	-	-	-
Jasa Lainnya	4	26,3	-	-	-	-
Total Bengkulu	102	192.289,80	-	-	-	-

Sumber: https://nswi.bkpm.go.id/data_statistik

Tabel 2. 132 Perkembangan Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri di Provinsi Bengkulu Tahun 2020 – 2022

Sektor	2020 (data awal)		2021		2022	
	Proyek	Investasi (Rp. Juta)	Proyek	Investasi (Rp. Juta)	Proyek	Investasi (Rp. Juta)
Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	61	1.148.843,70	29	1456395,3	37	1.621.035,30
Perikanan	8	30.480,00			1	64,7
Pertambangan	7	289.946,40	10	52336	11	95.782,60
Industri Makanan	48	246.275,80	15	430496,6	42	1.891.775,20
Industri Kayu			28	815900,4	26	915.683,80

Sektor	2020 (data awal)		2021		2022	
	Proyek	Investasi (Rp. Juta)	Proyek	Investasi (Rp. Juta)	Proyek	Investasi (Rp. Juta)
Industri Kertas dan Percetakan			2	0	2	5
Industri Kimia Dan Farmasi	2	22	3	600	2	202
Industri Karet dan Plastik	11	376.058,40	6	65441,6	6	140.388,70
Industri Mineral Non Logam			4	1550	14	9.118,90
Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	4	5.685,70	1	0	0	0
Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	2	429,3	1	12,6	0	0
Industri Lainnya	1	0	7	319	1	157.689,30
Listrik, Gas dan Air	44	492.715,90	22	337678,6	11	490.905,30
Konstruksi	8	1.556.992,40	36	949717,3	63	220.744,20
Perdagangan dan Reparasi	173	166.159,20	233	273766,9	273	367.416,10
Hotel dan Restoran	21	93.152,80	35	187178	31	289.391,40
Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	14	60.032,30	22	58883,3	39	482.874,60
Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	14	114.546,60	55	180857	24	71.246,30
Jasa Lainnya	58	817.838,10	49	112324,7	53	202.986,60
Total Bengkulu	476	5.399.178,60	558	4,923,457.3	636	6.957.310,00

Sumber: https://nswi.bkpm.go.id/data_statistik

Selain itu, rasa aman merupakan variabel yang sangat luas karena mencakup berbagai aspek dan dimensi, mulai dari dimensi politik, hukum, pertahanan, keamanan, sosial, dan ekonomi. Statistik dan indikator yang biasa digunakan untuk mengukur rasa aman masyarakat merupakan indikator negatif, misalnya jumlah angka kejahatan (crime total), jumlah orang yang berisiko terkena tindak kejahatan (crime rate) setiap 100.000 penduduk. Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin banyak tindak kejahatan pada masyarakat yang merupakan indikasi bahwa kondisi masyarakat menjadi semakin tidak aman. Statistik kriminalitas di Provinsi Bengkulu dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2. 133 Statistik Kriminalitas di Provinsi Bengkulu Tahun 2018 – 2021

Aspek Kriminal	2018 (data awal)	2019	2020	2021 (data termutakhir)
Kejahatan yang dilaporkan	3.389	3.453	3.333	3.493
Kejahatan yang diselesaikan (clearance rate)	83,59	67,54	68,35	46,81
Resiko Penduduk terkena kejahatan per 100.000 penduduk (Crime rate)	175	179	172	177

Sumber: Statistik Kriminal.

Penyelesaian kasus kejahatan di Provinsi Bengkulu pada tahun 2018 – 2021 menunjukkan tren meningkat dari sebesar 83,59% pada tahun 2018 menurun menjadi 46,81% pada tahun 2021. Begitu juga dengan Crime rate atau Resiko Penduduk terkena kejahatan per 100.000 penduduk, menunjukkan tren menurun dari 179 pada tahun 2019 menjadi 177 pada tahun 2021. Dengan capaian keberhasilan menekan kriminal, maka akan meningkatkan daya saing Provinsi Bengkulu.

Upaya untuk memenuhi dan menciptakan rasa aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang turut memengaruhi keberhasilan pembangunan nasional. Terciptanya dan terpenuhinya keamanan pada masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas termasuk aktivitas ekonomi. Kondisi ini pada skala makro akan menciptakan stabilitas nasional yang merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Perkembangan Fokus Iklim Investasi di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 134Perkembangan Fokus Iklim Investasi di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018 (data awal)	2019	2020	2021	2022
Persentase pertumbuhan investasi	%	211,6	13,43	6,57	-34,56	45,28
Crime Rate	Nilai	175	179	172	177	n/a

Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu, diolah dari berbagai sumber.

2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

2.5.1. Ketercapaian Target RPJPD 2005-2025

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian 2022	2025 (Proyeksi Capaian)	Tingkat Capaian Kinerja
MISI 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang menguasai IPTEK dan IMTAQ	Sasaran pokok 1: Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Religius	Angka Partisipasi Sekolah (%):					
		- 16-18 Tahun	59,63	82,26	79,31	82,30	100,00
		Angka Rata-rata Lama Sekolah (thn)	8,25	10,78	8,91	9,39	87,11
		Persentase Penduduk 15 ke Atas Yang Buta Huruf (%)	4,07	1,08	2,20	1,50	100,00
		Rasio guru terhadap murid:					
		- SMA/MA	0,083	0,164	0,093	0,06	35,87

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian 2022	2025 (Proyeksi Capaian)	Tingkat Capaian Kinerja
		Angka harapan hidup (tahun)	69,90	77,61	69,69	71,70	92,39
		Angka kematian ibu (jiwa)	220	102	95	89,00	87,25
		Angka kematian bayi (jiwa)	22,70	14,90	9,00	8,00	53,69
		Rasio puskesmas per 10.000 penduduk	1	4,13	0,87	1,00	24,21
		Rasio puskesmas pembantu per 10.000 penduduk	2,51	10,33	1,91	1,94	18,80
		Rasio dokter per 10.000 penduduk	2,93	4,06	6,10	6,13	100,00
		Jumlah kasus kriminal	3.716	1.812	4163	3330,00	100,00
		Jumlah tempat ibadah (buah)	2.898	5.062	4460	5129,00	100,00
		Jumlah jama'ah haji (orang)	1.367	1.900	742	1963,20	100,00
Misi 2: Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas, merata dan bermanfaat	Sasaran Pokok 2: Meningkatkan akses, pemerataan dan kualitas infrasruktur sesuai standar yang berlaku	Persentase jaringan jalan nasional dalam kondisi baik/sedang (%)	55	93	87,43	93,99	100,00
		Persentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi baik/sedang (%)	21,00	91,00	57,25	66,25	72,80
		Jumlah Rumah tangga Pelanggan PLN (rt)	226.970	380.254	514.632	522.351	100,00
		Luas areal sawah beririgasi (teknis, semi teknis, sederhana)	58,467	60,834	33.698	38.753	63,70
		Rumah tangga yang menggunakan air bersih/PDAM (Pelanggan)	52,968	88.740	90.696	129.096	100,00
Misi 3: Mewujudkan	Sasaran Pokok 3: Tercapainya	Pertumbuhan ekonomi (%)	6,1	7,15	4,31	6,00	83,92

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian 2022	2025 (Proyeksi Capaian)	Tingkat Capaian Kinerja	
perekonomian yang berdaya saing tinggi	struktur perekonomian yang kokoh, berbasis industri rakyat yang efisien, maju dan berdaya saing tinggi	Pendapatan perkapita (Rp)	10.871.119,00	67.014.573,00	43.741.711,54	58.741.712	87,66	
		Sasaran Pokok 4: Meningkatnya investasi dan perdagangan yang mampu mendukung perkuatan daya saing dan kestabilan harga	Nilai investasi (Jutaan Rupiah)	1.972.803	21.913.396	7.426.210	18.565.526	84,72
		a. PMDN (Rp)			6.957.310.000.000			
		b. PMA (USD)			52.152.200			
		Nilai Ekspor (Jutaan Rupiah)	2.140.298,00	9.596.494,00	4.895.866,32	10.770.906	100,00	
		Laju inflasi (%)	9,08	7,00	5,92	7	100,00	
	Sasaran Pokok 5: Berkembangnya kewirausahaan masyarakat dan meningkatnya peranan dan daya saing usaha-usaha ekonomi skala mikro dan kecil	Angka pengangguran Terbuka (%)	4,59	1,98	3,59	3,00	100,00	
		Proporsi Penduduk miskin (%)	18,30	12,83	14,34	12,50	97,43	
	Misi 4: Mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan	Sasaran Pokok 6: Tercapainya pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan	Nilai Tukar Petani	103,48	109,00	146,33	150,00	100,00
			Produksi padi (ton)	516.868,00	748.579,00	281.610	323.852	43,26
Produksi hortikultura (ton):								
Buah-buahan			679.724	984.443	232.679	302.482	100,00	
Sayuran			36,231	52,474	483.053	627.969	100,00	
Produksi palawija (ton)			157.383	227.938	156.005	234.008	100,00	
Produksi Perkebunan unggulan (ton)			584.434	1.214.997	876.930	970.342	79,86	
Produksi daging ternak (ton)			5.861	8.489	19.795	22.764	100,00	
Produksi Perikanan (ton)			104.336	151.110	190.688	219.291	100,00	
Produksi batubara (ton)		1.806.601	3.755.793	3.641.338	4.187.539	100,00		
Sasaran Pokok 7: Meningkatnya pengendalian lingkungan hidup secara berkelanjutan dan sesuai dengan daya dukungnya		Emisi gas rumah kaca (ton C02/eq)	0	150.184	145.495	158.589	100,00	

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian 2022	2025 (Proyeksi Capaian)	Tingkat Capaian Kinerja
MISI 5: Mewujudkan Masyarakat yang Adil dan Demokratis	Sasaran pokok 8: Meningkatnya Pemerataan Pendapatan di Masyarakat dan Antar Daerah	Indeks Gini	0,37	0.35-0.24	0,315	0,23	93,75
	Sasaran Pokok 9: Meningkatnya Pengarusutamaan Gender (PUG)	Jumlah Perempuan di DPRD Provinsi (orang)	8	14	7	14,00	100,00
	Sasaran Pokok 10: Terwujudnya Pengelolaan Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Jumlah daerah yang memperoleh Opini WTP	0	11	10	11,00	100,00
		Jumlah daerah yang memperoleh Opini WDP	8	0	1	0,00	100,00
		Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi	C	A	B	BB	98,77

2.5.2. Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja

Faktor-faktor yang mendorong dan menghambat tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD Provinsi Bengkulu Tahun 2025 disampaikan pada tabel di bawah berikut ini:

A. Faktor Pendorong

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Faktor Penghambat
MISI 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang menguasai IPTEK dan IMTAQ	Sasaran pokok 1: Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Religius	Angka Partisipasi Sekolah (%)-16-18 Tahun	1. Aksesibilitas Menuju Sekolah Cukup terhambat dikarenakan jarak antara rumah dan sekolah cukup jauh. selain itu disebabkan juga Keterbatasan Infrastruktur seperti Kurangnya jumlah ruang kelas sehingga daya tampung menjadi terbatas, 2. Kondisi Ekonomi: Ketimpangan ekonomi dan tingginya tingkat kemiskinan di beberapa wilayah di Provinsi Bengkulu menjadi faktor penghambat dalam angka partisipasi sekolah. Keluarga yang miskin mungkin tidak mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka atau terpaksa memprioritaskan pekerjaan yang menghasilkan Pendapatan untuk kelangsungan hidup. 3. Budaya dan Tradisi: Beberapa budaya atau tradisi di masyarakat menghambat partisipasi sekolah, seperti preferensi terhadap pernikahan dini, pengaruh gender yang membatasi akses pendidikan bagi perempuan, atau keyakinan bahwa pendidikan formal tidak penting bagi perkembangan anak.
		Angka Rata-rata Lama Sekolah (thn)	1. Aksesibilitas Menuju Sekolah Cukup terhambat dikarenakan jarak antara rumah dan sekolah cukup jauh. selain itu disebabkan juga Keterbatasan Infrastruktur seperti Kurangnya jumlah ruang kelas sehingga daya tampung menjadi terbatas, 2. Kondisi Ekonomi: Ketimpangan ekonomi dan tingginya tingkat kemiskinan di beberapa wilayah di Provinsi Bengkulu menjadi

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Faktor Penghambat
			faktor penghambat dalam angka partisipasi sekolah. Keluarga yang miskin mungkin tidak mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka atau terpaksa memprioritaskan pekerjaan yang menghasilkan Pendapatan untuk kelangsungan hidup. 3. Budaya dan Tradisi: Beberapa budaya atau tradisi di masyarakat menghambat partisipasi sekolah, seperti preferensi terhadap pernikahan dini, pengaruh gender yang membatasi akses pendidikan bagi perempuan, atau keyakinan bahwa pendidikan formal tidak penting bagi perkembangan anak. 4. terjadi perubahan metode perhitungan, dimana saat penetapan target yang digunakan yaitu usia 15+, sedangkan sejak tahun 2010 metode yang digunakan yaitu usia 25 +.
		Persentase Penduduk 15 ke Atas Yang Buta Huruf (%)	
		Rasio guru terhadap murid (SMA/MA)	Distribusi guru yang tidak merata dimana guru terpusat di Ibu Kota Kecamatan sehingga guru di Daerah terpencil dan terpelosok kurang/terbatas
		Angka harapan hidup (tahun)	1. Akses Terbatas terhadap Pelayanan Kesehatan: a. Keterbatasan fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang terlatih di beberapa daerah terpencil b. Keterbatasan Fasilitas Kesehatan untuk Pendapatanganan masalah kesehatan/penyakit kronis/berat di tingkat Kecamatan dan Desa 2. masih rendahnya pemenuhan 9 standar tenaga kesehatan di tingkat puskesmas dan masih terbatasnya pemenuhan sarana prasarana kesehatan di tingkat puskesmas, sehingga tidak mampu melayani Pendapatanganan kesehatan tingkat kronis/berat 3. Tingkat Kemiskinan yang Tinggi: Tingkat kemiskinan yang tinggi mempengaruhi kualitas hidup dan akses terhadap layanan kesehatan. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan bergizi, air bersih, sanitasi, dan perumahan yang layak menyebabkan penurunan angka harapan hidup. 4. Pola Hidup Tidak Sehat: Pola hidup yang tidak sehat, termasuk kurangnya aktivitas fisik, pola makan yang tidak seimbang, dan kebiasaan merokok. Serta Kurangnya kesadaran akan pentingnya pola hidup sehat juga mempengaruhi kesehatan masyarakat.
		Angka kematian ibu (jiwa)	1. Akses Terbatas terhadap Pelayanan Kesehatan: Provinsi Bengkulu menghadapi tantangan dalam menyediakan akses yang memadai terhadap pelayanan kesehatan ibu, terutama di daerah terpencil. Keterbatasan fasilitas kesehatan, kurangnya tenaga medis yang terlatih, dan transportasi yang sulit menjadi faktor penghambat dalam menurunkan angka kematian ibu. 2. Kurangnya Pengetahuan dan Kesadaran: Kurangnya pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya perawatan kesehatan maternal, kebersihan selama kehamilan, persalinan yang aman, dan perawatan pasca melahirkan mempengaruhi

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Faktor Penghambat
			angka kematian ibu. Kurangnya akses terhadap informasi yang akurat juga menjadi faktor penghambat. 3. Faktor Sosial dan Budaya: Beberapa faktor sosial dan budaya, seperti praktik tradisional yang berisiko tinggi selama kehamilan dan persalinan, pengaturan pernikahan yang dini, serta ketidaksetaraan gender dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan, mempengaruhi angka kematian ibu.
		Angka kematian bayi (jiwa)	1. Akses Terbatas terhadap Pelayanan Kesehatan: Keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan yang berkualitas, terutama di daerah terpencil, menjadi faktor penghambat dalam menurunkan angka kematian bayi di Provinsi Bengkulu. Jarak yang jauh, transportasi yang tidak memadai, dan kurangnya fasilitas medis yang memadai menghambat aksesibilitas pelayanan kesehatan yang diperlukan. 2. Kurangnya Pengetahuan dan Kesadaran: Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang perawatan bayi yang baik, nutrisi yang tepat, imunisasi, dan praktik kebersihan mempengaruhi angka kematian bayi. Pendidikan kesehatan yang terfokus pada ibu hamil dan keluarga sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mereka. 3. Kondisi Sosial-Ekonomi: Faktor sosial-ekonomi seperti kemiskinan, ketidakstabilan ekonomi, dan rendahnya Pendapatan mempengaruhi akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan bergizi, air bersih, sanitasi, dan perawatan medis meningkatkan risiko kematian bayi.
		Rasio puskesmas dan Puskesmas Pembantu per 10.000 penduduk	1. Keterbatasan Anggaran: Keterbatasan anggaran mempengaruhi pembangunan, perawatan, dan operasionalisasi puskesmas.2. Pertumbuhan Penduduk : Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak mampu diimbangi dengan jumlah pertumbuh Puskesmas
		Rasio dokter per 10.000 penduduk	1. Keterbatasan Sumber Daya: Keterbatasan sumber daya, termasuk anggaran dan tenaga medis yang tersedia, menjadi faktor penghambat dalam mencapai rasio dokter per 10.000 penduduk yang ideal. Kurangnya anggaran untuk merekrut, melatih, dan mempertahankan dokter mempengaruhi peningkatan rasio tersebut. 2. Ketimpangan Distribusi: Provinsi Bengkulu memiliki wilayah yang cukup luas dengan permukiman yang terpencar. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mendistribusikan dokter secara merata di seluruh wilayah provinsi, terutama di daerah terpencil.
		Jumlah kasus kriminal	1. Ketimpangan Sosial-Ekonomi: Ketimpangan sosial-ekonomi menjadi faktor penghambat dalam menurunkan jumlah kasus kriminal di Provinsi Bengkulu. Rendahnya Pendapatan, tingkat kemiskinan, dan ketidaksetaraan akses terhadap peluang ekonomi berkontribusi pada terjadinya tindak kriminal. 2. Kurangnya Akses Terhadap Pendidikan: Kurangnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas menjadi faktor penghambat. Pendidikan yang rendah atau tidak memadai menyebabkan rendahnya kesadaran hukum, kurangnya keterampilan, dan

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Faktor Penghambat
			peluang kerja yang terbatas, yang pada gilirannya meningkatkan risiko terjadinya tindak kriminal. 3. Kurangnya Pengawasan dan Penegakan Hukum: Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif menjadi faktor penghambat. Jika penegakan hukum lemah atau tidak konsisten, maka pelaku kejahatan mungkin merasa tidak terdorong untuk mengubah perilaku mereka.
		Jumlah tempat ibadah (buah)	1. Keterbatasan Sumber Daya Finansial: Keterbatasan sumber daya finansial menjadi faktor penghambat dalam pembangunan dan peningkatan jumlah tempat ibadah di Provinsi Bengkulu. Pembangunan tempat ibadah membutuhkan biaya yang cukup besar, termasuk untuk pembangunan fisik, pemeliharaan, dan fasilitas pendukung lainnya. 2. Perizinan dan Regulasi: Prosedur perizinan dan regulasi yang rumit dan berbelit-belit menjadi hambatan dalam pembangunan tempat ibadah. Proses perizinan yang lambat dan kompleks memperlambat atau menghambat pembangunan tempat ibadah baru atau perluasan tempat ibadah yang ada. 3. Konflik Kepentingan dan Pertentangan: Adanya konflik kepentingan dan pertentangan antara kelompok agama atau dengan pihak-pihak terkait menjadi penghambat. Pertentangan dalam hal kepemilikan lahan, lokasi tempat ibadah, atau perbedaan keyakinan menyulitkan pembangunan dan pengembangan tempat ibadah.
		Jumlah jama'ah haji (orang)	1. Keterbatasan Kuota Haji: Salah satu faktor penghambat utama dalam mencapai indikator jumlah jamaah haji di Provinsi Bengkulu adalah keterbatasan kuota haji yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Setiap tahun, kuota haji yang diberikan kepada setiap daerah terbatas, sehingga tidak semua calon jamaah haji berangkat. 2. Keterbatasan Sumber Daya Finansial: Keterbatasan sumber daya finansial menjadi faktor penghambat dalam mencapai target jumlah jamaah haji. Proses pendaftaran dan pelaksanaan ibadah haji memerlukan biaya yang signifikan, termasuk biaya transportasi, akomodasi, dan kebutuhan lainnya. Keterbatasan dana membatasi kemampuan calon jamaah untuk berangkat. 3. Kondisi Kesehatan Calon Jamaah: Kondisi kesehatan calon jamaah juga menjadi faktor penghambat. Calon jamaah yang mengalami masalah kesehatan serius atau memiliki kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan jauh dan menjalani ibadah haji mungkin tidak memenuhi persyaratan untuk berangkat. 4. pada tahun 2021 tidak dilaksanakan Ibdah Haji Karena Pandemi Covid-19
		Persentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi baik/sedang (%)	1. Keterbatasan Anggaran: Salah satu faktor penghambat dalam mencapai indikator ketercapaian jaringan jalan provinsi yang baik/sedang di Provinsi Bengkulu adalah keterbatasan anggaran. Pembangunan, perawatan, dan pemeliharaan jaringan jalan provinsi membutuhkan investasi yang besar. Jika anggaran terbatas, maka kemampuan untuk memperbaiki dan memelihara jaringan jalan provinsi menjadi terbatas pula.

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Faktor Penghambat
			2. Kerawanan Alam: Provinsi Bengkulu terletak di daerah yang rawan terhadap bencana alam seperti banjir, longsor, dan gempa bumi. Faktor ini menjadi penghambat dalam menjaga kondisi jaringan jalan provinsi tetap baik. Bencana alam menyebabkan kerusakan pada jalan dan menyulitkan aksesibilitas. 3. dilakukan survey dan perhitungan ulang pada tahun 2022, sedangkan pada tahun 2021 kebawah belum dilakukan pengecekan dilapangan 4. Pandemi COVID-19 : Terjadi Pandemi Covid-19 yang menyebabkan dilakukan Refocusing anggaran, dimana fokus anggaran diutamakan pada Pendapatanganan Pandemi Covid-19 5. masih banyaknya kendaraan bertonase melebihi muatan, yang menyebabkan kerusakan Jalan.
		Jumlah Rumahtangga Pelanggan PLN (rt)	1. Aksesibilitas dan Infrastruktur Listrik: Salah satu faktor penghambat dalam mencapai indikator jumlah rumah tangga pelanggan PLN di Provinsi Bengkulu adalah aksesibilitas dan infrastruktur listrik yang belum merata. Beberapa daerah mungkin masih sulit dijangkau oleh jaringan listrik PLN, sehingga rumah tangga di wilayah-wilayah tersebut belum terlayani dengan baik. 2. Keterbatasan Daya Beli: Keterbatasan daya beli masyarakat juga menjadi faktor penghambat. Biaya pemasangan dan pemakaian listrik yang tinggi membuat sebagian rumah tangga enggan atau kesulitan untuk menjadi pelanggan PLN. Faktor ekonomi ini mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan listrik dari PLN.
		Luas areal sawah beririgasi (teknis, semi teknis, sederhana)	1. Keterbatasan Sumber Daya Air: Salah satu faktor penghambat dalam mencapai indikator luas areal sawah beririgasi di Provinsi Bengkulu adalah keterbatasan sumber daya air. Terkadang ketersediaan air untuk irigasi sawah tidak mencukupi, baik karena curah hujan yang tidak merata atau keberadaan infrastruktur irigasi yang belum optimal. 2. Kurangnya Infrastruktur Irigasi: Kurangnya infrastruktur irigasi yang memadai juga menjadi faktor penghambat. Beberapa daerah mungkin masih kekurangan saluran irigasi, bendungan, atau pompa air yang diperlukan untuk mengalirkan air ke sawah. Hal ini menghambat pengembangan areal sawah beririgasi di Provinsi Bengkulu. 3. Keterbatasan Teknis dan Pengetahuan Petani: Keterbatasan pengetahuan teknis dan keterampilan petani dalam mengelola irigasi sawah juga menjadi penghambat. Jika petani tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang teknik irigasi yang efektif atau tidak memiliki akses terhadap pelatihan dan pendampingan yang memadai, maka pengembangan luas areal sawah beririgasi akan terhambat. 4. Alih Fungsi Lahan
		Rumah tangga yang menggunakan air bersih/PDAM (Pelanggan)	1. Keterbatasan Infrastruktur: Salah satu faktor penghambat adalah keterbatasan infrastruktur PDAM di beberapa wilayah Provinsi Bengkulu. Kurangnya jaringan distribusi air bersih dari PDAM membuat sebagian besar rumah tangga sulit untuk menggunakan air bersih secara terjangkau dan konsisten. 2. Keterbatasan Aksesibilitas: Beberapa daerah di Provinsi Bengkulu sulit dijangkau, terutama daerah terpencil dan pedalaman. Jarak yang jauh antara rumah tangga dengan sumber

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Faktor Penghambat
			air PDAM menyebabkan keterbatasan aksesibilitas, sehingga rumah tangga cenderung menggunakan sumber air alternatif seperti sumur atau sungai. 3. Kendala Ekonomi: Beberapa rumah tangga mungkin menghadapi kendala ekonomi yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk menjadi pelanggan PDAM. Biaya pemasangan meteran air, tagihan bulanan, dan biaya pemeliharaan menjadi faktor penghambat bagi rumah tangga dengan Pendapatan rendah.
Misi 3 :Mewujudkan perekonomian yang berdaya saing tinggi	Sasaran Pokok 3 : Tercapainya struktur perekonomian yang kokoh, berbasis industri rakyat yang efisien, maju dan berdaya saing tinggi	Pertumbuhan ekonomi (%)	1. Keterbatasan Sumber Daya Alam: Provinsi Bengkulu menghadapi keterbatasan dalam sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk pertumbuhan ekonomi. Sumber daya alam yang terbatas, seperti lahan pertanian yang sempit atau terdegradasi, menjadi penghambat bagi pertumbuhan sektor pertanian. Selain itu, keterbatasan sumber daya mineral dan energi juga membatasi pertumbuhan sektor industri. 2. Infrastruktur yang Tidak Memadai: Infrastruktur yang kurang baik, seperti jalan raya, jaringan transportasi, dan akses listrik yang terbatas, menjadi penghambat bagi pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang tidak memadai mempengaruhi distribusi barang dan jasa, serta keterjangkauan pasar. 3. Keterbatasan Kualitas Sumber Daya Manusia: Keterbatasan kualitas sumber daya manusia, terutama dalam hal pendidikan dan keterampilan, menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi. Kurangnya tenaga kerja terampil dan rendahnya tingkat pendidikan membatasi pengembangan sektor industri dan layanan yang lebih maju.
		Pendapatan perkapita (Rp)	1. Keterbatasan Sumber Daya Alam: Provinsi Bengkulu menghadapi keterbatasan dalam sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk meningkatkan Pendapatan per kapita. Keterbatasan lahan pertanian yang sempit atau terdegradasi, serta keterbatasan sumber daya mineral dan energi, mempengaruhi pertumbuhan sektor ekonomi dan Pendapatan per kapita. 2. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia: Rendahnya kualitas sumber daya manusia, seperti rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, mempengaruhi produktivitas tenaga kerja dan kualitas pekerjaan yang tersedia. Kurangnya akses terhadap pendidikan berkualitas dan pelatihan keterampilan menjadi penghambat dalam meningkatkan Pendapatan per kapita. 3. Infrastruktur yang Tidak Memadai: Infrastruktur yang kurang baik, seperti jaringan transportasi yang buruk, akses terbatas ke listrik, dan kurangnya akses ke layanan dasar, mempengaruhi produktivitas dan pertumbuhan sektor ekonomi. Infrastruktur yang memadai sangat penting untuk meningkatkan konektivitas dan efisiensi dalam kegiatan ekonomi.
	Sasaran Pokok 4 : Meningkatnya investasi dan perdagangan yang mampu mendukung	Nilai investasi (Jutaan Rupiah)	1. Keterbatasan Infrastruktur: Keterbatasan infrastruktur, seperti jaringan transportasi yang terbatas, kurangnya akses ke listrik, dan kualitas layanan telekomunikasi yang rendah, menjadi penghambat bagi investasi di Provinsi Bengkulu. Infrastruktur yang tidak memadai menghambat mobilitas barang dan orang

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Faktor Penghambat
	perkuatan daya saing dan kestabilan harga		serta meningkatkan biaya operasional, sehingga menurunkan daya tarik investasi. 2. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia: Rendahnya kualitas sumber daya manusia, termasuk rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, menghambat investasi. Investasi yang membutuhkan tenaga kerja berkualitas tinggi mungkin enggan masuk atau tidak berkembang di daerah dengan kualitas sumber daya manusia yang rendah. 3. Regulasi dan Birokrasi yang Rumit: Regulasi yang kompleks dan birokrasi yang rumit menghambat investasi di Provinsi Bengkulu. Proses perizinan yang panjang dan rumit serta kurangnya transparansi dalam regulasi menimbulkan hambatan dan ketidakpastian bagi para investor.
		a. PMDN (Rp)	
		b. PMA (USD)	
		Nilai Ekspor (Jutaan Rupiah)	1. Keterbatasan Infrastruktur dan Aksesibilitas: Keterbatasan infrastruktur transportasi dan kurangnya konektivitas yang baik menjadi penghambat dalam mengangkut dan mengekspor barang dari Provinsi Bengkulu. Jalan yang rusak, akses pelabuhan yang terbatas, dan kurangnya konektivitas udara memperlambat proses distribusi barang dan menaikkan biaya logistik. 2. Kualitas dan Diversifikasi Produk: Kualitas produk yang rendah serta kurangnya diversifikasi produk menjadi penghambat dalam meningkatkan nilai ekspor. Persaingan global yang ketat menuntut adanya produk yang berkualitas dan memiliki nilai tambah untuk bersaing di pasar internasional. 3. Perubahan Kebijakan Ekspor: Perubahan kebijakan ekspor baik di tingkat nasional maupun internasional mempengaruhi nilai ekspor Provinsi Bengkulu. Pembatasan ekspor, tarif perdagangan yang tinggi, dan perubahan regulasi mempengaruhi akses pasar dan daya saing produk ekspor.
		Laju inflasi (%)	1. Permintaan yang Tinggi: Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat menjadi faktor pendorong laju inflasi. Jika permintaan terhadap barang dan jasa meningkat lebih cepat daripada pasokannya, maka harga akan cenderung naik, menyebabkan inflasi. 2. Kenaikan Harga Komoditas: Jika terjadi kenaikan harga komoditas, seperti minyak mentah atau bahan pangan, hal ini mempengaruhi biaya produksi dan harga barang dan jasa secara umum, yang berpotensi mendorong laju inflasi. 3. Kebijakan Moneter: Kebijakan moneter yang ekspansif, seperti penurunan suku bunga atau peningkatan jumlah uang beredar, meningkatkan likuiditas di pasar dan berkontribusi pada peningkatan inflasi.
	Sasaran Pokok 5 : Berkembangnya kewirausahaan masyarakat dan meningkatnya peranan dan daya saing usaha-usaha ekonomi	Angka pengangguran Terbuka (%)	1. Dampak Pandemi COVID-19: Pandemi COVID-19 memiliki dampak signifikan terhadap sektor ekonomi di seluruh dunia, termasuk di Provinsi Bengkulu. Pembatasan aktivitas ekonomi, penutupan usaha, dan penurunan permintaan mengakibatkan perusahaan mengalami kesulitan dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), yang berkontribusi pada peningkatan angka pengangguran. 2. Keterbatasan Peluang Kerja: Provinsi Bengkulu memiliki

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Faktor Penghambat
	skala mikro dan kecil		ekonomi yang masih bergantung pada sektor primer, seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan. Keterbatasan lapangan kerja di sektor tersebut, terutama dalam hal teknologi dan mekanisasi, mempengaruhi tingkat pengangguran di provinsi ini. 3. Ketimpangan Keterampilan: Ketimpangan antara keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja di Provinsi Bengkulu juga menyebabkan tingginya angka pengangguran. Jika keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja tidak sesuai dengan permintaan pasar kerja, sulit bagi mereka untuk menkan pekerjaan yang sesuai. 4. Mobilitas Tenaga Kerja: Faktor geografis dan infrastruktur yang terbatas di Provinsi Bengkulu menjadi hambatan bagi mobilitas tenaga kerja. Ketika peluang kerja terbatas di daerah tempat tinggal mereka, sulit bagi penduduk untuk mencari pekerjaan di daerah lain, sehingga meningkatkan angka pengangguran. 5. Pertumbuhan Penduduk: Pertumbuhan penduduk yang tinggi tanpa pertumbuhan lapangan kerja yang seimbang menyebabkan peningkatan angka pengangguran di Provinsi Bengkulu. Jika pertumbuhan lapangan kerja tidak mampu menyerap jumlah penduduk yang bertambah, persaingan untuk menkan pekerjaan akan semakin ketat.
		Proporsi Penduduk miskin (%)	1. Keterbatasan lapangan kerja: Kurangnya peluang kerja formal dan lapangan kerja yang terbatas menjadi faktor penghambat dalam mengurangi jumlah penduduk miskin. 2. Rendahnya tingkat pendidikan: Kurangnya akses terhadap pendidikan berkualitas dan rendahnya tingkat literasi penduduk menjadi faktor penghambat dalam mengurangi proporsi penduduk miskin. 3. Ketimpangan distribusi pendapatan: Jika pendapatanan di Provinsi Bengkulu tidak terdistribusi secara merata, akan ada kesenjangan antara Pendapatan yang tinggi dan rendah, yang mempengaruhi proporsi penduduk miskin.
Misi 4 : Mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan	Sasaran Pokok 6 : Tercapainya pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan	Nilai Tukar Petani	1. Ketergantungan pada Komoditas Tertentu: Provinsi Bengkulu banyak mengandalkan sektor pertanian, terutama komoditas seperti kopi dan karet. Fluktuasi harga global untuk komoditas ini mempengaruhi nilai tukar petani dan mengurangi Pendapatan mereka. 2. Keterbatasan Akses ke Pasar: Petani di Provinsi Bengkulu sering menghadapi kesulitan dalam mengakses pasar yang menguntungkan. Keterbatasan infrastruktur transportasi dan distribusi yang memadai, serta keterbatasan akses ke informasi pasar, membatasi kemampuan petani untuk menjual hasil panen mereka dengan harga yang baik. 3. Kurangnya Pengetahuan dan Keterampilan dalam Pemasaran: Banyak petani di Provinsi Bengkulu kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam pemasaran produk pertanian mereka. Hal ini menghambat negosiasi harga yang menguntungkan dan mempengaruhi nilai tukar petani.
		Produksi padi (ton)	1. Keterbatasan Sumber Daya Air: Produksi padi di Provinsi Bengkulu terhambat oleh keterbatasan sumber daya air, terutama selama musim kemarau. Kondisi ini mempengaruhi pola tanam dan produktivitas pertanian.

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Faktor Penghambat
			2. Keterbatasan Lahan: Lahan pertanian yang terbatas dan terfragmentasi membatasi ekspansi pertanian padi di Provinsi Bengkulu. Hal ini juga mempengaruhi penggunaan teknik pertanian yang efisien. 3. Kurangnya Akses terhadap Teknologi dan Pemupukan yang Tepat: Kurangnya akses petani terhadap teknologi pertanian modern dan pemupukan yang tepat mempengaruhi produktivitas padi di Provinsi Bengkulu. 4. perubahan metode perhitungan produksi Pertanian
		Produksi hortikultura (ton) :	
		Buah-buahan	1. Infrastruktur dan Akses Pasar: Keterbatasan infrastruktur, terutama jalan dan transportasi yang kurang baik, menghambat distribusi buah-buahan ke pasar, mempengaruhi kualitas dan daya tahan produk. 2. Pergeseran Lahan: Pergeseran penggunaan lahan pertanian menjadi sektor non-pertanian, seperti perkotaan atau industri, mengurangi luas lahan yang tersedia untuk budidaya buah-buahan. 3. Bencana Alam: Provinsi Bengkulu rentan terhadap bencana alam seperti banjir, tanah longsor, atau kekeringan. Bencana ini mengganggu produksi buah-buahan dan merusak tanaman.
		Sayuran	1. Infrastruktur dan Akses Pasar: Keterbatasan infrastruktur, terutama jalan dan transportasi yang kurang baik, menghambat distribusi sayuran ke pasar, mempengaruhi kualitas dan daya tahan produk. 2. Kurangnya Pengetahuan dan Keterampilan: Kurangnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam praktik budidaya yang optimal, manajemen usaha tani, dan penerapan teknologi pertanian modern menjadi hambatan dalam meningkatkan produksi sayuran. 3. Pergeseran Lahan: Pergeseran penggunaan lahan pertanian menjadi sektor non-pertanian, seperti perkotaan atau industri, mengurangi luas lahan yang tersedia untuk budidaya sayuran.
		Produksi palawija (ton)	1. Keterbatasan Akses dan Infrastruktur: Keterbatasan akses ke pasar, terutama akses transportasi yang kurang baik, menghambat distribusi hasil panen palawija dan mempengaruhi harga jual petani. 2. Kurangnya Pengetahuan dan Teknologi: Kurangnya pengetahuan dan akses terhadap teknologi pertanian modern dalam budidaya palawija, seperti sistem irigasi yang efisien, pengendalian hama, dan praktik pertanian yang baik, menjadi penghambat dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas palawija. 3. Perubahan Iklim: Perubahan iklim, seperti pola curah hujan yang tidak menentu dan kejadian cuaca ekstrem, mempengaruhi produksi palawija dan meningkatkan risiko gagal panen.
		Produksi Perkebunan unggulan (ton)	1. Keterbatasan Akses dan Infrastruktur: Keterbatasan akses transportasi, kualitas jalan yang buruk, serta infrastruktur pendukung seperti irigasi dan pemrosesan hasil perkebunan yang terbatas, menghambat distribusi dan nilai tambah produk

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Faktor Penghambat
			perkebunan. 2. Perubahan Iklim: Perubahan iklim, seperti pola curah hujan yang tidak menentu, suhu ekstrem, dan bencana alam, mempengaruhi produksi perkebunan unggulan dan meningkatkan risiko kerugian. 3. Pengetahuan dan Teknologi: Kurangnya pengetahuan dan akses terhadap teknologi modern dalam budidaya perkebunan, pengelolaan lahan, serta pengendalian hama dan penyakit, menjadi penghambat dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas produk perkebunan.
		Produksi daging ternak (ton)	1. Keterbatasan Sumber Daya: Keterbatasan lahan, air, dan pakan ternak menjadi faktor penghambat dalam pengembangan peternakan dan produksi daging ternak di Provinsi Bengkulu. 2. Infrastruktur yang Kurang Mendukung: Keterbatasan infrastruktur, seperti jalan yang rusak, kurangnya akses transportasi, dan kurangnya fasilitas pemrosesan daging ternak, menghambat distribusi dan pemasaran produk. 3. Pengetahuan dan Teknologi: Kurangnya pengetahuan peternak mengenai manajemen peternakan yang baik, penerapan teknologi yang modern, dan pengendalian penyakit ternak, menghambat peningkatan produktivitas dan kualitas daging ternak.
		Produksi Perikanan (ton)	1. Kurangnya Akses Teknologi dan Peningkatan Kapasitas: Keberlanjutan dan peningkatan produksi perikanan di Provinsi Bengkulu terhambat oleh kurangnya akses terhadap teknologi modern dalam Pendapatangkapan ikan, budidaya, dan pengolahan. Peningkatan kapasitas nelayan dan petani perikanan melalui pelatihan dan pendidikan juga diperlukan. 2. Perubahan Iklim dan Kerusakan Lingkungan: Perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, seperti pencemaran air dan kerusakan ekosistem perairan, mempengaruhi produksi perikanan secara negatif. Pendapatanganan yang tepat terhadap masalah lingkungan perlu dilakukan untuk meminimalkan dampaknya terhadap produksi perikanan. 3. Regulasi dan Kebijakan yang Tidak Mendukung: Regulasi yang kompleks atau kebijakan yang tidak memadai menjadi penghambat dalam pengembangan sektor perikanan. Diperlukan kebijakan yang mendukung, termasuk pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan perlindungan terhadap nelayan lokal.
		Produksi batubara (ton)	1. Regulasi yang Ketat: Adanya regulasi yang ketat dalam industri pertambangan batubara, termasuk persyaratan lingkungan yang ketat dan perizinan yang rumit, menjadi faktor penghambat dalam produksi batubara. 2. Ketidakpastian Pasar: Fluktuasi harga batubara di pasar internasional mempengaruhi permintaan dan produksi batubara di Provinsi Bengkulu. Ketidakpastian pasar ini menjadi penghambat bagi industri pertambangan batubara.
	Sasaran Pokok 7: Meningkatnya pengendalian lingkungan hidup secara berkelanjutan dan	Emisi gas rumah kaca (ton C02/eq)	1. Pertumbuhan Industri dan Transportasi: Pertumbuhan industri dan sektor transportasi yang tidak terkelola dengan baik menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca di Provinsi Bengkulu. Penggunaan bahan bakar fosil dalam transportasi dan proses industri merupakan penyumbang utama emisi tersebut.

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Faktor Penghambat
	sesuai dengan daya dukungnya		2. Ketergantungan pada Energi Fosil: Ketergantungan yang tinggi pada energi fosil sebagai sumber energi utama di Provinsi Bengkulu menjadi faktor penghambat dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Kurangnya pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan seperti energi surya dan energi angin juga berperan dalam meningkatkan emisi. 3. Praktik Pertanian yang Tidak Berkelanjutan: Praktik pertanian konvensional, seperti pembakaran lahan dan penggunaan pupuk kimia berlebihan, menghasilkan emisi gas rumah kaca, terutama gas metana dan nitrous oksida.
MISI 5 : Mewujudkan Masyarakat yang Adil dan Demokratis	Sasaran pokok 8 : Meningkatnya Pemerataan Pendapatan di Masyarakat dan Antar Daerah	Indeks Gini	1. Ketimpangan Ekonomi: Ketimpangan distribusi Pendapatan dan kekayaan di Provinsi Bengkulu menjadi faktor penghambat dalam mencapai indeks Gini yang lebih baik. Ketimpangan tersebut disebabkan oleh disparitas sektor ekonomi, akses terhadap lapangan kerja yang terbatas, dan kesenjangan dalam pembangunan infrastruktur. 2. Kurangnya Kesempatan Kerja: Kurangnya kesempatan kerja yang berkualitas dan berpenghasilan layak menyebabkan kesenjangan Pendapatan dan kontribusi terhadap indeks Gini yang tinggi di Provinsi Bengkulu. Tingginya tingkat pengangguran atau pekerjaan informal yang tidak stabil mempengaruhi tingkat Pendapatan rumah tangga. 3. Ketidaksamaan Akses terhadap Pendidikan dan Kesehatan: Ketidaksamaan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan juga memengaruhi tingkat indeks Gini di Provinsi Bengkulu. Jika sebagian penduduk tidak menkan akses yang sama terhadap pendidikan dan layanan kesehatan berkualitas, ini memperburuk ketimpangan ekonomi.
	Sasaran Pokok 9 : Meningkatnya Pengarusutamaan Gender (PUG)	Jumlah Perempuan di DPRD Provinsi (orang)	1. Stereotip Gender: Stereotip gender yang masih melekat dalam masyarakat menjadi faktor penghambat dalam peningkatan jumlah perempuan di DPRD Provinsi Bengkulu. Persepsi yang meremehkan kemampuan perempuan dalam bidang politik dan pengambilan keputusan menghambat partisipasi mereka dalam dunia politik. 2. Keterbatasan Akses dan Kesempatan: Keterbatasan akses dan kesempatan bagi perempuan dalam hal pendidikan politik, jaringan politik, dan sumber daya politik menghambat partisipasi mereka di DPRD Provinsi Bengkulu. Ketidaksetaraan akses politik antara laki-laki dan perempuan menyebabkan kurangnya perwakilan perempuan di lembaga legislatif. 3. Budaya Patriarki: Budaya patriarki yang masih dominan dalam masyarakat menjadi penghambat bagi partisipasi perempuan di DPRD Provinsi Bengkulu. Norma dan nilai yang menempatkan perempuan pada peran domestik dan mengabaikan partisipasi mereka dalam ruang publik menghambat keterlibatan politik perempuan.
	Sasaran Pokok 10: Terwujudnya Pengelolaan Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Jumlah daerah yang memperoleh Opini WTP	1. Keterbatasan Sumber Daya: Salah satu faktor penghambat dalam memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) adalah keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu. Keterbatasan anggaran, tenaga ahli, infrastruktur, dan sistem pengelolaan keuangan yang belum

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Faktor Penghambat
			optimal menjadi penghambat dalam mencapai standar akuntabilitas yang diharapkan. 2. Ketidapatuhan terhadap Standar Akuntansi: Jika Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu tidak mematuhi standar akuntansi yang ditetapkan, baik secara teknis maupun prinsip-prinsipnya, hal ini menjadi faktor penghambat dalam memperoleh Opini WTP dari BPK-RI. Kurangnya pemahaman, pelatihan, dan kesadaran terkait tata kelola keuangan yang baik mempengaruhi hasil audit. 3. Kompleksitas Administrasi dan Regulasi: Tingginya tingkat kompleksitas administrasi dan regulasi di Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu menjadi penghambat dalam memperoleh Opini WTP. Jika proses administrasi dan pelaporan keuangan tidak teratur, tidak lengkap, atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan sulit bagi Kabupaten/Kota untuk memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk menkan Opini WTP.
		Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi	1. Ketidakpahaman tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP): Salah satu faktor penghambat dalam mencapai nilai SAKIP yang baik adalah kurangnya pemahaman tentang konsep dan mekanisme SAKIP. Jika instansi pemerintah di Provinsi Bengkulu tidak memahami secara menyeluruh tentang SAKIP, mereka akan kesulitan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengukur kinerja secara efektif. 2. Keterbatasan Sumber Daya: Keterbatasan anggaran, tenaga ahli, infrastruktur, dan sistem pendukung yang memadai menjadi faktor penghambat dalam mencapai nilai SAKIP yang optimal. Jika ter keterbatasan dalam hal sumber daya, instansi pemerintah akan sulit untuk melaksanakan pengukuran kinerja secara menyeluruh dan menyediakan data yang akurat dan terpercaya. 3. Kultur Organisasi yang Tidak Mendukung: Kultur organisasi yang tidak mendorong transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi kinerja menjadi faktor penghambat dalam mencapai nilai SAKIP yang baik. Jika ter resistensi terhadap perubahan dan kurangnya kesadaran akan pentingnya pengukuran kinerja, proses implementasi SAKIP akan terhambat.

B. Faktor Penghambat

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Faktor Pendorong
MISI 1 : Mewujudkan sumber daya manusia yang menguasai IPTEK dan IMTAQ	Sasaran pokok 1 : Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Religius	Angka Partisipasi Sekolah (%):- 16-18 Tahun	1. Faktor yang mendukung tercapainya target indikator Angka Partisipasi Sekolah (%) karena banyaknya program yang diluncurkan oleh pemerintah dalam memudahkan masyarakat untuk bersekolah, terutama bagi golongan yang kurang mampu dengan adanya program Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) maupun Bantuan Operasional Sekolah (BOS) baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Daerah. 2. Terlaksananya program pendidikan luar sekolah melalui pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) yang menyelenggarakan pendidikan kejar Paket A, B dan C
		Angka Rata-rata Lama Sekolah (thn)	1. Faktor yang mendukung tercapainya target indikator Angka Partisipasi Sekolah (%) karena banyaknya program yang diluncurkan oleh pemerintah dalam memudahkan masyarakat untuk bersekolah, terutama bagi golongan yang kurang mampu

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Faktor Pendorong
			dengan adanya program Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) maupun Bantuan Operasional Sekolah (BOS) baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Daerah. 2. Terlaksananya program pendidikan luar sekolah melalui pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) yang menyelenggarakan pendidikan kejar Paket A, B dan C
		Persentase Penduduk 15 ke Atas Yang Buta Huruf (%)	
		Rasio guru terhadap murid:	1. Peningkatan Rekrutmen dan Pelatihan Guru: Peningkatan rekrutmen guru dengan meningkatkan daya tarik profesi guru dan menawarkan insentif yang kompetitif. Selain itu, pelatihan dan pengembangan berkelanjutan bagi guru juga penting untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan efektivitas mereka. 2. Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan: Pemerintah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan di daerah terpencil dengan memperbaiki infrastruktur pendidikan dan transportasi. Hal ini akan membantu memastikan bahwa guru mencapai murid-murid di daerah terpencil, sehingga meningkatkan rasio guru terhadap murid.
		- SMA/MA	
		Angka harapan hidup (tahun)	1. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan: Peningkatan aksesibilitas terhadap fasilitas kesehatan yang memadai dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan menjadi faktor pendorong dalam meningkatkan angka harapan hidup. Ini melibatkan peningkatan jumlah fasilitas kesehatan, tenaga medis yang terlatih, dan distribusi yang merata di seluruh Provinsi Bengkulu. 2. Peningkatan universal Health Coverage (UHC) melalui peningkatan cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat baik melalui PBI JKN maupun Jamkesprov dan Jamkeskab/Jamkeskot 3. Peningkatan Persentase Balita yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap maupun desa yang menerapkan Universal Child Immunization (UCI) 4. Optimalisasi Pencegahan dan Pendapatanggulangan penyakit menular dan tidak menular terutama di level pelayanan kesehatan rujukan (Puskesmas Rawat Inap/Poned dan Rumah Sakit) 5. Edukasi dan Kesadaran Masyarakat: Meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola hidup sehat, pencegahan penyakit, dan akses terhadap pelayanan kesehatan menjadi faktor pendorong. Program-program edukasi kesehatan yang efektif dan partisipasi aktif masyarakat dalam memperoleh pengetahuan tentang kesehatan membantu meningkatkan angka harapan hidup.
		Angka kematian ibu (jiwa)	1. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan: Peningkatan aksesibilitas terhadap fasilitas kesehatan yang memadai dan pelayanan kesehatan maternal yang berkualitas menjadi faktor pendorong dalam menurunkan angka kematian ibu.

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Faktor Pendorong
			Ini melibatkan peningkatan jumlah puskesmas, rumah sakit, bidan, dan tenaga medis yang terlatih di seluruh Provinsi Bengkulu. 2. Edukasi dan Kesadaran Masyarakat: Meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perawatan kesehatan maternal menjadi faktor pendorong. Program-program edukasi yang menysasar ibu hamil, keluarga, dan masyarakat umum membantu meningkatkan pengetahuan tentang praktik yang aman selama kehamilan, persalinan, dan pasca melahirkan. 3. Kolaborasi Antar Sektor: Kolaborasi antara sektor kesehatan, pendidikan, dan sosial membantu mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi angka kematian ibu. Kolaborasi ini melibatkan penyediaan akses terhadap layanan kesehatan yang terintegrasi, pendidikan bagi perempuan tentang kesehatan reproduksi, dan program-program yang mendukung kesetaraan gender dan kesejahteraan ibu.
		Angka kematian bayi (jiwa)	1. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan: Peningkatan aksesibilitas terhadap fasilitas kesehatan yang berkualitas dan pelayanan kesehatan bayi yang tepat sangat penting. Diperlukan peningkatan jumlah fasilitas kesehatan yang memadai, pelatihan tenaga medis, dan peningkatan akses terhadap transportasi yang memadai. 2. Edukasi dan Kesadaran Masyarakat: Program edukasi yang melibatkan ibu hamil, keluarga, dan masyarakat umum perlu dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan tentang perawatan bayi yang baik. Edukasi tentang pentingnya pemeriksaan rutin, vaksinasi, nutrisi yang tepat, dan praktik kebersihan membantu mengurangi angka kematian bayi. 3. Penguatan Pelayanan Persalinan dan Neonatal: Fokus pada pelayanan persalinan yang aman dan perawatan neonatal yang berkualitas sangat penting untuk menurunkan angka kematian bayi. Diperlukan peningkatan fasilitas persalinan yang aman, pelatihan bagi tenaga medis dalam Pendapatanganan persalinan yang rumit, serta perawatan neonatal yang komprehensif. 4. Pengawasan dan Evaluasi: Monitoring dan evaluasi berkala terhadap program-program penurunan angka kematian bayi sangat penting. Data yang akurat harus dikumpulkan dan dianalisis untuk mengidentifikasi masalah, mengukur efektivitas program, dan melakukan perbaikan yang diperlukan.
		Rasio puskesmas dan Puskesmas Pembantu per 10.000 penduduk	Adanya prioritas yang tinggi dalam pembangunan dan pengembangan sektor kesehatan, termasuk pembangunan puskesmas, menjadi faktor pendorong. Komitmen pemerintah daerah dalam alokasi anggaran yang memadai dan program pembangunan yang berfokus pada pelayanan kesehatan masyarakat sangat penting.
		Rasio dokter per 10.000 penduduk	1. Kebijakan Pemerintah: Adanya kebijakan pemerintah yang mendukung peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menjadi faktor pendorong. Dengan adanya kebijakan yang kuat dan komitmen dari pemerintah daerah, langkah-langkah diambil untuk meningkatkan rasio dokter per 10.000 penduduk. 2. Kerjasama dengan Pihak Terkait: Kerjasama antara pemerintah daerah dengan institusi pendidikan, lembaga medis, dan

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Faktor Pendorong
			organisasi terkait mendorong peningkatan rasio dokter. Kolaborasi ini meliputi pengembangan program pendidikan dokter, pemagangan, dan program insentif bagi dokter yang bekerja di daerah terpencil.
		Jumlah kasus kriminal	1. Peningkatan Kesadaran Hukum: Peningkatan kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat tentang konsekuensi tindak kriminal menjadi faktor pendorong. Kampanye pendidikan publik, kegiatan sosialisasi, dan pelibatan masyarakat dalam upaya pencegahan kriminalitas membantu meningkatkan kesadaran hukum dan mengurangi tindak kriminal. 2. Penyediaan Akses Pendidikan dan Pelatihan: Penyediaan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas menjadi faktor pendorong. Pendidikan yang baik dan pelatihan keterampilan membantu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat, sehingga mereka memiliki lebih banyak peluang ekonomi yang sah dan kurang tergantung pada kegiatan kriminal. 3. Penguatan Sistem Hukum dan Keamanan: Penguatan sistem hukum dan keamanan merupakan faktor pendorong penting. Ini melibatkan peningkatan kehadiran kepolisian, peningkatan kapasitas penegakan hukum, perbaikan sistem peradilan pidana, dan peningkatan kerjasama antara institusi keamanan dan masyarakat.
		Jumlah tempat ibadah (buah)	1. Permintaan dan Kebutuhan Agama: Permintaan dan kebutuhan masyarakat akan tempat ibadah yang memadai menjadi faktor pendorong. Jika jumlah umat yang ingin beribadah meningkat, maka akan ada dorongan untuk membangun lebih banyak tempat ibadah. 2. Peningkatan Kesadaran Keagamaan: Peningkatan kesadaran keagamaan dalam masyarakat menjadi faktor pendorong. Jika masyarakat semakin peduli dan mengutamakan aspek keagamaan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan ada keinginan untuk memiliki lebih banyak tempat ibadah yang digunakan. 3. Dukungan Pemerintah dan Kebijakan yang Mendukung: Dukungan pemerintah dan kebijakan yang mendukung pembangunan tempat ibadah menjadi faktor pendorong. Jika pemerintah memberikan prioritas dan fasilitas yang memadai, termasuk melalui kebijakan perizinan yang jelas dan mudah, maka pembangunan tempat ibadah didorong.
		Jumlah jama'ah haji (orang)	1. Peningkatan Kesadaran dan Minat: Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjalankan ibadah haji serta meningkatnya minat untuk berangkat haji menjadi faktor pendorong. Jika kesadaran dan minat masyarakat meningkat, maka akan ada dorongan untuk mencapai target jumlah jamaah haji. 2. Dukungan Pemerintah: Dukungan pemerintah daerah dalam hal penyediaan fasilitas, informasi, dan bantuan bagi calon jamaah haji menjadi faktor pendorong. Pemerintah memberikan dukungan finansial, penyediaan sarana dan prasarana, serta mempermudah proses administrasi untuk memfasilitasi keberangkatan jamaah haji. 3. Sosialisasi dan Edukasi: Melakukan sosialisasi dan edukasi

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Faktor Pendorong
			kepada masyarakat mengenai proses pendaftaran, persyaratan, dan manfaat ibadah haji meningkatkan partisipasi masyarakat. Penyediaan informasi yang jelas dan komprehensif tentang proses haji serta manfaatnya bagi individu dan masyarakat memotivasi calon jamaah untuk berangkat.
		Persentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi baik/sedang (%)	1. Prioritas Pembangunan Infrastruktur: Pemerintah Provinsi Bengkulu memberikan prioritas pada pembangunan infrastruktur, termasuk jaringan jalan provinsi. Dengan memperhatikan pentingnya konektivitas dan aksesibilitas, pemerintah mendorong upaya perbaikan dan pemeliharaan jaringan jalan provinsi. 2. Dukungan Pemerintah Pusat: Dukungan dari pemerintah pusat dalam bentuk alokasi anggaran dan bantuan teknis menjadi faktor pendorong. Pemerintah pusat memberikan bantuan dalam pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan provinsi di Provinsi Bengkulu. 3. Kerjasama dengan Pihak Terkait: Pemerintah Provinsi Bengkulu melakukan kerjasama dengan pihak terkait seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan lembaga terkait lainnya. Kerjasama ini membantu dalam merencanakan, membangun, dan memelihara jaringan jalan provinsi.
		Jumlah Rumahtangga Pelanggan PLN (rt)	1. Perluasan Jaringan Listrik: Pemerintah Provinsi Bengkulu telah melakukan upaya perluasan jaringan listrik untuk meningkatkan ketersediaan listrik di seluruh wilayah. Dengan memperluas jaringan listrik, lebih banyak rumah tangga terhubung ke jaringan PLN dan menjadi pelanggan. 2. Program Subsidi dan Fasilitas Pembayaran: Pemerintah telah meluncurkan program subsidi listrik bagi rumah tangga miskin untuk memfasilitasi akses listrik yang lebih terjangkau. Selain itu, penyediaan fasilitas pembayaran yang mudah dan fleksibel juga menjadi pendorong bagi masyarakat untuk menjadi pelanggan PLN. 3. Kampanye Peningkatan Kesadaran: Pemerintah Provinsi Bengkulu melakukan kampanye dan sosialisasi tentang manfaat penggunaan listrik, keamanan, dan efisiensi energi kepada masyarakat. Dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya listrik dan keuntungan menjadi pelanggan PLN, minat masyarakat untuk menggunakan layanan PLN meningkat.
		Luas areal sawah beririgasi (teknis, semi teknis, sederhana)	1. Peningkatan Infrastruktur Irigasi: Pemerintah Provinsi Bengkulu melakukan investasi dalam pengembangan infrastruktur irigasi yang memadai, seperti membangun saluran irigasi baru, memperbaiki dan meningkatkan kapasitas bendungan, serta menyediakan pompa air yang efisien. Hal ini akan meningkatkan aksesibilitas air irigasi bagi petani. 2. Pengelolaan Sumber Daya Air yang Terpadu: Pemerintah Provinsi Bengkulu perlu mengembangkan kebijakan dan rencana pengelolaan sumber daya air yang terpadu. Hal ini mencakup pengaturan distribusi air irigasi secara adil dan efisien, pemanfaatan teknologi irigasi yang modern, serta pengurangan pemborosan air dalam sistem irigasi. 3. Pelatihan dan Peningkatan Pengetahuan Petani: Penting untuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada petani dalam

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Faktor Pendorong
			hal teknik irigasi yang efektif, pengelolaan air, dan praktik pertanian berkelanjutan. Dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani, mereka mengoptimalkan penggunaan sumber daya air dan meningkatkan produktivitas lahan sawah. 4. Pengembangan Kemitraan: Pemerintah Provinsi Bengkulu mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, seperti lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan organisasi petani. Kolaborasi ini meningkatkan akses petani terhadap pengetahuan, teknologi, dan sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan luas areal sawah beririgasi.
		Rumah tangga yang menggunakan air bersih/PDAM (Pelanggan)	1. Pengembangan Infrastruktur: Pemerintah Provinsi Bengkulu melakukan investasi dalam pengembangan infrastruktur PDAM, termasuk perluasan jaringan distribusi air bersih. Hal ini akan meningkatkan ketersediaan air bersih dan memperluas jangkauan layanan PDAM ke daerah-daerah yang belum terjangkau. 2. Subsidi dan Bantuan Keuangan: Pemerintah memberikan subsidi atau bantuan keuangan kepada rumah tangga dengan Pendapatan rendah untuk memfasilitasi pemasangan meteran air dan memenuhi tagihan bulanan PDAM. Langkah ini akan mendorong lebih banyak rumah tangga untuk menggunakan air bersih dari PDAM. 3. Edukasi dan Kampanye: Peningkatan kesadaran masyarakat tentang manfaat air bersih dan pentingnya penggunaan air PDAM perlu dilakukan melalui program edukasi dan kampanye. Masyarakat perlu diberi pemahaman tentang keunggulan air bersih dari PDAM dibandingkan dengan sumber air alternatif, serta pentingnya kebersihan dan sanitasi. 4. Penyediaan Alternatif Air Bersih: Selain memperluas jaringan PDAM, pemerintah mempertimbangkan penyediaan alternatif air bersih, seperti membangun sumur bor atau sistem pengolahan air sederhana di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh jaringan PDAM.
Misi 3 :Mewujudkan perekonomian yang berdaya saing tinggi	Sasaran Pokok 3 : Tercapainya struktur perekonomian yang kokoh, berbasis industri rakyat yang efisien, maju dan berdaya saing tinggi	Pertumbuhan ekonomi (%)	1. Potensi Sumber Daya Alam: Provinsi Bengkulu memiliki potensi sumber daya alam yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Pengembangan sektor pertanian dengan memanfaatkan lahan yang tersedia secara optimal, serta pengembangan sektor industri berbasis sumber daya alam, seperti pertambangan atau energi terbarukan, mendorong pertumbuhan ekonomi. 2. Pengembangan Infrastruktur: Peningkatan investasi dalam pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya, pelabuhan, bandara, dan akses listrik yang lebih luas, akan memperbaiki konektivitas dan memfasilitasi kegiatan ekonomi. Infrastruktur yang memadai akan meningkatkan efisiensi dalam distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan daya saing Provinsi Bengkulu. 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia: Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang berkualitas dan pelatihan keterampilan akan membantu menciptakan tenaga kerja yang lebih terampil dan produktif. Ini akan mendukung pertumbuhan sektor industri yang lebih maju dan layanan yang berkualitas.

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Faktor Pendorong
			4. Promosi Investasi: Mendorong investasi dari sektor swasta dengan memberikan insentif dan kemudahan berusaha akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah meningkatkan kerjasama dengan investor dalam mengembangkan sektor-sektor strategis, seperti pariwisata, industri pengolahan, atau pertambangan, untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan Pendapatan masyarakat.
		Pendapatan perkapita (Rp)	1. Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam: Memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada, seperti sektor pertanian, kehutanan, pariwisata, atau energi terbarukan, menjadi pendorong peningkatan Pendapatan per kapita. Pengembangan sektor-sektor ini dengan menggunakan teknologi modern dan meningkatkan nilai tambah produk akan meningkatkan Pendapatan masyarakat. 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia: Investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan yang berkualitas akan meningkatkan kualitas tenaga kerja. Meningkatkan akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar akan meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja, yang pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan Pendapatan per kapita. 3. Peningkatan Akses Terhadap Infrastruktur: Pembangunan infrastruktur yang memadai, seperti jalan raya, jaringan listrik yang luas, akses ke air bersih, dan akses ke layanan kesehatan, akan meningkatkan konektivitas dan meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi. Ini akan mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dan berkontribusi pada peningkatan Pendapatan per kapita. 4. Diversifikasi Ekonomi: Mendorong diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan, seperti pariwisata, industri pengolahan, atau jasa berbasis teknologi, meningkatkan Pendapatan per kapita. Mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu dan mengembangkan sektor-sektor baru akan menciptakan peluang kerja dan peningkatan Pendapatan. 5. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM): Memberikan dukungan yang lebih besar kepada UMKM, seperti akses ke modal, pelatihan, dan pasar, akan memberikan peluang bagi pengembangan usaha dan peningkatan Pendapatan per kapita. UMKM memiliki potensi untuk menciptakan lapangan kerja dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi lokal.
	Sasaran Pokok 4 : Meningkatnya investasi dan perdagangan yang mampu mendukung perkuatan daya saing dan kestabilan harga	Nilai investasi (Jutaan Rupiah)	Ada beberapa hal yang telah di lakukan Pemerintah Provinsi Bengkulu (Dinas Pendapatanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu) untuk mendorong peningkatan nilai investasi yang berasal dari investor-investor yang masuk ke provinsi Bengkulu yaitu sebagai berikut :a. Mempromosikan potensi-potensi yang ada di Provinsi Bengkulu untuk di kembangkan didalam Negeri maupun luar negerib. Iklim yang berusaha kondusif yaitu menyangkut gangguan keamanan dan juga dengan peraturan peraturan yang jelas dan tidak merugikan Pembinaan terhadap Dunia usaha dan masyarakat guna meningkatkan kualitas sumber daya manusiac. Pengendalian pelaksanaan Pendapatanaman modal melalui informasi realisasi

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Faktor Pendorong
			Pendapatanaman modal sesuai format LKPM tiap tiga bulan sekali (triwulanan yang akan memudahkan pemerintahatau masyarakat memantau perkembangan Pendapatanaman modal.d. Memberikan pelayanan perizinan prima dengan aparatur yang profesional dengan memberikan kemudahan ,kepastian dan transparansi proses perizinan dan non perizinan.
		a. PMDN (Rp)	
		b. PMA (USD)	
		Nilai Ekspor (Jutaan Rupiah)	1. Potensi Sumber Daya Alam: Provinsi Bengkulu memiliki potensi sumber daya alam yang dijadikan bahan ekspor, seperti pertanian, kehutanan, dan pertambangan. Potensi ini menjadi pendorong dalam meningkatkan nilai ekspor jika dikelola dengan baik dan diberikan nilai tambah. 2. Kebijakan dan Dukungan Pemerintah: Kebijakan dan dukungan pemerintah yang mendukung ekspor, seperti insentif pajak, fasilitas perizinan yang mudah, dan promosi perdagangan, mendorong peningkatan nilai ekspor. Langkah-langkah ini memfasilitasi akses pasar, memperkuat daya saing produk, dan meningkatkan iklim investasi di sektor ekspor. 3. Pengembangan Pasar Ekspor Baru: Mencari dan mengembangkan pasar ekspor baru menjadi pendorong untuk meningkatkan nilai ekspor. Mengidentifikasi peluang pasar baru, memperkuat hubungan dagang dengan negara-negara mitra, serta mengadakan promosi produk yang intensif membantu diversifikasi pasar ekspor dan meningkatkan nilai ekspor secara keseluruhan.
		Laju inflasi (%)	1. Kebijakan Fiskal yang Ketat: Kebijakan fiskal yang ketat atau pengendalian belanja pemerintah yang ketat menekan laju inflasi dengan mengurangi tingkat permintaan agregat di ekonomi. 2. Stabilitas Pasokan: Jika pasokan barang dan jasa di pasar cukup stabil, baik dari produksi lokal maupun impor, maka akan ada tekanan yang lebih rendah terhadap harga dan inflasi. 3. Kondisi Ekonomi Global: Ketidakpastian ekonomi global, seperti fluktuasi harga komoditas internasional atau perubahan dalam permintaan dan pasokan global, mempengaruhi inflasi di Provinsi Bengkulu.
	Sasaran Pokok 5 : Berkembangnya kewirausahaan masyarakat dan meningkatnya peranan dan daya saing usaha-usaha ekonomi skala mikro dan kecil	Angka pengangguran Terbuka (%)	1. Pengembangan Sektor Ekonomi: Pengembangan sektor ekonomi yang berpotensi memberikan lapangan kerja baru menjadi pendorong untuk mengurangi angka pengangguran. Fokus pada sektor-sektor seperti pariwisata, pertanian, perikanan, dan industri kreatif menciptakan lebih banyak peluang kerja bagi penduduk. 2. Peningkatan Kualifikasi dan Keterampilan: Meningkatkan kualifikasi dan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan meningkatkan peluang mereka dalam mencari pekerjaan. Program pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja membantu mengurangi kesenjangan antara kualifikasi dan permintaan tenaga kerja. 3. Investasi dan Pemberdayaan UMKM: Mendorong investasi dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menciptakan lapangan kerja baru. UMKM merupakan sektor yang memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja, dan

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Faktor Pendorong
			dukungan dalam bentuk akses ke modal, pelatihan, dan akses pasar meningkatkan kontribusi mereka terhadap pengurangan pengangguran.
		Proporsi Penduduk miskin (%)	1. Peningkatan lapangan kerja: Meningkatnya peluang kerja dan pembukaan lapangan kerja baru memberikan pendorong dalam mengurangi jumlah penduduk miskin.2. Peningkatan akses pendidikan: Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan akan memberikan peluang yang lebih baik bagi penduduk untuk menkan pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan Pendapatan mereka.3. Program Pendapatanggulungan kemiskinan: Implementasi program Pendapatanggulungan kemiskinan yang efektif, seperti bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi, membantu mengurangi proporsi penduduk miskin.
Misi 4 : Mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan	Sasaran Pokok 6 : Tercapainya pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan	Nilai Tukar Petani	1. Peningkatan Nilai Tambah Produk Pertanian: Mendorong petani untuk melakukan pengolahan lanjutan terhadap produk pertanian mereka, seperti pengolahan kopi menjadi kopi bubuk atau pembuatan produk olahan karet, meningkatkan nilai tukar petani. 2. Peningkatan Akses ke Pasar: Meningkatkan infrastruktur transportasi dan distribusi, serta memberikan akses yang lebih baik ke informasi pasar, membantu petani mengakses pasar yang lebih menguntungkan dan meningkatkan nilai tukar mereka. 3. Pendidikan dan Pelatihan Pemasaran: Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada petani mengenai strategi pemasaran, negosiasi harga, dan pengelolaan usaha pertanian membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam memasarkan produk pertanian dan meningkatkan nilai tukar.
		Produksi padi (ton)	1. Pengembangan Infrastruktur Irigasi: Pembangunan infrastruktur irigasi yang baik, termasuk sistem irigasi yang efisien dan pengelolaan air yang baik, mendorong produksi padi di Provinsi Bengkulu. 2. Peningkatan Akses terhadap Pupuk dan Benih Unggul: Memastikan ketersediaan pupuk dan benih unggul yang berkualitas serta meningkatkan akses petani terhadapnya meningkatkan produksi padi di Provinsi Bengkulu. 3. Penggunaan Teknologi Pertanian yang Tepat: Mendorong petani untuk menggunakan teknologi pertanian modern, seperti sistem irigasi tetes, penggunaan varietas padi unggul, dan teknik budidaya yang efisien, meningkatkan produktivitas padi. 4. Pendidikan dan Pelatihan Pertanian: Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada petani tentang praktik pertanian yang efisien, manajemen tanaman padi, dan penggunaan teknologi modern meningkatkan produksi padi di Provinsi Bengkulu.
		Produksi hortikultura (ton):	
		Buah-buahan	1. Potensi Sumber Daya Alam: Provinsi Bengkulu memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, seperti lahan subur, iklim yang sesuai, dan air yang cukup, yang mendorong produksi buah-buahan. 2. Pengembangan Varietas Unggul: Pendorong lainnya adalah pengembangan varietas buah-buahan yang unggul dan adaptif

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Faktor Pendorong
			terhadap kondisi lingkungan di Provinsi Bengkulu, sehingga meningkatkan hasil produksi dan kualitas buah-buahan. 3. Dukungan Teknis dan Pengetahuan: Adanya dukungan teknis dan pengetahuan yang baik, seperti pelatihan, penggunaan teknologi pertanian modern, dan praktik budidaya yang optimal, mendorong petani untuk meningkatkan produksi buah-buahan.
		Sayuran	1. Potensi Sumber Daya Alam: Provinsi Bengkulu memiliki lahan subur dan iklim yang sesuai untuk budidaya sayuran. Potensi ini menjadi pendorong utama dalam meningkatkan produksi sayuran di daerah tersebut. 2. Permintaan Pasar: Adanya permintaan pasar yang tinggi terhadap sayuran, baik dari pasar lokal maupun luar daerah, menjadi pendorong bagi petani untuk meningkatkan produksi sayuran. 3. Teknologi Pertanian: Penggunaan teknologi pertanian modern, seperti penggunaan pupuk organik, sistem irigasi yang efisien, dan pengendalian hama terintegrasi, meningkatkan produktivitas dan kualitas sayuran.
		Produksi palawija (ton)	1. Potensi Sumber Daya Alam: Provinsi Bengkulu memiliki lahan yang subur dan beragam kondisi agroklimatik yang mendukung pertumbuhan tanaman palawija seperti kacang tanah, jagung, kacang hijau, dan lain sebagainya. 2. Diversifikasi Tanaman: Upaya pemerintah dalam mendorong diversifikasi tanaman dari padi ke palawija, sebagai alternatif dalam meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi risiko ketidakpastian produksi padi. 3. Permintaan Pasar: Adanya permintaan pasar yang meningkat terhadap produk palawija baik di tingkat lokal maupun nasional, seperti kacang tanah, jagung, dan lainnya, menjadi pendorong bagi petani untuk meningkatkan produksi palawija.
		Produksi Perkebunan unggulan (ton)	1. Potensi Lahan dan Iklim: Provinsi Bengkulu memiliki lahan yang subur dan kondisi iklim yang mendukung pertumbuhan tanaman perkebunan unggulan seperti kopi, kelapa sawit, karet, dan cokelat. 2. Permintaan Pasar: Adanya permintaan pasar yang tinggi terhadap produk perkebunan unggulan seperti kopi dan kelapa sawit baik di tingkat nasional maupun internasional, menjadi pendorong bagi petani untuk meningkatkan produksi. 3. Dukungan Pemerintah: Dukungan kebijakan dan program pemerintah, seperti insentif perkebunan, penyuluhan pertanian, dan pengembangan infrastruktur, mendorong petani untuk mengembangkan dan meningkatkan produksi perkebunan unggulan.
		Produksi daging ternak (ton)	1. Potensi Sumber Daya Alam: Provinsi Bengkulu memiliki potensi sumber daya alam berupa lahan yang luas dan hijau, yang dimanfaatkan untuk pengembangan peternakan dan produksi pakan ternak. 2. Permintaan Pasar: Adanya permintaan yang tinggi terhadap daging ternak di pasar lokal, regional, maupun nasional, menjadi pendorong bagi peternak untuk meningkatkan produksi. 3. Dukungan Pemerintah: Adanya kebijakan dan program pemerintah yang mendukung pengembangan peternakan, seperti

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Faktor Pendorong
			pemberian insentif, bantuan teknis, dan penyuluhan pertanian, mendorong peternak untuk meningkatkan produksi daging ternak.
		Produksi Perikanan (ton)	1. Sumber Daya Alam yang Kaya: Provinsi Bengkulu memiliki potensi perikanan yang melimpah, terutama di sepanjang pantai dan perairan sungai. Ketersediaan sumber daya alam seperti laut, sungai, dan danau menjadi faktor pendorong dalam produksi perikanan di Provinsi Bengkulu 2. Dukungan Infrastruktur: Adanya infrastruktur yang memadai, seperti pelabuhan perikanan, tempat pembudidayaan, dan fasilitas pemrosesan ikan, mendorong pertumbuhan produksi perikanan. Infrastruktur yang baik mempermudah distribusi hasil tangkapan ikan dan produk perikanan. 3. Untuk Produksi Perikanan tangkap dari tahun ketahun mengalami peningkatan karna didukung oleh Program dan kegiatan yang ada pad Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu : Program Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap , Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan , Program Prioritas Kepala Daerah. , Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan, Pengeloaan Perizinan dan Kenelayanan, Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang dana nya bersumber dari APBN dan APBD, serta tahun 2022 dinas kelautanmenkan dana Tugas Pembantuan(TP) Pengelolaan Pelabuhan Perikanan. 4. Untuk Produksi Perikanan Budidaya dari tahun ketahun mengalami peningkatan karna adanya Program pembudidaya ikan yang menggunakan bibit unggul dimana salah satu kegiatannya adalah pelatihan budidaya dan manajemen pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan sehingga para Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) di Kabupaten/ Kota dalam lingkup Provinsi Bengkulu sudah optimal dalam menjaga kesehatan ikan dan lingkungan padaarea kolam yang dimiliki sehingga produksi dari berbagai spesies ikan meningkat.
		Produksi batubara (ton)	1. Sumber Daya Alam yang Melimpah: Provinsi Bengkulu memiliki cadangan batubara yang cukup besar. Ketersediaan sumber daya alam ini menjadi faktor pendorong utama dalam produksi batubara di provinsi ini. 2. Potensi Ekonomi: Industri pertambangan batubara memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Provinsi Bengkulu, termasuk peningkatan pendapatan daerah, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi.
	Sasaran Pokok 7 : Meningkatnya pengendalian lingkungan hidup secara berkelanjutan dan sesuai dengan daya dukungnya	Emisi gas rumah kaca (ton C02/eq)	1. Kesadaran akan Perubahan Iklim: Kesadaran akan perubahan iklim dan dampaknya yang semakin meningkat di kalangan masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta menjadi pendorong dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Hal ini mendorong adopsi teknologi dan kebijakan yang ramah lingkungan. 2. Kebijakan Lingkungan yang Progresif: Adanya kebijakan pemerintah yang progresif dalam mengurangi emisi gas rumah kaca, seperti penggunaan energi terbarukan, pengembangan transportasi berkelanjutan, dan pengelolaan limbah yang baik, menjadi pendorong dalam mengurangi emisi di Provinsi Bengkulu. 3. Pengembangan Energi Terbarukan: Pengembangan sumber energi terbarukan seperti energi surya, energi angin, dan

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Faktor Pendorong
			biomassa mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mengurangi emisi gas rumah kaca.
MISI 5 : Mewujudkan Masyarakat yang Adil dan Demokratis	Sasaran pokok 8 : Meningkatnya Pemerataan Pendapatan di Masyarakat dan Antar Daerah	Indeks Gini	1. Pembangunan Ekonomi yang Inklusif: Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menjadi faktor pendorong untuk mengurangi indeks Gini di Provinsi Bengkulu. Peningkatan kesempatan kerja yang berkualitas, pembangunan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pemberdayaan ekonomi lokal membantu mengurangi kesenjangan ekonomi. 2. Penyediaan Akses Pendidikan dan Kesehatan yang Merata: Meningkatkan akses penduduk terhadap pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan yang merata membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Investasi dalam infrastruktur pendidikan dan kesehatan, serta program bantuan sosial yang tepat sasaran, memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi di Provinsi Bengkulu. 3. Pengembangan Program Pemberdayaan Ekonomi: Mendorong pengembangan program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan keterampilan, akses modal usaha, dan pendampingan bagi kelompok masyarakat yang rentan membantu mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan indeks Gini.
	Sasaran Pokok 9 : Meningkatnya Pengarusutamaan Gender (PUG)	Jumlah Perempuan di DPRD Provinsi (orang)	1. Kesadaran dan Gerakan Kesetaraan Gender: Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik menjadi pendorong peningkatan jumlah perempuan di DPRD Provinsi Bengkulu. Gerakan perempuan yang memperjuangkan hak-hak politik dan kesetaraan gender memberikan dorongan positif. 2. Kebijakan dan Quota Kepemimpinan Perempuan: Implementasi kebijakan dan quota yang mengamankan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif menjadi pendorong peningkatan jumlah perempuan di DPRD Provinsi Bengkulu. Kebijakan ini memberikan insentif dan kesempatan yang lebih besar bagi perempuan untuk terlibat dalam politik. 3. Pendidikan Politik dan Pemberdayaan Perempuan: Meningkatkan pendidikan politik dan pemberdayaan perempuan melalui pelatihan, pengembangan keterampilan kepemimpinan, dan penguatan jaringan politik menjadi pendorong partisipasi perempuan di DPRD Provinsi Bengkulu.
	Sasaran Pokok 10: Terwujudnya Pengelolaan Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Jumlah daerah yang memperoleh Opini WTP	1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya: Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur, dan sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik menjadi faktor pendorong dalam memperoleh Opini WTP dari BPK-RI. Dengan adanya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya, Kabupaten/Kota memiliki potensi yang lebih besar untuk memenuhi standar akuntabilitas yang diharapkan. 2. Implementasi Standar Akuntansi yang Baik: Jika Kabupaten/Kota mampu menerapkan standar akuntansi dengan baik, baik dari segi teknis maupun prinsip-prinsipnya, maka peluang untuk memperoleh Opini WTP akan lebih besar. Hal ini melibatkan pemahaman yang baik tentang tata kelola keuangan yang benar, pelatihan bagi staf keuangan, dan pemantauan yang ketat terhadap kepatuhan terhadap standar akuntansi.

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Faktor Pendorong
			3. Perbaikan Administrasi dan Regulasi: Upaya untuk menyederhanakan proses administrasi dan regulasi serta memperbaiki tata kelola keuangan yang efisien dan transparan akan menjadi pendorong dalam memperoleh Opini WTP. Dengan mengurangi hambatan administratif dan menyusun regulasi yang jelas, Kabupaten/Kota lebih mudah memenuhi persyaratan audit.
		Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi	1. Kesadaran dan Komitmen Pemerintah Daerah: Kesadaran dan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah Provinsi Bengkulu akan pentingnya pengukuran kinerja dan SAKIP menjadi faktor pendorong utama. Jika pemerintah daerah memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik, nilai SAKIP ditingkatkan secara signifikan. 2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia: Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan terkait SAKIP menjadi faktor pendorong dalam mencapai nilai SAKIP yang baik. Dengan meningkatkan pemahaman dan keterampilan pegawai terkait pengukuran kinerja dan SAKIP, instansi pemerintah secara efektif mengimplementasikan dan mengelola sistem tersebut. 3. Penyediaan Infrastruktur dan Sistem Pendukung: Penyediaan infrastruktur dan sistem pendukung yang memadai, seperti teknologi informasi yang canggih dan sistem pelaporan yang terintegrasi, mendorong efisiensi dan akurasi dalam pengukuran kinerja serta menyediakan data yang diperlukan untuk nilai SAKIP.

2.5.3. Rekomendasi Tindak Lanjut

Rekomendasi yang dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan RPJPD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045 :

- Pembangunan Infrastruktur:**

Prioritaskan pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas dan aksesibilitas, seperti jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, dan jaringan telekomunikasi. Infrastruktur yang baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan akses ke layanan dasar, dan mendukung sektor pariwisata.
- Pengembangan Sumber Daya Alam :**

Perhatikan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, khususnya sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan. Dukung inovasi dan investasi di sektor-sektor ini untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan kesejahteraan masyarakat.
- Pemberdayaan Masyarakat :**

Fokus pada pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, sanitasi, dan air bersih. Dukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah

(UMKM) serta inisiatif ekonomi lokal untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi.

4) Pelestarian Lingkungan :

Berikan perhatian pada pelestarian lingkungan dan konservasi sumber daya alam, terutama dalam hal pengelolaan hutan, penanggulangan kerusakan lahan, dan upaya mitigasi perubahan iklim. Dukung program perlindungan satwa liar, kawasan konservasi, dan pengembangan pariwisata berkelanjutan.

5) Pengembangan Pariwisata :

Identifikasi potensi pariwisata di Provinsi Bengkulu dan tingkatkan promosi serta fasilitas pariwisata. Bangun destinasi wisata yang berkelanjutan dengan mempertahankan keindahan alam, budaya, dan kearifan lokal. Diversifikasi produk wisata untuk meningkatkan daya tarik pariwisata dan pendapatan daerah.

Rekomendasi yang dapat menjadi pertimbangan dalam penentuan indikator RPJPD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045:

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Rencana Tindak Lanjut
MISI 1 : Mewujudkan sumber daya manusia yang menguasai IPTEK dan IMTAQ	Sasaran pokok 1 : Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Religius	Angka Partisipasi Sekolah (%):	1. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur pendidikan, termasuk pembangunan dan perbaikan gedung sekolah, pembangunan ruang kelas baru atau rehabilitasi ruang kelas, dan penyediaan transportasi untuk siswa yang jauh dari sekolah. 2. Mengembangkan program beasiswa dan bantuan keuangan bagi keluarga kurang mampu secara ekonomi, dengan melibatkan kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan pihak swasta. 3. Melakukan kampanye sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan manfaatnya bagi masa depan anak-anak, serta mengatasi stigma atau budaya yang menghambat partisipasi sekolah. 4. peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga para orang tua dapat memprioritaskan pendidikan anak-anaknya 5. mengoptimalkan pelaksanaan Pendidikan luar sekolah seperti memperbanyak PKBM dan meningkatkan jumlah siswa yang mengikuti program kejar paket.
		- 16-18 Tahun	
		Angka Rata-rata Lama Sekolah (thn)	1. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur pendidikan, termasuk pembangunan dan perbaikan gedung sekolah, pembangunan ruang kelas baru atau rehabilitasi ruang kelas, dan penyediaan transportasi untuk siswa yang jauh dari sekolah. 2. Mengembangkan program beasiswa dan bantuan keuangan bagi keluarga kurang mampu secara ekonomi, dengan melibatkan kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan pihak swasta. 3. Melakukan kampanye sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan manfaatnya bagi masa depan anak-anak, serta mengatasi stigma atau budaya yang menghambat partisipasi sekolah. 4. peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga para orang tua dapat memprioritaskan pendidikan anak-anaknya 5. mengoptimalkan pelaksanaan Pendidikan luar sekolah seperti memperbanyak PKBM dan meningkatkan jumlah siswa yang mengikuti program kejar paket.
		Persentase Penduduk 15 ke Atas Yang Buta Huruf (%)	
		Rasio guru terhadap murid - SMA/MA	Pemerataan distribusi guru untuk daerah terpencil, dengan cara : 1. Insentif dan fasilitas: Untuk mendorong guru untuk mengajar di daerah terpencil dan terpelosok, dilakukan pemberian insentif dan fasilitas tambahan, seperti tunjangan khusus, akomodasi, atau kesempatan pengembangan profesional. 2. Aksesibilitas : ketercukupan aksesibilitas kepada guru yang ditempatkan daerah terpencil berupa Listrik, Infrastruktur Jalan, Transportasi dll 3. Program penempatan khusus: dibuat program penempatan khusus yang mendorong guru baru dan guru bantu untuk bekerja di daerah yang terpencil dan terpelosok.
		Angka harapan hidup (tahun)	1. Peningkatan Investasi dalam Infrastruktur Kesehatan: Pemerintah Provinsi Bengkulu perlu meningkatkan investasi dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur kesehatan. Ini mencakup pembangunan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan pusat pelayanan kesehatan primer di daerah terpencil, penyediaan peralatan medis yang memadai serta menempatkan tenaga medis yang cukup di setiap wilayah. 2. meningkatkan pemenuhan 9 standar tenaga kesehatan di tingkat puskesmas dan meningkatkan pemenuhan sarana prasarana kesehatan di tingkat puskesmas, sehingga puskesmas mampu melakukan Pendapatanganan kesehatan tingkat kronis/berat 3. mengoptimalkan pencegahan dan Pendapatanggulungan penyakit menular dan tidak menular terutama di level pelayanan kesehatan rujukan (Puskesmas Rawat Inap/Poned dan Rumah Sakit)

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Rencana Tindak Lanjut
			4. meningkatkan Universal Health Coverage (UHC) melalui peningkatan cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat baik melalui PBI JKN maupun Jamkesprov dan Jamkeskab/Jamkeskot 5. meningkatkan Persentase Balita yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap maupun desa yang menerapkan Universal Child Immunization (UCI) dan penurunan angka stunting 6. Program Edukasi Kesehatan: Pemerintah perlu meluncurkan kampanye edukasi kesehatan yang terarah dan komprehensif. Program-program ini mencakup penyuluhan tentang pola hidup sehat, pencegahan penyakit, kebersihan diri, dan pentingnya akses terhadap pelayanan kesehatan. Melibatkan komunitas dan kelompok masyarakat yang berperan penting dalam edukasi membantu mencapai tujuan ini.
		Angka kematian ibu (jiwa)	1. Peningkatan Infrastruktur Kesehatan: Pemerintah Provinsi Bengkulu perlu meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur kesehatan dengan memperluas jaringan puskesmas, rumah sakit, dan posyandu di daerah yang sulit dijangkau. Ini juga melibatkan peningkatan akses terhadap transportasi yang memadai untuk menghubungkan masyarakat dengan fasilitas kesehatan. 2. memperbanyak puskesmas poned 3. memperbanyak Puskesmas atau Rumah Sakit yang melaksanakan kegawatdaruratan maternal neonatal 4. Program Edukasi dan Kampanye Kesadaran: Dilakukan kampanye edukasi yang luas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perawatan kesehatan maternal. Program ini harus ditujukan kepada ibu hamil, keluarga, komunitas, serta melibatkan pihak sekolah dan media massa untuk menyebarkan informasi yang akurat dan relevan. 5. Meningkatkan kualitas praktik tradisional (dukun beranak) melalui pelatihan, agar memahami standar persalinan kesehatan. 6. meningkatkan persentase ibu hamil yang melakukan kunjungan sampai K4 (4 minggu setelah persalinan) dan ibu hamil yang melahirkan fasilitas pelayanan kesehatan, 7. memberikan kecukupan gizi terutama tablet tambah darah untuk Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK)
		Angka kematian bayi (jiwa)	1. memperbanyak puskesmas poned 2. memperbanyak Puskesmas atau Rumah Sakit yang melaksanakan kegawatdaruratan maternal neonatal 3. Meningkatkan kualitas praktik tradisional (dukun beranak) melalui pelatihan, agar memahami standar persalinan kesehatan. 4. meningkatkan persentase ibu hamil yang melakukan kunjungan sampai K4 (4 minggu setelah persalinan) dan ibu hamil yang melahirkan fasilitas pelayanan kesehatan, serta Meningkatkan kunjungan neonatal, terutama dalam 48 jam pertama setelah kelahiran 5. memberikan kecukupan gizi terutama tablet tambah darah untuk Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) 6. Memberikan imunisasi dasar lengkap kepada bayi sesuai jadwal yang direkomendasikan oleh program imunisasi nasional. 7. Memberikan makanan tambahan yang berkualitas dan bergizi kepada bayi setelah usia enam bulan, sesuai dengan pedoman gizi anak serta Mengedukasi ibu dan keluarga tentang pentingnya pemberian makanan tambahan yang tepat dan seimbang untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi. 8. Meningkatkan cakupan imunisasi dasar dengan mengintensifkan kampanye imunisasi dan memudahkan akses ke fasilitas kesehatan yang menyediakan imunisasi serta Memberikan dukungan dan edukasi kepada ibu mengenai pentingnya inisiasi menyusui dini dalam memberikan ASI eksklusif pada bayi selama enam bulan pertama. 9. Mengoptimalkan Program PEMANTAUAN PERTUMBUHAN, PERKEMBANGAN, DAN GANGGUAN TUMBUH KEMBANG ANAK terutama di Fasyankes
		Rasio puskesmas dan Puskesmas Pembantu per 10.000 penduduk	1. Penyediaan Anggaran yang Memadai: Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pembangunan, perawatan, dan operasionalisasi puskesmas. Penggunaan anggaran yang efektif dan efisien juga perlu diperhatikan. 2. Menekan laju pertumbuhan penduduk: Upaya ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pelayanan kesehatan dengan jumlah populasi yang harus dilayani. Dengan menekan laju pertumbuhan penduduk, akan ada peningkatan proporsi Puskesmas yang tersedia bagi setiap individu.
		Rasio dokter per 10.000 penduduk	1. Peningkatan Rekrutmen dan Pemagangan: Membuat program rekrutmen dokter yang efektif untuk menarik lulusan pendidikan kedokteran yang berkualitas ke Provinsi Bengkulu. Pemerintah daerah bekerja sama dengan institusi pendidikan untuk mengidentifikasi, merekrut, dan melatih dokter baru. 2. Insentif dan Fasilitas Kerja: Memberikan insentif dan fasilitas kerja yang menarik bagi dokter yang ingin bekerja di Provinsi Bengkulu. Insentif seperti tunjangan khusus, fasilitas pendidikan dan pelatihan, serta dukungan perumahan membantu menarik dan mempertahankan dokter di daerah ini. 3. Peningkatan Kerjasama dengan Institusi Pendidikan: Melakukan kerjasama yang erat dengan institusi pendidikan kedokteran dalam hal pengembangan kurikulum, program pemagangan, dan peningkatan kapasitas pendidikan dokter. Ini akan membantu memastikan tersedianya jumlah dokter yang memadai untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat Bengkulu termasuk dokter spesialis dan dokter sub spesialis 4. Peningkatan Kualitas Pendidikan Kedokteran : Peningkatan Akreditasi Fakultas Kedokteran Universitas Bengkulu, kecukupan tenaga dosen yang berasal dari Internal Provinsi Bengkulu, serta menjadikan RSUD M.Yunus sebagai Rumah Sakit Pendidikan sehingga proses belajar mengajar dan pemagangan di Fakultas Kedokteran Universitas Bengkulu dapat dilaksanakan di RSUD M.Yunus
		Jumlah kasus kriminal	1. Peningkatan Keamanan Lingkungan: Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan keamanan lingkungan, terutama di daerah yang rawan kejahatan. Ini mencakup peningkatan penerangan jalan, pemasangan kamera pengawas, dan peningkatan patroli kepolisian untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman. 2. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan: Perlu ditingkatkan akses dan kualitas pendidikan dan pelatihan, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan terhadap kriminalitas. Ini membantu meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kesadaran hukum masyarakat, serta memberikan peluang ekonomi yang lebih baik. 3. Penegakan Hukum yang Efektif: Peningkatan penegakan hukum yang efektif harus menjadi fokus utama. Ini meliputi peningkatan jumlah personel kepolisian, peningkatan pelatihan, peningkatan kemampuan investigasi, dan penguatan kerjasama dengan institusi hukum lainnya. 4. Kolaborasi dengan Pihak Terkait: Penting untuk membangun kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, kepolisian, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil. Kolaborasi ini menghasilkan upaya yang lebih efektif dalam menangani kasus kriminal dan mencegah terjadinya tindak kejahatan di Provinsi Bengkulu.

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Rencana Tindak Lanjut
		Jumlah tempat ibadah (buah)	1. Peningkatan Koordinasi dengan Pihak Terkait: Perlu dilakukan peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga agama, dan masyarakat dalam proses pembangunan tempat ibadah. Koordinasi yang baik membantu mengatasi konflik kepentingan dan mempercepat proses perizinan. 2. Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat: Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pembangunan tempat ibadah, kebijakan terkait, dan manfaatnya bagi masyarakat meningkatkan dukungan dan pemahaman masyarakat terhadap pembangunan tempat ibadah. 3. Penyediaan Anggaran yang Memadai: Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pembangunan dan pemeliharaan tempat ibadah. Ini dilakukan melalui perencanaan anggaran yang terarah dan peningkatan sumber daya keuangan daerah. 4. Pemantauan dan Evaluasi: Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pembangunan tempat ibadah yang telah dilakukan, termasuk dalam hal keberlanjutan, pemeliharaan, dan pemanfaatan. Hal ini membantu mengidentifikasi kendala yang muncul dan merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. 5. Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan: Mendorong partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan tempat ibadah memberikan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Melibatkan masyarakat membantu mempercepat proses pembangunan dan meningkatkan pemeliharaan tempat ibadah yang ada.
		Jumlah jama'ah haji (orang)	1. Pengembangan Sumber Daya Manusia: Melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas petugas yang terlibat dalam proses pendaftaran dan pelaksanaan ibadah haji. Hal ini meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan yang diberikan kepada calon jamaah. 2. Kerja Sama dengan Instansi Terkait: Membangun kerja sama yang baik dengan instansi terkait, seperti Kementerian Agama, maskapai penerbangan, dan lembaga terkait lainnya, untuk memfasilitasi pelaksanaan ibadah haji. Koordinasi yang baik antara berbagai pihak mempermudah proses pendaftaran dan pelaksanaan ibadah haji. 3. Peningkatan Akses Informasi: Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi mengenai proses pendaftaran, persyaratan, dan manfaat ibadah haji melalui kampanye sosialisasi yang efektif, media massa, dan media sosial. Hal ini membantu meningkatkan minat dan partisipasi masyarakat dalam berangkat haji. 4. Pemantauan dan Evaluasi: Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap proses pendaftaran dan pelaksanaan ibadah haji. Hal ini membantu mengidentifikasi kendala-kendala yang muncul dan merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk mencapai target jumlah jamaah haji. 5. Peningkatan Kerjasama Antar Provinsi: Membangun kerjasama antarprovinsi dalam hal redistribusi kuota haji yang tidak terpakai. Dengan adanya kerjasama tersebut, provinsi yang memiliki kelebihan kuota membagikan kuota yang tidak terpakai kepada provinsi lain yang masih memiliki kekurangan kuota.
		Persentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi baik/edang (%)	1. Peningkatan Anggaran: Pemerintah Provinsi Bengkulu mengupayakan peningkatan alokasi anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan nasional. Hal ini dilakukan dengan mengalokasikan lebih banyak dana untuk sektor infrastruktur, termasuk jalan nasional. 2. Mencari dan mengoptimalkan Alternatif Anggaran selain APBD Murni untuk penganggaran Jalan melalui dana Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Inpres Jalan, Sertifikat Berharga Syariah Negara (SBSN), maupun Diskresi Kebijakan Kementerian PUPR untuk pendanaan Jalan Provinsi yang didanai oleh BPJN Provinsi Bengkulu 3. Secara Rutin melakukan inspeksi dan penindakan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan dan penertiban Over Dimension Over Load (ODOL) 4. Mewajibkan Kendaraan Bertonase berat untuk melewati jalan Lingkar Luar dan Jalan TOL.
		Jumlah Rumahtangga Pelanggan PLN (rt)	1. Memberikan bantuan pasang listrik gratis daya 450 Kwh terutama bagi masayarakat miskin 2. Memberikan subsidi pasang listrik daya 900 Kwh bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) 3. Membangun pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT) terutama Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTB), Serta Pembangkit Listrik Tenaga Microhidro dan Minihidro (PLTMH) 4. Memperbanyak Gardu Induk dan Jaringan Transmisi Listrik (SUTT dan SUTET) 5. Mengoptimalkan Program CSR dalam rangka meningkatkan sambungan listrik bagi masyarakat miskin
		Luas areal sawah beririgasi (teknis, semi teknis, sederhana)	1. Pengembangan sumber daya air: Meningkatkan pengelolaan sumber daya air, seperti melalui pembangunan waduk atau embung, dan pengelolaan drainase yang baik, meningkatkan ketersediaan air untuk irigasi. 2. Peningkatan infrastruktur irigasi: Perbaikan dan pembangunan infrastruktur irigasi, termasuk saluran irigasi, pintu air, dan sistem pengendalian air yang efisien, perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan air irigasi. 3. Pemberdayaan petani: Memberikan pelatihan dan bantuan teknis kepada petani dalam pengelolaan irigasi yang baik, serta memberikan akses yang lebih baik terhadap teknologi irigasi modern, membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi penggunaan air. 4. Kebijakan dan regulasi yang mendukung: Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan luas areal sawah beririgasi, termasuk penyediaan dana investasi, insentif, dan perlindungan hak pemilikan air irigasi. selain itu seluruh Kab/Kota se Provinsi Bengkulu perlu segera menetapkan Perda dan Perkada terkait Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). 5. Pengawasan dan monitoring: Penting untuk melaksanakan pengawasan dan monitoring yang ketat terhadap penggunaan air irigasi dan infrastruktur irigasi untuk memastikan penggunaan yang efisien dan berkelanjutan, terutama mengoptimalkan peran Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Petugas Pintu Air. 6. Kolaborasi dengan pihak terkait: Melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk petani, lembaga riset, dan lembaga pemerintah terkait, dalam perencanaan dan implementasi kebijakan irigasi memperkuat pengembangan luas areal sawah beririgasi.
		Rumah tangga yang menggunakan air	1. Meningkatkan ketersediaan terhadap air baku melalui pembangunan waduk dan embung sebagai reservoir air yang juga bisa digunakan sebagai sumber air PDAM 2. Optimalisasi pemanfaatan SPAM Regional Benteng Kobema Untuk PDAM di tiga Kab/Kota yaitu Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Seluma 3. Pembangunan, Rehabilitasi dan Peningkatan SPAM IKK Tingkat Kab/Kota

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Rencana Tindak Lanjut
		bersih/PDAM (Pelanggan)	4. meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan pihak swasta dalam pengembangan infrastruktur PDAM. Selain itu, penting untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan sumber air bersih. Dalam hal subsidi dan bantuan keuangan, pemerintah mengalokasikan anggaran yang cukup untuk memfasilitasi pemasangan meteran air dan memenuhi kebutuhan air bersih bagi rumah tangga dengan pendapatan rendah.
Misi 3 :Mewujudkan perekonomian yang berdaya saing tinggi	Sasaran Pokok 3 : Tercapainya struktur perekonomian yang kokoh, berbasis industri rakyat yang efisien, maju dan berdaya saing tinggi	Pertumbuhan ekonomi (%)	1. Rencana Pembangunan Infrastruktur: Menyusun rencana pembangunan dan pengoptimalan Infrastruktur Strategis dan Infrastruktur Konektivitas seperti jalan Tol, Kereta Api, Bandara dan Pelabuhan Laut, serta infrastruktur Pembangkit Listrik sebagai prasyarat utama investasi dan Suprastruktur Penunjang Aktivitas Ekonomi 2. Program Pendidikan dan Pelatihan: Meningkatkan investasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk peningkatan akses ke pendidikan berkualitas dan pengembangan program pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar. 3. Transformasi Ekonomi : Transformasi Ekonomi dari Sektor hulu terutama di Bidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan menuju Agromaritim Industri 4. Peningkatan Kerjasama dengan Swasta: Mendorong kerjasama dengan sektor swasta dalam mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang potensial, dengan memberikan insentif dan kemudahan berusaha untuk menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja. 5. Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor informal untuk meningkatkan partisipasi ekonomi masyarakat setempat dan mengurangi tingkat pengangguran. 6. Promosi Pariwisata: Mengembangkan potensi pariwisata Provinsi Bengkulu dengan meningkatkan promosi pariwisata, memperbaiki infrastruktur pariwisata, dan memberikan layanan yang berkualitas kepada wisatawan. 7. Pelabuhan Pulau BaaiMenciptakan Kawasan Pelabuhan Pulau Baai menjadi kawasan industri sebagai cikal bakal kawasan ekonomi khusus dan sebagai pintu ekspor utama perdagangan luar negeri di Provinsi Bengkulu
		Pendapatan perkapita (Rp)	1. Meningkatkan investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar. 2. Mendorong pengembangan sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan, seperti pariwisata, industri pengolahan, atau jasa berbasis teknologi. 3. Meningkatkan akses terhadap infrastruktur dasar, seperti jaringan transportasi yang baik, listrik yang diandalkan, akses ke air bersih, dan layanan kesehatan yang memadai. 4. Memberikan dukungan yang lebih besar kepada UMKM, termasuk akses ke modal, pelatihan, dan pasar. 5. Mendorong kerjasama antara sektor publik dan swasta untuk mengembangkan sektor ekonomi yang potensial. 6. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi ekonomi Provinsi Bengkulu. 7. Menggalakkan program diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu dan mengembangkan sektor-sektor baru.
	Sasaran Pokok 4 : Meningkatnya investasi dan perdagangan yang mampu mendukung perkuatan daya saing dan kestabilan harga	Nilai investasi (Jutaan Rupiah)	1. Meningkatkan investasi dalam pembangunan infrastruktur, terutama jaringan transportasi, akses listrik, dan konektivitas telekomunikasi. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan akses pendidikan yang berkualitas dan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar. 3. Mereformasi regulasi dan birokrasi untuk mempercepat proses perizinan dan meningkatkan transparansi dalam regulasi. 4. Mengembangkan kebijakan investasi yang menarik, termasuk insentif pajak, fasilitas perizinan yang mudah, dan perlindungan hukum yang kuat. 5. Mempromosikan potensi sumber daya alam Provinsi Bengkulu dan meningkatkan kerja sama dengan investor dalam pengembangan sektor-sektor yang memiliki potensi. 6. Memperkuat kerjasama antara sektor publik dan swasta untuk mengidentifikasi peluang investasi dan mendorong kemitraan yang saling menguntungkan.
		a. PMDN (Rp)	
		b. PMA (USD)	
		Nilai Ekspor (Jutaan Rupiah)	1. Mendorong pengembangan dan diversifikasi produk ekspor dengan meningkatkan kualitas produk, memberikan pelatihan dan pendampingan kepada produsen, serta mendorong inovasi dalam proses produksi. 2. Mendorong pengembangan pasar ekspor baru melalui penelitian pasar, partisipasi dalam pameran internasional, promosi perdagangan, dan kerjasama dengan lembaga perdagangan internasional. 3. Memberikan insentif dan fasilitas yang menguntungkan bagi pelaku usaha ekspor, seperti pembebasan pajak ekspor, kemudahan perizinan, dan fasilitas pembiayaan yang terjangkau. 4. Menetapkan Pelabuhan Pulau Baai sebagai Single Window untuk perdagangan ekspor di Provinsi Bengkulu 5. Peningkatan Fasilitas Pelabuhan pulau Baai meliputi terminal peti kemas, teminal curah cair, terminal curah kering, serta memperbaiki manajemen kepelabuhanan meliputi dwelling time, Port Clearance dan Pemanduan Containerization, Port State Control dan Terminal/Tanker Management Interface. 6. Meminimalisir Asosiasi Pengusaha di Bidang Pertambangan, Perkebunan Unggulan (Kopi, Sawit dan Karet) dan Bidang Kelautan Perikanan agar mendistribusikan hasil komoditasnya melalui Pelabuhan Pulau Baai
		Laju inflasi (%)	1. pemantauan harga dan stok2. menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting3. melaksanakan operasi pasar murah4. melakukan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang5. Menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Rencana Tindak Lanjut
	Sasaran Pokok 5 : Berkembangnya kewirausahaan masyarakat dan meningkatnya peranan dan daya saing usaha-usaha ekonomi skala mikro dan kecil	Angka pengangguran Terbuka (%)	1. Meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan dalam merancang program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. 2. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan untuk meningkatkan kualifikasi dan keterampilan tenaga kerja. 3. Mendorong investasi dalam sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja, seperti pariwisata, pertanian, dan industri kreatif. 4. Memberikan dukungan dan fasilitas yang memadai bagi UMKM, termasuk akses ke modal, pelatihan, dan akses pasar. 5. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di Provinsi Bengkulu. 6. Optimalisasi pelaksanaan Job Fair dan Job Matching di Sekolah menengah Kejuruan (SMK) 7. Optimalisasi Pelaksanaan Pemagangan Luar Negeri (magang Jepang) dan pemagangan Dalam Negeri
		Proporsi Penduduk miskin (%)	1. Peningkatan investasi dalam sektor ekonomi: Fokus pada pengembangan sektor ekonomi yang berpotensi seperti pertanian, pariwisata, industri kreatif, dan sektor lainnya untuk menciptakan lapangan kerja baru. 2. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan: Meningkatkan akses pendidikan untuk semua lapisan masyarakat, termasuk pendidikan yang berkualitas, pelatihan keterampilan, dan pengembangan keahlian untuk meningkatkan kesempatan kerja dan penghasilan. 3. Penguatan program Pendapatangulangan kemiskinan: Meningkatkan efektivitas program Pendapatangulangan kemiskinan, seperti bantuan sosial yang tepat sasaran, pelatihan keterampilan, program pemberdayaan ekonomi, serta pengembangan infrastruktur yang mendukung perekonomian lokal. 4. Meningkatkan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat: Kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam merancang dan melaksanakan program-program Pendapatangulangan kemiskinan akan memberikan dampak yang lebih baik. 5. Verifikasi dan Validasi data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) agar bantuan dan jaminan sosial yang diberikan tepat sasaran 6. Meningkatkan akses produksi terutama lahan dan permodalan bagi petani gurem dan nelayan miskin
Misi 4 : Mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan	Sasaran Pokok 6 : Tercapainya pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan	Nilai Tukar Petani	1. Meningkatkan infrastruktur transportasi dan distribusi, termasuk jalan terutama jalan sentra produksi dan ajaln usaha tani, serta fasilitas penyimpanan terutama lumbung pangan, untuk mempermudah akses petani ke pasar. 2. Meningkatkan pemenuhan saprodi bagi petani terutama Alsintan, Bibit dan Pupuk bersubsidi. 3. Meningkatkan pemenuhan terhadap irigasi terutama jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDes) 4. penerapan smart farming dan pertanian presisi 5. Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada petani dalam pemasaran produk pertanian, termasuk negosiasi harga dan strategi pemasaran yang efektif. 6. Mendorong Hilirisasi produk pertanian dengan memberikan pelatihan dan dukungan teknis untuk pengolahan lanjutan produk pertanian, sehingga meningkatkan nilai tukar petani. 7. Mengembangkan sistem informasi pasar yang memberikan akses cepat dan akurat kepada petani tentang harga pasar dan permintaan produk pertanian. 8. Membentuk koperasi atau kelompok tani untuk meningkatkan daya tawar petani dalam bernegosiasi dengan pembeli dan memasarkan produk mereka secara kolektif. 9. Menggalakkan kemitraan antara petani dan sektor swasta, termasuk perusahaan pengolahan dan distribusi, untuk meningkatkan nilai tukar petani dan membuka peluang pasar yang lebih luas.
		Produksi padi (ton)	1. Meningkatkan infrastruktur transportasi dan distribusi, termasuk jalan terutama jalan sentra produksi dan ajaln usaha tani, serta fasilitas penyimpanan terutama lumbung pangan, untuk mempermudah akses petani ke pasar. 2. Meningkatkan pemenuhan saprodi bagi petani terutama Alsintan, Bibit dan Pupuk bersubsidi. 3. Meningkatkan pemenuhan terhadap irigasi terutama jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDes) 4. penerapan smart farming dan pertanian presisi 5. meningkatkan indeks pertanaman (IP) 6. meningkatkan tindakan preventif dan Pendapatangulangan bencana pertanian (FUSO) seperti pemasangan Sensor Weather Station, Pembentukan dan optimalisasi peran Brigade Proteksi Tanaman (BPT) serta Regu Pengendali OPT (RPO), Pemenuhan obat pembasmi hama serta asuransi pertanian.
		Produksi hortikultura (ton) :	
		Buah-buahan	1. Meningkatkan infrastruktur transportasi dan distribusi, termasuk jalan terutama jalan sentra produksi dan ajaln usaha tani, serta fasilitas penyimpanan terutama lumbung pangan, untuk mempermudah akses petani ke pasar. 2. Meningkatkan pemenuhan saprodi bagi petani terutama Alsintan, Bibit dan Pupuk bersubsidi. 3. penerapan smart farming dan pertanian presisi 4. meningkatkan tindakan preventif dan Pendapatangulangan bencana pertanian (FUSO) seperti pemasangan Sensor Weather Station, Pembentukan dan optimalisasi peran Brigade Proteksi Tanaman (BPT) serta Regu Pengendali OPT (RPO), Pemenuhan obat pembasmi hama serta asuransi pertanian.
		Sayuran	1. Meningkatkan infrastruktur transportasi dan distribusi, termasuk jalan terutama jalan sentra produksi dan ajaln usaha tani, serta fasilitas penyimpanan terutama lumbung pangan, untuk mempermudah akses petani ke pasar. 2. Meningkatkan pemenuhan saprodi bagi petani terutama Alsintan, Bibit dan Pupuk bersubsidi. 3. penerapan smart farming dan pertanian presisi 4. meningkatkan tindakan preventif dan Pendapatangulangan bencana pertanian (FUSO) seperti pemasangan Sensor Weather Station, Pembentukan dan optimalisasi peran Brigade Proteksi Tanaman (BPT) serta Regu Pengendali OPT (RPO), Pemenuhan obat pembasmi hama serta asuransi pertanian.
		Produksi palawija (ton)	1. Meningkatkan infrastruktur transportasi dan distribusi, termasuk jalan terutama jalan sentra produksi dan ajaln usaha tani, serta fasilitas penyimpanan terutama lumbung pangan, untuk mempermudah akses petani ke pasar. 2. Meningkatkan pemenuhan saprodi bagi petani terutama Alsintan, Bibit dan Pupuk bersubsidi. 3. penerapan smart farming dan pertanian presisi 4. meningkatkan tindakan preventif dan Pendapatangulangan bencana pertanian (FUSO) seperti pemasangan Sensor Weather Station, Pembentukan dan optimalisasi peran Brigade Proteksi Tanaman (BPT) serta Regu Pengendali OPT (RPO), Pemenuhan obat pembasmi hama serta asuransi pertanian.

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Rencana Tindak Lanjut
		Produksi Perkebunan unggulan (ton)	1. Meningkatkan infrastruktur transportasi dan distribusi, termasuk jalan terutama jalan sentra produksi dan ajaln usaha tani, serta fasilitas penyimpanan terutama lumbung pangan, untuk mempermudah akses petani ke pasar. 2. Meningkatkan pemenuhan saprodi bagi petani terutama Alsintan, Bibit dan Pupuk bersubsidi. 3. penerapan integrated nursery farming system 4. meningkatkan tindakan preventif dan Pendapatanggulangan bencana pertanian (FUSO) seperti pemasangan Sensor Weather Station, Pembentukan dan optimalisasi peran Brigade Proteksi Tanaman (BPT) serta Regu Pengendali OPT (RPO), Pemenuhan obat pembasmi hama serta asuransi pertanian. 5. Melakukan Replanting Tanaman Sawit dan Kopi
		Produksi daging ternak (ton)	1. Pengadaan bibit ternak dan induk ternak 2. optimalisasi pelaksanaan inseminasi buatan (IB) 3. Peningkatan pakan hijau ternak 4. Pelatihan dan Penyuluhan: Memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada peternak mengenai manajemen peternakan yang baik, penerapan teknologi modern, pengendalian penyakit ternak, serta praktik pemeliharaan yang berkelanjutan. 5. Riset dan Inovasi: Mendorong penelitian dan pengembangan dalam bidang peternakan, termasuk pengembangan pakan ternak lokal yang berkelanjutan dan peningkatan produktivitas ternak melalui pemuliaan. 6. Pengawasan dan Pengendalian Kualitas: Meningkatkan pengawasan dan pengendalian kualitas daging ternak, termasuk pemantauan kesehatan ternak, penggunaan obat-obatan yang aman, dan implementasi standar keamanan pangan yang ketat.
		Produksi Perikanan (ton)	1. Perikanan Tangkap:a) pengadaan alat tangkap dan alat bantu Pendapatangkapnb) pengadaan kapal dan mesin motor tempelc) subsidi solar bagi nelayand) pengadaan converter kit BBM ke Gas untuk nelayane) Pembangunan dan rehabilitasi pelabuhan perikananf) Pembangunan Pabrik Es dan cold storageg) pemberantasan ilegal fishing dan trawlh) Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada nelayan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengadopsi teknologi 2. Perikanan Budidaya:a) pengadaan bibit ikan dan indukan ikanb) pengadaan pakan ikan dan mesin pencetak pakan ikanc) Pengadaan sarana budidaya ikan diantaranya bioflok,..... dan.....d) Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada pembudidaya ikan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengadopsi teknologi
		Produksi batubara (ton)	1. Peningkatan Koordinasi antara Pemerintah dan Industri: Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara pemerintah daerah, industri pertambangan batubara, dan pemangku kepentingan terkait untuk mengatasi permasalahan regulasi, perizinan, dan pemenuhan persyaratan lingkungan. 2. Memperbanyak dan mempermudah perizinan pertambangan batubara dengan tetap memperhatikan dampak lingkungan
	Sasaran Pokok 7 : Meningkatnya pengendalian lingkungan hidup secara berkelanjutan dan sesuai dengan daya dukungnya	Emisi gas rumah kaca (ton CO2/eq)	1. Mendorong penggunaan energi terbarukan dalam sektor energi, transportasi, dan industri di Provinsi Bengkulu melalui insentif fiskal, kebijakan regulasi, dan pendanaan proyek energi terbarukan. 2. Memperkuat kebijakan lingkungan yang mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca, termasuk pengembangan transportasi berkelanjutan, pengelolaan limbah yang efisien, dan penggunaan teknologi ramah lingkungan. 3. Mengedukasi masyarakat dan petani tentang praktik pertanian berkelanjutan yang mengurangi emisi, seperti metode pertanian organik, pengelolaan limbah pertanian, dan penggunaan pupuk hijau. 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap emisi gas rumah kaca secara teratur untuk mengukur kemajuan dan mengevaluasi efektivitas langkah-langkah pengurangan yang diimplementasikan. 5. Membangun kemitraan dengan sektor swasta, lembaga riset, dan komunitas lokal untuk mempromosikan inovasi dan solusi yang mengurangi emisi gas rumah kaca.
MISI 5 : Mewujudkan Masyarakat yang Adil dan Demokratis	Sasaran pokok 8 : Meningkatnya Pemerataan Pendapatan di Masyarakat dan Antar Daerah	Indeks Gini	1. Meningkatkan investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar. 2. Mendorong pengembangan sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan, seperti pariwisata, industri pengolahan, atau jasa berbasis teknologi. 3. Meningkatkan akses terhadap infrastruktur dasar, seperti jaringan transportasi yang baik, listrik yang diandalkan, akses ke air bersih, dan layanan kesehatan yang memadai. 4. Memberikan dukungan yang lebih besar kepada UMKM, termasuk akses ke modal, pelatihan, dan pasar. 5. Mendorong kerjasama antara sektor publik dan swasta untuk mengembangkan sektor ekonomi yang potensial. 6. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi ekonomi Provinsi Bengkulu. 7. Menggalakkan program diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu dan mengembangkan sektor-sektor baru.
	Sasaran Pokok 9 : Meningkatnya Pengarusutamaan Gender (PUG)	Jumlah Perempuan di DPRD Provinsi (orang)	1. Mendorong kesetaraan gender dan menghapuskan stereotip yang merugikan perempuan dalam politik melalui kampanye sosial dan pendidikan publik. 2. Menerapkan kebijakan atau quota yang memastikan keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Bengkulu. 3. Memberikan pelatihan politik dan pemberdayaan kepada perempuan untuk meningkatkan kualifikasi dan keterampilan mereka dalam politik. 4. Meningkatkan kerja sama dengan organisasi perempuan dan lembaga masyarakat sipil dalam mendukung partisipasi politik perempuan. 5. Membangun jaringan dan mentorship bagi perempuan yang berminat terlibat dalam politik untuk memperkuat dukungan dan penguatan kapasitas mereka. 6. Mengadakan dialog dan forum diskusi tentang pentingnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik dan pemerintahan. 7. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap peningkatan partisipasi perempuan di DPRD Provinsi Bengkulu untuk memastikan implementasi tindakan lanjut yang efektif.
	Sasaran Pokok 10: Terwujudnya Pengelolaan	Jumlah daerah yang memperoleh Opini WTP	1. meningkatkan penatausahaan barang milik daerah meliputi pencatatan, penertiban, sertifikasi dan pemanfaatan 2. penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD) sesuai standar akuntansi pemerintah 3. penyelesaian temuan kasus di bidang pengelolaan keuangan daerah termasuk penyelesaian temuan ganti rugi (TGR)

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Rencana Tindak Lanjut
	Pemerintahan yang Baik dan Bersih		4. pelaksanaan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan sesuai dengan regulasi keuangan daerah 5. penetapan Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD tepat waktu dan tepat tahapan
		Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi	1. Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja dengan menyusun dokumen pohon kinerja, Cascading kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU), dokumen perencanaan daerah (RPJMD/Renstra dan RKPD/Renja), perjanjian kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang memenuhi kriteria SMART dan Crosscutting dari level Kepala Daerah sampai Staf 2. Meningkatkan kualitas pengukuran kinerja dengan cara mengukur pencapaian Renaksi Perjanjian Kinerja secara Triwulanan dan mengukur ketercapaian secara tahunan 3. Melakukan evaluasi internal secara berkala dan continue terhadap dokumen perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja 4. menyusun dokumen pelaporan kinerja tepat waktu dan berkualitas sesuai dengan standar pelaporan kinerja, serta lebih menekankan pada analisis ketercapaian outcome 5. menerapkan penggunaan aplikasi e-sakip dalam pelaksanaan manajemen kinerja 6. mengoptimalkan peran tim manajemen kinerja 7. meningkatkan pemahaman OPD terhadap Pelaksanaan Sakip

2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

2.6.1. Proyeksi Jumlah Pertumbuhan Penduduk dan Total Penduduk

Berdasarkan buku Proyeksi Penduduk Indonesia 2025–2050 Hasil Sensus Penduduk 2020 yang dirilis Badan Pusat Statistik pada tahun 2023, jumlah total penduduk Provinsi Bengkulu pada periode 2025-2045 akan mengalami pertumbuhan 18,61% dari tahun 2025 yang diperkirakan jumlah penduduk sebanyak 2.138,05 ribu orang menjadi sebanyak 2.536,00 ribu orang di tahun 2045. Akan tetapi dalam periode lima tahunan pada periode 2020-2045 persentase pertumbuhan penduduk Provinsi Bengkulu diperkirakan akan terus mengalami penurunan. Jika dilihat perbandingan jangka lima tahunan, pertumbuhan penduduk pada tahun 2030 (dibandingkan dengan tahun 2025) diperkirakan mencapai 5,64%, sedikit berkontraksi menjadi 4,68% pada tahun 2035 terhadap tahun 2030 dan pada tahun 2045 pertumbuhan penduduk diperkirakan berhasil ditekan dengan pertumbuhan sekitar 3,23% terhadap tahun 2040.

Tabel 2. 135Proyeksi Penduduk Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2045 (Ribu Orang)

Umur	2023	2025	Pertum buhan	2030	Pertum buhan	2035	Pertum buhan	2040	Pertum buhan	2045
0–4	181,22	185	-1,32%	182,56	-1,54%	179,74	-0,62%	178,63	0,46%	179,45
5–9	174,38	174,71	5,70%	184,67	-1,29%	182,29	-1,53%	179,51	-0,60%	178,43
10–14	172,74	173,52	0,77%	174,85	5,71%	184,83	-1,28%	182,47	-1,51%	179,71
15–19	171,2	171,58	1,04%	173,36	0,78%	174,71	5,71%	184,69	-1,27%	182,35
20–24	172,39	170,97	-0,04%	170,91	1,05%	172,71	0,80%	174,1	5,72%	184,05
25–29	173,12	173,59	-1,89%	170,31	-0,01%	170,29	1,07%	172,11	0,82%	173,52
30–34	169,41	170,37	1,51%	172,94	-1,87%	169,71	0,01%	169,73	1,08%	171,57
35–39	163,23	166,22	1,86%	169,31	1,54%	171,91	-1,84%	168,75	0,02%	168,79
40–44	152,9	156,22	5,47%	164,77	1,89%	167,89	1,57%	170,53	-1,82%	167,43
45–49	139,73	145,1	6,25%	154,17	5,53%	162,7	1,94%	165,86	1,61%	168,53
50–54	120,07	126,93	11,68%	141,76	6,35%	150,76	5,62%	159,24	2,01%	162,44

Umur	2023	2025	Pertum buhan	2030	Pertum buhan	2035	Pertum buhan	2040	Pertum buhan	2045
55–59	98,84	105,35	16,00%	122,21	11,85%	136,69	6,51%	145,59	5,74%	153,95
60–64	76,96	83,63	18,64%	99,22	16,30%	115,39	12,12%	129,38	6,70%	138,05
65–69	55,24	60,61	25,28%	75,93	19,14%	90,46	16,80%	105,66	12,46%	118,82
70–74	34,91	40,1	28,88%	51,68	26,22%	65,23	20,04%	78,3	17,43%	91,95
75–79	17,76	20,68	48,94%	30,8	30,49%	40,19	27,94%	51,42	21,12%	62,28
80+	11,92	13,47	42,17%	19,15	50,97%	28,91	40,68%	40,67	34,45%	54,68
Total	2.086,02	2.138,05	5,64%	2.258,60	4,68%	2.364,41	3,90%	2.456,64	3,23%	2.536,00

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2025–2050 Hasil Sensus Penduduk 2020

2.6.2. Proyeksi Jumlah Pertumbuhan Penduduk dan Total Penduduk

Berdasarkan Jenis Kelamin

2.6.2.1. Proyeksi Jumlah Pertumbuhan Penduduk dan Total Penduduk Berjenis Kelamin Laki-laki

Berdasarkan buku Proyeksi Penduduk Indonesia 2025–2050 Hasil Sensus Penduduk 2020 yang dirilis Badan Pusat Statistik pada tahun 2023, jumlah total penduduk berjenis kelamin laki-laki Provinsi Bengkulu pada periode 2025-2045 akan mengalami pertumbuhan 16,74% dari tahun 2025 yang diperkirakan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 1.091,26 ribu orang menjadi sebanyak 1.273,98 ribu orang di tahun 2045. Akan tetapi dalam periode lima tahunan pada periode 2020-2045 persentase pertumbuhan penduduk berjenis kelamin laki-laki Provinsi Bengkulu diperkirakan akan terus mengalami penurunan. Jika dilihat perbandingan jangka lima tahunan, pertumbuhan penduduk berjenis kelamin laki-laki pada tahun 2030 (dibandingkan dengan tahun 2025) diperkirakan mencapai 5,27%, sedikit berkontraksi menjadi 4,26% pada tahun 2035 terhadap tahun 2030 dan pada tahun 2045 pertumbuhan penduduk diperkirakan berhasil ditekan dengan pertumbuhan sekitar 2,81% terhadap tahun 2040.

Tabel 2. 136Proyeksi Penduduk Berjenis Kelamin Laki-laki Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2045 (Ribu Orang)

Umur	2023	2025	Pertum buhan	2030	Pertum buhan	2035	Pertum buhan	2040	Pertum buhan	2045
0–4	92,63	94,46	-1,34%	93,19	-1,56%	91,74	-0,60%	91,19	0,47%	91,62
5–9	89	89,29	5,50%	94,2	-1,33%	92,95	-1,53%	91,53	-0,58%	91
10–14	88,64	88,61	0,78%	89,3	5,50%	94,21	-1,31%	92,98	-1,52%	91,57
15–19	88,55	88,65	-0,16%	88,51	0,78%	89,2	5,52%	94,12	-1,30%	92,9
20–24	88,61	88,1	0,08%	88,17	-0,15%	88,04	0,80%	88,74	5,53%	93,65
25–29	88,57	88,88	-1,35%	87,68	0,09%	87,76	-0,14%	87,64	0,81%	88,35
30–34	86,58	87,21	1,69%	88,68	-1,33%	87,5	0,10%	87,59	-0,13%	87,48
35–39	83,17	84,78	2,29%	86,72	1,70%	88,19	-1,30%	87,04	0,10%	87,13
40–44	77,95	79,54	5,48%	83,9	2,30%	85,83	1,74%	87,32	-1,28%	86,2
45–49	71,37	73,98	5,83%	78,29	5,52%	82,61	2,35%	84,55	1,76%	86,04
50–54	61,48	64,77	11,09%	71,95	5,89%	76,19	5,60%	80,46	2,40%	82,39

Umur	2023	2025	Pertum buhan	2030	Pertum buhan	2035	Pertum buhan	2040	Pertum buhan	2045
55–59	50,72	53,85	14,82%	61,83	11,21%	68,76	6,05%	72,92	5,72%	77,09
60–64	39,53	42,64	17,26%	50	15,04%	57,52	11,47%	64,12	6,22%	68,11
65–69	28,35	30,9	22,62%	37,89	17,60%	44,56	15,51%	51,47	11,77%	57,53
70–74	17,51	20,11	26,90%	25,52	23,20%	31,44	18,38%	37,22	16,04%	43,19
75–79	8,31	9,85	49,85%	14,76	27,85%	18,87	24,48%	23,49	19,24%	28,01
80+	5,02	5,64	44,15%	8,13	50,80%	12,26	36,79%	16,77	29,52%	21,72
Total	1.065,99	1.091,26	5,27%	1.148,72	4,26%	1.197,63	3,47%	1.239,15	2,81%	1.273,98

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2025–2050 Hasil Sensus Penduduk 2020

2.6.2.2. Proyeksi Jumlah Pertumbuhan Penduduk dan Total Penduduk Berjenis Kelamin Perempuan

Berdasarkan buku Proyeksi Penduduk Indonesia 2025–2050 Hasil Sensus Penduduk 2020 yang dirilis Badan Pusat Statistik pada tahun 2023, jumlah total penduduk berjenis kelamin perempuan Provinsi Bengkulu pada periode 2025-2045 akan mengalami pertumbuhan 20,56% dari tahun 2025 yang diperkirakan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 1.046,78 ribu orang menjadi sebanyak 1.262,04 ribu orang di tahun 2045. Akan tetapi dalam periode lima tahunan pada periode 2020-2045 persentase pertumbuhan penduduk berjenis kelamin perempuan Provinsi Bengkulu diperkirakan akan terus mengalami penurunan. Jika dilihat perbandingan jangka lima tahunan, pertumbuhan penduduk berjenis kelamin laki-laki pada tahun 2030 (dibandingkan dengan tahun 2025) diperkirakan mencapai 6,03%, sedikit berkontraksi menjadi 5,12% pada tahun 2035 terhadap tahun 2030 dan pada tahun 2045 pertumbuhan penduduk berjenis kelamin perempuan diperkirakan berhasil ditekan dengan pertumbuhan sekitar 3,66% terhadap tahun 2040.

Tabel 2. 137Proyeksi Penduduk Berjenis Kelamin Perempuan Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2045 (Ribu Orang)

Umur	2023	2025	Pertum buhan	2030	Pertum buhan	2035	Pertum buhan	2040	Pertum buhan	2045
0–4	88,59	90,54	-1,28%	89,38	-1,54%	88	-0,64%	87,44	0,45%	87,83
5–9	85,38	85,42	5,91%	90,47	-1,25%	89,34	-1,52%	87,98	-0,61%	87,44
10–14	84,1	84,9	0,77%	85,55	5,93%	90,62	-1,25%	89,49	-1,51%	88,14
15–19	82,65	82,93	2,32%	84,85	0,78%	85,51	5,92%	90,57	-1,23%	89,46
20–24	83,78	82,87	-0,16%	82,74	2,33%	84,67	0,80%	85,35	5,92%	90,4
25–29	84,55	84,72	-2,47%	82,63	-0,11%	82,54	2,35%	84,48	0,82%	85,17
30–34	82,83	83,16	1,32%	84,26	-2,43%	82,21	-0,09%	82,14	2,37%	84,09
35–39	80,05	81,44	1,41%	82,59	1,37%	83,72	-2,40%	81,71	-0,06%	81,66
40–44	74,95	76,68	5,46%	80,87	1,46%	82,05	1,41%	83,21	-2,37%	81,24
45–49	68,36	71,12	6,69%	75,88	5,55%	80,09	1,52%	81,31	1,45%	82,49
50–54	58,59	62,16	12,31%	69,81	6,82%	74,57	5,66%	78,79	1,59%	80,04
55–59	48,12	51,5	17,24%	60,38	12,50%	67,93	6,98%	72,67	5,77%	76,86

Umur	2023	2025	Pertumbuhan	2030	Pertumbuhan	2035	Pertumbuhan	2040	Pertumbuhan	2045
60–64	37,44	40,99	20,10%	49,23	17,55%	57,87	12,77%	65,26	7,17%	69,94
65–69	26,89	29,71	28,04%	38,04	20,66%	45,9	18,06%	54,19	13,10%	61,29
70–74	17,4	19,99	30,87%	26,16	29,17%	33,79	21,57%	41,08	18,70%	48,76
75–79	9,45	10,82	48,24%	16,04	32,92%	21,32	31,00%	27,93	22,70%	34,27
80+	6,9	7,83	40,87%	11,03	50,95%	16,65	43,54%	23,9	37,91%	32,96
Total	1.020,03	1.046,78	6,03%	1.109,91	5,12%	1.166,78	4,35%	1.217,50	3,66%	1.262,04

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2025–2050 Hasil Sensus Penduduk 2020

2.6.3. Analisis Kependudukan

2.6.3.1. Kepadatan penduduk

Kepadatan penduduk adalah suatu ukuran yang menunjukkan berapa banyak jiwa atau penduduk yang tinggal dalam satu kilometer persegi wilayah. Kepadatan penduduk menjadi indikator adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki suatu wilayah. Wilayah yang memiliki sumber daya yang lebih baik, baik sumber daya fisik maupun sumber daya manusia, akan cenderung dipadati penduduk. Kepadatan penduduk juga memberikan informasi kepada pemerintah tentang pemerataan pembangunan. Wilayah yang penduduknya jarang menunjukkan pembangunan belum merata ke berbagai wilayah. Jika dibandingkan secara keseluruhan jumlah penduduk di Indonesia, sebaran penduduk Indonesia yang ada di Provinsi Bengkulu hanya sebesar 0,75% dari total penduduk yang ada.

Luas Provinsi Bengkulu berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021 Menteri Dalam Negeri adalah seluas 20.130,21 km². Oleh karena itu dapat diproyeksikan kepadatan penduduk Provinsi Bengkulu tahun 2025–2050 yang dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 138Proyeksi Kepadatan Penduduk Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2045

Tahun	Keterangan	Jumlah
2023	Jumlah Penduduk (Ribuan Orang)	2.086,02
	Kepadatan	103,63
2025	Jumlah Penduduk (Ribuan Orang)	2.138,05
	Kepadatan	106,21
2030	Jumlah Penduduk (Ribuan Orang)	2.258,60
	Kepadatan	112,20
2035	Jumlah Penduduk (Ribuan Orang)	2.364,41
	Kepadatan	117,46
2040	Jumlah Penduduk (Ribuan Orang)	2.456,64
	Kepadatan	122,04
2045	Jumlah Penduduk (Ribuan Orang)	2.536,00
	Kepadatan	125,98

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2025–2050 Hasil Sensus Penduduk 2020 data diolah

Jika dilihat dari persentase pertumbuhan penduduk yang memiliki tren penurunan dari tahun ke tahun, hal tersebut dapat memperkirakan dalam 20 tahun ke depan pemerintah dapat mengendalikan pertumbuhan penduduk pada tingkat yang ideal. Saat ini permasalahan kepadatan penduduk berfokus pada persebaran penduduk yang tidak merata terutama pada wilayah kota dan perdesaan. Kepadatan penduduk di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan. Selain itu terdapat perbedaan luas wilayah antar daerah dengan beberapa wilayah kawasan hutan lindung, yang menyebabkan persebaran penduduk tidak merata.

2.6.3.2. Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Berdasarkan tabel di bawah, rasio ketergantungan di Provinsi Bengkulu terus mengalami peningkatan, hal ini dapat dijadikan perhatian agar pemerintah dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak dan layak serta kemampuan penduduk usia produktif untuk mengetahui bagaimana cara memperoleh pekerjaan yang layak sehingga mampu menanggung kebutuhan penduduk usia muda dan usia produktif dan mampu mencegah timbulnya masalah sosial yang terjadi di Indonesia. Dan pemerintah mampu memperbaiki pendidikan yang dapat meningkatkan kualitas SDM di Provinsi Bengkulu.

Tabel 2. 139Proyeksi Rasio Ketergantungan Penduduk Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2045 (Ribuan Orang)

Komposisi Umur (%)	2025	2030	2035	2040	2045	2050
0–14	24,94	24	23,13	22,01	21,2	20,7
15–64	68,75	68,14	67,36	66,76	65,88	64,95
65+	6,31	7,86	9,51	11,24	12,92	14,36
Rasio Ketergantungan (%)	45,45	46,76	48,45	49,8	51,79	53,97

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2025–2050 Hasil Sensus Penduduk 2020

2.6.4. Kebutuhan sarana dan prasarana dasar

2.6.4.1. Proyeksi Kebutuhan Perumahan

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia yang mempunyai fungsi strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang, serta merupakan pengejawantahan jati diri. Salah satu perwujudan tercapainya kesejahteraan rakyat ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan papan sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia. Dengan demikian pembangunan perumahan dan kawasan

permukiman merupakan salah satu bidang strategis dalam upaya pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya dan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan kegiatan yang bersifat multi sektor, yang hasilnya langsung menyentuh salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Pemenuhan kebutuhan rumah layak dalam lingkungan sehat tentunya menjadi kewajiban masyarakat sendiri, pemerintah dalam hal ini mempunyai tugas untuk menciptakan iklim pembangunan yang kondusif sehingga memberikan peluang kepada dunia usaha menyediakan perumahan dan kawasan permukiman. Dinamika perkembangan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Pesisir Barat membawa dampak terjadinya pola pergeseran dalam pemanfaatan ruang dari kawasan yang bercirikan perdesaan ke kawasan yang bercirikan perkotaan, peningkatan pertumbuhan kawasan terbangun dan penyalahgunaan peruntukan lahan untuk permukiman.

Salah satu cara untuk mengetahui kebutuhan perumahan adalah dengan memperkirakan jumlah rumah tangga selama periode yang akan diproyeksikan. Yang dapat asumsikan bahwa setiap satu rumah tangga akan menempati satu rumah baik itu milik sendiri maupun rumah bukan milik sendiri. Yang rumah bukan milik sendiri diantaranya adalah kontrak, rumah dinas, menumpang dan lain-lain. Berikut ini adalah tabel yang berisikan informasi tentang distribusi persentase rumah tangga menurut kabupaten/kota dan status penguasaan bangunan tempat tinggal di Provinsi Bengkulu.

Tabel 2. 140 Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal di Provinsi Bengkulu

Kabupaten/Kota	Milik Sendiri	Bukan Milik Sendiri	Milik Sendiri	Bukan Milik Sendiri	Milik Sendiri	Bukan Milik Sendiri
	2020		2021		2022	
Bengkulu Selatan	87,20	12,80	90,59	9,41	91,17	8,84
Rejang Lebong	82,02	17,98	82,40	17,60	81,25	18,75
Bengkulu Utara	90,88	9,12	90,83	9,17	91,73	8,27
Kaur	91,48	8,52	94,45	5,55	96,43	3,57
Seluma	91,20	8,80	92,93	7,07	92,73	7,27
Mukomuko	82,52	17,48	84,90	15,10	83,48	16,52
Lebong	86,59	13,41	83,92	16,08	86,14	13,86
Kepahiang	87,76	12,24	83,93	16,07	87,77	12,24
Bengkulu Tengah	94,03	5,97	93,18	6,82	96,68	3,32
Kota Bengkulu	66,32	33,69	66,98	33,02	80,25	19,75
Provinsi Bengkulu	83,56	16,44	84,32	15,68	87,46	12,54

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu

Berikut ini adalah Proyeksi Pertumbuhan Jumlah rumah tangga berdasarkan trend jumlah rumah tangga Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2023 sampai dengan tahun 2045 dalam satuan ribu.

Tabel 2. 141Proyeksi Pertumbuhan Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Trend Jumlah Rumah Tangga Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2023 Sampai Dengan Tahun 2045 (dalam Ribu)

	Data BPS													Proyeksi					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Provinsi Bengkulu	435	442	450	458	466	473	480	488	495	502	509	512	518	529	543	578	614	649	685
Bengkulu Selatan	34	35	35	36	36	36	37	37	38	38	38	40	41	40	41	44	46	49	51
Rejang Lebong	64	64	64	65	65	66	66	66	67	67	67	71	72	71	72	75	78	80	83
Bengkulu Utara	67	69	70	72	73	75	76	78	79	80	82	78	79	83	85	91	97	102	108
Kaur	27	27	27	28	28	28	29	29	29	30	30	31	31	31	32	34	36	38	40
Seluma	44	45	45	46	47	47	48	48	49	49	50	53	53	53	54	58	61	65	68
Mukomuko	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	47	48	50	52	56	61	65	69
Lebong	26	27	27	28	28	29	29	30	30	30	31	28	28	30	31	32	34	35	36
Kepahiang	32	32	32	33	33	34	34	34	34	35	35	38	39	38	39	41	44	46	49
Bengkulu Tengah	24	25	25	26	26	27	27	28	28	28	29	29	30	30	31	33	35	38	40
Kota Bengkulu	79	81	83	85	87	89	91	93	95	97	99	95	96	102	105	113	121	130	138

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu data diolah

Selain menggunakan data jumlah rumah tangga dengan menggunakan trend data dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2022, untuk memproyeksi pertumbuhan rumah tangga tahun 2030-2045 juga dapat digunakan data proyeksi petumbuhan penduduk yang telah disampaikan sebelumnya. Dari jumlah penduduk yang didapatkan tersebut dibagi dengan menggunakan rata-rata jumlah penduduk dalam satu rumah tangga adalah sebanyak empat orang. Dari data tersebut didapatkan bahwa pada tahun 2030 dibutuhkan sekitar 3,14 rumah, tahun 2035 sebanyak 56,59 ribu rumah, tahun 2040 sebanyak sebanyak 79,65 rumah, dan pada tahun 2045 sebanyak 99,49 ribu rumah yang dapat menampung rumah tangga yang akan tumbuh. Kebutuhan rumah per tahunnya diperoleh dengan cara jumlah proyeksi kebutuhan rumah dikurangi dengan jumlah rumah eksisting.

Tabel 2. 142Proyeksi Kebutuhan Rumah Akibat Proyeksi Pertumbuhan Rumah Tangga Tahun 2030-2045 (dalam Ribu)

Tahun	Proyeksi Jumlah penduduk	Proyeksi Jumlah Rumah Tangga	Proyeksi kebutuhan Rumah
2023	2086,02	525,45	
2025	2138,05	534,51	
Perkiraan Pertumbuhan Penduduk	5,64%		
2030	2258,60	564,65	30,14

Tahun	Proyeksi Jumlah penduduk	Proyeksi Jumlah Rumah Tangga	Proyeksi kebutuhan Rumah
Perkiraan Pertumbuhan Penduduk	4,68%		
2035	2364,41	591,10	56,59
Perkiraan Pertumbuhan Penduduk	3,9%		
2040	2456,64	614,16	79,65
Perkiraan Pertumbuhan Penduduk	3,23%		
2045	2536,00	634,00	99,49

Tabel 2. 143 Perkembangan Rumah Tangga yang menempati RLH di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Rumah Tangga yang menempati RLH (%)	40,52	52,06	53,33	53,83	57,16

2.6.4.2. Proyeksi Kebutuhan Air Minum

Persentase Rumah Tangga dengan akses air minum semakin bertambah. Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak adalah perbandingan antara rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase.

Perkembangan Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak di Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 144Perkembangan Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak di Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2022

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rumah Tangga dengan akses air minum layak	%	28,54	49,37	46,17	62,47	67,39	73,07

Sumber: Dinas PUPR Provinsi Bengkulu

Berdasarkan data Dinas PUPR Provinsi Bengkulu Tahun 2022 bahwa Akses Air Minum Layak Provinsi Bengkulu sebesar 73,07 persen artinya peningkatan cukup signifikan dalam rentang waktu 5 tahun dengan peningkatan sebesar 44,53. Perbedaan yang cukup mencolok terlihat pada akses air minum layak antar kabupaten/kota. Kota Bengkulu merupakan daerah dengan akses air minum layak tertinggi di Provinsi Bengkulu yaitu mencapai 94,51 %. Sementara itu, pada Kabupaten Bengkulu Tengah, akses air minum layak baru dinikmati oleh 51,89 % rumah tangga. Sebaran Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 145Perkembangan Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2022

No	Kabupaten/ Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Bengkulu Selatan	67,27	49,54	65,85	45,78	58,22	65,00
2	Rejang Lebong	50,60	60,93	56,63	45,24	65,07	57,25
3	Bengkulu Utara	44,43	44,40	41,21	56,24	53,11	82,64
4	Kaur	62,34	62,15	66,42	79,40	86,20	83,94
5	Seluma	20,48	47,85	33,38	37,54	47,04	71,59
6	Mukomuko	66,43	62,66	53,32	79,41	75,99	75,73
7	Lebong	42,67	56,89	65,81	61,16	57,37	54,85
8	Kepahiang	61,55	67,18	46,19	63,82	62,65	61,81
9	Bengkulu tengah	56,92	55,73	44,82	49,32	63,06	51,89
10	Kota Bengkulu	87,87	86,92	85,16	88,77	92,21	94,51
Provinsi Bengkulu		58,02	61,22	57,60	62,47	67,39	73,07

Jika dilihat dari perkembangan perkembangan rumah tangga dengan akses air minum layak tahun 2017-2022 yang terjadi peningkatan sangat signifikan, dapat diproyeksikan secara optimis peningkatan jumlah persentase rumah tangga dengan air minum layak dapat mencapai diangka 95 persen dari jumlah rumah tangga yang ada. Hal ini dapat diproyeksikan dengan perhitungan kebutuhan air minum sebagai berikut:

Tabel 2. 146Proyeksi Jumlah Rumah Tangga dengan Air Minum Layak

Tahun	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Proyeksi Jumlah penduduk	2086,02	2138,05	2258,6	2364,41	2456,64	2536
Proyeksi Jumlah Rumah Tangga	525,45	534,51	564,65	591,1	614,16	634
Proyeksi kebutuhan Rumah			30,14	56,59	79,65	99,49
Proyeksi Persentase Rumah Tangga dengan Air Minum Layak	73,07%	75%	80%	85%	90%	95%
Proyeksi Jumlah Rumah Tangga dengan Air Minum Layak	383,9463	400,8825	451,72	502,435	552,744	602,3

2.6.4.3. Proyeksi Kebutuhan Listrik

Pembangunan infrastruktur kelistrikan dalam upaya untuk mencukupi kebutuhan listrik di Provinsi Bengkulu terus diupayakan, baik melalui peningkatan kinerja pembangkit listrik tenaga diesel yang telah ada, penambahan mesin pembangkit listrik baru, serta melalui pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Kinerja Perusahaan Listrik Negara (PLN)cabang Bengkulu pada kurun waktu 2018-2022 relatif meningkat. Hal itu terlihat dari jumlah desa yang dialiri listrik pada tahun 2022 sebanyak 1511 desa, meningkat dari tahun sebelumnya.

Ketersediaan pasokan listrik merupakan salah satu faktor utama yang menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan pada berbagai sektor perekonomian (industri, perdagangan, dan sebagainya). Pengukuran ketersediaan pasokan listrik salah satunya dapat diketahui melalui nilai Rasio Elektrifikasi (RE). Rasio Elektrifikasi merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga yang sudah teraliri listrik dengan total rumah tangga. Sementara itu subsektor pertambangan juga merupakan subsektor yang kecil peranannya dalam perekonomian Provinsi Bengkulu seperti terlihat dari relatif rendahnya peranan subsektor pertambangan dalam PDRB Provinsi Bengkulu. Selama waktu 2018-2022 peranan subsektor pertambangan dalam PDRB rata-rata berkisar di 3 persen saja pertahun. Rendahnya peranan subsektor pertambangan dalam perekonomian disebabkan belum optimalnya eksploitasi bahan-bahan tambang yang terkandung di bumi Provinsi Bengkulu. Perkembangan kinerja urusan Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 147 Perkembangan Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Rasio Elektrifikasi	%	94,88	99,99	99,99	99,04	99,61
Persentase Luas lahan Reklamasi	%	55,82	51,73	69,24	n/a	n/a

Sebaran Rasio Elektrifikasi kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu kurun waktu tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 148 Perkembangan Rasio Elektrifikasi Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022

No.	Kab/Kota	Indikator Data				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kota Bengkulu	100.00	99.73	99.78	99.78	99.94
2	Bengkulu Utara	99.22	99.24	99.58	99.29	99.85
3	Bengkulu Selatan	82.45	98.45	98.24	99.25	99.84
4	Kaur	97.11	97.62	99.31	98.36	99.76
5	Rejang Lebong	88.88	99.45	99.57	99.48	99.90
6	Seluma	89.47	99.82	100.00	99.99	99.06
7	Mukomuko	94.28	99.72	100.00	99.99	100.00
8	Kepahiang	100.00	91.18	91.21	92.28	98.44
9	Lebong	85.00	99.99	100.00	99.99	99.44
10	Bengkulu Tengah	100.00	99.99	100.00	99.99	100.00

2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

2.7.1 Rencana Struktur Ruang Berdasarkan RTRW

2.7.1.1 Rencana Sistem Pusat Permukiman

Rencana perwujudan sistem pusat permukiman di Provinsi Bengkulu bertujuan untuk mendorong peran dan fungsi kawasan perkotaan dalam pengembangan wilayah secara keseluruhan dalam lingkup Provinsi Bengkulu. Rencana pengembangan setiap kegiatan dilakukan melalui pembentukan pusat-pusat kegiatan secara berhirarki yang satu sama lain dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah sesuai potensi yang dimiliki setiap pusat kegiatan itu pada kondisi saat ini atau didasarkan pada arah kebijakan pengembangan peran dan fungsi kawasan perkotaan, baik yang menyangkut sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan. Sedangkan arah kebijakan pengembangan didasarkan pada tujuan yang akan dicapai sejalan dengan upaya perwujudan suatu sistem pusat kegiatan. Pertimbangan yang lebih penting adalah pada rencana pengembangan

kedepan dalam kurun waktu perencanaan sampai 20 tahun mendatang, sedangkan sumber daya yang ada serta kondisi saat ini menjadi pertimbangan selanjutnya.

Rencana perwujudan sistem pusat permukiman di Provinsi Bengkulu ini mengacu pada kriteria yang diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang meliputi Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tersebut, Kota Bengkulu dalam Sistem Perkotaan Nasional merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang rencana perwujudannya berada pada Tahap Pengembangan II yaitu berupa kegiatan Pengembangan/ Peningkatan Fungsi melalui Program Revitalisasi dan Percepatan Pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan nasional dengan kode II/C/1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017.

Berdasarkan kriteria dan arahan kebijakan pengembangan tata ruang Provinsi Bengkulu maka rencana struktur ruang wilayah di Provinsi Bengkulu sampai 20 tahun mendatang terdiri dari 1 (satu) PKN yaitu Kota Bengkulu (ibukota Provinsi Bengkulu), 3 (tiga) PKW dan 17 (tujuh belas) PKL.

Sistem permukiman fungsional wilayah Provinsi Bengkulu diarahkan memiliki 3 hirarki pusat pelayanan, yaitu:

a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN)

Yaitu kawasan perkotaan sebagai pusat yang berfungsi melayani wilayah provinsi, wilayah nasional, dan internasional. Pusat pelayanan ini terletak di kawasan perkotaan Bengkulu. Kota Bengkulu dan sekitarnya ini dikembangkan sebagai pusat pelayanan primer.

b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

Yaitu pusat yang melayani satu atau lebih daerah Kabupaten. Pusat pelayanan ini dikembangkan sebagai pusat pelayanan sekunder untuk memacu pertumbuhan perekonomian di wilayah sekitarnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 terdapat 3 (tiga) Pusat Kegiatan Wilayah yang telah ditetapkan yaitu:

1. Manna, rencana perwujudannya adalah juga pada Tahap Pembangunan II melalui Program Revitalisasi dan Percepatan Pengembangan Kota- kota Pusat Pertumbuhan Nasional yang difokuskan pada kegiatan Pengembangan / Peningkatan Fungsi.

2. Muko Muko, rencana perwujudannya adalah pada Tahap Pembangunan II melalui Program Revitalisasi dan Percepatan Pengembangan Kota- kota Pusat Pertumbuhan Nasional yang difokuskan pada kegiatan Pengembangan Baru.
3. Curup, rencana perwujudannya adalah sama seperti Muko Muko yaitu pada Tahap Pembangunan II melalui Program Revitalisasi dan Percepatan Pengembangan Kota-kota Pusat Pertumbuhan Nasional yang difokuskan pada kegiatan Pengembangan Baru.

c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Yaitu kota-kota pusat yang melayani satu atau lebih kecamatan dengan sebutan pusat pelayanan tersier. Pusat pelayanan tersier ini terutama dikembangkan untuk menciptakan satuan ruang wilayah yang lebih efisien sebagai sentra pelayanan kegiatan lokal. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan ruang kawasan perkotaan di Provinsi Bengkulu hingga akhir tahun perencanaan adalah meliputi:

1. PKL Ipuh di Kabupaten Muko Muko.
2. PKL Ketahun di Kabupaten Bengkulu Utara.
3. PKL Argamakmur di Kabupaten Bengkulu Utara.
4. PKL Malakoni di Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara.
5. PKL Karang Tinggi di Kabupaten Bengkulu Tengah.
6. PKL Kembang Seri di Kabupaten Bengkulu Tengah.
7. PKL Pekik Nyaring di Kabupaten Bengkulu Tengah.
8. PKL Perkotaan Kepahiang di Kabupaten Kepahiang.
9. PKL Bermani Ilir di Kabupaten Kepahiang.
10. PKL Kotapadang di Kabupaten Rejang Lebong.
11. PKL Muara Aman di Kabupaten Lebong.
12. PKL Tubei di Kabupaten Lebong.
13. PKL Tais di Kabupaten Seluma.
14. PKL Masad di Kabupaten Bengkulu Selatan.
15. PKL Linau di Kabupaten Kaur.
16. PKL Perkotaan Bintuhan di Kabupaten Kaur.
17. PKL Tanjung Kemuning di Kabupaten Kaur.

Ada 3 (tiga) kabupaten yang direncanakan untuk ditingkatkan sistem pusat permukiman dari PKL menjadi PKW sebagaimana sesuai dengan surat usulan dari kabupaten dan dianggap sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 yaitu: Kabupaten Kepahiang, Kabupaten

Bengkulu Utara dan Kabupaten Bengkulu Tengah. Secara lebih rinci rencana pusat-pusat kegiatan pelayanan dalam Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 149 Sistem Pusat Permukiman Provinsi Bengkulu

PKN	PKW	PKL
Kota Bengkulu	1. Muko Muko	1. Ipuh
		2. Ketahun
		3. Argamakmur
		4. Malakoni
		5. Karang Tinggi
		6. Kembang Seri
		7. Pekik Nyaring
		8. Muara'aman
		9. Tubei
		10. Kepahiang
		11. Bermani Ilir
	2. Curup	12. Kotapadang
		13. Tais
	3. Manna	14. Masad
		15. Bintuhan
		16. Linau
		17. Tanjung Kemuning

Sumber : PP 13 Tahun 2017 dan Hasil Rencana Tahun 2022

Keterangan :

- PKN dan PKW

: ditetapkan sesuai Kebijakan Nasional
- PKL

: ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi sesuai Potensi dan Arah Kebijakan Provinsi Bengkulu

Tabel 2. 150 Rencana Sistem Perkotaan dan Fungsinya di Provinsi Bengkulu

No.	Nama & Hirarki Kota	Strategi	Fungsi
I.	PKN (sesuai PP No.13 Tahun 2017)		
1.	Kota Bengkulu (ibukota Provinsi Bengkulu)	Pengembangan/ Peningkatan Fungsi	a. pusat pemerintahan provinsi b. pusat perdagangan dan jasa regional c. pusat pengumpulan serta distribusi hasil pertanian dan hasil perikanan laut d. pusat industri pengolahan e. pusat pariwisata f. pusat pendidikan tinggi g. pusat transportasi darat, laut dan udara h. pusat pelayanan kesehatan i. pusat permukiman.
II.A	PKW (sesuai PP No.26 Tahun 2008 dan PP No.13 Tahun 2017)		

No.	Nama & Hirarki Kota	Strategi	Fungsi
1.	Manna (ibukota Kabupaten Bengkulu Selatan)	Pengembangan/ Peningkatan Fungsi	j. pusat pemerintahan kabupaten k. pusat pelayanan kesehatan l. pusat pelayanan pendidikan m. pusat perdagangan dan jasa n. pusat pengumpulan dan distribusi hasil pertanian dan hasil perikanan o. pusat agroindustri p. simpul transportasi darat q. pusat pariwisata bahari dan pariwisata buatan
2.	Curup (ibukota Kabupaten Rejang Lebong)	Pengembangan baru	a. pusat pemerintahan kabupaten b. pusat perdagangan dan jasa c. pusat kegiatan agroindustri d. pusat pelayanan kesehatan e. pusat kegiatan perikanan f. pusat pengumpulan dan distribusi hasil- hasil pertanian tanaman pangan, peternakan dan kehutanan g. Simpul transportasi utama penghubung ke jaringan Lintas Tengah dan Timur Sumatera h. pusat kegiatan pariwisata alam
3.	Muko Muko (ibukota Kabupaten Muko Muko)	Pengembangan baru	a. pusat pemerintahan kabupaten b. pusat perdagangan dan jasa c. pusat pengumpulan dan distribusi hasil pertanian, hasil kehutanan, dan hasil perikanan d. pusat industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan e. pusat pelayanan pariwisata
III	PKL (Pusat Kegiatan Lokal)		
1	Ipuh (Kab. Muko Muko)	Pengembangan/ Peningkatan Fungsi	a. pusat pemerintahan kecamatan b. pusat perdagangan dan jasa c. pusat kegiatan pertanian, perikanan dan kehutanan
2	Ketahun (Kab. Bengkulu Utara)	Pengembangan baru	a. pusat pemerintahan kecamatan b. pusat kawasan agropolitan c. pusat kegiatan perikanan d. pusat kegiatan pertanian e. pusat kegiatan pertambangan
3.	Argamakmur (ibukota Kab. Bengkulu Utara)	Pengembangan dan peningkatan	a. pusat pemerintahan kabupaten b. pusat perdagangan dan jasa c. pusat kegiatan industri kecil dan menengah

No.	Nama & Hirarki Kota	Strategi	Fungsi
			d. pusat kegiatan pariwisata e. pusat kegiatan pertanian f. pusat kegiatan pertambangan
4	Malakoni (P. Enggano, Kab. Bengkulu Utara)	Pengembangan baru	a. pusat pemerintahan kecamatan b. pusat perikanan laut c. pusat kegiatan pariwisata d. pusat perdagangan dan jasa e. pusat pertahanan dan keamanan perbatasan Negara di laut lepas.
5	Karang Tinggi (ibukota Kab. Bengkulu Tengah)	Pengembangan baru	a. pusat pemerintahan kabupaten b. pusat perdagangan dan jasa c. pusat kegiatan pertanian
6	Kembang Seri (Kab. Bengkulu Tengah)	Pengembangan baru	a. pusat pemerintahan kecamatan b. pusat perdagangan dan jasa c. pusat pelayanan jasa perkebunan
7	Pekik Nyaring (Kab. Bengkulu Tengah)	Pengembangan baru	a. pusat pemerintahan kecamatan b. pusat perdagangan dan jasa c. pusat pelayanan jasa perikanan
8	Kota Kepahiang (ibukota Kab. Kepahiang)	Pengembangan dan Peningkatan	a. pusat pemerintahan kabupaten b. pusat perdagangan dan jasa c. pusat kegiatan pariwisata d. pusat kegiatan pertanian e. simpul transportasi
9	Bermani Ilir (Kab. Kepahiang)	Pengembangan baru	a. pusat pemerintahan kecamatan b. pusat perdagangan dan jasa c. pusat kegiatan pertanian
10	Kotapadang (Kabupaten Rejang Lebong)	Pengembangan baru	a. pusat pemerintahan kecamatan b. pusat perdagangan dan jasa c. pusat kegiatan pertanian d. simpul transportasi jaringan jalur kereta api
11	Muara-Aman (ibukota Kab. Lebong)	Pengembangan dan Peningkatan	a. pusat pemerintahan kabupaten b. pusat konservasi kawasa Taman Nasional Kerinci Seblat c. pusat pelayanan pariwisata d. pusat kegiatan pertanian dan kehutanan.
12	Tubei (ibukota Kab. Lebong)	Pengembangan dan Peningkatan	a. pusat pemerintahan kabupaten b. pusat konservasi kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat

No.	Nama & Hirarki Kota	Strategi	Fungsi
			c. pusat pelayanan pariwisata d. pusat kegiatan pertanian dan kehutanan

Sistem pusat permukiman didukung PPK dan pusat pertumbuhan kelautan meliputi:

- 1) PPK ditetapkan dalam RTRW Kabupaten;
- 2) Pusat Pertumbuhan Kelautan, terintegrasi dalam sistem pusat permukiman meliputi:
 - a. sentra perikanan tangkap dan pelabuhan perikanan di Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur dan Kota Bengkulu;
 - b. sentra pengolahan hasil perikanan di Kota Bengkulu; dan
 - c. destinasi pariwisata bahari di Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur dan Kota Bengkulu.
- 3) Sistem pusat permukiman didukung PPK dan pusat pertumbuhan kelautan di Provinsi Bengkulu penjelasannya secara rinci dapat dilihat di dalam dokumen final RZWP3K Provinsi Bengkulu berdasarkan Persetujuan Teknis terhadap Materi Teknis Perairan Pesisir Provinsi Bengkulu Nomor B.233/MEN-KP/II/2023) tanggal 14 Februari 2023.

2.7.1.2 Rencana Sistem Jaringan Transportasi

Rencana sistem jaringan transportasi merupakan sistem prasarana utama di Provinsi Bengkulu dimaksudkan untuk meningkatkan keterkaitan antara pusat-pusat kegiatan, peningkatan transportasi antar wilayah perkotaan- perdesaan, dan antar kawasan permukiman yang dikembangkan dalam ruang wilayah Provinsi Bengkulu, serta keterkaitannya dengan sistem jaringan transportasi nasional. Selain itu juga untuk mewujudkan keselarasan dan keterpaduan antar pusat permukiman provinsi dengan sektor kegiatan ekonomi daerah. Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi dilakukan secara terintegrasi yang meliputi indikasi program utama, sistem jaringan transportasi darat, sistem jaringan transportasi laut, dan sistem jaringan transportasi udara.

2.7.1.2.1 Gambaran Umum Rencana Jaringan Transportasi Pulau Sumatera

Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera mengarahkan pengembangan transportasi seperti diuraikan sebagai berikut:

A. Sistem Jaringan Jalan

1. Rencana Sistem Jaringan Jalan dalam RTR Pulau Sumatera

Pengembangan transportasi dalam rangka perwujudan rencana struktur ruang wilayah Pulau Sumatera dirumuskan ke dalam strategi spasial pengembangan sistem jaringan transportasi dengan esensi sebagai berikut:

- a) Pengembangan transportasi untuk mendukung pengembangan 70 sentra produksi pangan, 165 sentra produksi perkebunan, serta sentra produksi sumber daya alam lainnya dalam 43 kawasan andalan yang dikaitkan dengan simpul-simpul/pusat-pusat pengembangannya, berupa antara lain pengembangan jaringan jalan lintas timur di sub wilayah dataran rendah pantai timur, lintas tengah di sub wilayah pegunungan bukit barisan, jaringan jalan lintas barat di sub wilayah pesisir pantai barat, dan feeder road, serta jaringan jalur kereta api feeder di Sumatera bagian selatan, untuk mendukung sentra produksi dalam 31 kawasan andalan di darat yang dikaitkan dengan 50 simpul-simpul/ pusat-pusat pengembangannya.
- b) Pengembangan transportasi untuk mendukung pengembangan keterkaitan antar pusat pengembangan kawasan andalan darat dan laut :
 - 1) Pengembangan jaringan jalur lintas pantai Timur untuk mendukung keterkaitan antar 10 PKN dan 14 PKW sebagai pusat pengembangan 10 kawasan andalan dari Banda Aceh ke Bandar Lampung.
 - 2) Pengembangan jaringan jalur lintas pantai Barat untuk mendukung keterkaitan antar 3 PKN dan 7 PKW sebagai pusat pengembangan 8 kawasan andalan dari Bandar Lampung ke Meulaboh
 - 3) Pengembangan jaringan jalur lintas Tengah untuk mendukung pengembangan keterkaitan antara 2 PKN dan 15 PKW sebagai pusat pengembangan 6 kawasan andalan dari Bandar Lampung ke Takengon – Banda Aceh.
 - 4) Pengembangan feeder road Meulaboh – Beureun, Meulaboh – Peurelak (Ladia Galaska), Tapaktuan – Lhokseumawe, Sibolga – Belawan, Pematang bandar – Belawan, Sipirok – Belawan, Kaban Jahe – Belawan, Tarutung-Belawan, Padang – Bukit Tinggi – Pekanbaru – Dumai, Bengkulu – Jambi – Kuala Tungkal, Bengkulu – Lubuk Linggau – Lahat – Palembang, Baturaja – Kayuagung – Palembang.

- c) Pengembangan transportasi antar pulau dan ekspor untuk mendukung pengembangan komoditas unggulan yang berorientasi ekspor dan perdagangan antar pulau berupa pengembangan jalur lintas timur yang merupakan bagian Asian Highway, untuk mendukung keterkaitan dan kerjasama ekonomi dengan negara tetangga
- d) Pengembangan transportasi antar pulau untuk mendukung penanganan kawasan tertinggal terutama di Pantai Barat Sumatera melalui peningkatan penyeberangan atau transportasi pulau yang menghubungkan Nias – Sibolga, Simeluleu – Meulaboh, Siberut – Padang, dan Enggano – Bengkulu, Dumai – Batam, dan Batam – Natuna.
- e) Pengembangan sistem jaringan transportasi secara sinergis dan terpadu (interkoneksi multimoda) antara jaringan jalan – jaringan kereta api – penyeberangan – transportasi laut – transportasi udara.
- f) Pengembangan transportasi secara selektif dan terbatas bila melintasi kawasan lindung strategis nasional terutama Kawasan Ekosistem Leuser, Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Taman Nasional Berbak, Taman Nasional Bukit 30, Taman Nasional Bukit 12, Hutan Lindung Mahato, dan Hutan Lindung Bukit Batabuh.

2. Arahan Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Jalan

Arahan pengembangan sistem jaringan prasarana jalan didasarkan pada strategi berikut:

- a) Membuka akses daerah terisolasi dan mengatasi kesenjangan pembangunan antarwilayah;
- b) Menghubungkan daerah selatan dan utara yang relatif lebih berkembang
- c) Meningkatkan aksesibilitas dari kawasan pusat produksi, dari kawasan andalan ke outlet-outlet pemasaran;
- d) Meningkatkan pemanfaatan potensi unggulan wilayah secara optimal, yang diikuti dengan meningkatnya daya saing produk- produk unggulan di Sumatera;
- e) Mendukung misi pengembangan wilayah Pulau Sumatera untuk pengembangan sistem kota-kota di Pulau Sumatera yang terpadu melalui pengintegrasian pusat-pusat kota pantai, kota-kota agropolitan, dan kota-kota pertambangan dengan jaringan jalan di Pulau Sumatera.

Arahan pengembangan atau pemantapan Jaringan Jalan Lintas Barat Pulau Sumatera dan Jaringan Jalan Pengumpan Pulau Sumatera secara bertahap, dalam rangka meningkatkan keterkaitan antar kawasan perkotaan dan

mendorong perekonomian di Pulau Sumatera (termasuk provinsi Bengkulu) sebagaimana diindikasikan pada Perpres RI Nomor 13 tahun 2012 meliputi:

- a) Pengembangan jaringan Jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Barat Pulau Sumatera yang menghubungkan : Banda Aceh – Meulaboh – Blan Pidie – Tapaktuan – Bakongan – Subulussalam – Barus – Sibolga – Natal – Simpang Balam – Air Balam – Ujung Gading – Tiku – Pariaman – Dusun Alung – Padang – Painan – Tapan – Muko Muko – Ipuh – Seblat – Ketahun – Bintunan – Lais – Kerkap – Bengkulu – Tais – Manna – Bintuhan – Krui – Bengkuntat – Sanggi – Wonosobo – Kota Agung – Rantau Tijing – Gedung Tataan – Bandar Lampung (Perpres 13 Tahun 2012 Pasal 22 Ayat (2) huruf g).
- b) Pemantapan jaringan jalan arteri primer pada Jaringan Jalan Pengumpan Pulau Sumatera yang menghubungkan Jaringan Jalan Lintas Barat Pulau Sumatera dan Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Sumatera {Perpres 13 Tahun 2012 Pasal 22 Ayat (2) huruf h angka 2 (dua) dan angka 8 (delapan)} meliputi jaringan jalan arteri primer:
 - Ketahun - Batik Nau (indikasi program utama RPJMN 2015- 2019);
 - Bengkulu – Kepahiang- Curup - Tanjung Sanal – Lubuk Linggau;
- c) Pemantapan jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan
- d) Pengumpan Pulau Sumatera yang menghubungkan jaringan Jalan Lintas Barat Pulau Sumatera dan Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Sumatera di Provinsi Bengkulu {Perpres 13 Tahun 2012 Pasal 22 ayat (2) huruf i angka 9 (sembilan)} adalah jalan kolektor primer Manna – Simpang Pino –Tanjung Sakti – Pagar Alam – Lahat
- e) Pengembangan dan pemantapan jaringan jalan nasional untuk menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan pelabuhan dan/atau bandar udara {Perpres 13 Tahun 2012 Pasal 22 Ayat (3) huruf w} dilakukan pada jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Bengkulu dengan Pelabuhan Pulau Baai dan yang menghubungkan PKN Bengkulu dengan Bandar Udara Fatmawati-Soekarno.
- f) Pengembangan jaringan jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana {Perpres 13 Tahun 2012 Pasal 22 Ayat (7) huruf a angka 21 (dua puluh satu)} dilakukan pada Lubuk Linggau – Curup – Bengkulu (2019).

3. Sistem Jaringan Kereta Api Berdasarkan RTR Sumatera

Arahan perwujudan jaringan jalur kereta api didasarkan pada strategi berikut:

- a) Mengembangkan jaringan transportasi kapasitas tinggi, khususnya untuk angkutan barang atau produk komoditas berskala besar.
- b) Mendukung pengembangan sistem kota-kota di Sumatera yang terpadu melalui pengintegrasian kota-kota pantai, baik industri, pertambangan, maupun pariwisata, serta kota-kota agropolitan, baik kehutanan, pertanian maupun perkebunan.

Arahan pengembangan sistem jaringan jalur kereta api di Wilayah Sumatera yang diprioritaskan penanganannya terkait dengan Provinsi Bengkulu meliputi sistem jaringan lintas cabang dengan prioritas tinggi pada ruas-ruas : Lubuk Linggau – Bengkulu dan Padang – Bengkulu – Manna. Strategi Pengembangan jaringan jalur KA ruas Bengkulu – Muko Muko – Padang – Pariaman – Sibolga – Tapaktuan – Meulaboh – Banda Aceh adalah sebagai berikut:

- a) Mengembangkan stasiun kereta api penumpang tipe A pada Kota Bengkulu, Padang, dan Sibolga.
- b) Mengembangkan stasiun kereta api penumpang tipe B pada Kota Muko Muko, Pariaman, Simpang Empat, Tapaktuan, Meulaboh, Blang Pidie
- c) Mengembangkan stasiun kereta api barang tipe I di Kota Padang (Sumatera Barat) dan Sibolga (Sumatera Utara)
- d) Mengembangkan stasiun kereta api barang tipe II sebagai simpul pengangkutan bahan baku dari sentra produksi ke pusat-pusat pengolahan di Meulaboh, Tapaktuan, Simpang Empat, dan Muko Muko
- e) Mengembangkan moda transportasi Kereta Api dengan moda transportasi lainnya
- f) Mengembangkan jaringan jalur kereta api multi track dengan memperhatikan kondisi geologi, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana
- g) Mereservasi kawasan sekitar stasiun dan jaringan jalur kereta api
- h) Mengembangkan jalur kereta api ke simpul distribusi (bandara / pelabuhan)

4. Sistem Jaringan Prasarana Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan RTR Pulau Sumatera

Arahan pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi penyeberangan yang diprioritaskan penanganannya terkait dengan Provinsi Bengkulu yaitu :

- a) Pengembangan Pelabuhan Pulau Baai di Kota Bengkulu sebagai pelabuhan utama dalam rangka mendukung pengembangan Kota Bengkulu sebagai PKN
- b) Pengembangan jaringan transportasi penyeberangan meliputi:
 - 1) Lintas penyeberangan meliputi:
 - i. Pelabuhan Pulau Baai – Pelabuhan Kahyapu.
 - ii. Pelabuhan Pulau Baai – Pelabuhan Tanjung Priuk/Patimban.
 - iii. Pelabuhan Linau – Pelabuhan Kahyapu.
 - iv. Pelabuhan Muko Muko – Pulau Mentawai.
 - 2) Pelabuhan penyeberangan meliputi:
 - i. Pelabuhan Muko Muko di Kabupaten Muko Muko.
 - ii. Pelabuhan Kahyapu di Kabupaten Bengkulu Utara.
 - iii. Pelabuhan Ketahun di Kabupaten Bengkulu Utara.
 - iv. Pelabuhan Pulau Baai di Kota Bengkulu.
 - v. Pelabuhan Linau di Kabupaten Kaur.

5. Sistem Jaringan Prasarana Transportasi Laut RTR Pulau Sumatera

Arahan pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi laut didasarkan pada strategi berikut :

- a) Meningkatkan aksesibilitas dari kawasan pusat produksi dan Kawasan Ekonomi Khusus serta kawasan andalan ke outlet- outlet pemasaran
- b) Meningkatkan cakupan pasar produk-produk unggulan dengan memanfaatkan jalur ALKI I yang difungsikan untuk pelayaran dari laut Cina Selatan melintasi laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda ke Samudera Hindia dan sebaliknya; serta untuk pelayaran dari Selat Singapura melalui Laut Natuna dan sebaliknya (Alur Laut Cabang 1A) dan mengembangkan jalur-jalur penyeberangan lintas provinsi dan lintas pulau
- c) Meningkatkan volume ekspor-impor melalui pelabuhan peti kemas yang didukung oleh keberadaan industri manufaktur dan/atau industri pengolahan bahan baku

6. Arahan Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Transportasi Udara dalam Kaitannya dengan RTR Pulau Sumatera

Arahan pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi udara didasarkan pada strategi berikut:

- a) Meningkatkan aksesibilitas antar kota dalam lingkup wilayah Sumatera maupun antar kota dalam lingkup nasional dan internasional;
- b) Mendorong pengembangan potensi pariwisata pada lokasi- lokasi yang sangat potensial;
- c) Membuka keterisolasian daerah yang memiliki potensi berkembang;
- d) Menjalin sinergi jaringan prasarana transportasi wilayah antar moda.
- e) Membuka dan memantapkan jalur-jalur penerbangan internasional antara kota-kota PKN dengan negara tetangga dan negara-negara pusat pemasaran produksi & jasa dari Sumatera.

Arahan pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi udara yang diprioritaskan penanganannya yang terkait dengan provinsi Bengkulu yaitu Bandara Fatmawati-Soekarno di PKN Bengkulu sebagai Pelabuhan Udara yang sebelumnya berfungsi sebagai bandara pengumpul skala pelayanan tersier, berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 telah dinaikkan fungsinya menjadi bandara pengumpul skala pelayanan sekunder yang sedang diproses menjadi Bandara internasional.

2.7.1.2.2 Rencana Pengembangan Sistem jaringan Transportasi Provinsi Bengkulu

a. Jalan Umum

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan, maka fungsi jalan luar kota (dalam sistem jaringan jalan primer) dikelompokkan sebagai Jalan Arteri Primer, Jalan Kolektor Primer-1, Jalan Kolektor Primer-2, Jalan Kolektor Primer-3, Jalan Kolektor Primer-4, Jalan Lokal Primer, Jalan Lingkungan Primer dengan pengertian sebagai berikut:

- 1) jalan arteri primer (JAP) adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar-pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
- 2) jalan kolektor primer-1 (JKP-1) adalah jalan yang menghubungkan antar ibukota provinsi.
- 3) jalan kolektor primer-2 (JKP-2) adalah jalan yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota.
- 4) jalan kolektor primer-3 (JKP-3) adalah adalah jalan yang menghubungkan antar ibukota kabupaten/kota.

- 5) Jalan kolektor primer-4 (JKP-4) adalah jalan yang menghubungkan antara ibukota kabupaten/kota dan ibukota kecamatan.
- 6) Jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan antara PKN dan PK-Lingkungan, atau antara PKW dan PK-Lingkungan, atau antar PKL, atau antara PKL dan PK-Lingkungan.
- 7) Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.

Persyaratan Teknis menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 2006 tentang sistem jaringan jalan adalah sebagai berikut:

1) Jalan Arteri Primer

- a) Jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter.
- b) Jalan arteri primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata.
- c) Pada jalan arteri primer lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal.
- d) Jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer dibatasi sedemikian rupa sehingga ketentuan di atas harus tetap terpenuhi.
- e) Persimpangan sebidang pada jalan arteri primer dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan di atas.
- f) Jalan arteri primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus.

2) Jalan Kolektor Primer

- a) Jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter.
- b) Jalan kolektor primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata.
- c) Jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sehingga ketentuan kecepatan dan kapasitas masih tetap terpenuhi.
- d) Persimpangan sebidang pada jalan kolektor primer dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi ketentuan di atas.
- e) Jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus.

3) Jalan Lokal Primer

- a) Jalan lokal primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter.
- b) Jalan lokal primer yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus.

Sistem jaringan prasarana transportasi jalan raya yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi adalah jaringan jalan nasional yang berfungsi sebagai jalan arteri primer (JAP) dan jalan kolektor primer-1 (JKP-1), serta jalan tol/jalan bebas hambatan sebagai jalan strategis nasional yang ada dalam wilayah provinsi. Kemudian jaringan jalan yang menjadi wewenang provinsi yaitu jalan kolektor primer-2 (JKP-2) dan jalan kolektor primer-3 (JKP-3) serta jaringan jalan strategis provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang sistem jaringan Jalan.

Ketentuan lebih rinci mengenai jaringan transportasi jalan raya pada wilayah provinsi mengikuti ketentuan Keputusan Menteri PUPR Nomor: 430/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri Primer (JAP) dan Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1). Kemudian berdasarkan diktum ketiga Keputusan Menteri PUPR tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri PU Nomor 03/PRT/M/2012 dinyatakan bahwa gubernur menetapkan fungsi ruas jalan sebagai Jalan Kolektor Primer-2 (JKP-2), Jalan Kolektor Primer-3 (JKP-3), Jalan Kolektor Primer-4 (JKP-4), Jalan Lokal Primer (JLP), Jalan Lingkungan Primer (JLing-P), Jalan Arteri Sekunder (JAS), Jalan Kolektor Sekunder (JKS), Jalan Lokal Sekunder (JLS), dan Jalan Lingkungan Sekunder (JLing-S). Khusus untuk JKP-4, JLP, JLing-P, JAS, JKS, JLS, dan JLing-S, Gubernur menetapkannya berdasarkan usulan Bupati/ Walikota.

Dalam rangka mengarahkan struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang wilayah di Provinsi Bengkulu, maka direkomendasikan pula Jalan Kolektor Primer 4 (JK-4) dan jalan Lokal Primer yang merupakan jalan kabupaten agar diusulkan oleh Bupati bersangkutan setelah ditetapkan dalam RTRW masing-masing kabupaten. Arah rencana pengembangan prasarana ditekankan kepada keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan sesuai dengan hierarkinya.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka jaringan jalan di Provinsi Bengkulu dapat dikelompokkan berdasarkan fungsi dan statusnya, seperti disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 151 Pengembangan Jaringan Jalan Nasional di Provinsi Bengkulu Berdasar Keputusan Menteri PUPR Nomor: 430/KPTS/M/2022

NO	NOMOR RUAS			NAMA RUAS	PANJANG (KM)			
					PANJANG RUAS	JAP	JKP-1	JKP-1 (JSN)
1	1			BATAS PROV. SUMBAR - MUKOMUKO	33,09	33,09	-	-
2	2			MUKO-MUKO - BANTAL	50,76	50,76	-	-
3	3			BANTAL - IPUH	49,03	49,03	-	-
4	4			IPUH - SEBLAT	37,18	37,18	-	-
5	5			SEBLAT - KETAHUN	41,61	41,61	-	-
6	6			KETAHUN - DS. AIR LIMAS - BINTUNAN	30,79	30,79	-	-
7	7			BINTUNAN - LAIS	10,94	10,94	-	-
8	8			LAIS - KERKAP	20,78	20,78	-	-
9	9			KERKAP - PS. PEDATI	21,04	21,04	-	-
10	9	11	K	JLN. BUDI UTOMO (BENGKULU)	1,59	1,59	-	-
11	9	12	K	JLN. W.R. SUPRATMAN (BENGKULU)	5,51	5,51	-	-
12	10			PASAR PEDATI - SP. DPRD (TUGU HIU)	8,1	8,1	-	-
13	11			SP. DPRD (TUGU HIU) - SP. NAKAU	4,29	4,29	-	-
14	12	11	K	NAKAU - AIR SEBAKUL (BENGKULU)	5,92	5,92	-	-
15	13	11	K	AIR SEBAKUL - BETUNGAN (BENGKULU)	6,27	-	6,27	-
16	14	11	K	BETUNGAN - PADANG SERAI (BENGKULU)	5,42	-	5,42	-
17	15	11	K	JLN. AKSES PELABUHAN (BENGKULU) (PG.DEWA-P.BAAI)	7,84	7,84	-	-
18	16	11	K	AIR SEBAKUL - PAGAR DEWA	4,7	4,7	-	-
19	17			KEMBANG SERI - AIR SEBAKUL	16,79	16,79	-	-
20	18			BETUNGAN - TAIS	40,49	40,49	-	-
21	18	11	K	PAGAR DEWA - SP. BANDARA - BETUNGAN	6,44	6,44	-	-
22	19			TAIS - MARAS	57,82	57,82	-	-
23	20			MARAS - SP. KURAWAN (MANNA)	14,61	14,61	-	-
24	20	11	K	SP. KURAWAN - K. BUPATI (MANNA)	4,06	4,06	-	-
25	20	12	K	K. BUPATI - JLN. SAMSUL BAHRUN (MANNA)	4,06	4,06	-	-
26	21			SP. TIGA KAYU KUNYIT (MANNA) - TANJUNG KEMUNING	37,83	37,83	-	-
27	21	11	K	JLN. ISKANDAR BAKSIR (MANNA)	2,24	2,24	-	-
28	22			TANJUNG KEMUNING - LINAU	43,73	43,73	-	-
29	23			LINAU - BATAS PROV. LAMPUNG	27,79	27,79	-	-
30	24			NAKAU - BTS. KOTA KEPAHANG	47,66	47,66	-	-
31	24	11	K	BTS. KOTA KEPAHANG - SP. KANTOR BUPATI KEPAHANG	3,62	3,62	-	-
32	25			SP. KANTOR BUPATI KEPAHANG - SP. TABAMULAN (CURUP)	17,3	17,3	-	-
33	26			SP. TABAMULAN - BTS. KOTA CURUP	3,01	3,01	-	-
34	26	11	K	JLN. THAMRIN (CURUP)	0,89	0,89	-	-

NO	NOMOR RUAS				NAMA RUAS	PANJANG (KM)			
						PANJANG RUAS	JAP	JKP-1	JKP-1 (JSN)
35	26	12	K		JLN. MERDEKA (CURUP)	1,47	1,47	-	-
36	26	13	K		JLN. A. YANI (CURUP)	0,82	0,82	-	-
37	27				SP. NANGKA (CURUP) - BTS. PROV. SUMSEL	42,6	42,6	-	-
38	27	11	K		CURUP - S. NANGKA (CURUP)	5,13	5,13	-	-
39	28				MANNA - BTS. PROV. SUMSEL	40,72	-	40,72	-
40	28	11	K		JLN. A. YANI (MANNA)	2,59	2,59	-	-
41	29				SP. TABA MULAN - SP. NANGKA	12,2	12,2	-	-
42	30				SP. TIGA JBT. MANULA (KM 253.400) - BTS.PROV. LAMPUNG	1,5	1,5	-	-
43	31				SP. ENAM - LUBUK KEBUR	1,78	1,78	-	-
TOTAL PROVINSI BENGKULU						781,99	729,58	52,41	-

Sumber: Kepmen PUPR No.: 430/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri Primer dan Jalan Kolektor Primer -1

b. Rencana Pembangunan dan Peningkatan Jalan dalam Provinsi Bengkulu

Rencana Pembangunan dan Peningkatan Jalan di Provinsi Bengkulu dimaksudkan untuk mendukung Rencana Struktur Ruang Provinsi Bengkulu. Sesuai arahan struktur ruang nasional, ibukota Provinsi Bengkulu ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Untuk mendukung fungsi Kota Bengkulu sebagai PKN dan mendukung sistem perkotaan Provinsi Bengkulu maka rencana pembangunan, pengembangan, dan peningkatan jaringan jalan dan jembatan sampai dengan Tahun 2043 yaitu sebagai:

- 1) Pembangunan dam / tanggul penahan abrasi air laut pada ruas jalan Lintas Barat di Kabupaten Muko Muko dan Kabupaten Bengkulu Utara.
- 2) Pengembangan dan peningkatan fungsi jalan Lintas Barat yang menghubungkan PKN Bengkulu dan PKN di Provinsi berbatasan dari Jalan Kolektor Primer 1 (JKP-1) menjadi Jalan Arteri Primer (JAP).
- 3) Pengembangan jaringan jalan dari PKN Bengkulu dan PKW dalam Provinsi Bengkulu menuju Bandar Udara Pengumpul skala pelayanan sekunder Fatmawati-Soekarno serta menuju Pelabuhan Utama Pulau Baai.
- 4) Pemantapan jaringan jalan arteri primer pengumpan Lintas Barat – Tengah Nakau - Taba Penanjung - Kepahiang – Taba Mulan - Curup – SP Nangka – Kepalak Curup - Padang Ulak Tanding – Batas Kota Lubuk Linggau (Sumsel);
- 5) Pemantapan jaringan jalan kolektor primer satu (JKP-1) yang menghubungkan Manna ke Batas Sumsel arah Pagar Alam, Air Sebakul-Betungan dan Betungan –Padang Serai.

- 6) Pengembangan jaringan jalan strategis Nasional Trans Enggano yaitu ruas jalan Ka'ana-Kahyapu, Kahyapu-Tg.Keramai, Malakoni-Ka'ana, Malakoni-Banjarsari sebagai pendukung keterbukaan wilayah pulau Enggano.
- 7) Pembangunan jaringan jalan bebas hambatan yang menghubungkan:
 - a) Lubuk Linggau – Curup – Bengkulu (Feeder Tol : Kota Bengkulu - Bengkulu Tengah – Kepahiang – Rejang Lebong – Lubuk Linggau),
 - b) Padang (Sumatera Barat) – Bengkulu
 - c) Bengkulu – Batas Provinsi Lampung
 - d) Muara Enim - Lahat – Lubuk Linggau
 - e) Bengkulu Outer Ring Road (BORR): Ps.Pedati - Tugu Hiu - Nakau – Air Sebakul– Betungan – Padang Serai (Sp Kandis) – Pulau Baai.
- 8) Perbaikan perkerasan pada ruas jalan-ruas jalan Kolektor Primer 2 yang rusak.
- 9) Perlindungan terhadap kerusakan lingkungan khususnya pada ruas jalan yang melintasi hutan lindung dan taman nasional.
- 10) Sejalan dengan rencana perwujudan Struktur Ruang Provinsi, bahwa Kota Bengkulu sebagai PKN, maka peningkatan kondisi jalan dan geometrik jalan nasional dalam provinsi perlu disesuaikan dengan fungsi PKN sehingga pembangunan dan peningkatan jalan dalam jangka panjang adalah peningkatan fungsi jalan nasional dari Kolektor Primer-1 (JKP-1) menjadi Arteri Primer (JAP) mulai dari batas Sumbar– Bengkulu – sampai batas Lampung. Seluruh ruas jalan yang menghubungkan PKN Bengkulu – batas Sumbar dan PKN Bengkulu - batas Lampung yang diusulkan peningkatan fungsinya menjadi jalan Arteri Primer dapat dilihat pada Tabel 3.5.
- 11) Rencana pembangunan jaringan Jalan Lintas Tengah memanjang dari Utara ke Selatan Provinsi Bengkulu untuk meningkatkan aksesibilitas berupa pembangunan baru jaringan jalan kolektor primer yang terdiri atas ruas jalan dan jembatan
- 12) Jaringan Lintas Tengah Provinsi Bengkulu itu dimulai dari Batas Provinsi Lampung - Muara Dua - Muara Sahung - Datar Lebar - Batu Ampar - Palak Bengkerung -Simpang Pino – Sendawar - Padang Capo - Lubuk Sini – Pelajau - Lubuk Durian - Gunung Selan - Giri Mulya - Dusun Baru Napal Putih - Suka Merindu - Talang Gelumbang -Talang Arah – DusunTunggang - Bunga Tanjung - Lubuk Saung - Lalang Petai - Lubuk Pinang -Batas Sumatera Barat.

13) Rencana Pembangunan Jalan Baru di Provinsi Bengkulu Menurut Status dan Fungsi Jalan secara lebih rinci nama ruasnya dapat dilihat pada Tabel berikut ini

Tabel 2. 152 Usulan Rencana Peningkatan Jaringan Jalan Nasional (JKP-1 menjadi JAP) di Provinsi Bengkulu untuk Mendukung Fungsi

Nomor Ruas Baru			Nama Ruas Jalan	Panjang Jalan (km)	Fungsi	Status	Kabupaten/ Kota
013	11	K	Jln. Air Sebakul – Betungan(Bengkulu)	6.330	JKP-1	Nasional	Kota Bengkulu
014	11	K	Jln. Betungan- Padang Serai(Bengkulu)	4.400	JKP-1	Nasional	Kota Bengkulu
027			Manna – Bts Sumsel	40,72	JKP-1	Nasional	Bengkulu Selatan

Dalam di atas adalah ruas-ruas jalan yang diusulkan peningkatan fungsinya sesuai pasal 18 ayat (2) PP 13 Tahun 2017, bahwa jalan Arteri Primer dikembangkan secara menerus dan berhierarki untuk menghubungkan PKN dan PKN, dan/ atau PKN dan PKW.

Tabel 2. 153 Nama Ruas Jalan yang merupakan Rencana Pembangunan Jalan Baru, pemantapan, dan peningkatan di Provinsi Bengkulu

No	Nama Ruas Jalan	Fungsi	Status	Kabupaten/ Kota
1	Lubuk Pinang - Lalang Luas –Lubuk Pauh- Sungai Jerinjing-Sungai Ipuh-Lubuk Saung – Bukit Makmur – Talang Arah – Gajah Makmur (SP VIII)	JKP-2	Provinsi	Muko Muko
2	Suka Baru (PLG) – Air Tenang – Talang Lumpang- Tanjung Dalam-Teluk Kangu- Batu Payung – Talang Benai – Daen Sunraio – Limas Jaya (D IV) – Unit IX – Giri Mulya – Kuro Tidur – Senali – Taba Tembilang – Lubuk Saung – Kemumu – Lubuk Durian – Pematang Tiga – Sekayun – Bajak – Kelindang – Lubuk Sini – Suka Rami	JKP-2	Provinsi	Bengkulu Utara
3	Padang Capo – Ulu Talo – Durian Bubur – Sendawar	JKP-3/ JLP	Provinsi	Seluma
4	Pengembangan Jaringan Jalan Kolektor Primer 2 (JKP-2) dan Jalan Kolektor Primer 3 (JKP-3)			
5	Sukaraja– Padang Capo(Seluma) –Batas Sumsel (peningkatan Jkp2 > Jkp1)	JKP-3	Provinsi	Seluma, Kepahiang
6	Batas Sumsel –Air Klinsar (Empat Lawang Sumsel) – Kepahiang (pemb. Baru)	-		

No	Nama Ruas Jalan	Fungsi	Status	Kabupaten/ Kota
7	Sungai Lisai (Lebong) – Jangkat (Merangin Jambi) / pembangunan jaringan jalan baru			Lebong – Merangin Jambi
8	Talang Donok (Lebong) – Batu Gane Selangit (Musi Rawas Sumsel)/ pembangunan jaringan jalan baru	-		Lebong – Musi Rawas
9	Penarik–Sungai Ipuh (Muko Muko) / peningkatan	JLP	Provinsi	Muko Muko
10	Sungai Ipuh – Lempur Kabupaten Kerinci(Jambi) / pembangunan jalan baru	-		Muko Muko – Kerinci
11	Kroya– Air Lagan– Kepahiang– Lebong (Geothermal)	-		Lebong, Kepahiang
12	Tanjung Iman- Muara Sahung – Air Tembok /pengembangan & peningkatan fungsi Air Tembok– Muara Dua (ibukota OKU Selatan Sumsel) / pembangunan baru	JKP-2	Provinsi Nasional	Kaur – OKU Selatan
13	Simpang Manna –Tanjung Sakti – Pagar Alam(pengembangan &peningkatan)	JKP-1	Nasional	Bengkulu Selatan – Pagar Alam
14	Palak Bengkerung – Sukarami – Batu Ampar (pengembangan & peningkatan)	JLP	Provinsi	Bengkulu Selatan
15	Peningkatan dan pengembangan jaringan jalan arteri sekunder, jalan kolektor sekunder, dan jaringan jalan sistem sekunder dalam PKN kota Bengkulu	JAS, JKS,& JLS	Kota	Kota Bengkulu
16	Datar Lebar – Bungin Tambun II – Muara Sahung – Tanjung Agung– Palawan - Bandi Agung(Batas Lampung) / pengembangan dan peningkatan	JKP-2,JLP	Provinsi	Kaur
17	Lintasan Muara Aman – Tambang Sawah – Ketenong I – Ketenong II	JKP-3	Provinsi	Lebong
18	Ketenong II – Sungai Lisai – Merangin (pembangunan jaringan jalan baru)	-	Nasional	Lebong – Merangin
19	Jaringan jalan strategis nasional lingkaran Pulau Enggano dalam rangka KSPN	-	Nasional	Bengkulu Utara
20	Pengembangan jaringan jalan di Kawasan Strategis Provinsi	JKP-2/ JKP-3		Provinsi Bengkulu

Sumber : hasil analisis, usulan bidang Bina Marga, dan arahan Perpres RI Nomor 13 Tahun 2012

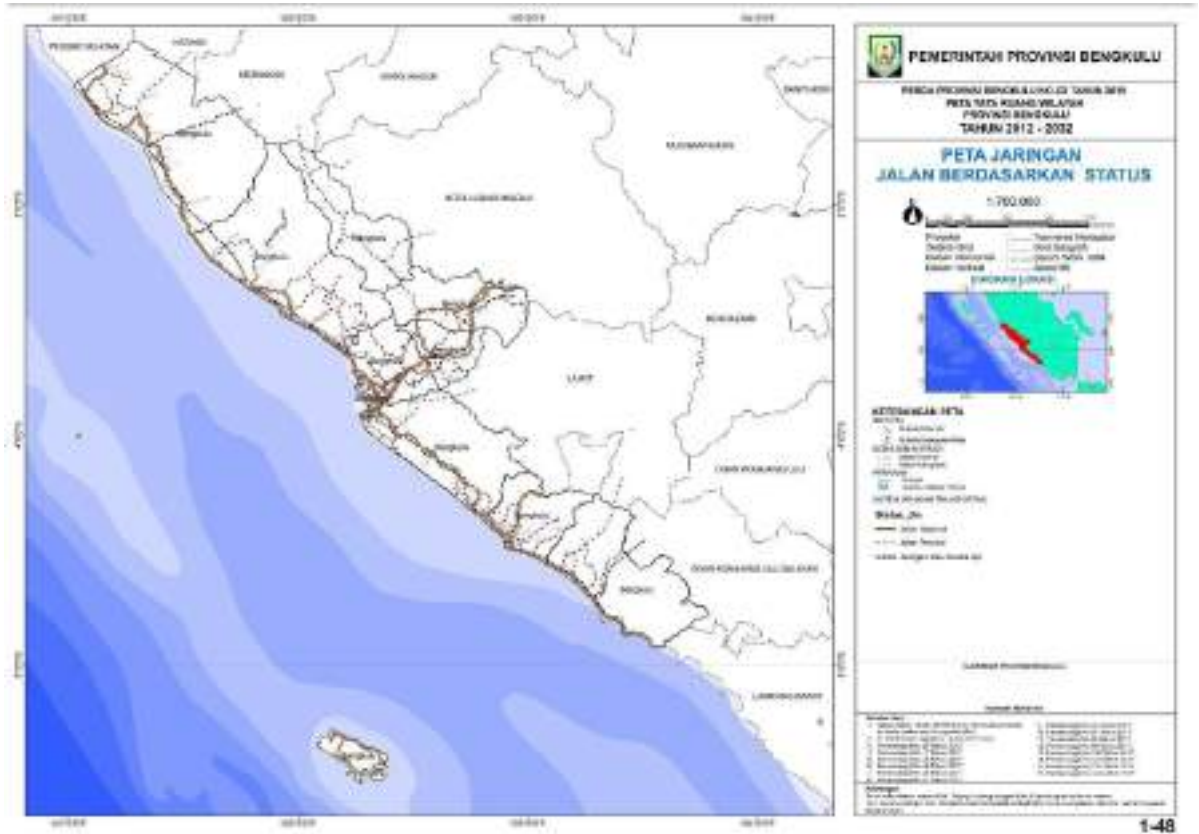
Tabel 2. 154 Pengembangan dan Peningkatan Fungsi Jaringan Jalan sebagai Jalan Penghubung

No	Ruas Jalan	eksisting	Rencana	Keterangan
1.	Tanjung Iman – Muara Sahung – Air Tembok di Kabupaten Kaur sampai ke Muara Dua di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan	JKP-2	Diusulkan JKP-1	Menghubungkan sistem perkotaan Kaur dan Muara Dua OKU Selatan
2.	Ketenong II–Sungai Lisai (Lebong) – Jangkat (Merangin Jambi) kajian pembangunan jalan baru	-	Diusulkan JKP-1	Menghubungkan sistem perkotaan kab. Bengkulu Utara – Lebong – Merangin Jambi
3.	Talang Donok (Lebong) – Batu Gane Selangit (Musi Rawas Sumsel) kajian pembangunan jalan baru	-	Diusulkan JKP-1	Menghubungkan sistem perkotaan kab. Lebong – Musi rawas
4.	Sukaraja- Padang Capo (Seluma) – Batas Sumsel	JKP-3	Diusulkan JKP-2	Menghubungkan sistem perkotaan kab. Seluma
5.	Bts Sumsel terusan Padang Capo Seluma–Air Kliksar (Empat Lawang Sumsel)– Kepahiang (Bengkulu)	JKP-3	Diusulkan JKP-2	Seluma – IV Lawang- kab. Kepahiang
6.	Sungai Ipuh (Muko Muko) – Batas Jambi–Lempur (Kerinci, Provinsi Jambi)/ kajian pembangunan jalan baru	-	Diusulkan JKP-1	Penghubung sistem perkotaan Muko Muko& Kab. Kerinci
7.	Ketenong (kabupaten Lebong)– Desa Sebelat Ulu (Bengkulu Utara)/ pembangunan jaringan jalan baru	-	JKP-2	Menghubungkan sistem perkotaan kab. Lebong – Bengkulu utara
8	Kerkap – Tanjung Agung Palik – Gunung Selan – Giri Mulya – Atas Tebing– Tubei-Muara Aman (PKL Tubei-Muara Aman menuju PKN Bengkulu dan sebaliknya)	JKP-2	JKP-1	Menghubungkan PKN Bengkulu dan PKL Muara Aman- Tubei
9.	Kerkap-Tanjung Agung Palik – Lubuk Durian	JKP-2	JKP-1	Menghubungkan PKN Bkl dan Argamakmur
10.	Lais – Argamakmur – Lubuk Durian – Lubuk Sini	JKP-2	JKP-1	Menghubungkan sistem perkotaan Bkl Utara dan Bkl Tengah
11.	Curup – Tes – Muara Aman – Tambang Sawah – Ketenong	JKP-3	JKP-2	Menghubungkan sistem perkotaan RL dan Lebong
12.	Padang Ulak Tanding – Kotapadang – Derati	JLP	JKP-3	Penghubung kota kecamatan

No	Ruas Jalan	eksisting	Rencana	Keterangan
13.	Kelutum – Simpang Pino (peningkatan fungsi)	JKP-3	JKP-2	Penghubung kota kecamatan
14.	Tebat Monok - SP.Waim – Kb.Agung	JLP	JKP-3	Penghubung PKL Kepahiang dan PKN Bkl
15.	Banjarsari –Tanjung Keramai - Malakoni –Ka’ana – Kayu Apu (pengembangan dan peningkatan fungsi)	JLP	JKP-3	Jaringan jalan strategis nasional untuk DPN
16.	Jalan wisata Suban Air Panas	JKP-3	JKP-2	Akses ke pusat wisata
17.	Jalan wisata air terjun Curup IX	JLP	JKP-3	Akses ke pusat wisata
18.	Jalan wisata kepahiang- kabawetan – Bandung Baru	JKP-3	JKP-2	Akses ke pusat wisata
19.	Batas Provinsi Lampung – Datar Lebar – Mentiring –Palak Bengkerung – Sukarami– Batu Ampar –Dusun Baru- Plajau- Lubuk Sini –Napal Putih – Suka Merindu – Talang Gelumbang –Talang Arah – Tunggang – Bunga Tanjung – Lubuk Saung – Lalang Petai – Lubuk Pinang –Tapan- Sumatera Barat Pembangunan jaringan jalan baru	JKP-3	JKP-2	Jaringan jalan dan jembatan sebagai Jaringan Lintas Tengah Provinsi Bengkulu
20.	Ketenong (Lebong) – Napal Licin Musi Rawas Utara, pembangunan jaringan jalan baru	-	Diusulkan JKP-1	Penghubung siatem perkotaan di Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan.
21.	Kota Bengkulu– Pondok Kubang – Taba Gumantung–Raja Besi – Karang Are (Bengkulu Tengah) – Tanjung Alam (Kepahiang)- Air Lanang - Tebat Pulau – Tebat Ketenong Dalam– Air Pikat – Baru Manis – Kampung Melayu – Sumber Rejo Transad (Rejang Lebong) –PGE Bukit Daun – Trans Mangkurajo (Lebong) – PGE Hulu Lais – Danau Liang – Tanjung Agung (Lebong)	-	JKP-3	Jaringan jalan lintas kabupaten dalam Provinsi Bengkulu

No	Ruas Jalan	eksisting	Rencana	Keterangan
21.	Bungin Tambun III Padang Guci Hulu – Suwarna Dwipa Kabupaten Muara Enim	-	Diusulkan JKP-1	Penghubung sistem perkotaan di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan.

Sumber: Hasil Analisis dan Usulan dari Kabupaten



Gambar 2. 6 Peta Rencana Jaringan Jalan Provinsi Bengkulu

c. Jalan Tol

- 1) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 bahwa jalan tol di Provinsi Bengkulu meliputi ruas jalan Lubuk Linggau – Curup – Bengkulu dan merupakan pengembangan jaringan jalan bebas hambatan.
- 2) Berdasarkan Rencana umum jaringan jalan tol yang mengacu kepada surat edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor: 16/SE/Sb/2020 Tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Jaringan Jalan Tol di Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ada ruas tol yang direncanakan meliputi:
 - a) Padang – Bengkulu
 - b) Bengkulu – Batas Provinsi Lampung
 - c) Muara Enim – Lahat – Lubuk Linggau



d. Rencana Terminal Penumpang

Terminal penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menaikkan/menurunkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar moda transportasi serta pengaturan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Oleh sebab itu akan sangat sulit untuk memfungsikan terminal jika penumpang yang naik dan turun sangat minim seperti di wilayah Provinsi Bengkulu. Contoh lain sulitnya menghidupkan terminal adalah di Kota Padang ibukota Sumatera Barat yang hingga waktu ini tidak ada terminal dan tidak disibukkan oleh terminal, padahal Kota Padang sudah termasuk kawasan perkotaan besar dengan jumlah penduduk tahun 2016 sudah 909 ribu Jiwa.

Terminal Penumpang menurut fungsi pelayanannya dibagi menjadi berbagai tipe sebagai berikut:

1. Terminal Penumpang Tipe A, berfungsi melayani kendaraan angkutan umum untuk angkutan luar kota antar provinsi, dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota dan angkutan perdesaan
2. Terminal Penumpang Tipe B, berfungsi melayani kendaraan angkutan umum untuk angkutan kota dalam provinsi, angkutan kota dan angkutan perdesaan
3. Terminal Penumpang Tipe C, berfungsi melayani kendaraan angkutan umum untuk angkutan perdesaan.

Persyaratan Lokasi untuk masing- masing tipe terminal adalah sebagai berikut:

a) Terminal Tipe A

- 1) Terletak di Ibukota Provinsi, Kota atau Kabupaten dalam jaringan trayek antar kota antar provinsi dan/atau angkutan lintas batas negara
- 2) Terletak di jalan arteri dengan kelas jalan sekurang-kurangnya kelas III A
- 3) Jarak antara dua terminal penumpang, tipe A sekurang- kurangnya 20 km di Pulau Jawa, 30 km di pulau Sumatera dan 50 km di pulau lainnya
- 4) Luas lahan yang tersedia sekurang-kurangnya 5 ha untuk terminal di Pulau Jawa dan Sumatera dan 3 ha untuk pulau lainnya
- 5) Mempunyai jalan akses masuk atau jalan keluar ke dan dari terminal, sekurang-kurangnya berjarak 100 meter di Pulau Jawa dan 50 meter di pulau lainnya.

b) Terminal Tipe B

- 1) Terletak di Kota atau Kabupaten dalam jaringan trayek antar kota dalam provinsi.
- 2) Terletak di jalan arteri atau kolektor dengan kelas jalan sekurang-kurangnya kelas

- Jarak antara dua terminal penumpang, tipe B atau dengan terminal tipe A sekurang-kurangnya 15 km di Pulau Jawa, dan 30 km di pulau lainnya
- Luas lahan yang tersedia sekurang-kurangnya 3 ha untuk terminal di Pulau Jawa dan Sumatera dan 2 ha untuk pulau lainnya
- Mempunyai jalan akses masuk atau jalan keluar ke dan dari terminal, sekurang-kurangnya berjarak 50 meter di Pulau Jawa dan 30 meter di pulau lainnya.
- Berdasarkan kriteria di atas, maka pengembangan terminal penumpang di Provinsi Bengkulu diarahkan pada pemberdayaan fungsi

Terminal tipe A atau Tipe B yang sudah terbangun di Provinsi Bengkulu, sedangkan untuk persiapan terminal yaitu berupa penyiapan lahan untuk terminal tipe C untuk rencana 20 Tahun mendatang.

Tabel 2. 155 Terminal penumpang di Provinsi Bengkulu

No.	Nama Terminal	Type	Lokasi
1	Air Sebakul	A	Kota Bengkulu
2	Simpang Nangka	A	Kab. Rejang Lebong
3	Gunung Ayu	B	Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu dan hasil pembahasan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2018 tentang Tataran Transportasi Wilayah Provinsi Bengkulu terdapat pengembangan terminal tipe B di seluruh kabupaten dan kota. Selain dari itu, selayaknya juga dibangun terminal terpadu antar moda terkait dengan Bandar Udara Fatmawati-Soekarno dan Pelabuhan Pulau Baai.

e. Sarana Angkutan Umum Darat

Sarana angkutan umum darat adalah segala bentuk sarana transportasi yang menggunakan jalan untuk mengangkut orang atau barang dengan aman, nyaman dan murah. Sarana angkutan umum adalah fasilitas yang penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat, baik perkotaan maupun perdesaan dalam rangka menunjang pergerakan orang dan barang yang sangat mempengaruhi konektivitas berfungsinya sistem perkotaan. Kendaraan umum akan lebih efisien dibandingkan kendaraan pribadi dalam menggunakan prasarana jaringan jalan dan juga kendaraan umum akan lebih kecil mencemari udara dibanding kendaraan pribadi.

Pengoperasian sarana angkutan umum berfungsi ganda, yaitu pelayanan pergerakan orang atau barang, pengendalian lalu lintas, dan perwujudan rencana struktur ruang (sistem perkotaan) sehingga terjadi keterkaitan timbal balik antar pusat-pusat

kegiatan pelayanan yang sudah ditetapkan (PKN, PKW, PKL Strategis, PKL, dan lain-lain).

Dengan demikian, untuk perwujudan rencana struktur ruang Provinsi Bengkulu akan dikembangkan:

- 1) Sistem sarana angkutan massal perkotaan.
- 2) Sarana angkutan non massal termasuk perangkutan online.
- 3) Sistem sarana angkutan massal untuk mendukung fungsi kawasan perkotaan besar Bengkulu dan kota satelit yang berbatasan di luar Kota Bengkulu berupa Bus biasa, LRT dan/atau MRT, Busway dan/atau BRT yang pada waktunya akan menjadi kawasan metropolitan. Jika laju pertumbuhan penduduk normal saja seperti saat ini maka status metropolitan baru akan terjadi pada 2050 tetapi jika kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus bertumbuh pesat tentulah status kawasan metropolitan Bengkulu akan terjadi lebih awal yaitu pada 2037. Adapun pengembangan sistem sarana angkutan massal tersebut adalah sebagai berikut:
 - a) Angkutan antar Kota antar provinsi dan angkutan antar kota dalam provinsi.
 - b) Angkutan Massal Bus Rapid Transit (BRT) dan/atau BUSWAY diatur dalam Keputusan Gubernur.

f. Terminal Barang

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2018 tentang Tataran Transportasi Wilayah Provinsi Bengkulu terdapat pengembangan jaringan prasarana simpul transportasi angkutan barang sebagai berikut:

- 1) Terminal angkutan barang di Kota Bengkulu
- 2) Terminal angkutan barang di Bintuhan Kabupaten Kaur
- 3) Terminal angkutan barang di Muko Muko Kabupaten Muko Muko
- 4) Terminal angkutan barang di Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara

g. Jembatan Timbang

Jembatan Timbang di wilayah Provinsi Bengkulu meliputi:

- 1) Jembatan Timbang Lubuk Pinang di Kabupaten Muko-Muko (direncanakan)
- 2) Jembatan timbang Permu di Kabupaten Kepahiang
- 3) Jembatan Timbang Padang Ulak Tanding di Kabupaten Rejang Lebong (telah diserahkan ke Kementerian Perhubungan).
- 4) Jembatan Timbang Keban Agung di Kabupaten Kepahiang (kondisi rusak, tidak beroperasi).

- 5) Jembatan Timbang Air Sebakul di Kota Bengkulu (kondisi rusak, tidak beroperasi).
- 6) Jembatan Timbang Tanjung Sakti di Kabupaten Bengkulu Selatan (direncanakan).
- 7) Jembatan Timbang Kecamatan Maje dan/atau Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur (direncanakan).

h. Jembatan

Ada beberapa jembatan di Provinsi Bengkulu yang berada di Kabupaten/ Kota sebagai berikut:

**Tabel 2. 156 Data Dasar (DD2) Jembatan Wilayah II Provinsi Bengkulu
Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah,
Kabupaten Muko Muko Dan Kota Bengkulu**

No	Nama Ruas	Nomor Jembatan	Nama Jembatan
Kabupaten Bengkulu Utara			
1	Bintunan - Desa Limas - Ketahun	17.001.009.01	Jembatan Air Serangai
2		17.001.009.02	Jembatan Air Urai
3	Kerkap - Lubuk Durian	17.001.011.01	Jembatan Penyangkak
4	Lubuk Durian - Argamakmur	17.001.012.01	Jembatan Air Palik Ulu
5		17.001.012.02	Jembatan Air Ketenong
6		17.001.012.03	Jembatan Air Nakai
7		17.001.012.04	Jembatan Air Telatang Besar
8	Argamakmur - Lais	17.001.012a.01	Jembatan Air Primbun
9	Tanjung Agung Palik - Gunung Selan	17.001.018.01	Jembatan Air Tanjung Agung Palik
10		17.001.018.02	Jembatan Air Besi II
11		17.001.018.03	Jembatan Air Lais
12	Gunung Selan - Giri Mulya	17.001.017.01	Jembatan Air Gunung Selan
13		17.001.017.02	Jembatan Air Buat
14		17.001.017.03	Jembatan Unit 1
15		17.001.017.04	Jembatan Air Kebat Besar
16		17.001.017.05	Jembatan Air Kotok
17		17.001.017.06	Jembatan Air Kepidu
18		17.001.017.07	Jembatan Air Pring
19		17.001.017.08	Jembatan Air Kotok II
20		17.001.017.09	Jembatan Air Kurip
21		17.001.017.10	Jembatan Air Buruk
22		17.001.017.11	Jembatan Air Bintunan
23	Giri Mulya - Alas Tebing	17.001.017a.01	Jembatan Air Desa Giri Mulya I
24		17.001.017a.02	Jembatan Air Desa Giri Mulya II
25		17.001.017a.03	Jembatan Air Desa Giri Mulya III
26		17.001.017a.04	Jembatan Air Desa Giri Mulya IV
27		17.001.017a.05	Jembatan Air Serangai Hulu
28		17.001.017a.06	Jembatan Air Santan
29		17.001.017a.07	Jembatan Air Tik Teleu
30	Batik Nau - Lubuk Banyau	17.001.036.01	Jembatan Air Durian Amparan

No	Nama Ruas	Nomor Jembatan	Nama Jembatan
31		17.001.036.02	Jembatan Air Tik Nio
32		17.001.036.03	Jembtan Air Kuripan
33		17.001.036.04	Jembatan Air Buruk
34	Bintunan - Batik Nau	17.001.018a.01	Jembatan Air Penampungan
35		17.001.018a.02	Jembatan Air Koteng
36		17.001.018a.03	Jembatan Air Kebanyak
37	Lubuk Banyau - Ds Air Solok	17.001.020.01	Jembatan Air Manguarjo
38		17.001.020.02	Jembatan Air Manguarjo 2
39		17.001.020.03	Jembatan Air Tik
40		17.001.020.04	Jembatan Air Tik 2
41		17.001.020.05	Jembatan Rw 5
42		17.001.020.06	Jembatan Air Besi
43	Lubuk Durian - Lubuk Sini	17.001.021.01	Jembatan Air Susup
44		17.001.021.02	Jembtan Air Ngengat
45		17.001.021.03	Jembatan Air Lemau
46		17.001.021.04	Jembatan Air Tik Lay
47		17.001.021.05	Jembatan Air Sampit
48		17.001.021.06	Jembatan Air Pondok Kubang 2
49		17.001.021.07	Jembatan Air Ringkis
50		17.001.021.08	Jembatan Air Batu
51		17.001.021.09	Jembatan Air Bagus
52		17.001.021.10	Jembatan Air Punjung
53		17.001.021.11	Jembatan Air Simpang
54		17.001.021.12	Jembatan Air Aur Kecil
55		17.001.021.13	Jembatan Air Bengkulu IV
56		17.001.021.14	Jembatan Air Penum Besar
57	Sp.Gunung Selan - Unit III Kuro Tidur	17.001.037.01	Jembatan Air Teluk Ajang
58		17.001.037.02	Jembatan Air Padang
59		17.001.037.03	Jembatan Air Padang 2
60	Banjar Sari - Malakoni - Kahyapu (P. Enggano)	17.001.054.01	Jembatan Air Desa Meok
61		17.001.054.02	Jembatan Air Kepupu
62		17.001.054.03	Jembatan Air Kualo Besar
63		17.001.054.04	Jembatan Air Kualo Kecil
64		17.001.054.05	Jembatan Kayu Desa Kaana
65		17.001.054.06	Jembatan Air Pakei
66		17.001.054.07	Jembatan Air Desa Kaana
67		17.001.054.08	Jembatan Air Kayu Apuh
68	Desa Kali - Argamakmur	17.001.012.01	Jembatan Air Besi
69	Sp.Air Muring - Suka Baru	17.001.042.01	Jembatan Air Muring 1
70		17.001.042.02	Jembatan Air Muring 2
71		17.001.042.03	Jembatan Air Mumbang
72		17.001.042.04	Jembatan Air Sukamerindu
73		17.001.042.05	Jembatan Air Jeranggai
74		17.001.042.06	Jembatan Desa Air Putih
75		17.001.042.07	Jembatan Air Seguling
76		17.001.042.08	Jembatan Air Desa Tanjung Dalam
77	Suka Baru - Bukit Berlian - Napal Putih	17.001.046.01	Jembatan Air Lelangi
78		17.001.046.02	Jembatan Air Semiak
79		17.001.046.03	Jembatan Air Klungkung

No	Nama Ruas	Nomor Jembatan	Nama Jembatan
80		17.001.046.04	Jembatan Air Napal Putih 1
81		17.001.046.05	Jembatan Air Benda
82		17.001.046.06	Jembatan Air Tenang
83		17.001.046.07	Jembatan Air Tenang 2
84		17.001.046.08	Jembatan Gantung Air Tanjung Kemenyan
85		17.001.046.09	Jembatan Air Tanjung Kemenyan
86		17.001.046.10	Jembatan Air Tanjung Muara 2
87		17.001.046.11	Jembatan Air Tanjung Muara
88		17.001.046.12	Jembatan Air Tenang 3
89		17.001.046.13	Jembatan Air Terap 1
90		17.001.046.14	Jembatan Air Terap 2
91		17.001.046.15	Jembatan Air Pasar Tanjung
92		17.001.046.16	Jembatan Air Tanjung Harapan 2
93		17.001.046.17	Jembatan Air Tanjung Harapan 3
94		17.001.046.18	Jembatan Air Tanjung Harapan 4
95		17.001.046.19	Jembatan Air Sp 5
96		17.001.046.20	Jembatan Air Bp Simpang 5
97	Ketahun - Bukit Berlian	17.001.046a.01	Jembatan Air Kualalengi
98		17.001.046a.02	Jembatan Air Dusun Raja
99		17.001.046a.03	Jembatan Air Tepat
100		17.001.046a.04	Jembatan Air Kuburan
101		17.001.046a.05	Jembatan Air Simi
102		17.001.046a.06	Jembatan Air Sepagu
103	Jl.Wisata Air Terjun Curug Ix	17.001.047.01	Jembatan Air Irigasi Dam Lais
104		17.001.047.02	Jembatan Air Irigasi Dam Lais 2
105	Sp.Talang Denok - Workshop - Argamakmur	17.001.048.01	Jembatan Air Besi
106		17.001.048.02	Jembatan Tik Tajau 1
107	Taba Tembilang - Kuro Tidur	17.001.050.01	Jembatan Air Nokan
108		17.001.050.02	Jembatan Air Desa Senali
109		17.001.050.03	Jembatan Air Lais
110		17.001.050.04	Jembatan Air Kemenyan
111	Ketahun - Napal Putih	17.001.051.01	Jembatan Air Bumi Hardjo
112		17.001.051.02	Jembatan Air Lingau
113		17.001.051.03	Jembatan Air Mupal Bawah
114		17.001.051.04	Jembatan Air Tadah Hujan
115	D6 Ketahun - Giri Mulya	17.001.052.01	Jembatan Air Limas Kecil
116		17.001.052.02	Jembatan Air Limas 2
117		17.001.052.03	Jembatan Air Sebayur
118		17.001.052.04	Jembatan Air Sebayur 2
119		17.001.052.05	Jembatan Air Simpang Batu
120		17.001.052.06	Jembatan Air Apolo
121		17.001.052.07	Jembatan Air Jelantung 2
122		17.001.052.08	Jembatan Air Jelantung
123		17.001.052.09	Jembatan Air Giri Mulya
Kabupaten Bengkulu Tengah			
124	Tugu Hiu - Taman Hutan Raya - Sp Kroya	17.001.040.01	Jembatan Air Tanjung Terdana
125		17.001.040.02	Jembatan Air Pondok Kubang

No	Nama Ruas	Nomor Jembatan	Nama Jembatan
126		17.001.040.03	Jembatan Air Nanjak
127		17.001.040.04	Jembatan Air Aur
128		17.001.040.05	Jembatan Air Tik Lei
129	Kelindang - Susup	17.001.044.01	Jembatan Air Simpang Aur 1
130	Susup - Tanjung Alam - Ujan Mas	17.001.046.01	Jembatan Air Simpang Aur
131		17.001.046.02	Jembatan Air Sungai Musi
Kabupaten Muko Muko			
130	Penarik - Lubuk Pinang	17.001.022.01	Jembatan Air Betung Penarik
131		17.001.022.02	Jembatan Air Teras Terunjam
132		17.001.022.03	Jembatan Air Pondok Kopi
133		17.001.022.04	Jembatan Air Runyung
134		17.001.022.05	Jembatan Air Mupal Serong
135		17.001.022.06	Jembatan Air Rengas
136		17.001.022.07	Jembatan Air Suka Pindah
137	Lubuk Gedang - Sp.Vi(Agung Jaya)- Sp.III (Selagan Jaya)	17.001.056.01	Jembatan Air Irigasi Manjuto
138		17.001.056.02	Jembatan Air Tirta Mulia
139		17.001.056.03	Jembatan Air Irigasi Manjuto 2
140		17.001.056.04	Jembatan Air Rawa Paleh
141		17.001.056.05	Jembatan Air Pematang Seganeh
142		17.001.056.06	Jembatan Air Hitam Hulu
143	Muko-Muko - Dusun Gedang - Sp.Yamaja (Pondok Kopi)	17.001.056a.01	Jembatan Air Kereta
144		17.001.056a.02	Jembatan Air Hitam
145		17.001.056a.03	Jembatan Air Terjun
108		17.001.050.02	Jembatan Air Desa Senali
109		17.001.050.03	Jembatan Air Lais
110		17.001.050.04	Jembatan Air Kemenyan
111	Ketahun - Napal Putih	17.001.051.01	Jembatan Air Bumi Hardjo
112		17.001.051.02	Jembatan Air Lingau
113		17.001.051.03	Jembatan Air Mupal Bawah
114		17.001.051.04	Jembatan Air Tadah Hujan
115	D6 Ketahun - Giri Mulya	17.001.052.01	Jembatan Air Limas Kecil
116		17.001.052.02	Jembatan Air Limas 2
117		17.001.052.03	Jembatan Air Sebayur
118		17.001.052.04	Jembatan Air Sebayur 2
119		17.001.052.05	Jembatan Air Simpang Batu
120		17.001.052.06	Jembatan Air Apolo
121		17.001.052.07	Jembatan Air Jelantung 2
122		17.001.052.08	Jembatan Air Jelantung
123		17.001.052.09	Jembatan Air Giri Mulya
Kabupaten Bengkulu Tengah			
124	Tugu Hiu - Taman Hutan Raya - Sp Kroya	17.001.040.01	Jembatan Air Tanjung Terdana
125		17.001.040.02	Jembatan Air Pondok Kubang
126		17.001.040.03	Jembatan Air Nanjak
127		17.001.040.04	Jembatan Air Aur
128		17.001.040.05	Jembatan Air Tik Lei
129	Kelindang - Susup	17.001.044.01	Jembatan Air Simpang Aur 1

No	Nama Ruas	Nomor Jembatan	Nama Jembatan
130	Susup - Tanjung Alam - Ujan Mas	17.001.046.01	Jembatan Air Simpang Aur
131		17.001.046.02	Jembatan Air Sungai Musi
Kabupaten Muko Muko			
130	Penarik - Lubuk Pinang	17.001.022.01	Jembatan Air Betung Penarik
131		17.001.022.02	Jembatan Air Teras Terunjam
132		17.001.022.03	Jembatan Air Pondok Kopi
133		17.001.022.04	Jembatan Air Runyung
134		17.001.022.05	Jembatan Air Mupal Serong
135		17.001.022.06	Jembatan Air Rengas
136		17.001.022.07	Jembatan Air Suka Pindah
137	Lubuk Gedang - Sp.Vi(Agung Jaya)- Sp.III (Selagan Jaya)	17.001.056.01	Jembatan Air Irigasi Manjuto
138		17.001.056.02	Jembatan Air Tirta Mulia
139		17.001.056.03	Jembatan Air Irigasi Manjuto 2
140		17.001.056.04	Jembatan Air Rawa Paleh
141		17.001.056.05	Jembatan Air Pematang Seganeh
142		17.001.056.06	Jembatan Air Hitam Hulu
143	Muko-Muko - Dusun Gedang - Sp.Yamaja (Pondok Kopi)	17.001.056a.01	Jembatan Air Kereta
144		17.001.056a.02	Jembatan Air Hitam
145		17.001.056a.03	Jembatan Air Terjun
146		17.001.056a.04	Jembatan Air Hitam 2
147		17.001.056a.05	Jembatan Air Sungai Mandi Darah
148	Tanah Rekah - Sp.IV (Teras Terunjam)	17.001.057.01	Jembatan Tanah Rekah
149		17.001.057.02	Jembatan Tanah Rekah 2
150		17.001.057.03	Jembatan Tanah Rekah 3
151		17.001.057.04	Jembatan Air Sungai Bodi
152		17.001.057.05	Jembatan Air Betung Teras Terunjam
Kota Bengkulu			
153	Jl.Citandui (Bengkulu)	17.001.037.01	Jembatan Air Jenggalu
154	Jl.Sedap Malam (Bengkulu)	17.001.037a.01	Jembatan Air Muaro
155	Jl.Hibrida (Bengkulu)	17.001.037.01	Jembatan Air Hibrida
156		17.001.037.01a	Jembatan Air Hibrida 2
157	Jl.Jenggalu (Bengkulu)	17.001.039.01	Jembatan Air Tapak Jedah
158	Jl.Letnan Samsyul Bahrn - Tugu Hiu (Bengkulu)	17.001.040.01	Jembatan Air Bengkulu II
159	Pasar Bengkulu - Tapak Paderi (Bengkulu)	17.001.056.01	Jembatan Air Pasar Bengkulu
160	Jl.Wisata Pantai Panjang (Bengkulu)	17.001.056a.01	Jembatan Air Pantai Panjang
Kabupaten Bengkulu Utara			
1	Bintunan - Desa Limas - Ketahun	17.001.009.01	Jembatan Air Serangai
2		17.001.009.02	Jembatan Air Urai
3	Kerkap - Lubuk Durian	17.001.011.01	Jembatan Penyangkak
4	Lubuk Durian - Argamakmur	17.001.012.01	Jembatan Air Palik Ulu
5		17.001.012.02	Jembatan Air Ketenong
6		17.001.012.03	Jembatan Air Nakai

No	Nama Ruas	Nomor Jembatan	Nama Jembatan
7		17.001.012.04	Jembatan Air Telatang Besar
8	Argamakmur - Lais	17.001.012a.01	Jembatan Air Primbun
9	Tanjung Agung Palik - Gunung Selan	17.001.018.01	Jembatan Air Tanjung Agung Palik
10		17.001.018.02	Jembatan Air Besi II
11		17.001.018.03	Jembatan Air Lais
12	Gunung Selan - Giri Mulya	17.001.017.01	Jembatan Air Gunung Selan
13		17.001.017.02	Jembatan Air Buat
14		17.001.017.03	Jembatan Unit 1
15		17.001.017.04	Jembatan Air Kebat Besar
16		17.001.017.05	Jembatan Air Kotok
17		17.001.017.06	Jembatan Air Kepidu
18		17.001.017.07	Jembatan Air Pring
19		17.001.017.08	Jembatan Air Kotok II
20		17.001.017.09	Jembatan Air Kurip
21		17.001.017.10	Jembatan Air Buruk
22		17.001.017.11	Jembatan Air Bintunan
23	Giri Mulya - Alas Tebing	17.001.017a.01	Jembatan Air Desa Giri Mulya I
24		17.001.017a.02	Jembatan Air Desa Giri Mulya II
25		17.001.017a.03	Jembatan Air Desa Giri Mulya III
26		17.001.017a.04	Jembatan Air Desa Giri Mulya IV
27		17.001.017a.05	Jembatan Air Serangai Hulu
28		17.001.017a.06	Jembatan Air Santan
29		17.001.017a.07	Jembatan Air Tik Teleu
30	Batik Nau - Lubuk Banyau	17.001.036.01	Jembatan Air Durian Amparan
31		17.001.036.02	Jembatan Air Tik Nio
32		17.001.036.03	Jembtan Air Kuripan
33		17.001.036.04	Jembatan Air Buruk
34	Bintunan - Batik Nau	17.001.018a.01	Jembatan Air Penampungan
35		17.001.018a.02	Jembatan Air Koteng
36		17.001.018a.03	Jembatan Air Kebanyak
37	Lubuk Banyau - Ds Air Solok	17.001.020.01	Jembatan Air Manguarjo
38		17.001.020.02	Jembatan Air Manguarjo 2
39		17.001.020.03	Jembatan Air Tik
40		17.001.020.04	Jembatan Air Tik 2
41		17.001.020.05	Jembatan Rw 5
42		17.001.020.06	Jembatan Air Besi
43	Lubuk Durian - Lubuk Sini	17.001.021.01	Jembatan Air Susup
44		17.001.021.02	Jembtan Air Ngengat
45		17.001.021.03	Jembatan Air Lemau
46		17.001.021.04	Jembatan Air Tik Lay
47		17.001.021.05	Jembatan Air Sampit
48		17.001.021.06	Jembatan Air Pondok Kubang 2
49		17.001.021.07	Jembatan Air Ringkis
50		17.001.021.08	Jembatan Air Batu
51		17.001.021.09	Jembatan Air Bagus
52		17.001.021.10	Jembatan Air Punjung
53		17.001.021.11	Jembatan Air Simpang
54		17.001.021.12	Jembatan Air Aur Kecil
55		17.001.021.13	Jembatan Air Bengkulu IV

No	Nama Ruas	Nomor Jembatan	Nama Jembatan
56		17.001.021.14	Jembatan Air Penum Besar
57	Sp.Gunung Selan - Unit III Kuro Tidur	17.001.037.01	Jembatan Air Teluk Ajang
58		17.001.037.02	Jembatan Air Padang
59		17.001.037.03	Jembatan Air Padang 2
60	Banjar Sari - Malakoni - Kahyapu (P. Enggano)	17.001.054.01	Jembatan Air Desa Meok
61		17.001.054.02	Jembatan Air Kepupu
62		17.001.054.03	Jembatan Air Kualo Besar
63		17.001.054.04	Jembatan Air Kualo Kecil
64		17.001.054.05	Jembatan Kayu Desa Kaana
65		17.001.054.06	Jembatan Air Pakei
66		17.001.054.07	Jembatan Air Desa Kaana
67		17.001.054.08	Jembatan Air Kayu Apuh
68	Desa Kali - Argamakmur	17.001.012.01	Jembatan Air Besi
69	Sp.Air Muring - Suka Baru	17.001.042.01	Jembatan Air Muring 1
70		17.001.042.02	Jembatan Air Muring 2
71		17.001.042.03	Jembatan Air Mumbang
72		17.001.042.04	Jembatan Air Sukamerindu
73		17.001.042.05	Jembatan Air Jeranggai
74		17.001.042.06	Jembatan Desa Air Putih
75		17.001.042.07	Jembatan Air Seguling
76		17.001.042.08	Jembatan Air Desa Tanjung Dalam
77	Suka Baru - Bukit Berlian - Napal Putih	17.001.046.01	Jembatan Air Lelangi
78		17.001.046.02	Jembatan Air Semiak
79		17.001.046.03	Jembatan Air Klungkung
80		17.001.046.04	Jembatan Air Napal Putih 1
81		17.001.046.05	Jembatan Air Benda
82		17.001.046.06	Jembatan Air Tenang
83		17.001.046.07	Jembatan Air Tenang 2
84		17.001.046.08	Jembatan Gantung Air Tanjung Kemenyan
85		17.001.046.09	Jembatan Air Tanjung Kemenyan
86		17.001.046.10	Jembatan Air Tanjung Muara 2
87		17.001.046.11	Jembatan Air Tanjung Muara
88		17.001.046.12	Jembatan Air Tenang 3
89		17.001.046.13	Jembatan Air Terap 1
90		17.001.046.14	Jembatan Air Terap 2
91		17.001.046.15	Jembatan Air Pasar Tanjung
92		17.001.046.16	Jembatan Air Tanjung Harapan 2
93		17.001.046.17	Jembatan Air Tanjung Harapan 3
94		17.001.046.18	Jembatan Air Tanjung Harapan 4
95		17.001.046.19	Jembatan Air Sp 5
96		17.001.046.20	Jembatan Air Bp Simpang 5
97	Ketahun - Bukit Berlian	17.001.046a.01	Jembatan Air Kualalengi
98		17.001.046a.02	Jembatan Air Dusun Raja
99		17.001.046a.03	Jembatan Air Tepat
100		17.001.046a.04	Jembatan Air Kuburan
101		17.001.046a.05	Jembatan Air Simi
102		17.001.046a.06	Jembatan Air Sepagu
103	Jl.Wisata Air Terjun Curug Ix	17.001.047.01	Jembatan Air Irigasi Dam Lais

No	Nama Ruas	Nomor Jembatan	Nama Jembatan
104		17.001.047.02	Jembatan Air Irigasi Dam Lais 2
105	Sp.Talang Denok - Workshop - Argamakmur	17.001.048.01	Jembatan Air Besi
106		17.001.048.02	Jembatan Tik Tajau 1
107	Taba Tembilang - Kuro Tidur	17.001.050.01	Jembatan Air Nokan
108		17.001.050.02	Jembatan Air Desa Senali
109		17.001.050.03	Jembatan Air Lais
110		17.001.050.04	Jembatan Air Kemenyan
111	Ketahun - Napal Putih	17.001.051.01	Jembatan Air Bumi Hardjo
112		17.001.051.02	Jembatan Air Lingau
113		17.001.051.03	Jembatan Air Mupal Bawah
114		17.001.051.04	Jembatan Air Tadah Hujan
115	D6 Ketahun - Giri Mulya	17.001.052.01	Jembatan Air Limas Kecil
116		17.001.052.02	Jembatan Air Limas 2
117		17.001.052.03	Jembatan Air Sebayur
118		17.001.052.04	Jembatan Air Sebayur 2
119		17.001.052.05	Jembatan Air Simpang Batu
120		17.001.052.06	Jembatan Air Apolo
121		17.001.052.07	Jembatan Air Jelantung 2
122		17.001.052.08	Jembatan Air Jelantung
123		17.001.052.09	Jembatan Air Giri Mulya
Kabupaten Bengkulu Tengah			
124	Tugu Hiu - Taman Hutan Raya - Sp Kroya	17.001.040.01	Jembatan Air Tanjung Terdana
125		17.001.040.02	Jembatan Air Pondok Kubang
126		17.001.040.03	Jembatan Air Nanjak
127		17.001.040.04	Jembatan Air Aur
128		17.001.040.05	Jembatan Air Tik Lei
129	Kelindang - Susup	17.001.044.01	Jembatan Air Simpang Aur 1
130	Susup - Tanjung Alam - Ujan Mas	17.001.046.01	Jembatan Air Simpang Aur
131		17.001.046.02	Jembatan Air Sungai Musi
Kabupaten Muko Muko			
130	Penarik - Lubuk Pinang	17.001.022.01	Jembatan Air Betung Penarik
131		17.001.022.02	Jembatan Air Teras Terunjam
132		17.001.022.03	Jembatan Air Pondok Kopi
133		17.001.022.04	Jembatan Air Runyung
134		17.001.022.05	Jembatan Air Mupal Serong
135		17.001.022.06	Jembatan Air Rengas
136		17.001.022.07	Jembatan Air Suka Pindah
137	Lubuk Gedang - Sp.Vi(Agung Jaya)- Sp.III (Selagan Jaya)	17.001.056.01	Jembatan Air Irigasi Manjuto
138		17.001.056.02	Jembatan Air Tirta Mulia
139		17.001.056.03	Jembatan Air Irigasi Manjuto 2
140		17.001.056.04	Jembatan Air Rawa Paleh
141		17.001.056.05	Jembatan Air Pematang Seganeh
142		17.001.056.06	Jembatan Air Hitam Hulu
143	Muko-Muko - Dusun Gedang - Sp.Yamaja (Pondok Kopi)	17.001.056a.01	Jembatan Air Kereta
144		17.001.056a.02	Jembatan Air Hitam

No	Nama Ruas	Nomor Jembatan	Nama Jembatan
145		17.001.056a.03	Jembatan Air Terjun
146		17.001.056a.04	Jembatan Air Hitam 2
147		17.001.056a.05	Jembatan Air Sungai Mandi Darah
148	Tanah Rekah - Sp.IV (Teras Terunjam)	17.001.057.01	Jembatan Tanah Rekah
149		17.001.057.02	Jembatan Tanah Rekah 2
150		17.001.057.03	Jembatan Tanah Rekah 3
151		17.001.057.04	Jembatan Air Sungai Bodi
152		17.001.057.05	Jembatan Air Betung Teras Terunjam
Kota Bengkulu			
153	Jl.Citandui (Bengkulu)	17.001.037.01	Jembatan Air Jenggalu
154	Jl.Sedap Malam (Bengkulu)	17.001.037a.01	Jembatan Air Muaro
155	Jl.Hibrida (Bengkulu)	17.001.037.01	Jembatan Air Hibrida
156		17.001.037.01a	Jembatan Air Hibrida 2
157	Jl.Jenggalu (Bengkulu)	17.001.039.01	Jembatan Air Tapak Jedah
158	Jl.Letnan Samsyul Bahrn - Tugu Hiu (Bengkulu)	17.001.040.01	Jembatan Air Bengkulu II
159	Pasar Bengkulu - Tapak Paderi (Bengkulu)	17.001.056.01	Jembatan Air Pasar Bengkulu
160	Jl.Wisata Pantai Panjang (Bengkulu)	17.001.056a.01	Jembatan Air Pantai Panjang

Tabel 2. 157 Rekapitulasi Data Kondisi Jembatan Jalan Provinsi Bengkulu Wilayah Kabupaten Lebong, Kepahiang Dan Rejang Lebong Tahun 2021

No	No. Jembatan	Nama Jembatan	Nama Ruas
1	17.017.001	Jembatan Air Santan	Atas Tebing - Muara Aman
2	17.017.002	Jembatan Air Tik Teleu	Atas Tebing - Muara Aman
3	17.017.003	Jembatan Air Tepuk	Atas Tebing - Muara Aman
4	17.004.001	Jembatan Air Selikat	Tambang Sawah - Ketenong
5	17.014.002	Jembatan Air Baes	Tambang Sawah - Ketenong
6	17.014.003	Jembatan Air Tik	Tambang Sawah - Ketenong
7	17.014.004	Jembatan Air Rupi	Tambang Sawah - Ketenong
8	17.014.005	Jembatan Air Tik Aur	Tambang Sawah - Ketenong
9	17.014.006	Jembatan Air Ketenong 1	Tambang Sawah - Ketenong
10	17.014.007	Jembatan Air Ketenong 2	Tambang Sawah - Ketenong
11	17.008.001	Jembatan Air Mubai	Tes - Muara Aman - Tambang Sawah
12	17.008.002	Jembatan Air Paya Embik	Tes - Muara Aman - Tambang Sawah
13	17.008.003	Jembatan Air Aman	Tes - Muara Aman - Tambang Sawah
14	17.008.004	Jembatan Air Kampung Jawa 1	Tes - Muara Aman - Tambang Sawah
15	17.008.005	Jembatan Air Kampung Jawa 2	Tes - Muara Aman - Tambang Sawah
16	17.008.006	Jembatan Air Desa Tunggang 1	Tes - Muara Aman - Tambang Sawah
17	17.008.007	Jembatan Air Desa Tunggang 2	Tes - Muara Aman - Tambang Sawah
18	17.008.008	Jembatan Air Ketahun	Tes - Muara Aman - Tambang Sawah
19	17.008.009	Jembatan Air Musnah Besar	Tes - Muara Aman - Tambang Sawah
20	17.008.010	Jembatan Air Pauk Besar	Tes - Muara Aman - Tambang Sawah
21	17.029.001	Air Sengkoang	Permu - Beringin Tiga
22	17.029.002	Jembatan Bandung Lama	Permu - Beringin Tiga

No	No. Jembatan	Nama Jembatan	Nama Ruas
23	17.029.003	Jembatan Air Kati	Permu - Beringin Tiga
24	17.029.004	Jembatan Air Hitam	Permu - Beringin Tiga
25	17.029.005	Jembatan Air Sentral	Permu - Beringin Tiga
26	17.029.006	Jembatan Air Dingin	Permu - Beringin Tiga
27	17.044.001	Jembatan Air Sempiang	Jl. Wisata Kepahiang - Kabawetan - Bandung Baru
28	17.044.002	Jembatan Air Sempiang Kecil	Jl. Wisata Kepahiang - Kabawetan - Bandung Baru
29	17.044.003	Jembatan Air Kali Asat	Jl. Wisata Kepahiang - Kabawetan - Bandung Baru
30	17.044.004	Jembatan Air Dingin	Jl. Wisata Kepahiang - Kabawetan - Bandung Baru
31	117.007.001	Jembatan Air Sempiang	Jl. Kepahiang - Batas Sumsel
32	117.007.002	Jembatan Air Sengak	Jl. Kepahiang - Batas Sumsel
33	117.007.003	Jembatan Air Kuning	Jl. Kepahiang - Batas Sumsel
34	117.007.004	Jembatan Air Langkap	Jl. Kepahiang - Batas Sumsel
35	117.007.005	Jembatan Air Gemuruh	Jl. Kepahiang - Batas Sumsel
36	117.007.006	Jembatan Air Belimbing	Jl. Kepahiang - Batas Sumsel
37	117.030.001	Jembatan Air Ketapang	Jl. Tebat Monok - SP. Waim - Kb. Agung
38	117.030.002	Jembatan Air Tiklei	Jl. Tebat Monok - SP. Waim - Kb. Agung
39	117.030.003	Jembatan Air Umen	Jl. Tebat Monok - SP. Waim - Kb. Agung
40	117.030.004	Jembatan Air Lubuk Saung	Jl. Tebat Monok - SP. Waim - Kb. Agung
41	117.030.005	Jembatan Air Siring	Jl. Tebat Monok - SP. Waim - Kb. Agung
42	117.030.006	Jembatan Air Musi	Jl. Tebat Monok - SP. Waim - Kb. Agung
43	17.042.001	Jembatan Lang	Air Lang - Desa Apur
44	17.042.002	Jembatan Air Lang 2	Air Lang - Desa Apur
45	17.042.003	Jembatan Jeruk	Air Lang - Desa Apur
46	17.041.001	Jembatan Air Merah	Jl. Sapta Marga (Curup)
47	17.041.001	Jembatan Air palak Siring	Jl. Salim Batu Bara (Curup)
49	17.028.001	Jembatan Air Simpang Macang	Jl. Taba Mulan - Sp. Nangka
50	17.028.002	Jembatan Air Meles	Jl. Taba Mulan - Sp. Nangka
51	17.041.001	Jembatan Air Kali Mati	Jl. Bukit Kaba (Curup)
52	17.041.001	Jembatan Air Suban	Jl. Wisata Suban Air Panas
53	17.003.001	Jembatan Air Putih	Jl. Dr. A. Gani (Curup)
54	17.003.002	Jembatan Air Duku	Jl. Dr. A. Gani (Curup)
55	17.003.003	Jembatan Air Taba Rena	Jl. Dr. A. Gani (Curup)
56	17.033.001	Jembatan Air Teliu	Palak Curup SP. III Karang Baru
57	17.033.002	Jembatan Air Suban	Palak Curup SP. III Karang Baru
58	17.033.003	Jembatan Air Apur 1	Palak Curup SP. III Karang Baru
59	17.003.004	Jembatan Air Apur 2	Palak Curup SP. III Karang Baru
60	17.003.005	Jembatan Air Kati	Palak Curup SP. III Karang Baru
61	17.033.006	Jembatan Air Nandu	Palak Curup SP. III Karang Baru
62	17.033.007	Jembatan Desa Air Agung	Palak Curup SP. III Karang Baru
63	17.027.001	Air Riuh	Padang Ulak Tanding - Kota Padang - Derati -Tj. Ening
64	17.027.002	Air Kecil 1	Padang Ulak Tanding - Kota Padang - Derati -Tj. Ening
65	17.027.003	Air Kecil 2	Padang Ulak Tanding - Kota Padang - Derati -Tj. Ening
66	17.027.004	Air Kecil 3	Padang Ulak Tanding - Kota Padang - Derati -Tj. Ening
67	17.027.005	Air Nambu	Padang Ulak Tanding - Kota Padang - Derati -Tj. Ening
68	17.027.006	Jembatan Kecil A	Padang Ulak Tanding - Kota Padang - Derati -Tj. Ening
69	17.027.007	Air Kati	Padang Ulak Tanding - Kota Padang - Derati -Tj. Ening
70	17.027.008	Jembatan Kecil 5	Padang Ulak Tanding - Kota Padang - Derati -Tj. Ening
71	17.027.009	Jembatan Kecil 6	Padang Ulak Tanding - Kota Padang - Derati -Tj. Ening
72	17.027.010	Air Belimbing	Padang Ulak Tanding - Kota Padang - Derati -Tj. Ening
73	17.027.011	Air Derati	Padang Ulak Tanding - Kota Padang - Derati -Tj. Ening

No	No. Jembatan	Nama Jembatan	Nama Ruas
74	17.027.012	Air Periang	Padang Ulak Tanding - Kota Padang - Derati -Tj. Ening
75	17.027.013	Air Napal 1	Padang Ulak Tanding - Kota Padang - Derati -Tj. Ening
76	17.027.014	Air Napal 2	Padang Ulak Tanding - Kota Padang - Derati -Tj. Ening
77	17.027.001	Air Belimbing	Padang Ulak Tanding - Kota Padang - Derati -Tj. Ening
78	17.027.002	Air Belimbing Besar	Padang Ulak Tanding - Kota Padang - Derati -Tj. Ening
79	17.027.003	Desa Belimbing	Padang Ulak Tanding - Kota Padang - Derati -Tj. Ening
80	17.027.004	Desa Suka Merindu	Padang Ulak Tanding - Kota Padang - Derati -Tj. Ening
81	17.027.005	Desa 1 Suka Merindu	Padang Ulak Tanding - Kota Padang - Derati -Tj. Ening
82	17.027.006	Desa 2 Suka Merindu	Padang Ulak Tanding - Kota Padang - Derati -Tj. Ening
83	17.027.007	Desa 1 Suka Jadi	Padang Ulak Tanding - Kota Padang - Derati -Tj. Ening
84	17.027.008	Desa 2 Suka Jadi	Padang Ulak Tanding - Kota Padang - Derati -Tj. Ening
85	17.027.009	Desa Durian Emas	Padang Ulak Tanding - Kota Padang - Derati -Tj. Ening
86	170.270.010	Desa Beliti	Padang Ulak Tanding - Kota Padang - Derati -Tj. Ening
87	170.270.011	Air Derati	Padang Ulak Tanding - Kota Padang - Derati -Tj. Ening
88	17.027.012	Air Petai	Padang Ulak Tanding - Kota Padang - Derati -Tj. Ening
89	17.008.001	Air Dingin	Curup - Tes
90	17.008.002	Air Merah	Curup - Tes
91	17.008.003	Air Ketelong	Curup - Tes
92	17.008.004	Air Kepiting	Curup - Tes
93	17.008.005	Air Tikat	Curup - Tes
94	17.008.006	Air Tamang	Curup - Tes
95	17.008.007	Air Pauh Kecil	Curup - Tes
96	17.008.008	Air Pauh Besar	Curup - Tes
1	17.017.001	Jembatan Air Santan	Atas Tebing - Muara Aman
2	17.017.002	Jembatan Air Tik Teleu	Atas Tebing - Muara Aman
3	17.017.003	Jembatan Air Tepuk	Atas Tebing - Muara Aman
4	17.004.001	Jembatan Air Selikat	Tambang Sawah - Ketenong
5	17.014.002	Jembatan Air Baes	Tambang Sawah - Ketenong
6	17.014.003	Jembatan Air Tik	Tambang Sawah - Ketenong
7	17.014.004	Jembatan Air Rupi	Tambang Sawah - Ketenong
8	17.014.005	Jembatan Air Tik Aur	Tambang Sawah - Ketenong
9	17.014.006	Jembatan Air Ketenong 1	Tambang Sawah - Ketenong
10	17.014.007	Jembatan Air Ketenong 2	Tambang Sawah - Ketenong
11	17.008.001	Jembatan Air Mubai	Tes - Muara Aman - Tambang Sawah
12	17.008.002	Jembatan Air Paya Embik	Tes - Muara Aman - Tambang Sawah
13	17.008.003	Jembatan Air Aman	Tes - Muara Aman - Tambang Sawah
14	17.008.004	Jembatan Air Kampung Jawa 1	Tes - Muara Aman - Tambang Sawah
15	17.008.005	Jembatan Air Kampung Jawa 2	Tes - Muara Aman - Tambang Sawah
16	17.008.006	Jembatan Air Desa Tunggang 1	Tes - Muara Aman - Tambang Sawah
17	17.008.007	Jembatan Air Desa Tunggang 2	Tes - Muara Aman - Tambang Sawah
18	17.008.008	Jembatan Air Ketahun	Tes - Muara Aman - Tambang Sawah
19	17.008.009	Jembatan Air Musnah Besar	Tes - Muara Aman - Tambang Sawah
20	17.008.010	Jembatan Air Pauk Besar	Tes - Muara Aman - Tambang Sawah
21	17.029.001	Air Sengkoang	Permu - Beringin Tiga
22	17.029.002	Jembatan Bandung Lama	Permu - Beringin Tiga
23	17.029.003	Jembatan Air Kati	Permu - Beringin Tiga
24	17.029.004	Jembatan Air Hitam	Permu - Beringin Tiga
25	17.029.005	Jembatan Air Sentral	Permu - Beringin Tiga
26	17.029.006	Jembatan Air Dingin	Permu - Beringin Tiga
27	17.044.001	Jembatan Air Sempiang	Jl. Wisata Kepahiang - Kabawetan - Bandung Baru

No	No. Jembatan	Nama Jembatan	Nama Ruas
28	17.044.002	Jembatan Air Sempiang Kecil	Jl. Wisata Kepahiang - Kabawetan - Bandung Baru
29	17.044.003	Jembatan Air Kali Asat	Jl. Wisata Kepahiang - Kabawetan - Bandung Baru
30	17.044.004	Jembatan Air Dingin	Jl. Wisata Kepahiang - Kabawetan - Bandung Baru
31	117.007.001	Jembatan Air Sempiang	Jl. Kepahiang - Batas Sumsel
32	117.007.002	Jembatan Air Sengak	Jl. Kepahiang - Batas Sumsel
33	117.007.003	Jembatan Air Kuning	Jl. Kepahiang - Batas Sumsel
34	117.007.004	Jembatan Air Langkap	Jl. Kepahiang - Batas Sumsel
35	117.007.005	Jembatan Air Gemuruh	Jl. Kepahiang - Batas Sumsel
36	117.007.006	Jembatan Air Belimbing	Jl. Kepahiang - Batas Sumsel
37	117.030.001	Jembatan Air Ketapang	Jl. Tebat Monok - SP. Waim - Kb. Agung
38	117.030.002	Jembatan Air Tiklei	Jl. Tebat Monok - SP. Waim - Kb. Agung
39	117.030.003	Jembatan Air Umen	Jl. Tebat Monok - SP. Waim - Kb. Agung
40	117.030.004	Jembatan Air Lubuk Saung	Jl. Tebat Monok - SP. Waim - Kb. Agung
41	117.030.005	Jembatan Air Siring	Jl. Tebat Monok - SP. Waim - Kb. Agung
42	117.030.006	Jembatan Air Musi	Jl. Tebat Monok - SP. Waim - Kb. Agung
43	17.042.001	Jembatan Lang	Air Lang - Desa Apur
44	17.042.002	Jembatan Air Lang 2	Air Lang - Desa Apur
45	17.042.003	Jembatan Jeruk	Air Lang - Desa Apur
46	17.041.001	Jembatan Air Merah	Jl. Sapta Marga (Curup)
47	17.041.001	Jembatan Air palak Siring	Jl. Salim Batu Bara (Curup)
49	17.028.001	Jembatan Air Simpang Macang	Jl. Taba Mulan - Sp. Nangka
50	17.028.002	Jembatan Air Meles	Jl. Taba Mulan - Sp. Nangka
51	17.041.001	Jembatan Air Kali Mati	Jl. Bukit Kaba (Curup)
52	17.041.001	Jembatan Air Suban	Jl. Wisata Suban Air Panas
53	17.003.001	Jembatan Air Putih	Jl. Dr. A. Gani (Curup)
54	17.003.002	Jembatan Air Duku	Jl. Dr. A. Gani (Curup)
55	17.003.003	Jembatan Air Taba Rena	Jl. Dr. A. Gani (Curup)
56	17.033.001	Jembatan Air Teliu	Palak Curup SP. III Karang Baru
57	17.033.002	Jembatan Air Suban	Palak Curup SP. III Karang Baru
58	17.033.003	Jembatan Air Apur 1	Palak Curup SP. III Karang Baru
59	17.003.004	Jembatan Air Apur 2	Palak Curup SP. III Karang Baru
60	17.003.005	Jembatan Air Kati	Palak Curup SP. III Karang Baru
61	17.033.006	Jembatan Air Nandu	Palak Curup SP. III Karang Baru
62	17.033.007	Jembatan Desa Air Agung	Palak Curup SP. III Karang Baru
63	17.027.001	Air Riuh	Padang Ulak Tanding - Kota Padang - Derati -Tj. Ening
64	17.027.002	Air Kecil 1	Padang Ulak Tanding - Kota Padang - Derati -Tj. Ening
65	17.027.003	Air Kecil 2	Padang Ulak Tanding - Kota Padang - Derati -Tj. Ening
66	17.027.004	Air Kecil 3	Padang Ulak Tanding - Kota Padang - Derati -Tj. Ening
67	17.027.005	Air Nambu	Padang Ulak Tanding - Kota Padang - Derati -Tj. Ening
68	17.027.006	Jembatan Kecil A	Padang Ulak Tanding - Kota Padang - Derati -Tj. Ening
69	17.027.007	Air Kati	Padang Ulak Tanding - Kota Padang - Derati -Tj. Ening
70	17.027.008	Jembatan Kecil 5	Padang Ulak Tanding - Kota Padang - Derati -Tj. Ening
71	17.027.009	Jembatan Kecil 6	Padang Ulak Tanding - Kota Padang - Derati -Tj. Ening
72	17.027.010	Air Belimbing	Padang Ulak Tanding - Kota Padang - Derati -Tj. Ening
73	17.027.011	Air Derati	Padang Ulak Tanding - Kota Padang - Derati -Tj. Ening
74	17.027.012	Air Periang	Padang Ulak Tanding - Kota Padang - Derati -Tj. Ening
75	17.027.013	Air Napal 1	Padang Ulak Tanding - Kota Padang - Derati -Tj. Ening
76	17.027.014	Air Napal 2	Padang Ulak Tanding - Kota Padang - Derati -Tj. Ening
77	17.027.001	Air Belimbing	Padang Ulak Tanding - Kota Padang - Derati -Tj. Ening
78	17.027.002	Air Belimbing Besar	Padang Ulak Tanding - Kota Padang - Derati -Tj. Ening

No	No. Jembatan	Nama Jembatan	Nama Ruas
79	17.027.003	Desa Belimbing	Padang Ulak Tanding - Kota Padang - Derati -Tj. Ening
80	17.027.004	Desa Suka Merindu	Padang Ulak Tanding - Kota Padang - Derati -Tj. Ening
81	17.027.005	Desa 1 Suka Merindu	Padang Ulak Tanding - Kota Padang - Derati -Tj. Ening
82	17.027.006	Desa 2 Suka Merindu	Padang Ulak Tanding - Kota Padang - Derati -Tj. Ening
83	17.027.007	Desa 1 Suka Jadi	Padang Ulak Tanding - Kota Padang - Derati -Tj. Ening
84	17.027.008	Desa 2 Suka Jadi	Padang Ulak Tanding - Kota Padang - Derati -Tj. Ening
85	17.027.009	Desa Durian Emas	Padang Ulak Tanding - Kota Padang - Derati -Tj. Ening
86	170.270.010	Desa Beliti	Padang Ulak Tanding - Kota Padang - Derati -Tj. Ening
87	170.270.011	Air Derati	Padang Ulak Tanding - Kota Padang - Derati -Tj. Ening
88	17.027.012	Air Petai	Padang Ulak Tanding - Kota Padang - Derati -Tj. Ening
89	17.008.001	Air Dingin	Curup - Tes
90	17.008.002	Air Merah	Curup - Tes
91	17.008.003	Air Ketelong	Curup - Tes
92	17.008.004	Air Kepiting	Curup - Tes
93	17.008.005	Air Tikat	Curup - Tes
94	17.008.006	Air Tamang	Curup - Tes
95	17.008.007	Air Pauh Kecil	Curup - Tes
96	17.008.008	Air Pauh Besar	Curup - Tes

Sumber :Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu 2022

2.7.1.2.3 Sistem Jaringan Kereta Api

Sesuai dengan arahan sistem jaringan jalur Kereta Api pulau Sumatera, arahan pengembangan jalur Kereta Api di Provinsi Bengkulu didasarkan pada strategi pengembangan jaringan transportasi kapasitas tinggi, khususnya untuk angkutan barang atau produk komoditas unggulan berskala besar. Perwujudan Provinsi Bengkulu baik Kereta Api umum maupun khusus meliputi:

- Pengembangan jaringan jalur Kereta Api yang terpadu dengan jaringan transportasi lainnya guna menunjang kegiatan ekonomi berdaya saing, membuka keterisolasian wilayah, dan meningkatkan keterkaitan antarwilayah.
- Pengembangan jaringan jalur Kereta Api perkotaan dalam wilayah provinsi untuk mendukung pergerakan orang dan barang secara massal, cepat, aman, dan efisien guna melayani perpindahan orang di wilayah perkotaan dalam perjalanan ulang alik (komuter) dalam provinsi.
- Pengembangan jaringan jalur kereta api antarkota dalam provinsi untuk melayani perpindahan orang dan/ atau barang dari satu kota ke kota lain dalam wilayah provinsi.
- Jaringan jalur kereta api khusus meliputi jaringan jalur kereta api untuk angkutan batu bara dan kereta motor (molek) di Napal Putih.
- Pengembangan jaringan jalur Kereta Api dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana .

- f. Pengembangan jaringan Jalur Kereta Api Provinsi Bengkulu merupakan pengembangan baru yang menghubungkan wilayah Provinsi Bengkulu dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Sumatera Barat.
- g. Pembangunan 4 (empat) stasiun penumpang dan 4 (empat) stasiun angkutan barang di setiap kabupaten.
- h. Terdapat 900 (Sembilan ratus) meter terowongan pada lintasan Kotapadang – Kota Bengkulu dengan trase jaringan melewati 4 (empat) kabupaten yaitu : Rejang Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, dan Seluma.
- i. Pembangunan jaringan jalur kereta api: Air Kemuning- Talang Empat ; Kepahiang – Tebat Karai ; Kepala Curup – Sindang Beliti.

Adapun rencana Stasiun dan Lintasan jaringan jalur Kereta Api yang akan dikembangkan dalam Provinsi Bengkulu dan keterkaitannya dengan provinsi yang berbatasan termasuk stasiun penumpang dan stasiun barang adalah :

- 1) Koridor Padang – Kota Bengkulu
- 2) Kotapadang (Kabupaten Rejang Lebong) – Pulau Baai (Kota Bengkulu)
- 3) Prabumulih – Muara Enim – Lahat – Lubuk Linggau
- 4) Jaringan jalur kereta api khusus di Napal Putih – Lebong Tandai (Kabupaten Bengkulu Utara).

usulan jaringan jalur kereta api di Provinsi Bengkulu antara lain :

- 1) Kota Bengkulu - Kabupaten Bengkulu Selatan
- 2) Kabupaten Bengkulu Selatan – Linau (Kabupaten Kaur)
- 3) Jaringan jalur kereta api Tanjung Enim – Tanjung Iman - Bintuhan - Linau
- 4) Pelabuhan Bantal (Kabupaten Muko Muko) – Kabupaten Merangin - Provinsi Jambi

Pengembangan jaringan jalur kereta api untuk ruas Muara Enim – Pulau Baai studi kelayakannya sudah selesai, sedangkan yang lainnya masih memerlukan kajian tentang kelayakannya serta perencanaan dan perancangan teknis. Selain itu, rencana jaringan jalur Kereta Api Linau – Tanjung Enim berdasarkan peta kawasan hutan SK.6608/MENLHK- PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tanggal 27 Oktober 2021. Lintasannya dapat didesain tidak melalui kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.

Pengembangan jaringan jalur kereta api wilayah Provinsi Bengkulu sebagaimana tersebut di atas ditujukan untuk meningkatkan perekonomian daerah, memperlancar angkutan barang dan angkutan massal penumpang serta keterpaduan antar moda transportasi yang dilakukan dalam rangka:

- 1) Pelayanan kawasan sentra produksi pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, dan sinergi dengan Bandar Udara Fatmawati Soekarno, pelabuhan Pulau Baai, Linau, dan Bantal yaitu jaringan jalur Kereta Api Kotapadang – Kota Bengkulu (segmen dari lintas Muara Enim- Pulau Baai), jaringan jalur Kereta Api Tanjung Enim – Linau, jaringan jalur Kereta Api Pelabuhan Bantal – Merangin (Jambi).
- 2) Pembangunan jaringan jalur Kereta Api penumpang reguler, wisata, dan barang untuk memperkuat rencana jaringan jalur Kereta Api Trans Sumatera (Trans Sumatera Railways), Kota Padang (Provinsi Sumatera Barat) – Kota Bengkulu – Kota Bandar Lampung melalui Muara Enim, dan Kota Bengkulu – Lubuk Linggau – Muara Enim.
- 3) Pembangunan Jaringan jalur Kereta Api perkotaan adalah untuk menghubungkan kawasan perkotaan dengan bandar udara pengumpul skala pelayanan sekunder Fatmawati-Soekarno dan pelabuhan utama Pulau Baai serta mendukung aksesibilitas di kawasan perkotaan PKN dan PKW dalam Provinsi Bengkulu serta melayani perjalanan ulang alik (komuter) dari PKN Bengkulu ke kota satelitnya.
- 4) Pengembangan prasarana penunjang lainnya terutama untuk menunjang Kawasan Pariwisata dengan kelancaran serta keamanan kereta api, antara lain : Revitalisasi Prasarana dan Sarana kereta motor (Molek) Napal Putih - Lebong Tandai (Kabupaten Bengkulu Utara) dan kawasan peruntukan pariwisata lainnya di Kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu.

Saat ini yang terakomodir dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional 2030 untuk Provinsi Bengkulu adalah Jaringan Kereta Api antara Kota Padang - Pulau Baai yang termasuk dalam program RIPNAS Tahap V yaitu Tahun 2030. Kajian atau studi yang pernah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah Penyusunan Studi Pendahuluan dan Outline Business Case (OBC) Proyek Perkeretaapian Kota Padang - Pulau Baai dengan skema KPBU pada tahun 2019. Sedangkan Stasiun kereta api meliputi:

- 1) stasiun kereta api Kota Padang di Kabupaten Rejang Lebong;
- 2) stasiun kereta api Sindang Beliti Ulu di Kabupaten Rejang Lebong;
- 3) stasiun kereta api Kepala Curup di Kabupaten Rejang Lebong;
- 4) stasiun kereta api Air Punggur di Kabupaten Rejang Lebong;
- 5) stasiun kereta api Batu Bandung di Kabupaten Kepahiang;
- 6) stasiun kereta api Tebat Karai di Kabupaten Kepahiang
- 7) stasiun kereta api Kepahiang di Kabupaten Kepahiang

- 8) stasiun kereta api Taba Penanjung 1 di Kabupaten Bengkulu Tengah;
- 9) stasiun kereta api Taba Penanjung 2 di Kabupaten Bengkulu Tengah;
- 10) stasiun kereta api Talang Empat di Kabupaten Bengkulu Tengah;
- 11) stasiun kereta api Air Kemuning di Kabupaten Seluma;
- 12) stasiun kereta api Kuti Agung di Kabupaten Seluma;
- 13) stasiun kereta api Betungan di Kota Bengkulu; dan
- 14) stasiun kereta api Pulau Baai Kota Bengkulu.

Untuk jaringan lain yang belum terakomodir dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional, dapat diusulkan kepada Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

2.7.1.2.4 Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Perwujudan sistem jaringan angkutan penyeberangan diarahkan pada peningkatan keterkaitan pulau Enggano dengan wilayah daratan Provinsi Bengkulu. Pengembangan angkutan penyeberangan merupakan peningkatan dari angkutan penyeberangan yang ada sekarang dan pengembangan lintasan baru disertai pembangunan dermaga penyeberangan.

Pengembangan jaringan angkutan penyeberangan di Provinsi Bengkulu meliputi:

- 1) Lintasan Bengkulu – Enggano, dengan pelabuhan penyeberangan masing-masing Pulau Baai dan Kahyapu serta Malakoni dengan kapal jenis Ro-Ro. Peningkatan pelayanan angkutan penyeberangan Pulau Baai – Kahyapu dan/atau Malakoni terutama berkaitan dengan pengembangan Pulau Enggano sebagai Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) dan ditetapkannya Kahyapu dan Malakoni serta Muko Muko, Ketahun, Linau, dan Pulau Baai sebagai Pelabuhan Angkutan Penyeberangan dalam RTRWN (Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2017).
- 2) Lintasan Linau (Kabupaten Kaur) – Kahyapu dan / atau Malakoni (Enggano), dan Linau - Pulau Baai dengan pengembangan pelabuhan baru di Linau.
- 3) Pelabuhan Pulau Baai – Pelabuhan Tanjung Priuk/Patimban.
- 4) Pelabuhan Muko Muko – Pulau Mentawai.
- 5) Pelabuhan penyeberangan di Provinsi Bengkulu terdiri atas:
 - a) Pelabuhan Muko Muko di Kabupaten Muko Muko
 - b) Pelabuhan Kahyapu di kabupaten Bengkulu Utara
 - c) Pelabuhan Ketahun di Kabupaten Bengkulu Utara
 - d) Pelabuhan Pulau Baai di Kota Bengkulu
 - e) Pelabuhan Linau di Kabupaten Kaur
 - f) Pelabuhan Bado di Kabupaten Bengkulu Tengah.

6) Pelabuhan sungai dan danau meliputi:

- a) Pelabuhan danau Dendam Tak Sudah di Kota Bengkulu
- b) Pelabuhan danau Tes di Kabupaten Lebong
- c) Pelabuhan danau Emas di Kabupaten Rejang Lebong.

Untuk lokasi pelabuhan sungai dan danau di atas akan ditentukan berdasarkan kajian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.7.1.2.5 Sistem jaringan Transportasi Laut

Pengembangan transportasi laut diarahkan pada peningkatan dukungan transportasi laut dalam keterkaitan pelayanan antar kawasan di Provinsi Bengkulu. Pengembangan transportasi laut di Provinsi Bengkulu merupakan peningkatan dari prasarana pelabuhan yang ada sekarang dan pengembangan pelabuhan baru, meliputi :

a. Pengembangan Pelabuhan Pulau Baai sebagai Pelabuhan Utama sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (RTRWN) sejalan dengan Kota Bengkulu yang sudah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Dengan ditetapkannya Pelabuhan Pulau Baai sebagai pelabuhan utama maka secara nasional akan dikembangkan untuk:

- 1) Melayani kegiatan pelayanan dan alih muat peti kemas angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah besar.
- 2) Menjangkau wilayah pelayanan sangat luas.
- 3) Menjadi sistem jaringan transportasi laut internasional.

Untuk itu peningkatan prasarana dan sarana di pelabuhan Pulau Baai meliputi:

- 1) Peningkatan dermaga Pulau Baai untuk melayani kapal berbobot besar dengan muatan kontainer.
- 2) Pembangunan lapangan penumpukan peti kemas.
- 3) Pembangunan lapangan karantina hewan ternak nasional.
- 4) Penyiapan kawasan peruntukan kawasan industri.
- 5) Penyiapan kawasan ekonomi khusus (KEK) manufaktur.
- 6) Penyiapan kawasan ekonomi khusus pariwisata.
- 7) Perpanjangan break water pelabuhan Pulau Baai.
- 8) Pengembangan fasilitas kesyahbandaran dan penjagaan laut dan pantai.
- 9) Pemeliharaan alur dan kolam Pelabuhan Pulau Baai.

b. Pengembangan Pelabuhan Linau di Kabupaten Kaur, yang merupakan peningkatan dari kegiatan pelabuhan yang ada untuk mendukung peluang

integrasi antara pelabuhan laut dengan pelabuhan penyeberangan dan jalur Kereta Api. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017, Pelabuhan Linau sudah ditetapkan sebagai Pelabuhan Pengumpul. Dengan demikian, pelabuhan Linau akan dikembangkan untuk:

- 1) Melayani kegiatan pelayanan dan alih muat peti kemas angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah menengah
 - 2) Menjangkau wilayah pelayanan menengah dan
 - 3) Memiliki fungsi sebagai simpul jaringan transportasi nasional.
- c. Pengembangan pelabuhan Malakoni untuk angkutan khusus wisatawan guna menunjang Enggano sebagai Destinasi Pariwisata Nasional. Sementara untuk mendukung kegiatan perikanan berpeluang dikembangkan pelabuhan perikanan (pelabuhan khusus). Pelabuhan Malakoni diarahkan menjadi Pelabuhan Pengumpan Lokal.
- d. Peningkatan pelabuhan Muko Muko, Malakoni, Ketahun, Pulau Tikus, Bantal, dan pelabuhan sepanjang pesisir pantai barat sumatera yang merupakan peningkatan dari kegiatan pelabuhan yang ada/ pernah ada. Pelabuhan ini diarahkan menjadi Pelabuhan Pengumpan Lokal.
- e. Dalam rangka kelancaran alur pelayaran diperlukan pengembangan sarana bantu navigasi pelayaran pada kawasan konservasi perairan yang memiliki keanekaragaman hayati di TWA Pantai Panjang - Pulau Baai dan Pulau Enggano.
- f. pelabuhan laut Terminal khusus meliputi:
- 1) Terminal khusus CPO Pasar Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara.
 - 2) Terminal khusus batubara Kota Bani Kabupaten Bengkulu Utara.
 - 3) Terminal khusus batubara Ketahun Bengkulu Utara.
 - 4) Terminal khusus batubara Desa Selolong Kabupaten Bengkulu Utara.
 - 5) Terminal untuk Kepentingan Sendiri 1 berada di Kota Bengkulu
 - 6) Terminal untuk Kepentingan Sendiri 2 berada di Kota Bengkulu
 - 7) Terminal untuk Kepentingan Sendiri 3 berada di Kota Bengkulu
 - 8) Terminal untuk Kepentingan Sendiri 4 berada di Kota Bengkulu
- g. Pelabuhan Perikanan meliputi:
- 1) Pelabuhan Perikanan Pantai terdiri atas:
 - a) Pelabuhan Pendaratan Ikan Pulau Baai Kota Bengkulu.
 - b) Pelabuhan Pendaratan Ikan Pasar Bantal Kabupaten Muko Muko.
 - 2) Pangkalan Pendaratan Ikan terdiri atas:
 - a) Pangkalan Pendaratan Ikan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara.

- b) Pangkalan Pendaratan Ikan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.
- c) Pangkalan Pendaratan Ikan Pasar Seluma Kabupaten Seluma akan ditingkatkan menjadi pelabuhan nusantara.
- d) Pangkalan Pendaratan Ikan Pasar Bawah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- e) Pangkalan Pendaratan Ikan Pasar Lama Kabupaten Kaur.
- h. Alur pelayaran umum dan perlintasan meliputi;
 - 1) Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu - Pelabuhan Muko Muko Kabupaten Muko Muko - Malaysia, Jepang, negara di Asia, negara eropa dan negara lainnya.
 - 2) Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu - Pelabuhan Muko Muko Kabupaten Muko Muko - Provinsi Sumatera Barat
 - 3) Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu - Pelabuhan Linau Kabupaten Kaur - Provinsi Lampung.
 - 4) Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu - Pelabuhan Linau
 - 5) Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu - Pelabuhan Kahyapu Kecamatan Enggano
 - 6) Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu - Pelabuhan Malakoni Kecamatan Enggano
- i. Alur pelayaran masuk pelabuhan meliputi;
 - 1) Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu - Pelabuhan Pasar Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara;
 - 2) Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu - Pelabuhan Kota Bani Kabupaten Bengkulu Utara;
 - 3) Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu - Pelabuhan Selolong Kabupaten Bengkulu Utara;
 - 4) Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu - Pelabuhan Pasar Ketahun;
 - 5) Pelabuhan Pulau Baai sampai ke perairan Pulau Mega;
 - 6) Pelabuhan Linau – Pelabuhan Kahyapu; dan
 - 7) Pelabuhan Linau – Pelabuhan Malakoni.
- j. Muatan pelabuhan laut Terminal khusus, Pelabuhan Perikanan, Alur pelayaran umum dan perlintasan dan Alur pelayaran masuk pelabuhan tersebut di atas, pengaturan dan penjelasannya dapat dilihat pada dokumen final RZWP3K Provinsi Bengkulu berdasarkan Persetujuan Teknis terhadap Materi Teknis

Perairan Pesisir Provinsi Bengkulu Nomor B.233/MEN-KP/II/2023 tanggal 14 Februari 2023.

2.7.1.2.6 Bandar Udara

Seperti halnya pengembangan transportasi laut, perwujudan sistem jaringan transportasi udara juga diarahkan pada peningkatan dukungan transportasi udara untuk pelayanan keterkaitan antar kawasan di Provinsi Bengkulu dan dalam NKRI. Strategi perwujudan tatanan kebandarudaraan dan transportasi udara di Provinsi Bengkulu meliputi:

- 1) mengembangkan dan memantapkan fungsi bandar udara untuk mendukung kegiatan industri dan pariwisata ekowisata, bahari, cagar budaya, dan ilmu pengetahuan, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran
- 2) mengembangkan bandar udara yang terpadu dengan sistem jaringan jalan nasional dan jaringan jalur kereta api
- 3) mengembangkan bandar udara untuk melayani angkutan udara perintis guna meningkatkan aksesibilitas kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk Pulau Enggano
- 4) mengendalikan kegiatan budi daya di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kawasan keselamatan operasi penerbangan; dan
- 5) memanfaatkan bersama bandar udara guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

Pengembangan dan pemantapan fungsi bandar udara untuk mendukung kegiatan industri dan pariwisata ekowisata, bahari, cagar budaya, dan ilmu pengetahuan, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran adalah dengan melakukan pengembangan dan pemantapan fungsi Bandar Udara Internasional Fatmawati Soekarno sebagai Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder. Selain dari itu, pengembangan jaringan transportasi udara di Provinsi Bengkulu merupakan pengembangan dan peningkatan serta pembangunan baru bandar udara kabupaten sebagai berikut:

- 1) Pengembangan jalur penerbangan dari Bandara Fatmawati Soekarno ke Provinsi lain dan luar negeri untuk mendukung fungsi kota Bengkulu sebagai PKN.
- 2) Peningkatan pelayanan Bandar Udara Fatmawati Soekarno (Padang Kemiling) Bengkulu yang telah ditetapkan sebagai bandar udara pengumpul skala pelayanan sekunder meliputi:
 - a) perpanjangan landas pacu menjadi 2800-3000 meter

- b) peningkatan kapasitas dan renovasi fasilitas terminal bandara.
- c) Pengembangan Rute Penerbangan ke luar provinsi dan Internasional
- d) Peningkatan fasilitas untuk angkutan barang/kargo
- e) Pengembangan layanan penerbangan ke Muko Muko dan Enggano.
- 3) Peningkatan Bandar Udara Muko Muko di Kabupaten Muko Muko dari lapangan terbang yang ada sekarang, dengan kapasitas pelayanan untuk pesawat kecil.
- 4) Pengembangan Bandar Udara di Enggano untuk mendukung pengembangan Pulau Enggano, terutama dalam mendukung kegiatan destinasi pariwisata nasional sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, bahwa Pulau Enggano termasuk Destinasi Pariwisata Nasional (DPN).
- 5) Rencana pengembangan bandar udara sebagai pusat penerbangan terdiri atas:
 - a) pendayagunaan Bandar Udara Muko Muko, Bandar Udara Enggano sebagai bandar udara pengumpan;
 - b) pengembangan Bandar Udara Muko Muko, Bandar Udara Enggano untuk mendukung aktivitas perkebunan, menunjang kegiatan pariwisata, untuk navigasi dan mitigasi bencana.
 - c) mengembangkan bandar udara yang terpadu dengan sistem jaringan jalan nasional dan jaringan jalur kereta api.

2.7.1.3 Rencana Sistem Jaringan Energi

Rencana sistem jaringan energi, meliputi :

- a. Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi terdapat di Kota Bengkulu.
- b. jaringan Infrastruktur ketenagalistrikan

Jaringan Infrastruktur ketenagalistrikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan dunia usaha terutama sector industri yang pada waktu ini masih sangat terbatas di Provinsi Bengkulu meliputi : pengembangan pembangkit, pengembangan transmisi, pengembangan gardu induk, dan pengembangan distribusi.

Produksi listrik di Provinsi Bengkulu pada tahun 2018 yang baru mencapai 1.023.000.000 KWH sebagian besar lebih untuk memenuhi kebutuhan pelanggan non industri yang disuplai dari pembangkit listrik tenaga diesel dan PLTA Tes. Kebutuhan energi listrik untuk pembangunan kawasan industri waktu ini masih terkendala dikarenakan PLTA Musi yang berkapasitas 3 X 70 MW lebih terpakai

menyuplai listrik Provinsi Sumatera Selatan dan provinsi lainnya. Rencana pengembangan jaringan energi listrik di Provinsi Bengkulu dilakukan berdasarkan perhitungan kebutuhan daya listrik mengacu kepada SNI 03-1733-2004 dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Setiap unit rumah tangga harus mendapatkan daya listrik dari PLN atau dari sumber lain.
- 2) Setiap unit rumah tangga harus dapat dilayani daya listrik minimum 450 VA per jiwa dan untuk sarana lingkungan sebesar 40% dari total kebutuhan rumah tangga.
- 3) Disediakan gardu listrik untuk setiap 200KVA daya listrik yang ditempatkan pada lahan yang bebas dari kegiatan umum.

Kebutuhan daya listrik diperkirakan dengan asumsi sebagai berikut:

- 1) Kebutuhan listrik perumahan adalah sebesar 40% dari kebutuhan total.
- 2) Kebutuhan listrik fasilitas pemerintah dan pelayanan umum adalah 15% dari kebutuhan total.
- 3) Kebutuhan listrik industri adalah 15% dari kebutuhan total.
- 4) Kebutuhan listrik fasilitas komersial adalah 10% dari kebutuhan total.
- 5) Kebutuhan listrik penerangan jalan adalah 10% dari kebutuhan total.
- 6) Kebutuhan untuk cadangan listrik adalah 10% dari kebutuhan total.

Berdasarkan standard dan asumsi di atas, maka kebutuhan daya listrik untuk Provinsi Bengkulu sampai dengan tahun 2032 diperkirakan adalah sebesar 3.103 MW sebagai berikut:

Tabel 2. 158Proyeksi Kebutuhan Daya Listrik Provinsi Bengkulu s.d 2032 (dalam MWatt)

No	Kabupaten	Jumlah Pddk Thn2032	Perumahan	Pemerin tahan &Fas. Umum	Industri	Komersial	Penerangan Jalan	Cadangan	Total
1.	Bengkulu Selatan	214.945	97	36	36	24	24	24	242
2.	Rejang Lebong	319.534	144	54	54	36	36	36	359
3.	Bengkulu Utara	343.532	155	58	58	39	39	39	387
4.	Kaur	148.637	67	25	25	17	17	17	167
5.	Seluma	300.648	135	51	51	34	34	34	338
6.	Muko Muko	247.580	111	42	42	28	28	28	278
7.	Lebong	190.790	86	32	32	21	21	21	215
8.	Kepahiang	210.155	95	35	35	24	24	24	236
9.	Bengkulu tengah	211.034	95	36	36	24	24	24	237

No	Kabupaten	Jumlah Pddk Thn2032	Perumahan	Pemerin tahan &Fas. Umum	Industri	Komersial	Penerangan Jalan	Cadangan	Total
10.	Kota Bengkulu	572.191	257	97	97	64	64	64	644
	Jumlah	2.759.046	1.242	466	466	311	311	311	3.103

Sumber : Hasil perhitungan berdasar SNI-1733-2004

Untuk memenuhi kebutuhan daya listrik sebesar total 3.103 MW (Lihat Tabel 3.12), maka rencana pengembangan sistem kelistrikan di Provinsi Bengkulu untuk sampai dengan akhir tahun rencana (2032) adalah sebagai berikut:

1. mengembangkan sumber-sumber energi listrik yang diprioritaskan untuk mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik untuk kegiatan permukiman dan jasa pendukungnya, perkantoran dan pariwisata dikawasan perkotaan, perdesaan, pulau Enggano, pulau Mega,dan pulau Tikus serta untuk kegiatan industri perpabrikaan.
2. penambahan pasokan sumber energi listrik tersebut dapat berasal dari penambahan pembangkit di Provinsi Bengkulu sendiri atau ditransfer dari provinsi lain melalui sistem penyaluran (transmisi) dan berbagai sumber energi alternatif berbasiskan energi baru dan terbarukan.

Dalam rangka memenuhi energi listrik pada PKN, PKW, PKSP, dan PKL serta seluruh wilayah provinsi terutama bagi kebutuhan dunia usaha dan industri pengolahan maka akan dilaksanakan sebagai berikut:

A. Infrastruktur Pembangkitan tenaga listrik dan prasarana pendukungnya

1. Pemanfaatan potensi panas bumi untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Tambang Sawah, Hulu Lais, Bukit Daun, Suban, Kepahiang, Lebong Simpang, dan seluruh potensi yang tersebar di seluruh kabupaten/ kota dalam Provinsi Bengkulu.
2. Pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) 2X100 MW di Pulau Baai Kota Bengkulu dan pembangkit listrik lainnya yang tersebar di seluruh kabupaten/ kota serta terkoneksi dengan provinsi tetangga.
3. Pemanfaatan sumber energi biomassa dan Minihidro (PLTM) sebagai alternatif sumber energi terbarukan (renewable) untuk pembangkit listrik di Tunggang, Air Dikit, Lebong Simpang, Embong, Ketahun, Ketahun Hilir, Aur Gading, Lubuk Banyau, Nakai, Air Nokan, Sengak, Muara Kemumu, Kelingi, Belimbing, Kepala Curup, Kanzy, Seluma, Puguk, Lubuk Sandi, Seluma Utara, Ulu Talo, Semidang Alas, Semidang Alas Maras, Pilubang, Air Tenam, Batu Balai/Manna, Padang Guci, Kinal, Muara Sahung, dan Pasar Jumat

4. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) berlokasi di daerah Kabupaten Lebong, Kabupaten Muko Muko dan Kabupaten Bengkulu Utara
5. pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) di Pulau Enggano Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Kaur.
6. mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) di daerah perdesaan, yang didukung dengan adanya sekitar 130 sungai di provinsi Bengkulu. Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTMH) berlokasi di daerah Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur.
7. Mengembangkan sistem pembangkit listrik terbarukan pada kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk Enggano, Pulau Tikus, dan Pulau Mega.
8. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) berlokasi di daerah Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kaur, Kota Bengkulu
9. Pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) tersebar di seluruh wilayah provinsi terutama untuk penerangan jalan dan ruang publik.
10. Pembangkit Listrik lainnya meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) di Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara dan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) di Lubuk Banyau Kabupaten Bengkulu Utara
11. Pembangunan PLTA berlokasi di daerah Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur meliputi:
 - a. PLTA Air Ketahun di Kabupaten Bengkulu Utara
 - b. PLTA Air Padang di Kabupaten Bengkulu Utara
 - c. PLTA Air Ketahun di Kabupaten Lebong
 - d. PLTA Air Putih di Kabupaten Lebong
 - e. PLTA Talang Ratu di Kabupaten Lebong
 - f. PLTA Tes di Kabupaten Lebong
 - g. PLTA Ketahun Tengah di Desa Karang Dapo Kabupaten Lebong
 - h. PLTA Lebong 2 di Kabupaten Lebong
 - i. PLTA Musi di Kabupaten Kepahiang
 - j. PLTA Musi Kota Agung di Kabupaten Kepahiang
 - k. PLTA Simpang Aur di Kabupaten Bengkulu Tengah
 - l. PLTA Air Elang di Kabupaten Seluma
 - m. PLTA Air Seginim di Kabupaten Bengkulu Selatan
 - n. PLTA Tanjung Sakti Kabupaten Bengkulu Selatan

- o. PLTA Air Padang Guci di Kabupaten Kaur
- p. PLTA Air Numan di Kabupaten Kaur
- q. PLTA Air Nasal di Kabupaten Kaur

Adapun rekapitulasi rencana pembangunan pembangkit listrik di wilayah Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 159 Rekapitulasi Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Bengkulu

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Jumlah
PLN											
PLTP (MW)	-	-	-	-	110	-	-	110	-	-	220
PLT Lain	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3
IPP											
PLTP	-	-	-	10	30	-	-	-	-	-	40
PLTM	8	25	19	9	12	-	-	-	-	-	73
PLTA	-	10	-	-	90	-	-	160	-	400	660
PLT Lain	-	-	1	-	53	-	-	-	-	-	54
Jumlah	8	35	20	19	186			160		400	827
Total											
PLTP				10	140			110			260
PLTM	8	25	19	9	12						73
PLTA		10			90			160		400	660
PLT Lain	0,3		1		53						54
Jumlah	8	35	20	19	296			270		400	1.047

Sumber : RUPTL –PLN-2021-2030

Tabel 2. 160 Rincian Rencana Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik

No	Sistem Tenaga Listrik	jenis	Lokasi/ Nama	Kapasitas (MW)	Target COD	Status	Pengembang
1	Sumatera	PLTM	Padang Guci-2	7,0	2021	Konstruksi	IPP
2	Isolated	PLTS	Pembangkit EBT LISDES	0,3	2021	Perencanaan	PLN
3	Sumatera	PLTM	Sengak 1	0,7	2021	Konstruksi	IPP
4	Sumatera	PLTM	Kanzy 3	5,0	2022	PPA	IPP
5	Sumatera	PLTM	Ketaun 3	10,0	2022	PPA	IPP
6	Sumatera	PLTM	Tunggang	10,0	2022	Konstruksi	IPP
7	Isolated	PLTS	Dedieselisasi	0,6	2023	Perencanaan	IPP
8	Sumatera	PLTP	Hululais (FTP2)	2 x55,0	2025	committed	PLN
9	Sumatera	PLTP	Kepahiang#1	55,0	2028	Committed	PLN
10	Sumatera	PLTP	Kepahiang #2	55,0	2028	Committed	PLN
11	Sumatera	PLTA	Hidro Sumatera (Kuota) tersebar*	10,0 90,0 160,0 400	2022 2025 2028 2030	Pengadaan Perencanaan Perencanaan Perencanaan	IPP
12	Sumatera	PLTM	Minihidro (Kuota) tersebar*	19,1 8,8	2023 2024	Perencanaan	IPP

No	Sistem Tenaga Listrik	jenis	Lokasi/ Nama	Kapasitas (MW)	Target COD	Status	Pengembang
				12,4	2025		
13	Sumatera	PLTP	Panas Bumi Sumatera (Kuota) tersebar*	10,0 30,0	2024 2025	Perencanaan	IPP
14	Sumatera	PLTS	Surya Sumatera (Kuota) tersebar*	50,1	2025	Perencanaan	IPP
15	Sumatera	PLT Bio	PLTBio Sumatera (Kuota) tersebar*	3,0	2025	Perencanaan	IPP
	Total			1.046,9			

Sumber : RUPTL –PLN-2021-2030

Selain rencana itu, masih terdapat potensi pembangkit yang bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan sistem tenaga listrik yaitu seperti pada tabel berikut:

Tabel 2. 161 Potensi Pembangkit Tenaga Listrik di Wilayah Provinsi Bengkulu

No	JENIS	LOKASI /NAMA	KAPASITAS
1	PLTA	Kepahiang	36,00 MW
2	PLTA	Ketaun Tengah	13,10 MW
3	PLTA	Talang Ratu	18,00 MW
4	PLTA	Lebong -2	12,00 MW
5	PLTA	Talang Ratu	18,00 MW
6	PLTA	Kota Agung	27,40 MW
7	PLTA	Tanjung Sakti	50,00 MW
8	PLTM	Air Tenam	7,00 MW
9	PLTM	Aur Gading	2,70 MW
10	PLTM	Belimbing	8,00 MW
11	PLTM	Embong	4,00 MW
12	PLTM	Kanzy 3	4,30 MW
13	PLTM	Ketaun 1	4,20 MW
14	PLTM	Ketaun 2	2,00 MW
15	PLTM	Ketaun 3	9,90 MW
16	PLTM	Ketaun Hilir	9,90 MW
17	PLTM	Kinal	7,00 MW
18	PLTM	Klingi	2,70 MW
19	PLTM	Lubuk Banyau	2,50 MW
20	PLTM	Nakon 1	7,30 MW
21	PLTM	Muara Kemumu	2,20 MW
22	PLTM	Nakai 1	3,20 MW
23	PLTM	Nakai 2	5,00 MW
24	PLTM	Pilubang	8,00 MW
25	PLTM	Puguk	5,30 MW
26	PLTM	Seluma	6,00 MW
27	PLTM	Air Dikit	6,00 MW
28	PLTP	Bukit Daun #1	55,00 MW

No	JENIS	LOKASI /NAMA	KAPASITAS
29	PLTP	Bukit Daun #2	30,00 MW
30	PLTP	Hululais (FTP2)#3	55,00 MW
31	PLTP	Hululais (FTP2)#4	55,00 MW
32	PLTP	Hululais Small Scale #1	10,00 MW
33	PLTP	Hululais Small Scale #2	10,00 MW
34	PLTP	Lawang- Malintang	20,00 MW
35	PLTBg	Lubuk Banyau	2,50 MW
36	PLTBm	Ketahun	4,00 MW

Sumber : RUPTL –PLN-2021-2030

B. Rencana Pengembangan Transmisi

Rencana pengembangan jaringan transmisi di Provinsi Bengkulu akan dilaksanakan untuk sistem 150 kV dan 275 kV yang pada tahap I sampai dengan tahun 2022 seperti pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 162Rencana Pembangunan Jaringan Transmisi s.d Tahun 2030

No	Dari	Ke	Tegangan (kV)	Kms	Tahun
1	Pulau Baai	Argamakmur	150	108	2021
2	Manna	Bintuhan	150	124	2023
3	Pekalongan	PLTP Hululais	150	100	2025
4	Kepahiang	Inc 2phi (Pekalongan- Pulau Baai)	150	20	2028
5	Muko Muko	Argamakmur	150	292	2028
	Total			664	

Sumber : RUPTL –PLN-2021-2030

Selain itu, untuk menunjang sistem jaringan infrastruktur transmisi energi listrik Provinsi Bengkulu tersebut dipandang perlu melaksanakan pengembangan dan pembangunan infrastruktur penyaluran tenaga listrik sebagai berikut :

- 1) Pengembangan jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 KV dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV diperlukan untuk menyalurkan energi listrik yang dibangkitkan oleh pembangkit baru diarahkan ke gardu induk dan distribusi, serta terkoneksi dengan wilayah Lubuk Linggau – Curup - Kepahiang – Pekalongan; Kepahiang - Bengkulu Tengah – Kota Bengkulu – Pulau Baai - Argamakmur – Muko Muko – Kambang (Sumbar); Curup - Muara Aman; Seluma – Manna - Bintuhan (Kaur) – Lampung; dan Manna– Pagar Alam
- 2) meningkatkan penyaluran (transmisi) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Musi untuk Provinsi Bengkulu
- 3) Pembangunan interkoneksi sesumatera antara lain Bengkulu – Musi Rawas Utara

- 4) Rehabilitasi jaringan transmisi utama saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) Bengkulu – Curup - Lubuk Linggau
- 5) Rehabilitasi jaringan transmisi pengumpan SUTET Muko Muko – Bengkulu – Manna
- 6) Pengembangan jaringan transmisi kawasan tertinggal Pulau Enggano.

2.7.1.4 Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

Sistem Jaringan Telekomunikasi yang terdiri atas jaringan tetap dan jaringan bergerak merupakan prasarana penting dalam mendukung kegiatan sosial- ekonomi masyarakat, kegiatan pemerintahan serta kegiatan lainnya di Provinsi Bengkulu dalam rangka komunikasi, pertukaran informasi, dan pengambilan keputusan baik bagi keperluan publik maupun kepentingan privat. Berdasarkan RTR Pulau Sumatera, pengembangan sistem telekomunikasi di Provinsi Bengkulu akan diarahkan pada perwujudan sistem telekomunikasi baik jaringan tetap maupun jaringan bergerak pada kota-kota PKW dan PKN Bengkulu. Pengembangan sistem prasarana telekomunikasi di Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

- a. mengembangkan jaringan telekomunikasi untuk meningkatkan keterkaitan antar wilayah di Provinsi Bengkulu.
- b. mengembangkan jaringan telekomunikasi sampai ke desa-desa terutama Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) dalam rangka meningkatkan keterkaitan kota-desa.
- c. sistem jaringan telekomunikasi pada jaringan tetap yaitu jaringan kabel bawah laut untuk telekomunikasi Bengkulu-WP Bengkulu dan secara rinci dapat dilihat di dalam dokumen final RZWP3K Provinsi Bengkulu berdasarkan Persetujuan Teknis terhadap Materi Teknis Perairan Pesisir Provinsi Bengkulu Nomor B.233/MEN-KP/II/2023 Tanggal 14 Februari 2023.
- d. mengembangkan jaringan telekomunikasi untuk mendukung pengembangan kota-kota (PKN, PKW, PKL Strategis, dan PKL) dan kawasan strategis serta hingga ke pelosok wilayah yang belum terjangkau prasarana telekomunikasi.
- e. mengembangkan prasarana telekomunikasi meliputi sistem bergerak yang terdiri dari sistem kabel serat optic terintegrasi sistem seluler dan sistem satelit sebagai penghubung antar pusat-pusat pertumbuhan.
- f. jaringan bergerak meliputi jaringan seluler berupa Base Transceiver Station (BTS) tersebar di seluruh kabupaten/kota
- g. Pengembangan serta rehabilitasi dan peningkatan fungsi jaringan bergerak untuk melayani pusat-pusat kegiatan di PKW Muko Muko, PKW Curup, PKW Manna, PKN Bengkulu, dan Kawasan Andalan Bengkulu dan sekitarnya.

- h. Penggantian kabel tembaga dengan kabel serat optic untuk seluruh kabupaten dalam Provinsi Bengkulu terkecuali PKN Kota Bengkulu yang sudah keseluruhan tersambung kabel serat optic.
- i. Pengembangan jaringan satelit untuk melayani PKN Bengkulu, PKW Manna, PKW Muko Muko, dan PKW Curup serta kawasan Andalan Bengkulu dan sekitarnya.
- j. Pengembangan jaringan satelit untuk melayani kawasan perbatasan Negara, kawasan terisolasi, dan kawasan tertinggal yaitu di Pulau Enggano dan Pulau Mega.
- k. Pengembangan transmisi penyiaran TVRI

Rencana Sistem jaringan telekomunikasi berdasarkan perkiraan kebutuhan pelayanan telepon (menggunakan SNI 03-1733-2004) diarahkan pada penyediaan pelayanan untuk 358.675 sambungan WiFi dan/ atau telepon, 11.036 sambungan smart city, 39 Sentral Telepon Otomat (STO) dan jaringan distribusi untuk mendukung pusat-pusat kegiatan ekonomi pada pusat kegiatan nasional (PKN) Kota Bengkulu, PKW, PKL Strategis, dan pusat kegiatan lokal (PKL) serta kawasan strategis dan prioritas sebagai salah satu pendorong berkembangnya investasi. Prakiraan kebutuhan prasarana dan sarana telekomunikasi per kabupaten/ kota secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 163Kebutuhan Pelayanan Telepon di Provinsi Bengkulu Tahun 2032

No.	Kabupaten	Jumlah Penduduk	Sambungan Telepon/ WiFi	Jaringan smart city	STO
1.	Bengkulu Selatan	214.945	27.943	860	3
2.	Rejang Lebong	319.534	41.539	1.278	5
3.	Bengkulu Utara	343.532	44.659	1.374	5
4.	Kaur	148.637	19.323	594	2
5.	Seluma	300.648	39,084	1.203	4
6.	Muko Muko	247.580	32.185	990	3
7.	Lebong	190.790	24.803	763	3
8.	Kepahiang	210.155	27.320	841	3
9.	Bengkulu Tengah	211.034	27.434	844	3
10.	Kota Bengkulu	572.191	74.385	2.289	8
	Jumlah	2.759.046	358.675	11.036	39

Sumber: Analisis Kebutuhan Tahun 2032 berdasar SNI 03-1733-2004

2.7.1.5 Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Rencana pengembangan prasarana sumber daya air meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Konservasi sumber daya air dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber

air permukaan dan sumber air tanah melalui optimasi pemanfaatan sumber air, pembuatan bendungan, dan penjernihan air. Selain itu juga diperlukan penurapan mata air dan membangun sumur bor, pencegahan pencemaran pada cekungan air tanah (cat) di berbagai sumber. Untuk meningkatkan pendayagunaan sumber daya air direncanakan melalui pengembangan jaringan irigasi pada wilayah kabupaten yang memiliki pertanian lahan basah, sedangkan untuk pengendalian daya rusak air dilakukan melalui pembangunan dan/atau pengembangan prasarana pengendalian banjir dan pengamanan pantai.

Rencana pendayagunaan Sumber Daya Air di Provinsi Bengkulu diarahkan untuk pengembangan prasarana sumber daya air yang memenuhi berbagai kepentingan. Pengembangan prasarana sumber daya air untuk air baku diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber air permukaan dan sumber air tanah.

Berdasarkan RTR Pulau Sumatera pengembangan sumber daya air di wilayah Provinsi Bengkulu dalam kaitannya dengan wilayah yang lebih luas adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan wilayah sungai lintas provinsi beserta DAS yang termasuk di dalamnya adalah:
 - 1) Wilayah Sungai Musi – Sugihan – Banyu Asin– Lemau meliputi DAS Musi, DAS Lakitan di Sumatera Selatan, DAS Kelingi Kabupaten Sumatera Selatan, DAS Lemau.
 - 2) Wilayah Sungai Teramang – Muar di Kabupaten Mukomuko terdiri atas DAS Manjuntio, DAS Selagan, DAS Lagan, DAS Dikit, DAS Pelatun Gedang, DAS Bakal Kecil, DAS Bantal, DAS Bakal Gedang, DAS Pinang, DAS Teramang, DAS Retak, DAS Ipuh, DAS Muar, DAS Buluh dan DAS Rami.
 - 3) Wilayah sungai Nasal - Padang Guci di Kabupaten Kaur dan Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri atas DAS Selali, DAS Pino, DAS Manna, DAS Bengkenang, DAS Kedurang, DAS Mertam, DAS Sulau, DAS Padang Guci, DAS Kelam, DAS Kinal, DAS Luas, DAS Tetap, DAS Sambat, DAS Numan, DAS Hawang, DAS Nasal, DAS Kolek, DAS Manula dan DAS Anak Selanak.
 - 4) Cekungan Air Tanah lintas Provinsi meliputi:
 - a) Lubuk Pinang - Painan;
 - b) Lubuk Linggau - Muara Enim;
 - c) GedongMeneng - Provinsi Lampung; dan
 - d) Muaraduo - Curup Cekungan Air Tanah lintas Kabupaten
- b. Pengembangan prasarana dan sarana sumber daya air yang terdiri atas pemeliharaan kawasan di sekitar bendung yang meliputi bendung Muko Muko kiri,

bendung Air Majunto, bendung Air Kesubun, bendung Air Lais Kurotidur, bendung Air Seluma, bendung Air Selebang Kedurang, bendung Batutegei.

c. Bangunan pengendalian banjir terdiri atas rumah pompa di Kota Bengkulu

2.7.1.5.1 Air Tanah dan Air Permukaan (Wilayah Sungai)

Sumber air tanah di Provinsi Bengkulu, bagian puncak jajaran gunungapi strato di bagian timur merupakan daerah penangkap hujan dengan aliran permukaan lebih dominan, sehingga digolongkan sebagai daerah air tanah langka. Secara alami sungai yang mulai terbentuk di bagian puncak tersebut serta bagian tubuh gunung akan mengalir menyebar ke arah kaki gunung sehingga produktivitas akuifer di daerah gunungapi strato secara berangsur akan semakin meninggi ke arah bagian kaki gunung. Daerah sekitar Curup- Kepahiang merupakan daerah paling prospektif kandungan air tanahnya, mengingat daerah tersebut merupakan cekungan antara gunung sehingga aliran air tanah akan berkumpul di sekitar cekungan ini. Di samping itu Sesar Sumatera yang bertindak sebagai penyalur air tanah memberikan sumbangan bagi terkumpulnya sumber air tanah di cekungan ini. Akuifer terpenting di daerah gunungapi adalah endapan lahar dan lava vesikuler. Tercatat beberapa mata air yang muncul dari akuifer tersebut debitnya mencapai lebih dari 200 l/detik.

Daerah Aliran Sungai (DAS) di Provinsi Bengkulu sangat dipengaruhi oleh kondisi bentuk wilayah, tanah, geologi, geomorphologi, intensitas hujan dan vegetasi. DAS yang termasuk luas dan sedang ada 27 area, dan DAS yang terluas adalah Air Kungkai mempunyai luas 285.016,31 Ha & Air Ketahun seluas 263.033,72 Ha.

Aliran air sungai yang deras dan tajam mempunyai potensi untuk dijadikan sebagai sumber pembangkit listrik tenaga air berskala kecil (mikro) terutama pada sungai-sungai yang DAS-nya luas, kondisi topografi bergelombang - berbukit dan kondisi penutupan lahannya didaerah hulu masih baik seperti Air Seblat, Air Ipuh, dan Air Ketahun.

Rencana arahan pengelolaan sumber daya air di Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

Pembangunan prasarana sumber daya air meliputi:

1. Semua sumber air baku dari dam, embung, waduk, telaga, bendungan serta sungai-sungai yang airnya dapat dimanfaatkan secara langsung dan dikembangkan untuk berbagai kepentingan.
2. Zona pemanfaatan DAS dilakukan dengan membagi tipologi DAS berdasarkan tipologinya.
3. Penetapan zona pengelolaan sumber daya air sesuai dengan keberadaan wilayah sungai tersebut pada zona kawasan lindung tidak diizinkan

pemanfaatan sumber daya air untuk fungsi budidaya, termasuk juga untuk penambangan.

4. Prasarana sumber daya air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lintas wilayah administratif kabupaten/kota, dikoordinasikan oleh Pemerintah Provinsi.

2.7.1.5.2 Air Baku

Sumber air permukaan dimanfaatkan untuk menunjang kebutuhan manusia. Air permukaan mempunyai fungsi utama sebagai air irigasi dan sumber air minum. Sumber air permukaan sangat terkait dengan karakteristik Daerah Aliran Sungai (DAS) atau Satuan Wilayah Sungai (SWS). Wilayah Provinsi Bengkulu terbagi dalam 9 SWS yang merupakan 27 DAS yang termasuk kategori besar dan sedang. Pengelolaan air permukaan lebih tepat dilakukan melalui pendekatan karakteristik DAS.

Sungai-sungai di Provinsi Bengkulu yang mempunyai potensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber air permukaan (air minum) adalah Air Manjuto, Air Selagan, Air Teramang, Air Ketahun, Air Bengkulu, Air Kungkai, Air Manna dan Air Padang Guci. Pada lokasi pemrosesan air minum (Intake) sungai-sungai ini mempunyai debit air lebih besar dari 3,38 m³/detik diwaktu musim kemarau yang cukup sebagai bahan baku air minum. Selain itu air sungai-sungai tersebut kualitasnya masih tergolong cukup baik (cemar ringan). Untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas kondisi sungai- sungai tersebut perlu dipertahankannya kondisi penutupan hutan di daerah hulu dan dilakukan pengendalian pemanfaatan lahan DAS-nya. Instalasi pengolahan air permukaan yang dimiliki PDAM di Provinsi Bengkulu saat ini rata-rata mempunyai kapasitas 200 sampai 400 lt/dt.

Prakiraan kebutuhan air minum untuk permukiman di Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut. Kebutuhan penyediaan air minum di kecamatan dan pemukiman secara ideal dilakukan dengan pendekatan yang menggunakan angka standard yang sudah ditetapkan yaitu minimal 60 l/hari/kapita dan maksimal 120 l/hari/kapita. Dari angka standar tersebut dapat dihitung prakiraan volume air minum yang perlu diproduksi oleh instansi pengelola air minum. Selain angka standar tersebut, untuk menetapkan proporsi angka persentase pendistribusian volume air minum yang diproduksi, digunakan pendekatan dengan ketentuan yang telah ada dan diaplikasikan di beberapa konsep rencana di Indonesia, yaitu:

1. Kebutuhan rumah tangga dihitung berdasarkan jumlah penduduk dengan rata-rata minimum 60 l/hari/kapita dan maksimum 120 l/hari/kapita.
2. Kebutuhan untuk pelayanan sosial/pelayanan umum (kesehatan, pendidikan, peribadatan, dan lain-lain) yaitu 5% - 10% dari kebutuhan total rumah tangga.

3. Kebutuhan untuk komersial (perdagangan, jasa, dan industri) yaitu 10%- 20% dari kebutuhan total rumah tangga.
4. Kebutuhan cadangan air minum minimal 10% dari kebutuhan (rumah tangga dan fasilitas)
5. Kebutuhan untuk menanggulangi kebocoran dalam pendistribusian pada instalasi air yaitu 15% - 25% dari kebutuhan total (rumah tangga + fasilitas pelayanan umum + cadangan).

Berdasarkan standard kebutuhan minimal provinsi, maka kebutuhan penyediaan air minum bagi Provinsi Bengkulu adalah seperti dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 164Prakiraan Kebutuhan Penyediaan Air Minum Provinsi Bengkulu Tahun 2032 (liter/hari)

No.	Kabupaten	Kebutuhan Domestik, air liter /hari	Pelayanan Umum/ Sosial	Komersial	Cadangan	Kebocoran	Total
			10% dom	20% dom	10% (dom + fasilitas)	25% tot	
1.	Bengkulu Selatan	12.896.700	1.289.670	2.579.340	1.676.571	4.610.570	18.442.281
2.	Rejang Lebong	19.172.040	1.917.204	3.834.408	2.492.365	6.854.004	27.416.017
3.	Bengkulu Utara	20.611.920	2.061.192	4.122.384	2.679.550	7.368.761	29.475.046
4.	Kaur	8.918.220	891.822	1.783.644	1.159.369	3.188.264	12.753.055
5.	Seluma	18.038.880	1.803.888	3.607.776	2.345.054	6.448.899	25.795.598
6.	Muko Muko	14.854.800	1.485.480	2.970.960	1.931.240	5.310.620	21.242.480
7.	Lebong	11.447.400	1.144.740	1.289.480	1.488.162	4.092.445	16.369.782
8.	Kepahiang	12.611.280	1.261.128	2.522.256	1.261.128	4.508.532	18.034.130
9.	Bengkulu Tengah	12.662.040	1.266.204	2.532.408	1.646.065	4.526.679	18.106.717
10	Kotas Bengkulu	34.331.460	3.433.146	6.866.292	4.463.090	12.273.497	49.093.988
	Jumlah	165.545.100	16.554.474	32.109.048	21.142.594	59.182.271	236.729.094

Sumber: Analisis Kebutuhan Tahun 2032

2.7.1.6 Rencana Pengembangan Daerah Irigasi

Rencana pengembangan jaringan irigasi dimaksudkan untuk mendukung pengembangan kegiatan pertanian (khususnya pertanian lahan basah) pada pusat kegiatan yang direncanakan sebagai Pusat Kegiatan Pertanian sesuai arahan struktur ruang yang diharapkan. Rencana pengembangan prasarana pengairan/irigasi, selain pemeliharaan prasarana yang sudah ada ditujukan pula untuk meningkatkan kapasitas yang sudah ada, sehingga dapat mengairi area yang lebih luas.

Sumber air irigasi tersebut adalah sungai-sungai yang mengalir di wilayah Provinsi Bengkulu, dengan pembuatan dam dan saluran induk irigasi yang diutamakan untuk mengairi areal pertanian potensial yaitu antara lain adalah wilayah Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur.

Pengembangan jaringan irigasi dapat dilakukan secara terpadu dengan program penyediaan air dan wewenang pengelolaan jaringan irigasi tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jaringan irigasi pada D.I. Kewenangan Pusat meliputi:

1. D.I. Air Nipis Seginim di Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. D.I. Air Lais Kuro Tidur di Kabupaten. Bengkulu Utara;
3. D.I. Air Ketahun di Kabupaten Lebong;
4. D.I. Air Manjuntio di Kabupaten Muko Muko;
5. D.I. Air Alas di Kabupaten Seluma; dan
6. D.I. Air Seluma di Kabupaten Seluma.

Jaringan irigasi pada D.I. Kewenangan Provinsi di Kabupaten/kota meliputi:

1. jaringan irigasi pada D.I. di Kabupaten Bengkulu Utara terdiri dari:
 - a) DI. Air Nokan Batu Roto;
 - b) DI. Air Nokan Rama Agung;
 - c) DI. Air Palik Aur Gading; dan
 - d) DI. Air Telatang Besar.
2. jaringan irigasi pada D.I. kewenangan provinsi di Kabupaten Lebong meliputi DI. Air Santan.
3. jaringan irigasi pada D.I. kewenangan provinsi di Kabupaten Rejang Lebong meliputi:
 - a) DI. Air Musi Kejalo; dan
 - b) DI. Air Daup.
4. jaringan irigasi pada D.I. kewenangan provinsi di Kabupaten Kepahiang meliputi DI. Air Daup.
5. Jaringan irigasi pada D.I. kewenangan provinsi di Kabupaten Bengkulu Tengah meliputi DI. Rawa Air Hitam.
6. jaringan irigasi pada D.I. kewenangan provinsi di Kabupaten Seluma meliputi:
 - a) DI. Air Riak Siabun;
 - b) DI. Rawa Peninjauan; dan
 - c) DI. Rawa Penago.

7. jaringan irigasi pada D.I. kewenangan provinsi di Kabupaten Bengkulu Selatan meliputi DI. Air Selebang Kedurang; dan
8. Jaringan irigasi pada D.I. kewenangan provinsi di Kabupaten Kaur meliputi DI. Air Kule

Pengembangan prasarana irigasi, baik berupa perluasan prasarana yang ada maupun pengembangan prasarana baru pada kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

- a. Kabupaten Muko Muko, dengan memanfaatkan sumber-sumber:
 - 1) Air Manjunt, di Kecamatan Muko Muko Utara;
 - 2) Air Selagan dan Air Dikit, di Kecamatan Teras Terunjam dan di bagian hilir di Kecamatan Muko Muko Utara;
 - 3) Air Bantal dan Air Teramang, di Kecamatan Pondok Suguh;
 - 4) Air Ipuh dan Air Retak, di Kecamatan Muko Muko Selatan.
- b. Kabupaten Bengkulu Utara, dengan memanfaatkan sumber-sumber :
 - 1) Air Seblat, di Kecamatan Putri Hijau;
 - 2) Air Ketahun dan anak sungainya, di Kecamatan Ketahun dan Napal Putih;
 - 3) Air Bintunan, di Kecamatan Batik Nau dan Girimulya;
 - 4) Air Padang dan Air Lais, di Kecamatan Lais, Kota Argamakmur, dan Kecamatan Padang Jaya;
 - 5) Air Palik, di Kecamatan Kerkap, Air Napal di Kecamatan Bang Haji ;
 - 6) Air Lemau, di Kecamatan Pondok Kelapa, Pematang Tiga dan Pagar Jati;
 - 7) Air Bengkulu dan anak sungainya, di Kecamatan Talang Empat, Karang Tinggi, dan Taba Penanjung.
- c. Kabupaten Seluma dengan jaringan irigasi meliputi: D.I. Air Alas di Kabupaten Seluma; dan D.I. Air Seluma di Kabupaten Seluma
- d. Kabupaten Lebong, dengan memanfaatkan sumber Air Ketahun dan anak sungainya, untuk pengairan di Kecamatan Lebong Utara, Lebong Tengah, dan Lebong Selatan.
- e. Kabupaten Rejang Lebong, dengan memanfaatkan sumber-sumber
 - 1) Air Musi, dan anak sungainya, untuk Kecamatan Curup dan Bermani Ulu;
 - 2) Air Kelingi, Air Kati, Air Beliti dan anak sungainya untuk Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kotapadang, dan Sindang Kelingi.
- f. Kabupaten Kepahiang, dengan memanfaatkan sumber Air Musi dan anak sungainya, terutama di Kecamatan Ujan Mas, dan dapat dikembangkan selanjutnya di Kecamatan Bermani Ilir, Tebat Karai dan Kepahiang.

- g. Wilayah Sungai Bengkulu – Alas – Talo di Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Utara yang terdiri atas DAS Bengkulu; DAS Jenggalu; DAS Nelas; DAS Kungkai; DAS Seluma; DAS Penago; DAS Talo; DAS Alas; dan DAS Maras.
- h. Wilayah Sungai seblat- Ketahun- Lais di Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong terdiri dari DAS TIK; DAS Sabai; DAS Macang; DAS Senaba; DAS Seblat; DAS Muring; DAS Kerkap; DAS Layang; DAS Karang Pulau; DAS Ketahun; DAS Urai; DAS Serangai; DAS Bintunan; DAS Padang; DAS Lais; DAS Napal; DAS Palik; DAS Pinang; dan DAS Mumpo
- i. Wilayah Sungai Enggano di Kabupaten Bengkulu Utara terdiri atas DAS Mae; DAS Tanjung Kooma; DAS Tanjung Lakoaha; DAS Mahame; DAS Kokodo; DAS Malakoni; DAS Belowa; DAS Kijah; DAS Taobi; dan DAS Dua.
- j. Cekungan air tanah Bengkulu di Kota Bengkulu
- k. Prasarana sumber daya air terdiri atas:
 - 1) Bendung dan jaringan irigasi di Kabupaten Bengkulu Utara meliputi:
 - a) DI. Air Lais Kuro Tidur
 - b) DI. Air Nokan Batu Roto
 - c) DI. Air Nokan Rama Agung
 - d) DI. Air Palik Aur Gading
 - e) DI. Air Telatang Besar.
 - 2) Bendung dan jaringan irigasi di Kabupaten Lebong meliputi:
 - a) DI. Air Ketahun
 - b) DI. Air Santan.
 - 3) Bendung dan jaringan irigasi di Kabupaten Rejang Lebong meliputi:
 - a) DI. Air Musi Kejalo
 - b) DI. Air Daup.
 - 4) Bendung dan jaringan irigasi di Kabupaten Kepahiang meliputi DI. Air Daup.
 - 5) Bendung dan jaringan irigasi di Kabupaten Bengkulu Tengah meliputi DI. Rawa Air Hitam.
 - 6) Bendung dan jaringan irigasi di Kabupaten Seluma meliputi:
 - a) DI. Air Alas
 - b) DI. Air Seluma
 - c) DI. Air Riak Siabun
 - d) DI. Rawa Peninjauan
 - e) DI. Rawa Penago.
 - 7) Bendung dan jaringan irigasi di Kabupaten Bengkulu Selatan meliputi:

- a) DI. Air Nipis Seginim; dan
- b) DI. Air Selebang Kedurang
- 8) Bendung dan jaringan irigasi di Kabupaten Kaur meliputi:
 - a) DI. Air Kule; dan
 - b) DI. Cawang Kidau.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas kondisi sungai perlu dikendalikan kondisi penutupan lahan di daerah hulu serta dilakukan pengendalian pemanfaatan DAS-nya. Untuk lahan yang beririgasi teknis harus dipertahankan agar tidak berubah fungsi menjadi peruntukan yang lain dan jika areal tersebut terpaksa harus berubah fungsi maka disediakan lahan areal baru yang menggantikannya dengan luasan minimal sama agar prasarana dan sarana irigasi yang ada tetap berfungsi dengan baik.

Sungai-sungai di Bengkulu yang cenderung berbentuk dentritik dengan pengaliran yang mengarah ke satu titik maka bentuk semacam ini memungkinkan waktu kedatangan banjir (time of arrival) terjadi bersamaan yang akan berakibat banjir pada daerah hilirnya.

Provinsi Bengkulu merupakan kawasan yang rawan terhadap bahaya banjir, sehingga perlu dilakukan pembangunan dan/atau pengembangan prasarana pengendalian banjir dan pengamanan pantai yaitu di Kabupaten Muko Muko pada dataran aluvial hilir Air Manjuto, Air Selagan, Air Teramang dan Air bantal; dan untuk Kabupaten Bengkulu Utara pada hilir Air Ketahun; untuk di Kota Bengkulu yaitu di hilir air Bengkulu dan Air Kungkai; kemudian untuk Kabupaten Bengkulu Selatan pada hilir Air Manna dan Air Padang Guci. Selain itu, kawasan lainnya yang rawan banjir adalah hulu air Ketahun di Kabupaten Lebong selain merupakan kawasan rawan banjir juga rawan erosi tebing sungai. Kawasan yang rawan terhadap bahaya banjir ini disebabkan luas DAS sungai bersangkutan luas, kondisi daerah hulu berbukit sampai bergunung sehingga apabila terjadi hujan air langsung dialirkan dan bentuk wilayah hilirnya datar. Meskipun demikian ditinjau dari intensitas dan lamanya genangan berlangsung, masih layak untuk pengembangan kawasan budidaya, terutama untuk pertanian.

2.7.1.7 Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Dalam rangka mengantisipasi kebutuhan air minum, pengendalian air hujan, dan air limbah diperlukan sistem prasarana pengelolaan regional untuk PKN Bengkulu yang pada akhir tahun perencanaan akan menjadi kawasan perkotaan besar yang di sekelilingnya terdapat kota baru atau kota satelit pada wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Seluma.

Oleh karena itu direncanakan pembangunan infrastruktur sebagai berikut:

a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

1. Pembangunan infrastruktur sistem penyediaan air minum regional (SPAM regional) dengan sebutan SPAM Benteng-Kobema (Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, dan Seluma) yang terletak di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah dikarenakan sumber air terdekat yang dapat dialirkan memakai tekanan gaya gravitasi berada di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah yaitu :
 - a. IPAM Utama di Kecamatan Karang Tinggi
 - b. IPAM I di Desa Arga Indah 2
 - c. IPAM II di Kecamatan Merigi Sakti
 - d. Air Rindu Hati di Desa Rindu Hati merupakan salah satu alternatif sumber air baku pada ketinggian lebih dari 90 meter dpl.

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di beberapa kabupaten meliputi:

- a. SPAM Desa Benuang Galing Kabupaten Kepahiang
- b. SPAM Desa Embung Ijuk Kabupaten Kepahiang
- c. SPAM Desa Pasar Baru Kabupaten Kaur
- d. SPAM IKK Bengkulu Kota Bengkulu
- e. SPAM IKK Kabupaten Bengkulu Utara
- f. SPAM IKK Kabupaten Seluma
- g. SPAM IKK Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara
- h. SPAM IKK Kerkau Kabupaten Bengkulu Utara
- i. SPAM IKK Lebong Atas Kabupaten Lebong
- j. SPAM IKK Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara
- k. SPAM IKK Rimbo Penghadang Kabupaten Lebong
- l. SPAM IKK Selagan Kabupaten Muko Muko
- m. SPAM IKK Sindang Beliti Kabupaten Rejang Lebong
- n. SPAM IKK Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong
- o. SPAM IKK Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Utara
- p. SPAM IKK Uram Jaya Kabupaten Lebong
- q. SPAM Kawasan Kabupate Kaur
- r. SPAM Kawasan Kota Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara
2. Pembangunan infrastruktur sistem penyediaan air minum (SPAM) lain tersebar di seluruh kabupaten dan kota.

b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)

1. Pembangunan instalasi pengolahan air limbah regional di tersebar seluruh kabupaten/kota.

2. Pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) kawasan perkotaan di seluruh kabupaten dan kota.

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sistem komunal di kawasan perkotaan dalam wilayah Provinsi Bengkulu diarahkan tersebar di seluruh kabupaten / kota sesuai kebutuhan setempat

Rencana Pengembangan IPAL hanya dilakukan di Kawasan Perkotaan. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sistem terpusat tidak bisa dibuat secara sembarangan karena sangat tergantung pada ketinggian tanah suatu area yang masih perlu disurvei dan dikaji lebih lanjut. Sedangkan untuk IPAL sistem komunal dapat dibangun tersebar di kawasan perkotaan sebagaimana telah dilakukan di Kota Bengkulu. IPAL untuk kawasan perkotaan kabupaten, diatur secara lebih rinci dalam masing- masing rencana tata ruang wilayah kabupaten.

- c. Sistem pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3)

Tempat pengolahan dan/atau pengolahan limbah industri Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) diarahkan pada masing-masing rencana tata ruang wilayah kabupaten /kota.

- d. Sistem jaringan persampahan wilayah

Rencana sistem prasarana lingkungan ini, terutama digunakan untuk mengarahkan perencanaan sistem prasarana lingkungan yang bersifat antar wilayah melalui berbagai mekanisme kerjasama. Pengembangan sistem prasarana lingkungan ini adalah sebagai upaya bersama dalam menghadapi dampak lingkungan. Oleh sebab itu, maka perlu dikembangkan lokasi yang digunakan bersama antar kabupaten dengan sistem pengelolaan prasarana lingkungan yang berwawasan lingkungan.

Sistem pembuangan sampah yang ada di ibukota-ibukota kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu sebagian besar masih dikelola secara tradisional dibakar di halaman dan belum dikelola dengan cara didaur ulang (recycle) atau digunakan kembali (reuse). Wilayah yang sudah memiliki Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) adalah Kota Bengkulu dengan luas 7 Ha yang terletak di Kelurahan Sukarami Air Sebakul, Kecamatan Selebar. Namun seluas 3 Ha dari 7 Ha tersebut dengan pengelolaan open dumping sudah mengalami over kapasitas sehingga pembuangan sampah dialihkan ke area yang 4 Ha sebelahnya yang mampu menampung 440.000 m³ sampah. Kawasan lainnya yang mulai mengembangkan sistem pengelolaan sampah secara composting regional adalah Rejang Lebong, Kepahiang dan Lebong serta kabupaten lainnya. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah dapat

direncanakan dikelola secara terpadu dengan memanfaatkan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kelurahan Sukarami Air Sebakul, Kecamatan Selebar itu juga seluas 4 Ha tersebut dengan mengubah sistem pemrosesan akhir yaitu dengan sistem sanitary land fill.

Pengelolaan sampah di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah penutupan seluruh TPA Open Dumping menjadi Sanitary Landfill pada tahun 2013. Akan tetapi, hingga waktu ini sebagian besar sistem pengelolaan sampah di Indonesia masih bertumpu kepada pendekatan akhir (end of pipe), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Open dumping merupakan masalah serius untuk kesehatan masyarakat dan lingkungan dikarenakan terjadinya pelepasan material berbahaya seperti leachate, toxic gas, bau asap dari terbakarnya sampah, vektor penyakit, sebaran sampah, dan pengaruh gas rumah kaca.

Rencana pengelolaan sampah di Provinsi Bengkulu diarahakan untuk menerapkan konsep pengelolaan sampah dengan 3R yaitu reduce, reuse, recycle atau “mengurangi, menggunakan ulang, dan daur ulang. Dengan 88 omest pengelolaan sampah yang mengutamakan konsep 3R, pemerintah setempat mendapat keuntungan ganda, yaitu pembukaan lapangan pekerjaan, pertambahan nilai ekonomis dari daur ulang, dan volume sampah yang dikirim ke TPA hanya 30% dari kondisi pengelolaan tanpa konsep 3R. Pengelolaan sampah dan TPA harus dilakukan dengan sistem Sanitary Landfill sesuai dengan ketentuan dan peraturan pemerintah yang berlaku.

Mengingat kondisi fisik Provinsi Bengkulu yang berbukit dan bergelombang, maka penyiapan TPA secara bersama-sama akan lebih sesuai dan menghemat biaya untuk daerah yang berdekatan. Kerjasama regional tersebut bisa dilakukan antara Kabupaten-Kabupaten/kota yang terletak berdekatan yaitu Kabupaten Seluma, Kota Bengkulu dengan Kabupaten Bengkulu Tengah. Demikian juga dengan Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang, dan Kabupaten Lebong. Sistem jaringan persampahan wilayah di Provinsi Bengkulu meliputi sistem jaringan persampahan wilayah berupa tempat pemrosesan akhir (TPA) regional yaitu:

- a. TPA regional lintas Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Tengah di Kabupaten Bengkulu Tengah; dan
- b. TPA regional lintas Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong di Kabupaten Kepahiang

Prakiraan Produksi Sampah

Volume sampah yang dihasilkan di Provinsi Bengkulu berasal dari kegiatan rumah tangga (*domestic*), dari kegiatan fasilitas umum, perkantoran, pasar, pertokoan, dan kegiatan lainnya (*non domestic*). Sebagai standard pembanding, dalam satu hari, Kota Bengkulu tahun 2017 diperkirakan menghasilkan sekitar 984 meter kubik sampah dari sekitar 364.604 Jiwa penduduk Kota Bengkulu, dengan standard setara dengan 2700 cc atau 2,7 l/o/h (liter per orang perhari) bagi kota sedang. Dengan demikian, prakiraan produksi sampah di Provinsi Bengkulu pada tahun 2032 adalah 7.099 M³ per hari.

Kebutuhan sarana pengelolaan sampah dapat dihitung berdasarkan standard kapasitas pelayanan yang tercantum dalam SNI 3242 Tahun 2008 sebagai berikut:

- a. Satu unit Transfer Depo melayani: 20.000p
- b. Satu unit Truk Sampah melayani : 15.000p
- c. Satu Kontainer melayani : 4.000p
- d. Satu Gerobak Sampah melayani : 500p

Prakiraan produksi sampah dan kebutuhan fasilitas pengangkutan sampah pada tahun 2032 berdasarkan hasil perhitungan dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut:

Tabel 2. 165Produksi Sampah dan Kebutuhan Fasilitas Pengangkutan Sampah di Provinsi Bengkulu Tahun 2032

No	Kabupaten	Jumlah Penduduk Thn 2032	Produksi Sampah (l/h)	Transfer Depo	Truk Sampah	Kontainer	Gerobak Sampah
1	Bengkulu Selatan	214.945	537.362	11	14	54	430
2	Rejang Lebong	319.534	798.835	16	21	80	639
3	Bengkulu Utara	343.532	858.830	17	23	86	687
4	Kaur	148.637	371.592	7	10	37	297
5	Seluma	300.648	751.620	15	20	75	601
6	Muko Muko	247.580	618.950	12	16	62	495
7	Lebong	190.790	476.975	9	13	48	382
8	Kepahiang	210.155	525.387	11	14	52	420
9	Bengkulu tengah	211.034	527.585	11	14	53	422
10	Kota Bengkulu	572.191	1.544.916	29	38	143	1.144
	Jumlah	2.759.046	6.201.585	138	183	690	5.427



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Penyelenggaraan pembangunan Provinsi Bengkulu dalam kurun waktu dua puluh tahun terakhir telah membuahkan hasil yang diharapkan, tetapi untuk pembangunan kedepan masih terdapat permasalahan dan tantangan dari berbagai dimensi pembangunan. Berbagai permasalahan yang dihadapi Provinsi Bengkulu dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal yang terjadi sebagai dampak interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor baik pada skala lokal kabupaten/kota, provinsi maupun nasional. Permasalahan–permasalahan tersebut timbul karena kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, adanya kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Berdasarkan hasil evaluasi gambaran umum kondisi di Provinsi Bengkulu sebagaimana telah disajikan pada BAB II, terdapat berbagai bidang pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

3.1.1. Permbangunan Manusia yang Belum Optimal

Di Provinsi Bengkulu, sektor pendidikan menghadapi beberapa permasalahan yang menghambat perkembangan pembangunan manusia. Rata-rata lama sekolah pada tahun 2022 baru mencapai 8,91 tahun, mencerminkan tingkat pendidikan yang masih rendah. Partisipasi sekolah di tingkat pendidikan menengah juga belum optimal, ditunjukkan oleh Angka Partisipasi Murni (APM) SLTA sebesar 66,08% dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 16-18 tahun sebesar 79,75%. Akreditasi sekolah juga menjadi perhatian, dengan sejumlah sekolah SMA (4,5%) dan SMK (8,5%) yang belum terakreditasi atau memiliki akreditasi rendah pada tahun 2022. Guru yang belum bersertifikasi juga menjadi permasalahan, mencapai 49,5% guru SMA dan 55,68% guru SMK pada tahun 2022. Selain itu, kesesuaian lulusan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha masih belum optimal.

Di sektor kesehatan, Provinsi Bengkulu juga menghadapi sejumlah tantangan dalam pembangunan manusia. Angka Harapan Hidup Provinsi Bengkulu yang mencapai 69,69 tahun pada tahun 2022 masih di bawah rata-rata nasional, menunjukkan adanya permasalahan

kesehatan masyarakat. Angka kematian bayi yang tinggi, mencapai 9,1 per 1000 kelahiran hidup, dan angka kematian ibu sebesar 95 per 100.000 dari proses kehamilan, persalinan, dan paska persalinan pada tahun 2022, menjadi fokus utama dalam upaya peningkatan kesehatan maternal dan bayi. Stunting pada balita mencapai 19,8% pada tahun 2022, menandakan adanya permasalahan gizi dan kesehatan pada tahap perkembangan awal. Selain itu, masih ada sejumlah Puskesmas dengan status Akreditasi Dasar (70 dari 179 puskesmas pada tahun 2022), menunjukkan bahwa sebagian besar puskesmas belum mencapai standar optimal dalam pelayanan kesehatan. Elaborasi ini memberikan gambaran menyeluruh tentang permasalahan dalam sektor pendidikan dan kesehatan yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Provinsi Bengkulu.

Analisis terhadap narasi tersebut menggambarkan kondisi aktual sektor pendidikan dan kesehatan di Provinsi Bengkulu pada tahun 2022. Namun, untuk memahami lebih dalam, perlu dibandingkan dengan kondisi serupa di tingkat nasional.

Sektor pendidikan Provinsi Bengkulu menunjukkan beberapa tantangan yang meliputi rendahnya rata-rata lama sekolah, partisipasi sekolah yang belum optimal, akreditasi sekolah yang masih perlu ditingkatkan, serta rendahnya persentase guru bersertifikasi. Secara nasional, kondisi serupa juga terjadi di beberapa daerah, terutama di daerah-daerah yang memiliki tingkat perkembangan manusia yang lebih rendah. Meskipun demikian, implementasi kebijakan nasional seperti program sertifikasi guru dan upaya peningkatan mutu pendidikan dapat memberikan dampak positif secara bertahap.

Di sektor kesehatan, Provinsi Bengkulu menghadapi tantangan terkait angka harapan hidup yang masih di bawah rata-rata nasional, angka kematian bayi dan ibu yang tinggi, serta prevalensi stunting yang signifikan. Meskipun beberapa permasalahan tersebut juga terjadi di tingkat nasional, tingkat keparahan dan fokus masalah mungkin bervariasi antar daerah. Hal ini bisa dipengaruhi oleh aspek demografis, aksesibilitas layanan kesehatan, serta perbedaan dalam implementasi kebijakan kesehatan daerah.

Perbandingan ini menyoroti pentingnya pemahaman konteks regional dalam merumuskan kebijakan pembangunan manusia yang efektif. Meskipun terdapat tantangan bersama di tingkat nasional, upaya yang disesuaikan dengan karakteristik setiap daerah menjadi kunci dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia secara keseluruhan.

Masalah literasi di Provinsi Bengkulu masih tergolong rendah dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan beberapa indikator, seperti:

- **Nilai skor PISA (Programme for International Student Assessment)** yang rendah. Pada tahun 2018, skor PISA untuk literasi membaca di Bengkulu hanya 397, jauh di bawah rata-rata nasional 415 dan rata-rata negara OECD 482.

- **Minat baca masyarakat yang masih rendah.** Hal ini terlihat dari masih sedikitnya masyarakat yang mengunjungi perpustakaan dan belum menjadikannya sebagai kebiasaan sehari-hari.
- **Kurangnya infrastruktur penunjang literasi.** Jumlah perpustakaan di Bengkulu masih sedikit dan belum merata di seluruh wilayah. Selain itu, koleksi buku di perpustakaan juga masih terbatas, terutama buku-buku berkualitas.
- **Kualitas guru dan tenaga kependidikan yang masih perlu ditingkatkan.** Banyak guru yang belum memiliki kompetensi yang memadai dalam menumbuhkan minat baca dan literasi siswa.
- **Kurangnya peran serta pemangku kepentingan.** Peran serta pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam meningkatkan literasi masih belum optimal.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan permasalahan literasi di Provinsi Bengkulu, antara lain:

- **Kesenjangan ekonomi.** Masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah umumnya memiliki akses yang terbatas terhadap buku dan bahan bacaan lainnya.
- **Kurangnya akses internet.** Hal ini membuat masyarakat sulit untuk mendapatkan informasi dan bahan bacaan digital.
- **Budaya membaca yang belum kuat.** Masyarakat masih lebih banyak menghabiskan waktu menonton televisi atau bermain gadget daripada membaca buku.
- **Kurangnya konten bacaan yang menarik dan berkualitas.** Masih banyak buku dan bahan bacaan yang tidak sesuai dengan minat dan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan literasi di Provinsi Bengkulu, antara lain:

- **Meningkatkan minat baca masyarakat melalui berbagai kegiatan,** seperti Gerakan Literasi Nasional, Festival Literasi, dan Lomba Baca Puisi.
- **Membangun infrastruktur penunjang literasi,** seperti perpustakaan dan taman bacaan.
- **Meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan** melalui pelatihan dan workshop tentang literasi.
- **Meningkatkan peran serta pemangku kepentingan** dalam meningkatkan literasi melalui kerjasama dengan berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat, dan swasta.
- **Menyediakan konten bacaan yang menarik dan berkualitas** melalui penerbitan buku-buku lokal dan kerjasama dengan penerbit nasional.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan literasi di Provinsi Bengkulu, antara lain:

- **Keterbatasan anggaran.** Pemerintah daerah memiliki keterbatasan anggaran untuk membiayai program-program literasi.
- **Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya literasi.** Masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya literasi bagi kehidupan mereka.
- **Perubahan gaya hidup masyarakat.** Masyarakat saat ini lebih banyak menghabiskan waktu menonton televisi atau bermain gadget daripada membaca buku.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan dalam meningkatkan literasi di Provinsi Bengkulu, perlu dilakukan beberapa solusi, antara lain:

- **Meningkatkan alokasi anggaran untuk program-program literasi.**
- **Melakukan sosialisasi tentang pentingnya literasi** kepada masyarakat melalui berbagai media, seperti televisi, radio, dan media sosial.
- **Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak** untuk meningkatkan literasi, seperti pemerintah, masyarakat, dan swasta.
- **Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi** untuk meningkatkan akses terhadap bahan bacaan, seperti melalui e-book dan perpustakaan digital.

Permasalahan literasi di Provinsi Bengkulu masih perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak. Dengan berbagai upaya dan kerjasama dari semua pihak, diharapkan literasi di Provinsi Bengkulu dapat terus ditingkatkan sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Numerasi merupakan salah satu kemampuan dasar yang penting bagi setiap individu untuk dapat menyelesaikan masalah sehari-hari dan menjalani kehidupan yang produktif. Namun, permasalahan numerasi di Provinsi Bengkulu masih tergolong rendah dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan beberapa indikator, seperti:

- **Nilai skor PISA (Programme for International Student Assessment)** yang rendah. Pada tahun 2018, skor PISA untuk numerasi di Bengkulu hanya 369, jauh di bawah rata-rata nasional 393 dan rata-rata negara OECD 489.
- **Kemampuan numerasi siswa yang masih rendah.** Hal ini terlihat dari masih banyaknya siswa yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal matematika, baik di sekolah dasar maupun sekolah menengah.

- **Kurangnya minat siswa terhadap matematika.** Matematika seringkali dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit dan membosankan oleh siswa, sehingga mereka kurang tertarik untuk mempelajarinya.
- **Kualitas guru matematika yang masih perlu ditingkatkan.** Banyak guru matematika yang belum memiliki kompetensi yang memadai dalam mengajar dan menumbuhkan minat siswa terhadap matematika.
- **Kurangnya media pembelajaran yang menarik dan inovatif.** Masih banyak media pembelajaran matematika yang tradisional dan kurang menarik bagi siswa.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan permasalahan numerasi di Provinsi Bengkulu, antara lain:

- **Kesenjangan ekonomi.** Masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah umumnya memiliki akses yang terbatas terhadap pendidikan yang berkualitas, termasuk pendidikan matematika.
- **Kurangnya akses internet.** Hal ini membuat siswa sulit untuk mendapatkan informasi dan bahan belajar matematika digital.
- **Budaya belajar yang belum kuat.** Masih banyak siswa yang belum memiliki kebiasaan belajar yang baik, termasuk belajar matematika.
- **Kurangnya peran serta orang tua dalam membantu siswa belajar matematika.** Banyak orang tua yang tidak memiliki pengetahuan matematika yang cukup untuk membantu anak-anak mereka belajar.
- **Kualitas kurikulum matematika yang masih perlu ditingkatkan.** Kurikulum matematika saat ini masih dianggap terlalu teoritis dan kurang aplikatif.

Pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan numerasi di Provinsi Bengkulu, antara lain:

- **Meningkatkan minat siswa terhadap matematika melalui berbagai kegiatan,** seperti Olimpiade Matematika, Festival Matematika, dan Lomba Matematika.
- **Membangun infrastruktur penunjang pembelajaran matematika,** seperti laboratorium matematika dan taman matematika.
- **Meningkatkan kualitas guru matematika** melalui pelatihan dan workshop tentang matematika.
- **Meningkatkan peran serta orang tua dalam membantu siswa belajar matematika** melalui sosialisasi dan pelatihan bagi orang tua.
- **Mengembangkan media pembelajaran matematika yang menarik dan inovatif,** seperti buku interaktif, video pembelajaran, dan game edukasi.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan numerasi di Provinsi Bengkulu, antara lain:

- **Keterbatasan anggaran.** Pemerintah daerah memiliki keterbatasan anggaran untuk membiayai program-program numerasi.
- **Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya numerasi.** Masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya numerasi bagi kehidupan mereka.
- **Perubahan gaya hidup siswa.** Siswa saat ini lebih banyak menghabiskan waktu bermain gadget daripada belajar matematika.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan dalam meningkatkan numerasi di Provinsi Bengkulu, perlu dilakukan beberapa solusi, antara lain:

- **Meningkatkan alokasi anggaran untuk program-program numerasi.**
- **Melakukan sosialisasi tentang pentingnya numerasi** kepada masyarakat melalui berbagai media, seperti televisi, radio, dan media sosial.
- **Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak** untuk meningkatkan numerasi, seperti pemerintah, masyarakat, dan swasta.
- **Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi** untuk meningkatkan akses terhadap bahan belajar matematika, seperti melalui e-book dan video pembelajaran.

Permasalahan numerasi di Provinsi Bengkulu masih perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak. Dengan berbagai upaya dan kerjasama dari semua pihak, diharapkan numerasi di Provinsi Bengkulu dapat terus ditingkatkan sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

a. Standar Kompetensi Minumum pada Asesmen Tingkat Nasional

Di provinsi Bengkulu, terdapat sebuah tantangan yang signifikan dalam mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional di satuan pendidikan. Meskipun ada berbagai upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah tersebut, namun tingkat pencapaian masih belum memuaskan.

Salah satu permasalahan utama adalah rendahnya persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen nasional. Hal ini bisa disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk kurangnya sumber daya, fasilitas yang terbatas, kurangnya pelatihan bagi guru, serta tantangan dalam mengakses pendidikan bagi masyarakat di daerah pedesaan.

Kurangnya infrastruktur pendidikan yang memadai juga dapat menjadi kendala serius. Beberapa sekolah mungkin tidak dilengkapi dengan fasilitas yang

memadai, seperti perpustakaan yang lengkap, laboratorium, atau bahkan ruang kelas yang layak. Kondisi ini dapat menghambat proses pembelajaran yang efektif. Selain itu, kurangnya pelatihan bagi guru juga dapat menjadi faktor penghambat. Guru yang tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan yang memadai untuk mengajar dapat memengaruhi kualitas pendidikan secara keseluruhan. Pelatihan yang terus-menerus dan peningkatan profesionalisme guru menjadi kunci dalam meningkatkan standar pendidikan.

Selanjutnya, akses terhadap pendidikan juga menjadi masalah, terutama bagi masyarakat di daerah pedesaan atau terpencil. Jarak yang jauh, transportasi yang terbatas, dan kurangnya infrastruktur pendukung dapat membuat sulit bagi anak-anak untuk mengakses pendidikan dengan baik.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya yang terkoordinasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat secara keseluruhan. Investasi dalam infrastruktur pendidikan, pelatihan bagi guru, program untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan, serta dukungan dari berbagai pihak dapat membantu meningkatkan persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum di provinsi Bengkulu.

Permasalahan Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi di Provinsi Bengkulu

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu tahun 2023, proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi Pendidikan Tinggi di Provinsi Bengkulu hanya **7,46%**. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional yang mencapai **15,59%**.

Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak penduduk di Provinsi Bengkulu yang belum memiliki akses pendidikan tinggi yang memadai.

Dampak Permasalahan ini antara lain mencakup:

- **Tingginya angka pengangguran:** Kurangnya kualifikasi pendidikan tinggi dapat meningkatkan risiko pengangguran, terutama bagi usia muda.
- **Rendahnya pendapatan:** Pekerja dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah umumnya memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan pekerja yang memiliki pendidikan tinggi.
- **Keterampilan yang tidak memadai:** Kurangnya keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja dapat menghambat perkembangan ekonomi daerah.
- **Kesenjangan sosial:** Kesenjangan antara penduduk yang berpendidikan tinggi dan rendah dapat memperparah kesenjangan sosial di masyarakat.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi:

- **Keterbatasan akses pendidikan:** Akses terhadap pendidikan tinggi di Provinsi Bengkulu masih terbatas, terutama di daerah pedesaan.

- **Keterbatasan biaya pendidikan:** Biaya pendidikan tinggi yang tinggi menjadi kendala bagi banyak keluarga di Bengkulu untuk menyekolahkan anak-anak mereka ke jenjang pendidikan tinggi.
- **Kurangnya motivasi:** Masih rendahnya motivasi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- **Kualitas pendidikan:** Kualitas pendidikan di sekolah-sekolah di Bengkulu masih perlu ditingkatkan untuk mempersiapkan siswa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

b. **Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi**

Berdasarkan data Survei Nasional Angkatan Kerja (SAKERNAS) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022, persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi di Indonesia adalah **21,02%**.

Angka ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang belum bekerja di bidang yang sesuai dengan keahlian mereka.

Persentase berdasarkan Jenjang Pendidikan:

- **Diploma:** 27,15%
- **Sarjana:** 20,41%
- **Pascasarjana:** 35,33%

Faktor-faktor yang Mempengaruhi:

- **Ketidakcocokan antara Keahlian dan Kebutuhan Pasar Kerja:** Keahlian yang dipelajari di sekolah atau universitas tidak selalu sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
- **Keterbatasan Lapangan Pekerjaan:** Lapangan pekerjaan yang tersedia untuk pekerja dengan keahlian menengah tinggi masih terbatas.
- **Kurangnya Pengalaman Kerja:** Kurangnya pengalaman kerja yang relevan dapat menyulitkan pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan di bidang keahlian mereka.
- **Gaji yang Rendah:** Gaji yang ditawarkan untuk pekerjaan di bidang keahlian menengah tinggi seringkali lebih rendah dibandingkan dengan pekerjaan di bidang lain.

Dampak Permasalahan:

- **Pengangguran:** Tingginya angka pengangguran di kalangan pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi.
- **Keterhambatan Ekonomi:** Kurangnya tenaga kerja yang kompeten di bidang keahlian menengah tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.
- **Kesenjangan Sosial:** Kesenjangan antara pekerja yang memiliki keahlian menengah

tinggi dan pekerja yang tidak memiliki keahlian menengah tinggi dapat memperparah kesenjangan sosial di masyarakat.

3.1.2. Angka Kemiskinan yang Masih Cukup Tinggi

Secara umum, dalam rentang waktu dari Maret 2014 hingga September 2022, yang merupakan data termutakhir saat dokumen ini disusun, terdapat kecenderungan penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu, baik dari segi jumlah maupun persentase, kecuali pada beberapa titik waktu seperti Maret 2015, Maret 2016, Maret 2020, dan September 2020. Peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin pada Maret 2015 terjadi akibat kenaikan harga barang kebutuhan pokok yang dipicu oleh kenaikan harga bahan bakar minyak. Sementara itu, peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin pada Maret 2020 dan September 2020 terkait dengan dampak pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia.

Pada bulan September 2022, jumlah penduduk miskin di Provinsi Bengkulu mencapai 292,93 ribu orang. Terjadi penurunan sebanyak 4,3 ribu orang jika dibandingkan dengan bulan Maret 2022. Namun, apabila dibandingkan dengan bulan September 2021, terdapat penambahan sekitar 1,14 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada bulan September 2022 mencapai 14,34 persen, mengalami penurunan sebesar 0,28 persen poin dari bulan Maret 2022, dan turun 0,09 persen poin dari bulan September 2021.

Meskipun terjadi penurunan tingkat kemiskinan pada bulan September 2022, penambahan jumlah penduduk miskin jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya menunjukkan adanya tantangan dalam mengatasi dampak ekonomi yang terkait dengan pandemi Covid-19. Perlu adanya upaya lebih lanjut dalam mengimplementasikan kebijakan sosial dan ekonomi guna memperkuat ketahanan masyarakat terhadap tekanan ekonomi yang berkepanjangan.

Kemiskinan memang merupakan permasalahan serius di Provinsi Bengkulu, terutama jika dibandingkan dengan beberapa provinsi lain di Sumatra. Meskipun terdapat upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan, namun fakta tetap menunjukkan bahwa Provinsi Bengkulu masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional maupun regional. Data menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Bengkulu tidak menunjukkan penurunan yang signifikan dari tahun ke tahun. Faktanya, kondisi ekonomi yang stagnan, keterbatasan lapangan kerja, rendahnya kualitas pendidikan dan akses terhadap layanan kesehatan yang terbatas menjadi faktor-faktor utama yang memperburuk masalah kemiskinan di daerah ini.

Dibandingkan dengan beberapa provinsi lain di Sumatra yang telah mengalami perkembangan ekonomi yang signifikan, Bengkulu justru masih tertinggal dan kesenjangan ekonomi semakin melebar. Ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan dan akses terhadap sumber daya menjadi semakin nyata di tengah-tengah masyarakat Bengkulu yang masih terjebak dalam kemiskinan struktural. Angka pengangguran yang tinggi, terutama di kalangan pemuda, serta kurangnya peluang ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, semakin memperburuk kondisi sosial-ekonomi di provinsi ini.

Dengan demikian, kemiskinan bukan hanya merupakan permasalahan di Bengkulu, tetapi juga menjadi hambatan utama dalam upaya pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di daerah ini. Diperlukan upaya nyata dari pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk menghadapi tantangan ini dengan kebijakan yang lebih progresif dan program-program yang lebih terarah untuk mengatasi akar penyebab kemiskinan dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh warga Bengkulu untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka.

3.1.3. Pertumbuhan Ekonomi Cenderung Stagnan

Provinsi Bengkulu menghadapi sejumlah permasalahan ekonomi yang kompleks, ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang selalu berada di bawah rata-rata nasional sejak tahun 2017. Keadaan ini mencerminkan rendahnya daya saing ekonomi provinsi. Pada tahun 2020-2022, dampak pandemi COVID-19 secara signifikan mempengaruhi ekonomi Bengkulu, menyebabkan kontraksi pertumbuhan ekonomi mencapai minus 0,02% pada tahun 2020. Meskipun terjadi rebound pada tahun 2022 dengan pertumbuhan sebesar 4,31%, angka ini masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,31%.

Fluktuasi pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya dan kondisi kontraksi pada Triwulan I-2023 menunjukkan ketidakstabilan dan risiko ekonomi yang dihadapi oleh Provinsi Bengkulu. Faktor-faktor eksternal seperti krisis, ketidakpastian ekonomi global, dan pandemi COVID-19 turut memainkan peran dalam fluktuasi tersebut. Meskipun PDRB Provinsi Bengkulu mencapai Rp 23,02 triliun pada Triwulan I-2023, kontraksi pertumbuhan sebesar minus 2,38% (q-to-q) mengindikasikan tekanan ekonomi pada periode tersebut.

Keterbatasan daya saing menjadi jelas ketika pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu pada tahun 2022 masih lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,31%. Ini mengisyaratkan ketidakmampuan Provinsi Bengkulu untuk mengejar pertumbuhan nasional. Indeks ketahanan dan pemulihan yang mencapai skor 62,1, meskipun lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Sumatera yang berkisar antara 50-60 (Bloomberg Resilience Score, 2022), masih mencerminkan kondisi yang kurang ideal.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu telah mengalami fluktuasi, dipengaruhi oleh kondisi eksternal seperti krisis, ketidakpastian ekonomi global, dan pandemi COVID-19. Kontraksi ekonomi pada Triwulan I-2023, sekalipun sementara, menambah beban ketidakpastian ekonomi daerah ini. Provinsi Bengkulu perlu merancang strategi kebijakan yang lebih adaptif dan inovatif untuk menghadapi tantangan ekonomi yang kompleks ini, termasuk upaya untuk meningkatkan daya saing, merespons fluktuasi, dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

3.1.4. Hilirisasi Komoditas Unggulan dan Pengembangan Pariwisata Masih Belum Optimal

Bengkulu memiliki banyak sumber daya alam yang menjadi komoditas unggulan daerah. Sawit, karet, kopi, perikanan merupakan komoditas unggulan yang berpengaruh cukup besar dalam perekonomian Bengkulu. Namun kontribusi komoditas tersebut masih minim dan belum optimal. Hal ini dikarenakan komoditas unggulan daerah belum memiliki nilai tambah yang

baik, sehingga belum memberikan kontribusi yang optimal dalam pertumbuhan ekonomi Bengkulu.

Selain itu, sektor pariwisata juga potensial untuk dikembangkan namun belum dapat dikelola dengan baik. Bengkulu memiliki potensi dan sumberdaya wisata yang belum memberikan manfaat yang optimal. Kontribusi sektor pariwisata terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto relatif kecil. Permasalahan utama yang dihadapi adalah terkait dengan belum tersedianya konsep dan arahan implementatif pembangunan pariwisata Provinsi Bengkulu, sehingga upaya-upaya pembangunan cenderung tidak terintegrasi, diperlukan satu rencana yang komprehensif dan implementatif untuk setiap aksi pembangunan pariwisata dalam jangka waktu tertentu. Disamping itu, permasalahan lain disektor wisata adalah terkait dengan aksesibilitas yang terbatas, terbatasnya pengelolaan dan manajemen atraksi, terbatasnya kualitas SDM pariwisata serta promosi dan pemasaran objek wisata potensial yang belum optimal.

Berdasarkan data tersebut, beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi di Provinsi Bengkulu meliputi:

1. Minim Nilai Tambah Komoditas Unggulan:

- Meskipun sawit, karet, kopi, dan perikanan menjadi komoditas unggulan di Bengkulu, kontribusi mereka terhadap pertumbuhan ekonomi masih minim dan belum optimal.
- Kondisi ini mencerminkan kebutuhan untuk meningkatkan nilai tambah pada komoditas unggulan agar dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan pada perekonomian daerah.

2. Kendala dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata:

- Meski sektor pariwisata di Bengkulu memiliki potensi besar, pengelolaannya belum optimal.
- Kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masih relatif kecil, menunjukkan adanya kendala dalam memanfaatkan potensi wisata secara maksimal.

3. Tidak Tersedianya Konsep dan Arahan Implementatif:

- Permasalahan utama dalam pengembangan pariwisata di Provinsi Bengkulu adalah belum tersedianya konsep dan arahan implementatif pembangunan pariwisata yang jelas.
- Kurangnya panduan menyebabkan upaya-upaya pembangunan pariwisata cenderung tidak terintegrasi, membutuhkan rencana yang komprehensif dan implementatif untuk setiap tindakan pembangunan pariwisata dalam jangka waktu tertentu.

4. Keterbatasan Aksesibilitas:

- Terbatasnya aksesibilitas menjadi hambatan dalam pengembangan sektor pariwisata.
- Upaya untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas ke destinasi wisata di Provinsi Bengkulu perlu menjadi perhatian utama untuk menarik lebih banyak pengunjung.

5. Manajemen dan Pengelolaan Objek Wisata:

- Pengelolaan dan manajemen atraksi pariwisata di Bengkulu masih terbatas, memerlukan upaya untuk meningkatkan pengelolaan dan kualitas destinasi wisata.
- Dibutuhkan investasi dalam pelatihan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor pariwisata.

6. Promosi dan Pemasaran yang Belum Optimal:

- Promosi dan pemasaran objek wisata potensial di Bengkulu masih belum optimal.
- Diperlukan strategi pemasaran yang lebih efektif untuk meningkatkan visibilitas destinasi wisata dan menarik minat wisatawan.

7. Kendala Terkait Kualitas SDM Pariwisata:

- Keterbatasan kualitas SDM pariwisata merupakan permasalahan lain yang perlu diperhatikan.
- Peningkatan kualifikasi dan keterampilan SDM di sektor pariwisata dapat mendukung pengembangan yang berkelanjutan.

Permasalahan-permasalahan ini menunjukkan perlunya upaya terkoordinasi dan strategis dalam pengembangan ekonomi, peningkatan nilai tambah komoditas unggulan, serta optimalisasi sektor pariwisata di Provinsi Bengkulu. Diperlukan perencanaan dan implementasi kebijakan yang terintegrasi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

3.1.5. ASN yang Belum Sepenuhnya Berkualitas dan Profesional

Permasalahan yang mengindikasikan bahwa ASN di Provinsi Bengkulu belum sepenuhnya berkualitas dan profesional dapat dilihat dari dua aspek krusial, yaitu Kepegawaian dan Pendidikan/Pelatihan.

Dalam urusan Kepegawaian, terdapat sejumlah permasalahan yang meliputi:

1. Pelaksanaan reformasi birokrasi terhambat oleh kendala dalam peraturan perundang-undangan, khususnya terkait pengadaan CPNS yang terkonsentrasi oleh pemerintah pusat, menyebabkan kekurangan pegawai, terutama dalam bidang teknis seperti guru.
2. Parameter manajemen kepegawaian masih memerlukan peningkatan, memerlukan program-program khusus untuk mendukung reformasi birokrasi dan pencapaian amanat undang-undang.
3. Belum terdapat perencanaan manajemen kepegawaian yang berbasis pada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, dan kurangnya kesesuaian antara kompetensi pegawai dengan Standar Kompetensi Jabatan sebagai jaminan profesionalisme ASN.
4. Sistem seleksi terbuka bagi jabatan struktural belum berjalan optimal.
5. Sistem informasi manajemen kepegawaian masih belum optimal.

Dalam urusan Pendidikan dan Pelatihan, permasalahan yang teridentifikasi melibatkan:

1. Belum semua PNS memiliki kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan sebagai Jaminan Profesionalisme PNS.
2. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan belum efektif dalam mencetak ASN yang berkualitas.

3. Beasiswa pendidikan dan tugas belajar belum optimal, khususnya dalam mengakomodasi kebutuhan daerah.

Dari dua aspek tersebut, terlihat bahwa Provinsi Bengkulu masih menghadapi sejumlah tantangan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme ASN, baik dalam pengelolaan kepegawaian maupun pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Langkah-langkah strategis perlu diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut demi mencapai standar ASN yang berkualitas dan profesional.

3.1.6. Pelayanan Publik Belum Optimal

Permasalahan pokok terkait ketidakefektifan pelayanan publik di Provinsi Bengkulu melibatkan beberapa aspek yang memerlukan perhatian serius. Pertama-tama, dalam hal infrastruktur pelayanan publik, evaluasi mendalam perlu dilakukan terhadap ketersediaan kantor pemerintahan dan pusat layanan masyarakat. Beberapa daerah mungkin mengalami kekurangan kantor pelayanan publik, menyebabkan akses yang terbatas bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan yang mereka butuhkan. Infrastruktur komunikasi dan teknologi yang kurang memadai juga dapat menjadi kendala dalam penyediaan pelayanan yang efisien.

Selanjutnya, kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pelayanan publik perlu dievaluasi. Hal ini mencakup peninjauan terhadap pelatihan dan kualifikasi pegawai pelayanan masyarakat serta efisiensi pegawai administrasi. Ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia secara langsung memengaruhi kinerja dan responsifitas pelayanan publik kepada kebutuhan masyarakat.

Aspek teknologi informasi juga menjadi sorotan, dengan perlunya penilaian terhadap integrasi teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sistem teknologi informasi yang tidak optimal dapat menghambat kemampuan pemerintah dalam memberikan layanan yang cepat dan efisien kepada masyarakat. Pemanfaatan aplikasi dan platform digital perlu ditingkatkan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik.

Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga perlu diperkuat. Evaluasi terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan atau umpan balik terhadap pelayanan yang mereka terima dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang sejauh mana pemerintah terlibat dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik menjadi faktor kunci. Tinjauan terhadap sistem pelaporan kinerja, mekanisme pengawasan, dan tindakan korektif yang diterapkan akan membantu memastikan bahwa pelayanan publik di Provinsi Bengkulu beroperasi secara transparan dan akuntabel.

Terakhir, koordinasi antar instansi pemerintah perlu ditingkatkan. Kerjasama yang kuat antar berbagai lembaga pemerintah adalah kunci untuk mengatasi hambatan dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik.

Dengan merinci setiap aspek ini, pemerintah Provinsi Bengkulu dapat mengidentifikasi permasalahan yang spesifik dan mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah tersebut.

3.1.7. Belum Kondusifnya Atmosfir Pembangunan

Provinsi Bengkulu menghadapi sejumlah permasalahan yang merintanginya terciptanya atmosfir pembangunan yang kondusif. Keamanan dan ketertiban umum masih menjadi kendala serius, ditandai dengan tingkat kerawanan gangguan keamanan yang relatif tinggi dan tingginya pelanggaran terhadap peraturan daerah. Pelanggaran tersebut mencerminkan lemahnya pencegahan terhadap gangguan keamanan dan penegakan hukum di daerah tersebut.

Di sektor sosial, pembangunan juga menghadapi tantangan besar terutama terkait dengan tingginya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Faktor-faktor seperti ketersediaan pelayanan sosial yang belum optimal dalam menjangkau penerima layanan, rendahnya pendapatan PMKS, dan kurangnya upaya pencegahan dini serta penanggulangan korban bencana alam, semuanya menjadi permasalahan utama. Tingginya Indeks Risiko Bencana pada tahun 2022 juga menjadi indikasi bahwa potensi risiko bencana di Provinsi Bengkulu masih tinggi.

Kondisi tersebut secara keseluruhan menciptakan atmosfir pembangunan yang tidak kondusif di provinsi ini. Tantangan keamanan dan sosial yang dihadapi menuntut upaya serius untuk memperbaiki penegakan hukum, meningkatkan keamanan, dan memperbaiki penyediaan layanan sosial. Hanya dengan menanggulangi permasalahan ini, Provinsi Bengkulu dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dan kondusif untuk pembangunan yang berkelanjutan dan merata bagi seluruh masyarakatnya.

3.1.8. Rendahnya Pengelolaan Lingkungan Hidup

Masalah krusial yang dihadapi dalam urusan wajib non-pelayanan dasar lingkungan hidup adalah kurang optimalnya pengelolaan lingkungan. Pada tahun 2022, terlihat bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mencapai angka 70,82, sementara Indeks Kualitas Air sebesar 46,18, dan Indeks Kualitas Udara sebesar 91,27. Paralel dengan itu, lahan kritis terus mengalami peningkatan hingga mencapai 713 ribu hektar pada tahun 2021. Beberapa faktor yang menjadi penyebab utama meliputi:

1. Pencemaran Air yang Tinggi:

- Berkurangnya kualitas air disebabkan oleh pencemaran dari berbagai sumber, termasuk limbah domestik, industri, pertanian, peternakan, perikanan, dan pertambangan.
- Pengelolaan limbah yang belum optimal menjadi salah satu penyebab utama menurunnya kualitas air.

2. Kualitas Udara yang Menurun:

- Penurunan kualitas udara ambien terjadi akibat emisi dari kendaraan bermotor dan cerobong industri.
- Peningkatan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, pertanian, energi, transportasi, dan pengelolaan limbah domestik juga berkontribusi pada menurunnya kualitas udara.

3. Penurunan Fungsi Layanan Ekosistem DAS Bengkulu:

- Fungsi layanan jasa ekosistem DAS Bengkulu mengalami penurunan, yang tercermin dari menurunnya kuantitas air karena berkurangnya daerah resapan air, menurunnya tutupan vegetasi, dan meningkatnya alih fungsi lahan produktif.
- Kurangnya pengelolaan yang berkelanjutan menyebabkan penurunan fungsi ekosistem yang seharusnya mendukung keberlanjutan lingkungan.

4. Kerusakan Sumber Daya Alam dan Ekosistem:

- Meningkatnya kerusakan pada sumber daya alam, ekosistem, dan keanekaragaman hayati terjadi akibat kerusakan lahan.
- Pengelolaan yang kurang optimal menyebabkan terus berlanjutnya kerusakan pada ekosistem lingkungan.

5. Risiko Bencana yang Meningkat:

- Risiko bencana meningkat karena mitigasi, kesiapsiagaan, dan tanggap darurat bencana belum optimal.
- Pengelolaan lingkungan yang belum terkoordinasi dengan baik menjadi faktor utama dalam meningkatkan risiko bencana.

Permasalahan ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam pengelolaan lingkungan hidup secara menyeluruh dan berkelanjutan. Diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi pencemaran, meningkatkan kualitas air dan udara, mendukung fungsi ekosistem, serta mengurangi risiko bencana melalui pengelolaan yang lebih baik dan terintegrasi.

3.1.9. Pemenuhan Infrastruktur Dasar Belum Optimal

Pemenuhan kebutuhan dan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar di Provinsi Bengkulu masih merupakan permasalahan yang signifikan. Fokus utama jatuh pada tiga aspek utama infrastruktur dasar, yakni air minum layak, sanitasi yang memadai, dan perumahan yang layak. Namun, data menunjukkan bahwa pencapaian dalam hal persentase rumah layak huni, rumah tangga dengan akses sanitasi memadai, dan rumah tangga dengan akses air minum layak pada tahun 2022 masih di bawah rata-rata nasional, yakni masing-masing sebesar 57,16%, 79,58%, dan 73,57%.

Permasalahan inti yang muncul adalah ketidakoptimalan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama di sektor rumah, sanitasi, dan air minum. Rendahnya persentase rumah layak huni mencerminkan kesulitan masyarakat dalam memperoleh tempat tinggal yang memadai dan layak huni. Selain itu, akses sanitasi yang belum mencapai standar memadai mengindikasikan adanya keterbatasan dalam penyediaan fasilitas sanitasi yang bersih dan aman. Begitu pula dengan akses air minum yang belum optimal, menunjukkan adanya tantangan dalam menyediakan sumber air bersih yang memadai bagi masyarakat.

Dalam konteks ini, permasalahan inti yang muncul adalah kebutuhan mendesak untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar di Provinsi Bengkulu. Tantangan ini juga mencakup aspek distribusi yang tidak merata antara daerah perkotaan dan pedesaan, yang dapat memperparah kesenjangan akses masyarakat terhadap fasilitas dasar. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis dan investasi yang signifikan untuk mengatasi permasalahan ini dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

3.1.10. Pembangunan Perdesaan Belum Optimal

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan selama kurun waktu 2016-2022, namun dalam tingkat pertumbuhan yang melambat. Meskipun demikian, capaiannya selalu berada di bawah rata-rata IPM nasional sepanjang periode tersebut. Pada tahun 2018, IPM Provinsi Bengkulu baru berhasil mencapai kategori tinggi dengan nilai sebesar 70,64. Selama tahun 2015-2022, IPM Provinsi Bengkulu mengalami peningkatan dari 68,59 menjadi 72,16.

Penting untuk dicatat bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan modal pembangunan yang krusial, dan oleh karena itu, perlu diimplementasikan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kualitasnya. Meski Provinsi Bengkulu memiliki jumlah penduduk yang relatif lebih sedikit, kondisi ini dapat diubah menjadi potensi positif yang mendorong pembangunan, bukan sekadar menjadi hambatan.

Jika dianalisis hingga tingkat kabupaten/kota, sebaran IPM pada tahun 2022 menunjukkan adanya variasi. Terdapat 7 kabupaten dengan IPM masuk dalam kategori sedang, 2 kabupaten dengan IPM kategori tinggi, dan hanya 1 kota dengan IPM kategori sangat tinggi. Meskipun terdapat peningkatan, IPM Provinsi Bengkulu pada tahun 2022 masih berada di bawah IPM nasional yang mencapai 72,91.

Upaya perlu ditingkatkan untuk menjadikan SDM Provinsi Bengkulu lebih tangguh dan berdaya saing. Kebijakan yang mendukung pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat perlu diperkuat agar dapat mengatasi ketidakmerataan dan meningkatkan kesejahteraan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu.

3.1.11. Konektivitas dan Pengembangan Infrastruktur Strategis Masih Terbatas

Konektivitas tetap menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh Provinsi Bengkulu. Integrasi konektivitas, baik dalam skala intrawilayah maupun antar-wilayah melalui jalur darat, laut, dan udara, masih belum mencapai tingkat optimal. Pada tingkat internasional, keterhubungan Provinsi Bengkulu sebagai pintu gerbang perdagangan barang dan jasa juga belum mencapai potensi penuhnya. Dalam konteks geografis, Bengkulu terletak di sisi barat Pulau Sumatera, berbatasan langsung dengan Samudera Hindia di sisi barat, dan dikelilingi oleh jajaran Bukit Barisan di sebelah timur. Kawasan ini juga diapit oleh hutan-hutan yang termasuk Hutan Lindung dan Taman Nasional, seperti Taman Nasional Kerinci Sebelat dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.

Aksesibilitas dari dan menuju Bengkulu terbatas, dengan hanya lima pintu keluar melalui jalur darat, melibatkan Kabupaten Mukomuko-Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Rejang Lebong-Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Kepahiang-Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Bengkulu Selatan-Provinsi Sumatera Selatan, dan Kabupaten Kaur-Provinsi Lampung. Posisi Provinsi Bengkulu yang terisolir menuntut upaya ekstra untuk memperbaiki konektivitas dalam segala aspek, termasuk jalur darat, laut, dan udara. Oleh karena itu, pengembangan ruas jalan baru, keterhubungan dengan jaringan tol, dan jalur kereta api Trans Sumatera menjadi prioritas utama. Selain itu, pengembangan pelabuhan laut dan Bandara juga

menjadi langkah strategis untuk mendukung pengembangan ekonomi Provinsi Bengkulu. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi keterbatasan aksesibilitas dan memacu pertumbuhan ekonomi dengan membuka peluang perdagangan dan investasi yang lebih luas.

3.1.12. Kurangnya Pusat-Pusat Pertumbuhan/Ekonomi Baru

Provinsi Bengkulu menghadapi tantangan serius terkait kurangnya pusat-pusat pertumbuhan atau ekonomi baru yang dapat menggerakkan perkembangan ekonomi regional. Hal ini menjadi perhatian utama karena pusat-pusat pertumbuhan berperan penting dalam mendiversifikasi struktur ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing daerah. Salah satu masalah utama adalah kurangnya inisiatif untuk mengidentifikasi dan mengembangkan sektor-sektor ekonomi potensial yang dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan. Selain itu, kurangnya investasi dan dukungan infrastruktur di daerah-daerah yang memiliki potensi ekonomi memperburuk situasi ini.

Adanya keterbatasan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah juga turut menyulitkan perkembangan pusat-pusat pertumbuhan di Provinsi Bengkulu. Terbatasnya infrastruktur transportasi dan sarana pendukung ekonomi di beberapa wilayah menjadi hambatan serius bagi investasi dan pengembangan usaha. Selain itu, kurangnya koordinasi antar sektor dan kebijakan yang mendukung inovasi dan investasi di berbagai sektor ekonomi turut memperkuat ketidakmampuan dalam menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru.

Diperlukan langkah-langkah strategis, termasuk identifikasi sektor-sektor unggulan yang memiliki potensi tinggi, penyediaan insentif investasi, peningkatan infrastruktur, serta pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mendorong terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan yang berkelanjutan di Provinsi Bengkulu.

3.1.13. Belum kuatnya sinergi Pembangunan Pusat – Daerah

Masalah belum kuatnya sinergi pembangunan antara pusat dan daerah Provinsi Bengkulu merupakan tantangan signifikan dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan merata. Kurangnya sinergi ini dapat menciptakan disparitas pembangunan antar wilayah serta menghambat pertumbuhan ekonomi yang seimbang di seluruh provinsi. Beberapa aspek yang perlu dicermati dalam konteks ini meliputi:

Koordinasi Kebijakan Pembangunan: Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Provinsi Bengkulu dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan menjadi salah satu permasalahan utama. Dibutuhkan kerja sama yang lebih erat dalam merancang strategi pembangunan yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi setiap daerah.

Dukungan Keuangan dan Fiskal: Sinergi pembangunan yang kuat memerlukan dukungan keuangan yang memadai dari pemerintah pusat. Adanya kebijakan fiskal yang tidak merata dapat menyulitkan daerah dalam mengimplementasikan proyek-proyek pembangunan yang diperlukan. Pembagian alokasi dana yang tidak merata dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam pemanfaatan sumber daya.

Infrastruktur dan Konektivitas: Lemahnya infrastruktur dan konektivitas antara pusat dan daerah di Provinsi Bengkulu dapat menjadi hambatan bagi sinergi pembangunan. Diperlukan investasi yang lebih besar dalam pembangunan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, dan energi untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah.

Pemberdayaan Daerah: Pemberdayaan daerah dalam hal perencanaan dan pengambilan keputusan perlu diperkuat. Pelibatan aktif daerah dalam proses perencanaan pembangunan akan menciptakan sinergi yang lebih efektif dan memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan lebih sesuai dengan kebutuhan setempat.

Pengembangan Sumber Daya Manusia: Sinergi pembangunan juga terkait dengan pengembangan sumber daya manusia yang seimbang di seluruh provinsi. Diperlukan upaya untuk memastikan bahwa potensi SDM di setiap daerah dioptimalkan, sehingga setiap wilayah dapat berkontribusi secara maksimal terhadap pembangunan nasional. Dengan meningkatkan sinergi antara pusat dan daerah, Provinsi Bengkulu dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, mengurangi kesenjangan pembangunan, dan memastikan bahwa setiap daerah dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan nasional. Sinergi ini juga akan memberikan kontribusi positif terhadap tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional.

Tabel 3. 1 Permasalahan Pembangunan Provinsi Bengkulu

No	Permasalahan Pembangunan Provinsi Bengkulu
1	Pembangunan Manusia yang Belum Optimal
2	Angka Kemiskinan yang Masih Cukup Tinggi
3	Pertumbuhan Ekonomi Cenderung Stagnan
4	Hilirisasi Komoditas Unggulan dan Pengembangan Pariwisata Masih Belum Optimal
5	ASN yang belum sepenuhnya berkualitas dan professional
6	Pelayanan Publik Belum Optimal
7	Belum Kondusifnya atmosfir pembangunan
8	Rendahnya Pengelolaan Lingkungan Hidup
9	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Belum Optimal

10	Pembangunan Pedesaan yang belum optimal
11	Konektivitas dan Pengembangan Infrastruktur Strategis Masih Terbatas
12	Kurangnya Pusat-Pusat Pertumbuhan/ Ekonomi Baru
13	Belum kuatnya sinergi Pembangunan pusat – daerah

3.2. Isu Strategis Daerah

Provinsi Bengkulu, sebagai salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki potensi besar dalam berbagai sektor, menghadapi beragam permasalahan dan isu strategis yang kompleks. Untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penting untuk mengidentifikasi dan memahami isu-isu strategis yang menjadi tantangan utama. Isu-isu strategis daerah Provinsi Bengkulu dapat diidentifikasi sebagai berikut:

3.2.1. Peningkatan Daya Saing Ekonomi

Provinsi Bengkulu menghadapi tantangan signifikan dalam meningkatkan daya saing ekonominya. Beberapa faktor utama yang menyebabkan perlambatan ekonomi di wilayah ini mencakup rendahnya digitalisasi UMKM, ketidakmampuan koperasi dan usaha kecil serta menengah (UKM) untuk mengakses modal perbankan, dan belum berkembangnya sektor pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi. Selain itu, sektor pertanian, perikanan, perdagangan, dan industri juga menghadapi berbagai kendala yang menghambat optimalisasi potensi ekonomi daerah.

1. Rendahnya Digitalisasi UMKM:

Neraca Perdagangan Digital: Berdasarkan hasil kajian Bank Indonesia Perwakilan Bengkulu, Neraca Perdagangan Digital Bengkulu pada tahun 2022 mengalami defisit sebesar 1,565 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Bengkulu lebih banyak membeli produk UMKM dari luar daerah daripada menjual produk UMKM ke luar Bengkulu. Defisit ini disebabkan oleh minimnya digitalisasi UMKM di Bengkulu.

2. Keterbatasan Koperasi dan Akses Modal UKM:

Pengembangan Koperasi dan UKM: Permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dan UKM meliputi akses modal yang minim, fungsi kelembagaan yang belum optimal, tingginya jumlah koperasi tidak aktif, serta pemanfaatan dan pengembangan akses pemasaran dan promosi yang belum merata. Data menunjukkan bahwa akses modal KUKM terhadap dunia perbankan masih sangat rendah, dan fungsi serta kelembagaan koperasi belum berjalan optimal.

3. Sektor Pariwisata yang Belum Menguat:

Konektivitas dan Infrastruktur Wisata: Belum menguatnya pariwisata sebagai pendorong ekonomi inklusif disebabkan oleh lemahnya konektivitas infrastruktur transportasi menuju destinasi wisata, terbatasnya atraksi wisata, dan kurangnya internalisasi nilai-nilai hospitality di masyarakat. Data dari sektor pariwisata menunjukkan bahwa kontribusi sektor penyediaan jasa akomodasi dan makan minum dalam PDRB hanya sebesar 0,1% pada tahun 2022.

4. **Produktivitas Pertanian yang Rendah:**

Ekosistem dan Teknologi Pertanian: Rendahnya produktivitas komoditas pertanian disebabkan oleh kurang optimalnya aktivitas ekonomi dari hulu ke hilir, gangguan ekosistem pertanian, menurunnya luas lahan, dan rendahnya penguasaan teknologi budidaya. Data menunjukkan bahwa struktur ekonomi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menurun hingga menjadi 27,21% pada tahun 2022.

5. **Tantangan di Sektor Perikanan dan Kelautan:**

Eksplotasi dan Pencemaran: Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang baru mencapai 100,89% pada tahun 2021 menunjukkan kesejahteraan pembudidaya ikan yang cukup baik, namun permasalahan seperti eksploitasi ruang laut berlebihan, pencemaran lingkungan, dan kurang optimalnya pemanfaatan pelabuhan perikanan masih menghambat perkembangan sektor ini.

6. **Menurunnya Kontribusi Perdagangan:**

Dominasi Barang Impor dan Fluktuasi Harga: Sektor perdagangan menghadapi penurunan kontribusi terhadap PDRB yang disebabkan oleh dominasi barang impor, fluktuasi harga barang konsumsi, kurangnya promosi produk lokal, dan belum meratanya penerapan standar produk serta teknologi informasi dalam perdagangan.

7. **Masalah di Sektor Industri:**

Daya Saing Rendah dan Biaya Ekonomi Tinggi: Pertumbuhan sektor industri menurun karena produk industri memiliki daya saing rendah akibat biaya ekonomi tinggi dan infrastruktur kawasan industri yang belum terintegrasi. Data menunjukkan bahwa industri pengolahan di Bengkulu masih didominasi oleh industri padat karya dengan tenaga kerja berpendidikan rendah, sementara tren global menuju industri 4.0 yang membutuhkan tenaga kerja terampil dan teknologi canggih.

3.2.2. **Hilirisasi Komoditas Unggulan dan Pengembangan Pariwisata yang Komprehensif dan Kompetitif**

a. **Hilirisasi Komoditas Unggulan**

Pengembangan hilirisasi komoditas unggulan di Provinsi Bengkulu sangat penting tidak hanya untuk meningkatkan jumlah produksi, tetapi juga untuk mengembangkan perekonomian daerah. Provinsi Bengkulu memiliki bahan baku yang melimpah, namun masih minim perkembangan industri hilirisasi, sehingga bahan baku sering kali diekspor tanpa diolah menjadi produk turunan atau barang jadi. Hal ini mengakibatkan hilangnya potensi nilai tambah yang dapat meningkatkan perekonomian lokal.

1. **Defisit Neraca Perdagangan Digital:** Berdasarkan hasil kajian Bank Indonesia Perwakilan Bengkulu, Neraca Perdagangan Digital Bengkulu pada tahun 2022 mengalami defisit sebesar 1,565 triliun rupiah. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Bengkulu lebih banyak membeli produk dari luar daerah ketimbang menjual produk lokal.
2. **Rendahnya Investasi dalam Industri Hilirisasi:** Rendahnya investasi dalam industri hilirisasi di Bengkulu menyebabkan bahan baku seperti kopi, karet, dan kelapa sawit diekspor dalam bentuk mentah. Kurangnya pabrik pengolahan lokal menghambat peningkatan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja lokal.
3. **Peluang Peningkatan Nilai Ekspor:** Dengan mengembangkan industri hilirisasi, Bengkulu dapat meningkatkan nilai ekspor produk olahan yang memiliki nilai tambah lebih tinggi daripada bahan mentah. Ini akan berdampak positif pada perekonomian daerah melalui peningkatan investasi, penyerapan tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi.

b. Pengembangan Pariwisata yang Komprehensif dan Kompetitif

Provinsi Bengkulu memiliki potensi pariwisata yang sangat besar, baik dari segi kekayaan alam, budaya, maupun sejarah. Namun, potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal. Pengembangan pariwisata yang komprehensif dan kompetitif dapat menjadi mesin penggerak utama ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif.

1. **Tingkat Hunian Kamar dan Lama Menginap:** Pada tahun 2019, Tingkat Hunian Kamar di Bengkulu hanya sebesar 67,97% dengan rata-rata lama menginap 1,8 hari. Angka ini menurun drastis selama pandemi Covid-19, dengan Tingkat Hunian Kamar turun menjadi 45,45% dan rata-rata lama menginap hanya 1,31 hari.
2. **Rendahnya Investasi di Sektor Pariwisata:** Investasi di sektor pariwisata masih rendah, yang berdampak pada kontribusi sektor ini terhadap PDRB hanya sebesar 0,1% pada tahun 2022.
3. **Keterbatasan Akses dan Atraksi Wisata:** Konektivitas infrastruktur transportasi menuju destinasi wisata masih lemah, terbatasnya atraksi wisata

menekan lama kunjungan wisatawan, dan kurangnya internalisasi nilai-nilai hospitality di masyarakat.

3.2.3. Pengembangan Konektivitas Daerah serta Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan

Konektivitas masih menjadi tantangan bagi Provinsi Bengkulu. Belum optimalnya integrasi konektivitas intrawilayah dan antar-wilayah baik darat, laut dan udara dan belum optimalnya hub internasional sebagai pintu gerbang perdagangan barang dan jasa. Secara geografis, Bengkulu terletak di sisi barat Pulau Sumatera, yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia di sisi barat, dan dipagari oleh jajaran Bukit Barisan di sebelah timur. Bengkulu juga dikelilingi oleh kawasan-kawasan hutan baik itu Hutan Lindung maupun Taman Nasional, seperti Taman Nasional Kerinci Sebelat dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Aksesibilitas dari dan menuju Bengkulu melalui darat hanya dilalui melalui 5 (titik) pintu keluar yaitu Kabupaten Mukomuko-Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Rejang Lebong-Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Kepahiang-Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Bengkulu Selatan-Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Kaur-Provinsi Lampung.

Melalui udara, saat ini ada 1 (satu) bandara udara utama yaitu Fatmawati, dan 2 (dua) bandara perintis yaitu Bandara Kabupaten Mukomuko dan Pulau Enggano. Melalui jalur laut, terdapat Pelabuhan Pulau Baai, Pelabuhan Bantal Kabupaten Mukomuko, Pelabuhan Linau di Kabupaten Kaur. Bengkulu masih memiliki akses konektivitas yang masih minim, sehingga diperlukan keterbukaan akses yang luas, baik darat, laut dan udara. Hal ini berdampak terhadap alur distribusi barang, jasa dan penumpang masih terbatas. Letak geografis Bengkulu, yang tertutup oleh kawasan-kawasan hutan berakibat sulitnya bagi Bengkulu untuk membuka aksesibilitas.

Provinsi Bengkulu perlu membuka keterisolasian dan atau kelancaran arus barang dan orang dari dan ke Provinsi Bengkulu; membangun dan atau meningkatkan kapasitas infrastruktur jalan lintas provinsi dari aspek jarak tempuh dan pengurangan biaya angkut; membangun kerjasama dengan provinsi sekitar untuk membangun pola-pola pembangunan koridor. Peningkatan akses lintas provinsi ini ditujukan agar Bengkulu memiliki keunggulan kompetitif dan berdaya saing untuk menarik minat investor.

3.2.4. Kemiskinan, Kesejahteraan dan Daya Saing SDM

Kemiskinan menjadi isu global yang terjadi saat ini, dan menjadi salah satu perhatian pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan bahwa tujuan pertama pembangunan berkelanjutan adalah mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun. Tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bengkulu dapat dikatakan masih cukup rendah. Walaupun sudah menunjukkan perbaikan yang

signifikan, namun tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Bengkulu masih dibawah rata-rata nasional. Tingkat kemiskinan Bengkulu pada tahun 2022 mencapai 14,34%, jauh berada diatas rata-rata nasional yang sudah mencapai satu digit yaitu 9,57%.

Selain itu, tingkat pengangguran di Provinsi Bengkulu didominasi oleh penduduk dengan latar pendidikan menengah atas sampai perguruan tinggi. Penduduk yang bekerja dengan latar belakang pendidikan SMA, SMK, Diploma dan Universitas, berdasarkan data BPS pada bulan Agustus 2022 adalah sebesar 43,46%. Ini berarti sebesar 50% lebih pekerja di Bengkulu bekerja dengan latar pendidikan yang rendah. Selain itu sebesar 70,26% angkatan kerja bekerja pada sektor informal, yang sangat rentan terhadap kelayakan upah. Per bulan rata-rata pendapatan pekerja informal adalah sekita 1,5 juta, masih jauh dibawah UMP. Hal ini menggambarkan bahwa daya saing tenaga kerja di Bengkulu masih minim, dan tingkat kesejahteraan pekerja masih rendah.

Pada sektor pendidikan, angka rata-rata lama sekolah Provinsi Bengkulu pada tahun 2022 adalah sebesar 8,91 tahun, masih dibawah target wajib belajar 9 tahun. Rasio jumlah penduduk per Universitas masih cukup rendah, yang mengakibatkan banyak penduduk yang bermigrasi keluar untuk mencari pendidikan yang lebih tinggi. Permasalahan pendidikan sangat kompleks, karena menyangkut kemampuan siswa, akses siswa, sarpras pendidikan, kualitas guru hingga metode pembelajaran. Akumulasi dari permasalahan tersebut, tergambar pada rata-rata lama sekolah yang belum mencapai 9 tahun. Penetapan sistem pendidikan yang baku bisa memberikan kepastian bagi setiap pengajar dan sekolah. Kelengkapan fasilitas serta pemerataan kualitas pendidikan bagi setiap warga negara, khususnya daerah-daerah yang jauh dari pusat kota menjadi fokus Pemerintah Provinsi Bengkulu dimana banyak sekali masyarakat yang tidak memperoleh hak mereka dalam memperoleh pendidikan. Perbaikan kualitas pendidikan di Provinsi Bengkulu dimulai dari peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan untuk semua lapisan masyarakat, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, dan peningkatan kuantitas/kualitas guru (kualitas pendidikan), peningkatan kualitas pembelajaran (daya saing di pasar kerja); pemerataan kualifikasi dan penempatan guru dan pemantapan kesejahteraan guru. Selain itu, peningkatan kualitas tenaga pendidik, bertujuan untuk memberikan bekal bagi para guru dan kepala sekolah, sehingga mereka mampu menjadi tenaga pendidik yang berkualitas dalam menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan bagi para siswanya peran guru sangat dibutuhkan untuk mempersiapkan SDM yang handal tidak hanya sisi akademik namun juga memiliki karakter religius, memegang nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

Selanjutnya pelayanan kesehatan masyarakat di Provinsi Bengkulu adalah pelayanan yang bersifat publik dengan tujuan utama memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Pelayanan kesehatan masyarakat tersebut antara lain promosi kesehatan, pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, perbaikan gizi, peningkatan kesehatan keluarga, keluarga berencana, kesehatan jiwa serta berbagai program kesehatan masyarakat lainnya. Pada sektor kesehatan, Usia Harapan Hidup Provinsi Bengkulu pada tahun 2022 masih berada dibawah capaian nasional yaitu sebesar 69,69 tahun sedangkan nasional mencapai 73,5 tahun. Hal ini menggambarkan bahwa Bengkulu perlu melakukan akselerasi dalam peningkatan taraf kesehatan masyarakat, terutamak peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan seperti peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, peningkatan akses pelayanan kesehatan di wilayah-wilayah terpencil, peningkatan kuantitas dan kualitas dokter dan paramedis, kepastian layanan jaminan kesehatan, pengembangan program kader dokter desa bekerja sama dengan perguruan tinggi; dan pementapan kesejahteraan dokter dan paramedis.

3.2.5. Pembangunan Peran Perempuan pada Sektor Formal di Provinsi Bengkulu Masih Relatif Rendah

Salah satu permasalahan yang masih dihadapi Provinsi Bengkulu adalah rendahnya peran perempuan dalam sektor formal. Meskipun telah terjadi berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang, data menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang bekerja di sektor formal masih relatif rendah dibandingkan dengan laki-laki.

Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. **Pendidikan dan Pelatihan:** Banyak perempuan di Bengkulu yang belum memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk memasuki pasar kerja formal. Ini mencakup kurangnya kesempatan untuk mengikuti program pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri.
2. **Norma Sosial dan Budaya:** Norma sosial dan budaya yang masih kental di masyarakat Bengkulu sering kali menghambat perempuan untuk bekerja di luar rumah. Peran tradisional perempuan sebagai ibu rumah tangga masih dominan, sehingga banyak yang memilih atau didorong untuk tetap di rumah.
3. **Akses terhadap Peluang Kerja:** Perempuan sering kali menghadapi diskriminasi dalam proses rekrutmen dan promosi di sektor formal. Selain itu, minimnya program pemerintah atau swasta yang mendukung kewirausahaan perempuan juga menjadi hambatan bagi mereka yang ingin memulai usaha sendiri.

4. **Fasilitas Pendukung:** Kurangnya fasilitas pendukung seperti tempat penitipan anak dan kebijakan cuti melahirkan yang memadai membuat perempuan sulit untuk menyeimbangkan antara pekerjaan dan tanggung jawab rumah tangga.

Upaya untuk mengatasi permasalahan ini perlu menjadi prioritas dalam agenda pembangunan Provinsi Bengkulu. Dengan meningkatkan peran perempuan dalam sektor formal, tidak hanya akan memperkuat ekonomi keluarga, tetapi juga akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan. Program-program yang berfokus pada peningkatan keterampilan, perubahan norma sosial, penyediaan fasilitas pendukung, dan kebijakan yang mendukung partisipasi perempuan di sektor formal harus segera diimplementasikan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan berkeadilan gender.

3.2.6. Peningkatan Kinerja Birokrasi

Siklus manajemen pembangunan akan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan, apabila didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi kualitas dan profesionalisme aparatur, akuntabilitas kinerja pembangunan, serta pelayanan publik yang prima. Aparatur sebagai pelayan publik dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan prima. Keterbukaan dan transparansi informasi serta komunikasi menjadi penting dalam membangun bentuk pelayanan publik yang prima. Ruang pengaduan masyarakat harus lebih semakin terbuka, guna meningkatkan nilai aparatur sebagai pelayan bagi masyarakat. Maka pengembangan teknologi untuk mewujudkan *e-Government* menjadi hal cukup penting sebagai instrumen komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu pelayanan perijinan, kemudahan berusaha, pelayanan administrasi kependudukan, hingga pelayanan pendidikan dan kesehatan juga harus semakin ditingkatkan.

Akuntabilitas kinerja pembangunan juga menjadi satu kriteria menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Akuntabilitas kinerja dibangun sejak proses perencanaan dan penganggaran, hingga implementasi. Dalam rangka mempertahankan kinerja akuntabilitas daerah, Pemerintah Provinsi Bengkulu akan terus meningkatkan kinerja, yang dimulai dari proses perencanaan dalam menentukan tujuan, sasaran, program, kegiatan pembangunan daerah, beserta indikator kinerjanya agar relevan, selaras, dan konsisten. Nilai SAKIP Provinsi Bengkulu, berdasarkan hasil penilaian Kementerian PAN RB, adalah sebesar 69,30%.

Isu yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja pembangunan daerah salah satunya adalah tentang kemandirian fiskal. Dari tingkat kontribusi PAD dan DBH Provinsi Bengkulu terhadap pendapatan daerah, Bengkulu termasuk daerah yang belum mandiri. Kondisi tersebut menggambarkan dua hal, yaitu pertama adalah belum

optimalnya kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber PAD di Provinsi Bengkulu. Sumber-sumber PAD yang ada selama ini (kondisi eksisting) sepertinya sudah tidak lagi mampu membiayai kenaikan beban belanja APBD Provinsi Bengkulu yang terus meningkat setiap tahunnya. Kedua adalah adanya kenaikan secara signifikan beban belanja APBD Provinsi Bengkulu yang relatif memberikan tekanan pembiayaan APBD. Implikasinya adalah pada kewajiban pemerintah daerah untuk menjaga kelangsungan pelayanan pemerintahan, umum sekaligus pembangunan di daerah.

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan tercapai apabila didukung dengan ASN yang berkualitas dan profesional, serta kelembagaan yang optimal. Indeks profesionalitas ASN di Provinsi Bengkulu masih rendah. Pada tahun 2021, Indeks Profesionalitas ASN baru mencapai 73,87. Abdi negara atau yang sekarang dikenal dengan nama Aparatur Sipil Negara (ASN) pada hakikatnya merupakan pelayan masyarakat. Sesuai dengan apa yang dicita-citakan dan digariskan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka keberadaan PNS (Pegawai Negeri Sipil) maupun P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat mutlak diperlukan. Untuk itu, peningkatan kompetensi dan kualitas ASN menjadi kunci mutlak yang harus dilakukan, disertai penempatan ASN sesuai dengan formasi yang dibutuhkan. Demikian juga penguatan kelembagaan agar efektif dan efisien, mulai dari kelembagaan tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa.

Sedangkan dalam rangka menjaga kondusivitas wilayah selama 5 (lima) tahun ke depan, Pemerintah Provinsi Bengkulu terus melaksanakan koordinasi dan kerjasama antar tingkat pemerintahan serta lintas sektor sebagai upaya peningkatan kualitas kehidupan demokrasi yang damai, aman, dan toleran bagi seluruh elemen masyarakat Bengkulu. Aspek kondusivitas wilayah menjadi prasyarat penting dan strategis dalam menunjang kelancaran dan keberhasilan program-program pembangunan di Bengkulu. Penciptaan kondusivitas wilayah ini juga diharapkan mampu mewujudkan iklim sejuk untuk menjaga kerukunan antar umat beragama, meningkatkan perlindungan bagi kebebasan sipil masyarakat, dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Bengkulu yang harmonis dari dimensi ketertiban sosial.

3.2.7. Pembangunan Rendah Karbon dan Emisi GRK

Pembangunan rendah karbon dan pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) merupakan isu strategis yang sangat penting bagi Provinsi Bengkulu. Pembangunan yang ramah lingkungan tidak hanya bertujuan untuk menjaga kelestarian alam tetapi juga untuk memastikan kesejahteraan jangka panjang bagi masyarakat. Provinsi

Bengkulu, seperti banyak daerah lainnya, menghadapi tantangan dalam mengurangi emisi GRK sambil tetap mendorong pertumbuhan ekonomi.

Data dan Informasi Pendukung:

1. Intensitas Emisi GRK:

Data menunjukkan bahwa intensitas emisi GRK di Provinsi Bengkulu masih tinggi. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk penggunaan bahan bakar fosil yang dominan, praktik pertanian dan perkebunan yang kurang ramah lingkungan, serta pengelolaan limbah yang belum optimal.

2. Sektor Energi:

Penggunaan energi di Provinsi Bengkulu masih didominasi oleh bahan bakar fosil. Ketergantungan pada energi konvensional ini mengakibatkan tingginya emisi GRK. Data menunjukkan bahwa sektor energi merupakan salah satu penyumbang terbesar emisi GRK di daerah ini.

3. Sektor Pertanian dan Perkebunan:

Praktik pertanian dan perkebunan yang kurang efisien dan ramah lingkungan juga berkontribusi terhadap tingginya emisi GRK. Pembakaran lahan dan penggunaan pupuk kimia yang berlebihan merupakan beberapa contoh praktik yang meningkatkan emisi GRK.

4. Sektor Transportasi:

Transportasi merupakan sumber signifikan emisi GRK. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor, terutama yang berbahan bakar fosil, mengakibatkan peningkatan emisi. Kurangnya transportasi umum yang efisien juga mendorong penggunaan kendaraan pribadi.

5. Pengelolaan Limbah:

Pengelolaan limbah yang belum optimal, terutama limbah padat dan cair, menyebabkan peningkatan emisi metana (CH₄), salah satu gas rumah kaca yang memiliki potensi pemanasan global yang tinggi. Data menunjukkan bahwa pengelolaan sampah yang tidak memadai merupakan kontributor signifikan emisi GRK di Bengkulu.

Tabel 3. 2 Isu Strategis Daerah

No	Isu Strategis
1	Peningkatan Daya Saing Ekonomi
2	Hilirisasi Komoditas Unggulan dan Pengembangan Pariwisata yang Komprehensif dan Kompetitif
3	Pengembangan konektivitas serta Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan

4	Kemiskinan, Kesejahteraan dan Daya Saing SDM
5	Pembangunan peran perempuan pada sektor formal di Provinsi Bengkulu masih relatif rendah
6	Peningkatan Kinerja Birokrasi
7	Pembangunan Rendah Karbon dan Emisi GRK

Dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan, Provinsi Bengkulu telah mengidentifikasi sejumlah permasalahan dan isu strategis yang perlu segera diatasi untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dari peningkatan daya saing ekonomi, hilirisasi komoditas unggulan, pengembangan pariwisata yang komprehensif dan kompetitif, hingga pembangunan rendah karbon dan pengurangan emisi gas rumah kaca, setiap isu memerlukan perhatian khusus dan strategi yang tepat. Upaya ini tidak hanya penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah, tetapi juga untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan dapat terus berlanjut dan memberi manfaat bagi generasi mendatang.



BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH



BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu 2025 – 2045 disusun dengan tujuan untuk menjadi panduan strategis bagi Pembangunan Provinsi Bengkulu dalam rentang waktu dua puluh tahun. Provinsi Bengkulu, yang kaya akan keberagaman budaya dan keindahan alamnya memiliki peran strategis sebagai bagian integral dari perekonomian nasional. Meskipun memiliki potensi yang besar, provinsi ini juga dihadapkan pada sejumlah tantangan, termasuk ketidaksetaraan ekonomi dan isu-isu lingkungan yang memerlukan solusi komprehensif.

Tantangan yang dihadapi, seperti ketidaksetaraan ekonomi dan tekanan terhadap sumber daya alam, memerlukan pendekatan holistik. Namun di dalam tantangan tersebut terkandung pula peluang besar untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dengan terus meningkatkan kualitas sumberdaya manusia baik jasmani maupun rohani dengan senantiasa memberikan perlindungan kepada Perempuan, Anak dan Kelompok Disabilitas.

Provinsi Bengkulu memiliki peran yang tidak dapat diabaikan dalam pemenuhan kebutuhan nasional. Oleh karena itu, keberhasilan dalam penyusunan RPJPD ini bukan hanya cerminan ambisi lokal, tetapi juga kontribusi terhadap visi pembangunan nasional.

4.1. Visi

Perumusan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu 2025-2045 merupakan hasil dari proses penyelarasan yang mendalam dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, serta merupakan terjemahan dari upaya untuk menjawab isu-isu strategis yang dihadapi oleh Provinsi Bengkulu. Proses ini melibatkan analisis yang komprehensif terhadap berbagai tantangan dan peluang yang ada di daerah, serta konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa visi yang dirumuskan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Bengkulu.

Visi pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 adalah "Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan". Visi ini mencerminkan aspirasi nasional untuk mencapai kedaulatan dalam berbagai aspek, kemajuan ekonomi dan sosial, serta keberlanjutan lingkungan. Visi tersebut diimplementasikan di Provinsi Bengkulu melalui Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 dengan visi "Bengkulu Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan". Berikut adalah penjelasan bagaimana visi daerah selaras dengan visi nasional.

1. Negara Nusantara Berdaulat

Visi nasional menekankan kedaulatan, yang mencakup aspek-aspek seperti kedaulatan ekonomi, politik, dan budaya. Kedaulatan ekonomi berarti kemampuan negara untuk mengendalikan dan mengelola sumber daya ekonominya secara mandiri dan berdaya saing. Di tingkat provinsi, visi "Bengkulu Maju" mencerminkan komitmen untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Ini dilakukan melalui pengembangan sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, industri pengolahan, dan pariwisata. Peningkatan daya saing ekonomi daerah ini mendukung kedaulatan ekonomi nasional dengan memperkuat ekonomi lokal yang berkontribusi pada perekonomian nasional.

2. Negara Nusantara Maju

Visi nasional "Negara Nusantara Maju" mencakup kemajuan dalam aspek-aspek ekonomi, sosial, dan teknologi. Visi "Bengkulu Maju, Sejahtera" di tingkat provinsi mencerminkan upaya untuk mencapai kemajuan ekonomi dan sosial bagi masyarakat Bengkulu. Ini termasuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan serta pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas dan aksesibilitas di wilayah Bengkulu adalah bagian integral dari upaya mencapai kemajuan ini. Dengan demikian, kemajuan di tingkat provinsi secara langsung mendukung visi nasional untuk menciptakan kemajuan yang merata di seluruh Nusantara.

3. Negara Nusantara Berkelanjutan

Keberlanjutan merupakan salah satu pilar utama visi nasional, yang mencakup keberlanjutan lingkungan, ekonomi, dan sosial. Visi "Bengkulu Berkelanjutan" di tingkat provinsi mencerminkan komitmen untuk menjaga dan melestarikan lingkungan serta mendukung pembangunan yang ramah lingkungan. Ini melibatkan upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, mengembangkan energi terbarukan, dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Program-program yang berfokus pada mitigasi perubahan iklim dan konservasi lingkungan di Provinsi Bengkulu selaras dengan upaya nasional untuk mencapai keberlanjutan lingkungan.

Visi "Bengkulu Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan" selaras dengan visi nasional "Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan" dalam beberapa aspek kunci. Kedua visi ini menekankan pentingnya kedaulatan ekonomi, kemajuan sosial-ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan. Melalui implementasi program dan strategi yang

mendukung peningkatan daya saing ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan, Provinsi Bengkulu berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian visi nasional. Keselarasan ini menunjukkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang holistik dan berkelanjutan untuk seluruh Indonesia.

Tabel 4. 1 Penyelerasan Visi RPJPN 2025-2045 dan Visi RPJPD Provinsi Bengkulu 2025-2045

RPJPN 2025 Indonesia	RPJPD 2025 Provinsi Bengkulu
VISI	
<i>Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan</i>	<i>Bengkulu Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan</i>

Perumusan visi ini juga merupakan terjemahan dari upaya untuk menjawab isu-isu strategis yang dihadapi oleh Provinsi Bengkulu. Visi tersebut dirancang untuk mencakup aspek kemajuan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Berikut adalah penjelasan bagaimana setiap isu strategis mempengaruhi perumusan pokok-pokok visi dan pernyataan visi daerah:

Peningkatan Daya Saing Ekonomi

- **Maju:** Peningkatan daya saing ekonomi mencerminkan upaya untuk memperkuat sektor ekonomi dengan inovasi, teknologi, dan efisiensi, sehingga Provinsi Bengkulu dapat lebih kompetitif di tingkat nasional dan internasional.
- **Sejahtera:** Dengan peningkatan daya saing ekonomi, diharapkan kesejahteraan masyarakat juga meningkat melalui peningkatan kesempatan kerja, pendapatan, dan kualitas hidup.

Hilirisasi Komoditas Unggulan dan Pengembangan Pariwisata yang Komprehensif dan Kompetitif

- **Maju:** Mengembangkan hilirisasi komoditas unggulan dan pariwisata yang kompetitif akan meningkatkan nilai tambah ekonomi dan memperkuat posisi Bengkulu sebagai destinasi unggulan.
- **Sejahtera:** Pengembangan ini akan membuka lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendukung kesejahteraan secara keseluruhan.

Pengembangan konektivitas serta Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan

- **Maju:** Konektivitas yang baik dan infrastruktur berkualitas akan mendukung pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi logistik.
- **Berkelanjutan:** Infrastruktur yang dibangun dengan prinsip berkelanjutan akan memastikan bahwa pembangunan tersebut ramah lingkungan dan dapat bertahan dalam jangka panjang, mendukung keberlanjutan sumber daya alam.

Kemiskinan, Kesejahteraan dan Daya Saing SDM

- **Sejahtera:** Mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dengan kualitas hidup yang lebih baik.
- **Maju:** Meningkatkan daya saing sumber daya manusia akan memastikan bahwa masyarakat memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam ekonomi modern, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pembangunan peran perempuan pada sektor formal di Provinsi Bengkulu masih relatif rendah

- **Sejahtera:** Memperkuat peran perempuan dalam sektor formal akan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat dengan memberikan peluang ekonomi yang lebih adil.
- **Maju:** Pemberdayaan perempuan akan memperkuat ekonomi dengan diversifikasi tenaga kerja dan memanfaatkan potensi penuh dari seluruh populasi.

Peningkatan Kinerja Birokrasi

- **Maju:** Birokrasi yang efisien dan profesional akan meningkatkan pelayanan publik, mendukung pembangunan yang lebih cepat dan lebih efektif.
- **Berkelanjutan:** Kinerja birokrasi yang baik juga mendukung pengelolaan sumber daya yang lebih baik dan lebih bertanggung jawab, memastikan keberlanjutan program dan kebijakan.

Pembangunan Rendah Karbon dan Emisi GRK

- **Berkelanjutan:** Pembangunan yang rendah karbon akan membantu mengurangi dampak perubahan iklim, memastikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan jangka panjang.
- **Sejahtera:** Mengurangi emisi GRK juga berdampak pada kualitas hidup masyarakat dengan mengurangi polusi dan meningkatkan kesehatan publik.

Tabel 4. 2 Perumusan Visi berdasarkan Isu Strategis

No	Isu Straegis	Pokok-Pokok Visi	Pernyataan Visi
1	Peningkatan Daya Saing Ekonomi	Maju, Sejahtera	Bengkulu Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan
2	Hilirisasi Komoditas Unggulan dan Pengembangan Pariwisata yang Komprehensif dan Kompetitif	Maju, Sejahtera	
3	Pengembangan konektivitas serta Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Maju, Berkelanjutan	

No	Isu Straegis	Pokok-Pokok Visi	Pernyataan Visi
4	Kemiskinan, Kesejahteraan dan Daya Saing SDM	Maju, Sejahtera	
5	Pembangunan peran perempuan pada sektor formal di Provinsi Bengkulu masih relatif rendah	Maju, Sejahtera	
6	Peningkatan Kinerja Birokrasi	Maju, Berkelanjutan	
7	Pembangunan Rendah Karbon dan Emisi GRK	Sejahtera, Berkelanjutan	

Dengan memperhatikan isu-isu strategis yang telah diidentifikasi dan menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), “Indonesia Emas 2045: Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan, Visi Provinsi Bengkulu dirumuskan untuk menghadirkan masa depan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Bengkulu:

“**BENGKULU MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN**”

Visi ini menandai tekad untuk mewujudkan Provinsi Bengkulu sebagai daerah yang mampu Maju dalam berbagai aspek kehidupan. Maju dalam artian memiliki ekonomi yang kuat, sumber daya yang berkelanjutan, dan masyarakat yang berdaya saing. Sejahtera mencakup kesejahteraan ekonomi, sosial dan budaya bagi semua warganya dengan pendekatan inklusif dan adil. Keberlanjutan menggarisbawahi komitmen terhadap lingkungan dan pembangunan yang tidak mengorbankan generasi mendatang.

Indikasi terwujudnya Visi Pembangunan Provinsi Bengkulu Tahun 2025 – 2045, ditandai dengan:

- Maju:** Kemajuan Provinsi Bengkulu harus tercermin dalam aspek kehidupan, khususnya ekonomi dan sosial. Kemajuan ekonomi dan sosial Bengkulu ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi.
- Sejahtera:** Memberikan kemakmuran utuh kepada masyarakat, yang ditunjukan dengan terwujudnya tatanan sosial masyarakat yang memiliki daya saing dan peradaban yang tinggi, serta terpenuhinya kebutuhan layanan masyarakat seperti layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, pangan, air bersih, energy dan informasi.

3. **Berkelanjutan:** Berkomitmen untuk menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seimbang dengan pembangunan sosial, sumber daya alam dan lingkungan yang lestari, dan berkualitas, serta tata kelola pemerintahan yang baik.

4.2. Sasaran Visi

Sasaran visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu 2025-2045 merupakan hasil penyelarasan yang komprehensif dengan sasaran visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Proses penyelarasan ini mencerminkan kepatuhan terhadap berbagai regulasi dan pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, khususnya Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang diterbitkan pada 10 Januari 2024, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang juga diterbitkan pada 10 Januari 2024.

Proses penyelarasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa sasaran visi di tingkat daerah sejalan dengan prioritas pembangunan nasional, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan nasional secara efektif dan efisien. Sasaran visi RPJPD Provinsi Bengkulu mencakup berbagai aspek yang menjadi prioritas nasional, seperti peningkatan pendapatan per kapita, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, peningkatan daya saing sumber daya manusia, penurunan emisi gas rumah kaca menuju net zero emission, serta penguatan kepemimpinan daerah.

Dengan mengikuti arahan dan pedoman yang ditetapkan dalam Surat Edaran Bersama dan Instruksi Menteri, Provinsi Bengkulu memastikan bahwa perencanaan pembangunan jangka panjangnya tidak hanya relevan dan sesuai dengan kondisi lokal, tetapi juga mendukung agenda nasional. Hal ini juga menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan dan strategi pembangunan yang terintegrasi dan harmonis dengan rencana pembangunan nasional.

Tabel 4. 3 Penyelerasan Sasaran Visi RPJPN 2025-2045 dan Sasaran Visi Provinsi Bengkulu RPJPD 2025-2045

RPJPN 2025-2045				RPJPD 2025-2045			
Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
Pendapatan per kapita setara negara maju	a. GNI Per Kapita (US\$)	5.500	30.300	Peningkatan Pendapatan per kapita	a. PDRB per kapita (Rp Juta)	55 – 60	180 – 235
	b. Kontribusi PDB Maritim (%)	7,6	15,0		b. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	31,47	285,37
	c. Kontribusi PDB Manufaktur (%)	20,8	28,0		c. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	5,50 – 6,00	10– 12
Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang	a. Tingkat Kemiskinan (%)	6,0 - 7,0	0,5 - 0,8	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	a. Tingkat Kemiskinan (%)	13,6 – 13,1	5– 7
	b. Rasio Gini (indeks)	0,379 - 0,382	0,377 - 0,320		b. Rasio gini (Indeks)	0,327 – 0,332	0,265 – 0,288
	c. Kontribusi PDRB KTI (%)	21,5 (2022)	28,5		c. Kontribusi PDRB Provinsi (%)	0,47-0,48	0,7-0,8

RPJPN 2025-2045				RPJPD 2025-2045			
Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat	<i>Global Power Index</i> (peringkat)	34 (2023)	15 besar	<i>Kepemimpinan Daerah dalam mendukung visi daerah</i>	Indeks Daya Saing Daerah	3,33-3,35	3,80-4,02
Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks Modal Manusia (indeks)	0,54 (2022)	0,73	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Modal Manusia	0,57	0,74
Intensitas emisi GRK menurun menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	38,6	93,5	Penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	57,74	90,73

4.2.1. Pendapatan per Kapita Setara Negara Maju

RPJPN 2025-2045 memiliki sasaran untuk meningkatkan pendapatan per kapita setara dengan negara maju, dengan indikator utama Gross National Income (GNI) per kapita yang ditargetkan mencapai US\$30.300 pada tahun 2045. Sasaran ini diterjemahkan dalam RPJPD Provinsi Bengkulu sebagai peningkatan pendapatan per kapita dengan indikator PDRB per kapita yang diharapkan mencapai Rp180-235 juta pada tahun 2045. Selain itu, RPJPD juga menargetkan peningkatan Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) dan kontribusi PDRB industri pengolahan, yang sejalan dengan upaya nasional untuk meningkatkan kontribusi sektor maritim dan manufaktur terhadap PDB.

4.2.2. Kemiskinan Menuju 0% dan Ketimpangan Berkurang

RPJPN menargetkan pengentasan kemiskinan menuju 0% dan pengurangan ketimpangan dengan indikator tingkat kemiskinan yang diturunkan hingga 0,5-0,8% dan rasio Gini yang menurun hingga 0,320. RPJPD Provinsi Bengkulu menyelaraskan sasaran ini dengan target penurunan tingkat kemiskinan hingga 5-7% dan rasio Gini hingga 0,265-0,288 pada tahun 2045. Selain itu, kontribusi PDRB provinsi diharapkan meningkat menjadi 0,7-0,8%, yang mendukung pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan di daerah.

4.2.3. Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat

RPJPN menargetkan peningkatan kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di dunia internasional, yang diukur melalui Global Power Index, dengan target masuk 15 besar. RPJPD Provinsi Bengkulu mendukung sasaran ini melalui peningkatan kepemimpinan daerah, diukur dengan Indeks Daya Saing Daerah yang diharapkan meningkat menjadi 3,80-4,02 pada tahun 2045.

4.2.4. Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat

RPJPN menargetkan peningkatan daya saing sumber daya manusia dengan Indeks Modal Manusia yang diharapkan mencapai 0,73 pada tahun 2045. Sasaran ini selaras dengan RPJPD Provinsi Bengkulu yang menargetkan peningkatan Indeks Modal Manusia dari 0,57 pada tahun 2025 menjadi 0,74 pada tahun 2045. Hal ini menunjukkan komitmen daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan sumber daya manusia untuk mendukung daya saing ekonomi.

4.2.5. Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission

RPJPN menetapkan target penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) menuju net zero emission dengan penurunan intensitas emisi sebesar 93,5% pada tahun 2045. RPJPD Provinsi Bengkulu menyelaraskan sasaran ini dengan target penurunan intensitas emisi GRK dari 57,74% pada tahun 2025 menjadi 90,73% pada tahun 2045. Keselarasan ini menunjukkan komitmen daerah untuk mendukung upaya nasional dalam mitigasi perubahan iklim dan pencapaian target net zero emission.

Melalui penyelarasan sasaran visi RPJPN dan RPJPD, Provinsi Bengkulu menunjukkan komitmennya dalam mendukung tujuan nasional. Dengan indikator dan target yang relevan, strategi pembangunan daerah tidak hanya mendukung pencapaian tujuan nasional tetapi juga memastikan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan di tingkat lokal. Sinergi antara pusat dan daerah ini akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai visi pembangunan yang lebih maju dan sejahtera.

Dengan demikian, sasaran visi RPJPD Provinsi Bengkulu 2025-2045 tidak hanya mencerminkan aspirasi lokal tetapi juga komitmen untuk mendukung dan berkontribusi pada pencapaian visi nasional. Penyelarasan ini memastikan bahwa setiap langkah pembangunan yang diambil oleh Provinsi Bengkulu berada dalam kerangka kerja yang lebih besar dan terintegrasi, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat di tingkat lokal maupun nasional.

4.2. Misi

Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu 2025-2045 merupakan hasil penyelarasan dengan agenda transformasi Indonesia yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Proses perumusan misi ini dilakukan dengan pendekatan top-down dan bottom-up, memastikan bahwa setiap misi yang dirumuskan tidak hanya sesuai dengan prioritas nasional tetapi juga relevan dengan kondisi dan kebutuhan lokal.

Dari sisi top-down, misi RPJPD Provinsi Bengkulu 2025-2045 diselaraskan dengan agenda transformasi nasional yang bertujuan untuk menciptakan Indonesia yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Agenda transformasi ini mencakup berbagai aspek seperti transformasi sosial, ekonomi, tata kelola, supremasi hukum, ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta kesinambungan pembangunan. Provinsi Bengkulu mengadopsi dan menyesuaikan agenda ini ke dalam konteks lokal untuk memastikan bahwa pembangunan daerah sejalan dengan arah kebijakan nasional.

Tabel berikut menunjukkan hubungan antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu 2025-2045. Masing-masing misi RPJPD dirancang untuk selaras dengan agenda/misi RPJPN, menciptakan sinergi yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional di tingkat daerah.

Tabel 4. 4 **Penyelarasan Agenda/Misi RPJPN 2025-2045 dengan Misi RPJPD Provinsi Bengkulu 2025-2045**

No	RPJPN 2025-2045		RPJPD 2025-2045
	Kelompok Agenda/Misi	Agenda/Misi	Misi
1	Transformasi Indonesia	Transformasi sosial	Mewujudkan transformasi sosial melalui pembangunan manusia yang berdaya saing
2		Transformasi ekonomi	Mewujudkan transformasi ekonomi secara inklusif berbasis sumberdaya alam melalui hilirisasi produk unggulan daerah dan ekonomi kreatif
3		Transformasi tata kelola	Menciptakan transformasi kelembagaan dan tata kelola pemerintahan yang adaptif, profesional, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima
4	Landasan Transfromasi	Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	Menciptakan atmosfir pembangunan yang kondusif melalui perwujudan Keamanan Daerah Tangguh, dan Demokrasi yang berkeadilan
5		Ketahanan sosial budaya dan ekologi	Pembangunan Sosial Budaya dan Ekologi
6	Kerangka Implementasi Transformasi	Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan
7		Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Meningkatkan pembangunan infrastruktur ekonomi yang berkualitas dan ramah lingkungan untuk mendukung pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru
8		Kesinambungan pembangunan	Mewujudkan sinergi dan kesinambungan pembangunan

Transformasi Sosial

Misi pertama RPJPN tentang transformasi sosial diterjemahkan dalam RPJPD Provinsi Bengkulu menjadi misi untuk mewujudkan transformasi sosial melalui pembangunan

manusia yang berdaya saing. Misi ini menekankan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Dengan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta memberikan peluang ekonomi yang lebih baik, misi ini selaras dengan tujuan nasional untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Transformasi Ekonomi

Agenda transformasi ekonomi dalam RPJPN diterjemahkan dalam RPJPD menjadi misi untuk mewujudkan transformasi ekonomi secara inklusif berbasis sumber daya alam melalui hilirisasi produk unggulan daerah dan ekonomi kreatif. Misi ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan memaksimalkan potensi sumber daya alam dan sektor ekonomi kreatif. Ini sejalan dengan agenda nasional untuk memperkuat perekonomian dengan meningkatkan nilai tambah komoditas lokal dan mempromosikan inovasi serta kreativitas.

Transformasi Tata Kelola

Misi ketiga dalam RPJPN mengenai transformasi tata kelola diterjemahkan dalam RPJPD menjadi misi untuk menciptakan transformasi kelembagaan dan tata kelola pemerintahan yang adaptif, profesional, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Misi ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola pemerintahan untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan meningkatkan efisiensi serta akuntabilitas pemerintahan. Hal ini selaras dengan tujuan nasional untuk memperkuat institusi pemerintahan yang responsif dan akuntabel.

Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan

Agenda RPJPN mengenai supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia diimplementasikan dalam RPJPD melalui misi untuk menciptakan atmosfer pembangunan yang kondusif melalui perwujudan keamanan daerah tangguh dan demokrasi yang berkeadilan. Misi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan stabil, serta mempromosikan nilai-nilai demokrasi yang adil untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Ini sesuai dengan upaya nasional untuk menjaga stabilitas dan memperkuat sistem hukum serta demokrasi.

Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Misi RPJPN tentang ketahanan sosial budaya dan ekologi diterjemahkan dalam RPJPD menjadi misi pembangunan sosial budaya dan ekologi. Misi ini berfokus pada peningkatan kerukunan sosial, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, dan perlindungan terhadap nilai-nilai budaya serta keragaman etnis dan agama. Ini sejalan dengan tujuan nasional untuk memperkuat ketahanan sosial budaya dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan

Agenda RPJPN tentang pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan diterjemahkan dalam RPJPD menjadi misi untuk mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan. Misi ini memastikan bahwa setiap wilayah, termasuk pedesaan dan perkotaan, mendapatkan perhatian yang sama dalam pembangunan infrastruktur dan layanan dasar untuk mengurangi kesenjangan. Hal ini sesuai dengan tujuan nasional untuk menciptakan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia.

Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Misi RPJPN mengenai sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan diterjemahkan dalam RPJPD menjadi misi untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur ekonomi yang berkualitas dan ramah lingkungan untuk mendukung pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Misi ini fokus pada pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat konektivitas antar wilayah. Ini selaras dengan agenda nasional untuk meningkatkan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

Kesinambungan Pembangunan

Agenda RPJPN tentang kesinambungan pembangunan diterjemahkan dalam RPJPD menjadi misi untuk mewujudkan sinergi dan kesinambungan pembangunan. Misi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan pusat dan daerah berjalan secara sinergis dan berkesinambungan, menciptakan kerangka kerja yang stabil dan efisien. Hal ini sejalan dengan tujuan nasional untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan dilaksanakan secara harmonis di seluruh Indonesia.

Dengan menyelaraskan misi RPJPD dengan agenda/misi RPJPN, Provinsi Bengkulu dapat memastikan bahwa strategi dan program pembangunannya mendukung tujuan nasional. Sinergi antara pusat dan daerah ini akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan, serta meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat di Provinsi Bengkulu.

Selain itu, perumusan misi RPJPD Provinsi Bengkulu 2025-2045 juga dilakukan dengan pendekatan bottom-up. Proses ini melibatkan identifikasi permasalahan yang ada di daerah melalui berbagai konsultasi dan partisipasi dari pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta. Identifikasi permasalahan ini mencakup berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang kemudian diterjemahkan menjadi misi-misi spesifik yang bertujuan

untuk menjawab permasalahan tersebut dalam rangka mencapai visi "Bengkulu Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan."

Provinsi Bengkulu menghadapi tantangan dalam pembangunan manusia yang belum optimal dan tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi. Permasalahan pembangunan manusia yang belum optimal disebabkan oleh rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan, serta keterbatasan akses terhadap kedua aspek penting tersebut. Kondisi ini mengakibatkan rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), yang berdampak pada produktivitas masyarakat yang rendah dan keterbatasan dalam menciptakan inovasi serta nilai tambah dalam berbagai sektor ekonomi. Sementara itu, tingginya tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu disebabkan oleh kurangnya peluang ekonomi dan pekerjaan yang layak, serta terbatasnya akses terhadap program pemberdayaan ekonomi dan bantuan sosial. Dampaknya adalah rendahnya tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, serta ketimpangan sosial dan ekonomi yang tinggi.

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, Misi 1 dirumuskan dengan fokus pada "Mewujudkan transformasi sosial melalui pembangunan manusia yang berdaya saing". Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta memberikan peluang ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat. Strategi utama mencakup peningkatan akses dan kualitas pendidikan melalui pengembangan kurikulum yang relevan dan meningkatkan akses ke layanan kesehatan yang memadai. Selain itu, program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan modal usaha dirancang untuk meningkatkan kompetensi masyarakat dan menciptakan peluang kerja yang lebih baik. Program bantuan sosial yang tepat sasaran juga akan membantu mengurangi beban ekonomi masyarakat miskin dan mendorong partisipasi mereka dalam program pemberdayaan.

Provinsi Bengkulu juga menghadapi tantangan dalam hal pertumbuhan ekonomi yang cenderung stagnan dan hilirisasi komoditas unggulan serta pengembangan pariwisata yang masih belum optimal. Pertumbuhan ekonomi yang stagnan disebabkan oleh kurangnya nilai tambah pada komoditas unggulan dan belum maksimalnya pengembangan sektor-sektor potensial, termasuk pariwisata. Kondisi ini menghambat laju pertumbuhan ekonomi daerah dan mengurangi daya saing Provinsi Bengkulu di tingkat nasional dan internasional. Hilirisasi komoditas unggulan yang belum optimal berarti bahwa banyak komoditas diekspor dalam bentuk mentah atau setengah jadi, sehingga nilai tambah dan manfaat ekonominya tidak sepenuhnya dirasakan oleh daerah. Selain itu, potensi pariwisata yang besar di Provinsi Bengkulu belum dimanfaatkan secara maksimal, sehingga kontribusinya terhadap perekonomian daerah masih rendah.

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, Misi 2 dirumuskan dengan fokus pada "Mewujudkan transformasi ekonomi secara inklusif berbasis sumberdaya alam melalui hilirisasi produk unggulan daerah dan ekonomi kreatif". Misi ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih dinamis dan inklusif dengan memaksimalkan potensi sumber daya alam dan sektor kreatif. Strategi utama mencakup pengembangan industri pengolahan komoditas unggulan untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal, yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat. Selain itu, promosi dan pengembangan destinasi wisata di Provinsi Bengkulu akan ditingkatkan untuk menarik lebih banyak wisatawan dan investasi di sektor pariwisata, yang pada gilirannya akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan daerah.

Provinsi Bengkulu menghadapi tantangan dalam hal aparatur sipil negara (ASN) yang belum sepenuhnya berkualitas dan profesional, serta pelayanan publik yang belum optimal. Permasalahan kualitas ASN mencakup keterbatasan dalam hal kompetensi, keterampilan, dan etos kerja, yang mengakibatkan rendahnya kinerja birokrasi dan efektivitas pemerintahan. Kondisi ini menghambat implementasi kebijakan dan program pembangunan yang efisien dan efektif. Selain itu, pelayanan publik yang belum optimal mencerminkan adanya masalah dalam sistem dan prosedur pelayanan, yang sering kali kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, kurang transparan, dan tidak akuntabel. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan menurunkan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah daerah.

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, Misi 3 dirumuskan dengan fokus pada "Menciptakan transformasi kelembagaan dan tata kelola pemerintahan yang adaptif, profesional, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima". Misi ini bertujuan untuk memperkuat kelembagaan pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dan pengembangan kapasitas ASN. Strategi utama mencakup pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan tugas dengan profesionalisme tinggi. Penerapan standar kinerja yang jelas dan evaluasi berkala akan membantu memastikan bahwa ASN bekerja dengan efisien dan efektif.

Provinsi Bengkulu menghadapi tantangan dalam hal belum kondusifnya atmosfer pembangunan. Permasalahan ini mencakup isu-isu seperti ketidakstabilan keamanan, konflik sosial, dan kurangnya keadilan dalam proses pembangunan. Kondisi ini menghambat proses pembangunan karena menciptakan lingkungan yang tidak mendukung bagi investasi, partisipasi masyarakat, dan implementasi program-

program pembangunan. Ketidakstabilan keamanan bisa disebabkan oleh tingginya angka kriminalitas, ketegangan sosial, dan kurangnya penegakan hukum yang efektif. Di sisi lain, kurangnya keadilan dalam pembangunan sering kali terlihat dalam bentuk distribusi sumber daya yang tidak merata dan partisipasi masyarakat yang terbatas dalam pengambilan keputusan.

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, Misi 4 dirumuskan dengan fokus pada "Menciptakan atmosfir pembangunan yang kondusif melalui perwujudan keamanan daerah tangguh, dan demokrasi yang berkeadilan". Misi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang stabil dan mendukung pembangunan melalui peningkatan keamanan dan penerapan prinsip-prinsip demokrasi yang berkeadilan. Strategi utama mencakup peningkatan keamanan daerah dengan memperkuat penegakan hukum, meningkatkan kapasitas aparat keamanan, dan membangun kerjasama antara masyarakat dan aparat keamanan untuk mencegah dan menangani konflik serta kriminalitas. Program-program pencegahan kriminalitas dan upaya rehabilitasi juga akan diterapkan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman.

Provinsi Bengkulu dihadapkan pada tantangan serius dalam pengelolaan lingkungan hidup yang kurang optimal. Permasalahan ini mencakup degradasi lingkungan, pencemaran, dan penggunaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Kondisi ini menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti menurunnya kualitas udara dan air, hilangnya keanekaragaman hayati, serta meningkatnya risiko bencana alam. Pengelolaan lingkungan yang rendah juga memperburuk kualitas hidup masyarakat dan menghambat pembangunan berkelanjutan.

Untuk menjawab tantangan ini, Misi 5 dirumuskan dengan fokus pada "Pembangunan sosial budaya dan ekologi". Misi ini bertujuan untuk mengintegrasikan aspek sosial, budaya, dan lingkungan dalam setiap upaya pembangunan, sehingga tercipta keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Strategi utama mencakup upaya pelestarian lingkungan dengan memperkuat regulasi lingkungan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran. Program reboisasi dan rehabilitasi ekosistem kritis akan digalakkan untuk memulihkan kawasan yang rusak dan meningkatkan fungsi ekologi.

Provinsi Bengkulu menghadapi tantangan serius terkait pemenuhan infrastruktur dasar yang belum optimal dan pembangunan pedesaan yang masih tertinggal. Permasalahan infrastruktur dasar mencakup akses terbatas ke jalan yang layak, air bersih, listrik, dan layanan kesehatan. Kondisi ini menghambat mobilitas masyarakat, mengurangi efisiensi ekonomi, dan menurunkan kualitas hidup. Selain itu, pembangunan pedesaan yang belum optimal mencerminkan ketimpangan dalam

distribusi sumber daya dan pelayanan, yang menyebabkan kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan semakin lebar.

Untuk mengatasi masalah-masalah ini, Misi 6 dirumuskan dengan fokus pada "Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan". Misi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap wilayah, termasuk pedesaan, mendapatkan perhatian yang sama dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar. Strategi utama mencakup peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar di seluruh wilayah, seperti pembangunan jalan, penyediaan air bersih, elektrifikasi pedesaan, dan peningkatan fasilitas kesehatan. Program ini akan memastikan bahwa semua masyarakat, termasuk yang berada di daerah terpencil, memiliki akses ke layanan dasar yang layak.

Provinsi Bengkulu menghadapi permasalahan konektivitas dan pengembangan infrastruktur strategis yang masih terbatas serta kurangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Keterbatasan infrastruktur ini mencakup jalan yang tidak memadai, jembatan yang kurang, serta fasilitas transportasi yang tidak optimal, yang menghambat mobilitas barang dan orang. Selain itu, minimnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru menyebabkan konsentrasi aktivitas ekonomi hanya di beberapa area, sementara daerah lainnya tertinggal. Ketidakseimbangan ini mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dan menurunkan potensi daerah secara keseluruhan.

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, Misi 7 dirumuskan dengan fokus pada "Meningkatkan pembangunan infrastruktur ekonomi yang berkualitas dan ramah lingkungan untuk mendukung pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru". Misi ini bertujuan untuk memperkuat infrastruktur ekonomi sekaligus mendukung terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan. Strategi utama mencakup pembangunan dan perbaikan infrastruktur strategis seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah. Infrastruktur yang lebih baik akan memudahkan mobilitas, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta menarik investasi.

Provinsi Bengkulu menghadapi permasalahan berupa belum kuatnya sinergi antara pembangunan pusat dan daerah. Kurangnya koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah mengakibatkan kebijakan dan program pembangunan yang tidak selaras, serta alokasi sumber daya yang tidak optimal.

Hal ini menyebabkan hambatan dalam implementasi proyek-proyek pembangunan, ketidakefisienan penggunaan anggaran, dan hasil pembangunan yang kurang maksimal. Ketidaksinkronan ini juga dapat menimbulkan tumpang tindih program,

pemborosan sumber daya, dan pada akhirnya menghambat percepatan pembangunan yang seharusnya berjalan lebih efektif dan efisien.

Untuk mengatasi masalah ini, Misi 8 dirumuskan dengan fokus pada "Mewujudkan sinergi dan kesinambungan pembangunan". Misi ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah agar tercipta harmonisasi dalam pelaksanaan pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Strategi utama mencakup peningkatan mekanisme koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah melalui forum-forum konsultasi, pertemuan rutin, dan pembentukan tim koordinasi lintas sektor. Forum-forum ini akan menjadi wadah untuk menyelaraskan kebijakan, merumuskan strategi bersama, dan menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program pembangunan.

Rangkuman penjelasan permasalahan dan rumusan misi dirangkung dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. 5 Permasalahan Daerah dan Rumusan Misi RPJPD Provinsi Bengkulu 2025-2045

No	Permasalahan	Misi
1	a. Pembangunan Manusia yang Belum Optimal b. Kemiskinan yang Masih Cukup Tinggi	Misi 1: Mewujudkan transformasi sosial melalui pembangunan manusia yang berdaya saing
2	a. Pertumbuhan Ekonomi Cenderung Stagnan b. Hilirisasi Komoditas Unggulan dan Pengembangan Pariwisata Masih Belum Optimal	Misi 2: Mewujudkan transformasi ekonomi secara inklusif berbasis sumberdaya alam melalui hilirisasi produk unggulan daerah dan ekonomi kreatif
3	a. ASN yang belum sepenuhnya berkualitas dan professional b. Pelayanan belum optimal	Misi 3: Menciptakan transformasi kelembagaan dan tata kelola pemerintahan yang adaptif, profesional, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima
4	Belum Kondusifnya atmosfir pembangunan	Misi 4: Menciptakan atmosfir pembangunan yang kondusif melalui perwujudan keamanan daerah tangguh, dan demokrasi yang berkeadilan
5	Rendahnya pengelolaan lingkungan hidup	Misi 5:

No	Permasalahan	Misi
		Pembangunan sosial budaya dan ekologi
6	a. Pemenuhan Infrastruktur Dasar Belum Optimal b. Pembangunan Pedesaan yang belum optimal	Misi 6: Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan
7	a. Konektivitas dan Pengembangan Infrastruktur Strategis Masih Terbatas b. Kurangnya Pusat-Pusat Pertumbuhan/ Ekonomi Baru	Misi 7: Meningkatkan pembangunan infrastruktur ekonomi yang berkualitas dan ramah lingkungan untuk mendukung pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru
8	Belum kuatnya sinergi Pembangunan pusat – daerah	Misi 8 : Mewujudkan sinergi dan kesinambungan pembangunan

Misi-misi RPJPD Provinsi Bengkulu 2025 – 2045 dirancang untuk menjembatani kesenjangan, mempercepat pembangunan dan menjadikan visi sebagai kenyataan. Di masa depan, dunia akan menghadapi perubahan yang jauh lebih cepat daripada yang pernah dialami sebelumnya, terutama dipicu oleh megatren global seperti revolusi teknologi, perubahan demografi, perubahan iklim, serta dinamika geopolitik dan geekonomi. Perubahan ini memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial dan budaya, ekonomi, serta menuntut adaptasi dan inovasi yang cepat dari individu, masyarakat, dan negara untuk menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang yang muncul.

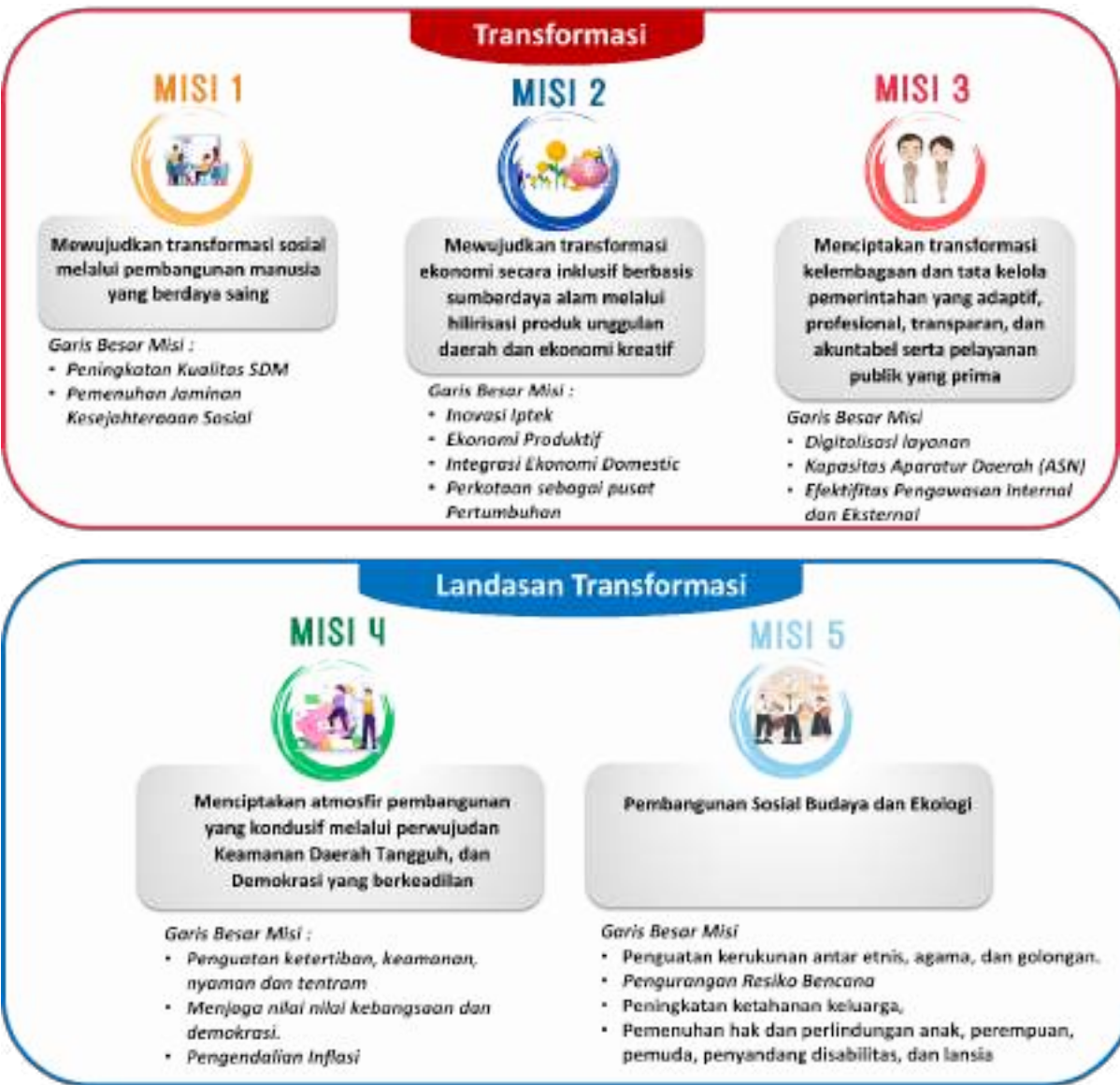
Di tengah perubahan dunia yang begitu pesat, pemanfaatan sumber daya dalam negeri belum sepenuhnya optimal dan berkelanjutan. Walaupun Bengkulu telah mencatat kemajuan signifikan dari tahapan pembangunan sebelumnya, tetapi masih terdapat banyak ruang untuk perbaikan yang harus dilakukan, yang terkait dengan kualitas sumber daya manusia, riset dan inovasi, produktivitas sektor ekonomi produktif, ketidakpastian hukum, dan kerusakan lingkungan.

Untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, Provinsi Bengkulu sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mengubah pendekatan pembangunan yang digunakan di masa lalu. Langkah reformasi saja tidak cukup, melainkan perlu diperkuat dengan transformasi menyeluruh di berbagai bidang

pembangunan. Transformasi ini penting untuk mewujudkan pembangunan yang kompetitif, didorong oleh peningkatan produktivitas yang inklusif dan berkelanjutan. Langkah transformasi di Provinsi Bengkulu sejalan dengan Transformasi Indonesia, yaitu transformasi menyeluruh yang meliputi Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, dan Transformasi Tata Kelola.

Ketiga transformasi ini adalah kunci penting pembangunan jangka Panjang yang di turunkan menjadi 8 (delapan) Misi RPJPD Provinsi Bengkulu di mana misi tersebut saling terkait dan saling memengaruhi di dalam mewujudkan Bengkulu Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan 2045.

MISI RPJPD 2025-2045





digitalisasi layanan, peningkatan kapasitas aparaturnya daerah (ASN), dan efektivitas pengawasan internal dan eksternal. Dengan strategi-strategi ini, diharapkan ASN akan lebih berkualitas dan profesional, serta pelayanan publik akan menjadi lebih optimal, transparan, dan akuntabel.

Misi 4: Menciptakan Atmosfir Pembangunan yang Kondusif melalui Perwujudan Keamanan Daerah Tangguh, dan Demokrasi yang Berkeadilan bertujuan untuk mengatasi masalah ketidakstabilan keamanan, konflik sosial, dan kurangnya keadilan dalam proses pembangunan. Garis besar misi ini meliputi penguatan ketertiban dan keamanan, menjaga nilai kebangsaan dan demokrasi, serta pengendalian inflasi. Dengan strategi-strategi ini, diharapkan atmosfer pembangunan di Provinsi Bengkulu akan lebih kondusif, aman, adil, dan mendukung investasi serta partisipasi masyarakat.

Misi 5: Pembangunan Sosial Budaya dan Ekologi bertujuan untuk mengatasi permasalahan pengelolaan lingkungan hidup yang kurang optimal. Garis besar misi ini mencakup penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan, pengurangan risiko bencana, peningkatan ketahanan keluarga, serta pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia. Dengan strategi-strategi ini, diharapkan pengelolaan lingkungan hidup akan meningkat, menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan, serta mendorong pembangunan yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Misi 6: Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan dirumuskan untuk mengatasi masalah pemenuhan infrastruktur dasar yang belum optimal dan pembangunan pedesaan yang masih tertinggal. Garis besar misi ini mencakup penguatan kerjasama antardaerah dalam pengelolaan wilayah dan penguatan konektivitas antar wilayah. Dengan pelaksanaan strategi-strategi ini, diharapkan infrastruktur dasar dan pembangunan pedesaan di Provinsi Bengkulu akan lebih optimal, mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta menciptakan pembangunan yang merata dan berkeadilan.

Misi 7: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Ekonomi yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan untuk Mendukung Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru bertujuan untuk mengatasi permasalahan konektivitas dan pengembangan infrastruktur strategis yang masih terbatas serta kurangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Garis besar misi ini meliputi pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan penggunaan teknologi ramah lingkungan dan praktik pembangunan berkelanjutan. Dengan strategi-strategi ini, diharapkan konektivitas dan pengembangan infrastruktur strategis akan meningkat, mendukung terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang dapat menggerakkan perekonomian daerah secara berkelanjutan dan inklusif.

Misi 8: Mewujudkan Sinergi dan Kestinambungan Pembangunan dirumuskan untuk mengatasi masalah kurangnya sinergi antara pembangunan pusat dan daerah. Garis besar misi ini mencakup sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah, serta peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berdasarkan sasaran prioritas nasional. Dengan pelaksanaan strategi-strategi ini, diharapkan sinergi antara pembangunan pusat dan daerah akan semakin kuat, menciptakan harmoni dan keselarasan dalam pelaksanaan pembangunan, serta memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu.

Dalam merumuskan visi dan misi untuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu 2025-2045, telah dilakukan penyelarasan yang mendalam dengan visi dan agenda transformasi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJPN 2025-2045. Proses ini juga melibatkan identifikasi permasalahan spesifik daerah melalui pendekatan partisipatif, memastikan bahwa visi dan misi yang dirumuskan tidak hanya mencerminkan aspirasi nasional tetapi juga kebutuhan dan kondisi lokal.

Visi "Bengkulu Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan" menjadi panduan utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dengan misi-misi yang dirancang untuk menjawab tantangan utama yang dihadapi dan memanfaatkan peluang yang ada. Melalui kombinasi strategi top-down dan bottom-up, serta komitmen kuat dari semua pemangku kepentingan, Provinsi Bengkulu optimis dapat mencapai tujuan pembangunan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.



BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK



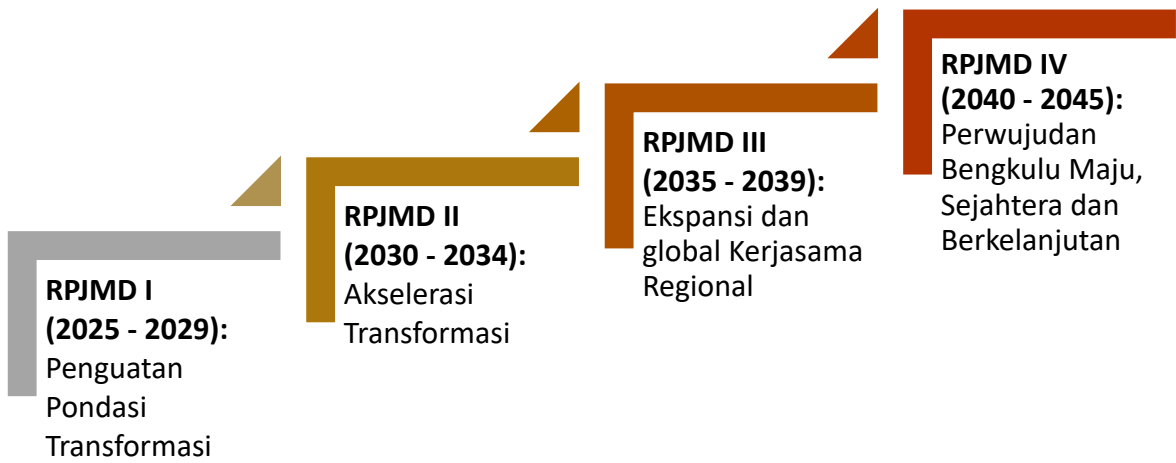
BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Dalam mengawali perjalanan menuju Provinsi Bengkulu Mandiri, Sejahtera dan Berkelanjutan 2045, RPJPD dirancang dengan kebijakan pembangunan jangka panjang yang sejalan dengan visi dan misi yang telah diuraikan pada bab IV. Arah kebijakan ini mengambil inspirasi dari komitmen untuk mewujudkan transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, supremasi hukum dan stabilitas, ketahanan sosial budaya dan energi, mewujudkan pembangunan yang merata dan burerkeadilan, mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan serta mewujudkan kesinambungan pembangunan. Ini merupakan penyelarasan visi dan misi RPJPN ke dalam RPJPD Provinsi Bengkulu 2025-2045.

5.1. Arah Kebijakan Pentahapan Pembangunan

Gambar di bawah menjelaskan tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu dari tahun 2025 hingga 2045. Tahapan ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan dirancang untuk secara bertahap mewujudkan visi "Bengkulu Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan."



Gambar 5. 1 Tahapan Periodesasi RPJPD

Tahapan RPJMD ini terdiri dari empat periode:

- RPJMD I (2025 - 2029): Penguatan Pondasi Transformasi** - Pada tahap ini, fokus utama adalah memperkuat dasar-dasar transformasi yang diperlukan untuk pembangunan jangka panjang. Langkah-langkah strategis akan diambil untuk membangun fondasi yang kuat dalam berbagai aspek pembangunan, termasuk ekonomi, sosial, dan infrastruktur.
- RPJMD II (2030 - 2034): Akselerasi Transformasi** - Tahap ini bertujuan untuk mempercepat proses transformasi yang telah dimulai pada periode sebelumnya. Fokusnya adalah pada peningkatan kecepatan dan efektivitas

implementasi program pembangunan untuk mencapai hasil yang signifikan dalam waktu yang lebih singkat.

3. **RPJMD III (2035 - 2039): Ekspansi dan Global Kerjasama Regional** - Pada periode ini, Provinsi Bengkulu akan memperluas jangkauan pembangunan dengan meningkatkan kerjasama regional dan global. Ekspansi ini mencakup berbagai sektor, termasuk ekonomi, pendidikan, dan teknologi, untuk meningkatkan daya saing daerah di kancah internasional.
4. **RPJMD IV (2040 - 2045): Perwujudan Bengkulu Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan** - Tahap akhir ini merupakan puncak dari upaya pembangunan selama dua dekade sebelumnya. Fokusnya adalah pada pencapaian visi besar Bengkulu yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan, dengan indikator keberhasilan yang mencakup peningkatan kualitas hidup masyarakat, ekonomi yang kuat, dan lingkungan yang terjaga.

Tahapan-tahapan ini dirancang untuk memastikan bahwa pembangunan di Provinsi Bengkulu dilakukan secara terencana, bertahap, dan berkesinambungan, sesuai dengan panduan RPJPN 2025-2045 yang secara detil dapat dilihat pada tabel V.1 berikut:

Tabel 5. 1 Tahapan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025 – 2045

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		I (2025 – 2029) Penguatan Pondasi Transformasi	II (2030 – 2034) Akselerasi Transformasi	III (2035 – 2039) Ekspansi dan Kerjasama Regional	IV (2040 – 2045) Perwujudan Bengkulu, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
BENGKULU MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN	Misi 1: Mewujudkan transformasi sosial melalui pembangunan manusia yang berdaya saing	Peningkatan kualitas sistem pendidikan, pembangunan kapasitas sosial, dan infrastruktur dasar.	Mengakselerasi inovasi pendidikan dan pelatihan, mendorong pembangunan ekonomi berbasis teknologi, serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efisien	Ekspansi global, dengan fokus melibatkan diplomasi pendidikan, ekspor produk unggulan daerah, dan pemberdayaan masyarakat global.	Pembangunan konektivitas nasional dan internasional, pembangunan manusia unggul, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
	Misi 2: Mewujudkan transformasi ekonomi secara inklusif berbasis sumberdaya alam melalui hilirisasi produk unggulan daerah dan ekonomi kreatif	Peningkatan produktivitas sektor sumberdaya alam dan pembentukan dasar ekonomi kreatif.	Mengakselerasi diversifikasi produk unggulan, pemberdayaan ekonomi kreatif, dan peningkatan nilai tambah produk lokal.	Ekspansi pasar internasional untuk produk-produk unggulan daerah.	Pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global melalui inovasi dan investasi strategis.

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		I (2025 – 2029) Penguatan Pondasi Transformasi	II (2030 – 2034) Akselerasi Transformasi	III (2035 – 2039) Ekspansi dan Kerjasama Regional	IV (2040 – 2045) Perwujudan Bengkulu, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan
	Misi 3: Menciptakan transformasi kelembagaan dan tata kelola pemerintahan yang adaptif, profesional, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima	Reformasi kelembagaan dan peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan.	Akselerasi transformasi, dengan penekanan pada profesionalisasi aparatur, peningkatan transparansi, dan akuntabilitas lembaga pemerintahan.	Ekspansi global, Provinsi Bengkulu akan meningkatkan kolaborasi antarlembaga dan meningkatkan reputasi internasional melalui tata kelola pemerintahan yang baik.	Pelayanan publik yang prima, terkoneksi dengan teknologi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
	Misi 4: Menciptakan atmosfir pembangunan yang kondusif melalui perwujudan Keamanan Daerah Tangguh, dan	Penyelenggaraan keamanan daerah dan pembentukan fondasi demokrasi yang kokoh.	Peningkatan kualitas keamanan dan upaya untuk memperkuat keadilan dalam sistem demokrasi.	Memperkuat kerjasama bidang keamanan dan demokrasi pada tingkat regional.	Sistem keamanan daerah tangguh dan demokrasi yang berkeadilan telah menjadi bagian integral dari pembangunan yang

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		I (2025 – 2029) Penguatan Pondasi Transformasi	II (2030 – 2034) Akselerasi Transformasi	III (2035 – 2039) Ekspansi dan Kerjasama Regional	IV (2040 – 2045) Perwujudan Bengkulu, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan
	Demokrasi yang berkeadilan				berkelanjutan dan kondusif.
	Misi 5: Pembangunan Sosial Budaya dan Ekologi	Memperkuat infrastruktur sosial, mempertahankan dan mengembangkan warisan budaya, serta menjaga keberlanjutan ekologi.	Mengakselerasi pembangunan sosial budaya dan ekologi dengan memperhatikan inklusivitas dan partisipasi masyarakat.	Menjalin kerjasama internasional untuk konservasi lingkungan dan pelestarian warisan budaya.	Pembangunan sosial budaya dan ekologi yang berkelanjutan, memberikan kontribusi positif terhadap kehidupan masyarakat dan menjaga kelestarian ekosistem.
	Misi 6: Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Penguatan fondasi transformasi dengan fokus mengidentifikasi dan mengatasi disparitas pembangunan antarwilayah serta memperkuat infrastruktur	Percepatan pembangunan di daerah yang masih tertinggal untuk mencapai keseimbangan dan keadilan dalam kewilayahan.	Mengembangkan kolaborasi regional dan nasional untuk meningkatkan sinergi pembangunan kewilayahan.	Perluasan sinergi pembangunan yang merata dan berkeadilan ke tingkat nasional, sehingga seluruh wilayah Provinsi Bengkulu dapat menikmati manfaat pembangunan dengan adil.

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		I (2025 – 2029) Penguatan Pondasi Transformasi	II (2030 – 2034) Akselerasi Transformasi	III (2035 – 2039) Ekspansi dan Kerjasama Regional	IV (2040 – 2045) Perwujudan Bengkulu, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan
		dasar di seluruh wilayah Provinsi.			
	Misi 7: Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan untuk mendukung pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru	Peningkatan dan modernisasi jaringan transportasi, seperti jalan, pelabuhan, dan bandara di seluruh wilayah provinsi.	Percepatan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah tertinggal.	Mengintensifkan kerja sama lintas wilayah dan meningkatkan konektivitas nasional.	Perluasan dan peningkatan infrastruktur yang ramah lingkungan secara keseluruhan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.
	Misi 8: Mewujudkan sinergi dan kesinambungan pembangunan	Pengembangan kebijakan lingkungan yang progresif dan berkelanjutan, termasuk penerapan teknologi ramah lingkungan dalam	Percepatan implementasi program-program keberlanjutan dan penggunaan sumber daya alam yang bijaksana.	Memperluas keterlibatan dalam kerja sama internasional dalam hal pengelolaan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam.	Penguatan kebijakan dan regulasi lingkungan yang menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta mengintegrasikan inovasi

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		I (2025 – 2029) Penguatan Pondasi Transformasi	II (2030 – 2034) Akselerasi Transformasi	III (2035 – 2039) Ekspansi dan Kerjasama Regional	IV (2040 – 2045) Perwujudan Bengkulu, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan
		pengelolaan sumber daya alam.			teknologi hijau dalam pembangunan.

5.1.1. Arah Kebijakan I (2025 – 2029): Penguatan Pondasi Transformasi

Pada periode ini, fokus utama adalah membangun dasar yang kuat untuk transformasi jangka panjang. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing misi dalam kerangka penguatan pondasi transformasi:

Misi 1: Mewujudkan Transformasi Sosial melalui Pembangunan Manusia yang Berdaya Saing

Kebijakan:

- **Peningkatan Kualitas Sistem Pendidikan:** Fokus pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan di semua jenjang, dengan menekankan pada kurikulum yang relevan dan peningkatan kompetensi guru.
- **Pembangunan Kapasitas Sosial:** Mendorong peningkatan kapasitas sosial masyarakat melalui program pelatihan dan pengembangan keterampilan.
- **Peningkatan Infrastruktur Dasar:** Membangun dan memperbaiki infrastruktur dasar seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi untuk mendukung pembangunan manusia yang berdaya saing.

Misi 2: Mewujudkan Transformasi Ekonomi secara Inklusif Berbasis Sumber Daya Alam melalui Hilirisasi Produk Unggulan Daerah dan Ekonomi Kreatif

Kebijakan:

- **Peningkatan Produktivitas Sektor Sumber Daya Alam:** Mendorong optimalisasi pengelolaan sumber daya alam melalui teknologi dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas.
- **Pembentukan Dasar Ekonomi Kreatif:** Mengembangkan sektor ekonomi kreatif dengan mendorong inovasi dan diversifikasi produk unggulan daerah.

Misi 3: Menciptakan Transformasi Kelembagaan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Profesional, Transparan, dan Akuntabel

Kebijakan:

- **Reformasi Kelembagaan:** Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kelembagaan pemerintah melalui restrukturisasi dan peningkatan kapasitas.
- **Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan:** Meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas aparatur pemerintah melalui pelatihan dan pengembangan sistem manajemen.

Misi 4: Menciptakan Atmosfir Pembangunan yang Kondusif melalui Perwujudan Keamanan Daerah Tangguh dan Demokrasi yang Berkeadilan

Kebijakan:

- **Penyelenggaraan Keamanan Daerah:** Membangun sistem keamanan daerah yang tangguh melalui peningkatan kapasitas dan kerjasama dengan berbagai pihak.

- **Pembentukan Fondasi Demokrasi yang Kokoh:** Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi dan memperkuat institusi demokrasi.

Misi 5: Pembangunan Sosial Budaya dan Ekologi

Kebijakan:

- **Memperkuat Infrastruktur Sosial:** Membangun dan meningkatkan fasilitas sosial yang mendukung kehidupan bermasyarakat.
- **Mempertahankan dan Mengembangkan Warisan Budaya:** Melestarikan dan mengembangkan budaya lokal melalui program-program kebudayaan.
- **Menjaga Keberlanjutan Ekologi:** Mendorong pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem.

Misi 6: Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan

Kebijakan:

- **Mengidentifikasi dan Mengatasi Disparitas Pembangunan:** Fokus pada pengentasan ketimpangan pembangunan antarwilayah melalui program-program khusus untuk wilayah tertinggal.
- **Memperkuat Infrastruktur Dasar di Seluruh Wilayah Provinsi:** Membangun infrastruktur dasar yang merata di seluruh wilayah untuk mendukung keseimbangan pembangunan.

Misi 7: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan untuk Mendukung Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru

Kebijakan:

- **Peningkatan dan Modernisasi Jaringan Transportasi:** Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas dengan membangun dan memodernisasi infrastruktur transportasi seperti jalan, pelabuhan, dan bandara.
- **Pengembangan Infrastruktur yang Ramah Lingkungan:** Mendorong pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Misi 8: Mewujudkan Sinergi dan Kestinambungan Pembangunan

Kebijakan:

- **Pengembangan Kebijakan Lingkungan yang Progresif dan Berkelanjutan:** Menerapkan kebijakan yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan penggunaan sumber daya alam yang bijaksana.
- **Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam:** Mendorong penggunaan teknologi hijau dan ramah lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam untuk menjaga keberlanjutan.

Periode ini adalah fondasi untuk semua inisiatif dan kebijakan yang akan dilaksanakan dalam fase-fase berikutnya. Fokus pada penguatan pondasi transformasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua sektor siap untuk menghadapi akselerasi dan ekspansi dalam tahap-tahap pembangunan berikutnya.

5.1.2. Arah Kebijakan II (2030 – 2034): Akselerasi Transformasi

Pada periode ini, fokus utama adalah mempercepat proses transformasi yang telah dimulai pada periode sebelumnya dengan meningkatkan kecepatan dan skala implementasi kebijakan serta program pembangunan. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing misi dalam kerangka akselerasi transformasi:

Misi 1: Mewujudkan Transformasi Sosial melalui Pembangunan Manusia yang Berdaya Saing

Kebijakan:

- **Mengakselerasi Inovasi Pendidikan dan Pelatihan:** Mempercepat pengembangan kurikulum yang inovatif dan relevan, meningkatkan program pelatihan keterampilan, serta memperluas akses pendidikan berkualitas di semua jenjang.
- **Mendorong Pembangunan Ekonomi Berbasis Teknologi:** Mempercepat adopsi teknologi di berbagai sektor ekonomi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing.
- **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efisien:** Mempercepat proses reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.

Misi 2: Mewujudkan Transformasi Ekonomi secara Inklusif Berbasis Sumber Daya Alam melalui Hilirisasi Produk Unggulan Daerah dan Ekonomi Kreatif

Kebijakan:

- **Mengakselerasi Diversifikasi Produk Unggulan:** Mempercepat diversifikasi produk unggulan daerah melalui pengembangan teknologi dan inovasi.
- **Pemberdayaan Ekonomi Kreatif:** Meningkatkan dukungan terhadap sektor ekonomi kreatif dengan memberikan fasilitas, pelatihan, dan akses pasar yang lebih luas.
- **Peningkatan Nilai Tambah Produk Lokal:** Mendorong peningkatan nilai tambah produk lokal melalui proses hilirisasi dan pengembangan industri pengolahan.

Misi 3: Menciptakan Transformasi Kelembagaan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Profesional, Transparan, dan Akuntabel

Kebijakan:

- **Profesionalisasi Aparatur:** Mempercepat program pelatihan dan pengembangan kompetensi aparatur pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme.
- **Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas:** Memperkuat mekanisme pengawasan dan pelaporan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga pemerintah.

Misi 4: Menciptakan Atmosfir Pembangunan yang Kondusif melalui Perwujudan Keamanan Daerah Tangguh dan Demokrasi yang Berkeadilan

Kebijakan:

- **Peningkatan Kualitas Keamanan:** Mempercepat peningkatan kapasitas dan responsivitas aparat keamanan untuk menciptakan lingkungan yang aman.
- **Memperkuat Keadilan dalam Sistem Demokrasi:** Memperkuat institusi demokrasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi untuk memastikan keadilan dan kesetaraan.

Misi 5: Pembangunan Sosial Budaya dan Ekologi

Kebijakan:

- **Mengakselerasi Pembangunan Sosial Budaya:** Meningkatkan dukungan terhadap program-program sosial budaya yang inklusif dan melibatkan partisipasi masyarakat.
- **Mengakselerasi Pembangunan Ekologi:** Mempercepat implementasi kebijakan dan program keberlanjutan lingkungan untuk menjaga keseimbangan ekologi.

Misi 6: Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan

Kebijakan:

- **Percepatan Pembangunan di Daerah Tertinggal:** Mempercepat program pembangunan infrastruktur dan ekonomi di daerah tertinggal untuk mencapai keseimbangan dan keadilan kewilayahan.
- **Memperkuat Infrastruktur Dasar:** Mempercepat pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar di seluruh wilayah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Misi 7: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan untuk Mendukung Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru

Kebijakan:

- **Percepatan Pembangunan Infrastruktur Transportasi:** Mempercepat pembangunan jaringan transportasi yang modern dan ramah lingkungan untuk mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi.

- **Pengembangan Infrastruktur Ramah Lingkungan:** Mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

Misi 8: Mewujudkan Sinergi dan Kesenambungan Pembangunan

Kebijakan:

- **Percepatan Implementasi Program Keberlanjutan:** Mempercepat pelaksanaan program-program keberlanjutan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana.
- **Penggunaan Sumber Daya Alam yang Bijaksana:** Mendorong praktik-praktik pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan melalui adopsi teknologi hijau dan kebijakan lingkungan yang progresif.

Periode akselerasi transformasi ini bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan dan program yang telah direncanakan, dengan fokus pada peningkatan kualitas dan skala implementasi. Upaya ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam pembangunan di Provinsi Bengkulu dan menciptakan dasar yang kuat untuk ekspansi dan kerjasama regional pada tahap berikutnya.

5.1.3. Arah Kebijakan III (2035 – 2039): Ekspansi dan Kerjasama Regional

Pada periode ini, fokus utama adalah memperluas jangkauan pembangunan melalui ekspansi ekonomi dan peningkatan kerjasama regional. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing misi dalam kerangka ekspansi dan kerjasama regional:

Misi 1: Mewujudkan Transformasi Sosial melalui Pembangunan Manusia yang Berdaya Saing

Kebijakan:

- **Ekspansi Global Melalui Diplomasi Pendidikan:** Mendorong kerjasama internasional dalam bidang pendidikan, termasuk program pertukaran pelajar dan kerjasama penelitian dengan institusi pendidikan di luar negeri.
- **Ekspor Produk Unggulan Daerah:** Meningkatkan daya saing produk unggulan daerah di pasar internasional melalui peningkatan kualitas dan promosi produk.
- **Pemberdayaan Masyarakat Global:** Mendorong keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi global melalui pelatihan keterampilan dan peningkatan akses terhadap peluang kerja internasional.

Misi 2: Mewujudkan Transformasi Ekonomi secara Inklusif Berbasis Sumber Daya Alam melalui Hilirisasi Produk Unggulan Daerah dan Ekonomi Kreatif

Kebijakan:

- **Ekspansi Pasar Internasional:** Mengembangkan pasar internasional untuk produk-produk unggulan daerah dengan meningkatkan kualitas produk dan memperkuat branding.

- **Peningkatan Nilai Tambah Produk Lokal:** Mendorong hilirisasi dan diversifikasi produk lokal untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing di pasar global.

Misi 3: Menciptakan Transformasi Kelembagaan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Profesional, Transparan, dan Akuntabel

Kebijakan:

- **Kolaborasi Antar Lembaga:** Meningkatkan kerjasama antar lembaga pemerintah dan dengan lembaga internasional untuk memperkuat tata kelola pemerintahan.
- **Meningkatkan Reputasi Internasional:** Memperkuat reputasi Provinsi Bengkulu di kancah internasional melalui praktik tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan.

Misi 4: Menciptakan Atmosfir Pembangunan yang Kondusif melalui Perwujudan Keamanan Daerah Tangguh dan Demokrasi yang Berkeadilan

Kebijakan:

- **Memperkuat Kerjasama Bidang Keamanan dan Demokrasi:** Meningkatkan kerjasama dengan negara-negara tetangga dan organisasi internasional dalam bidang keamanan dan demokrasi untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan.

Misi 5: Pembangunan Sosial Budaya dan Ekologi

Kebijakan:

- **Kerjasama Internasional untuk Konservasi Lingkungan:** Meningkatkan kerjasama dengan negara lain dan organisasi internasional dalam upaya konservasi lingkungan dan pelestarian warisan budaya.
- **Pembangunan Sosial Budaya yang Inklusif:** Mendorong inklusivitas dan partisipasi masyarakat dalam program-program sosial budaya.

Misi 6: Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan

Kebijakan:

- **Kolaborasi Regional dan Nasional:** Meningkatkan sinergi pembangunan antar wilayah melalui kerjasama regional dan nasional untuk mengatasi disparitas pembangunan.
- **Pembangunan Infrastruktur untuk Keseimbangan Wilayah:** Mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah tertinggal untuk mencapai keseimbangan pembangunan antar wilayah.

Misi 7: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan untuk Mendukung Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru

Kebijakan:

- **Kerja Sama Lintas Wilayah:** Meningkatkan kerja sama lintas wilayah untuk memperkuat konektivitas dan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
- **Pengembangan Infrastruktur yang Ramah Lingkungan:** Mendorong pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan untuk mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

Misi 8: Mewujudkan Sinergi dan Kesenambungan Pembangunan

Kebijakan:

- **Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan:** Memperluas keterlibatan dalam kerjasama internasional untuk pengelolaan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam.
- **Integrasi Inovasi Teknologi Hijau:** Mengintegrasikan inovasi teknologi hijau dalam pembangunan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Periode ekspansi dan kerjasama regional ini bertujuan untuk memperluas jangkauan pembangunan Provinsi Bengkulu melalui kerjasama dan sinergi dengan berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional. Fokus pada ekspansi pasar, peningkatan kerjasama regional, dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan diharapkan dapat membawa Provinsi Bengkulu menuju tahap pembangunan yang lebih maju dan berdaya saing global.

5.1.4. Arah Kebijakan IV (2040 – 2045): Perwujudan Bengkulu, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan

Pada periode ini, fokus utama adalah mencapai visi jangka panjang untuk mewujudkan Provinsi Bengkulu yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing misi dalam kerangka perwujudan Bengkulu, maju, sejahtera, dan berkelanjutan:

Misi 1: Mewujudkan Transformasi Sosial melalui Pembangunan Manusia yang Berdaya Saing

Kebijakan:

- **Pembangunan Konektivitas Nasional dan Internasional:** Memperkuat konektivitas infrastruktur pendidikan dengan standar internasional dan menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan global.

- **Pembangunan Manusia Unggul:** Melanjutkan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan peningkatan akses terhadap teknologi canggih.
- **Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan:** Meningkatkan kesadaran dan praktik pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk mendukung kesejahteraan jangka panjang.

Misi 2: Mewujudkan Transformasi Ekonomi secara Inklusif Berbasis Sumber Daya Alam melalui Hilirisasi Produk Unggulan Daerah dan Ekonomi Kreatif

Kebijakan:

- **Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan:** Mendorong investasi strategis yang ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
- **Penguatan Daya Saing Global:** Memperkuat posisi produk unggulan daerah di pasar global melalui peningkatan kualitas, inovasi, dan branding.

Misi 3: Menciptakan Transformasi Kelembagaan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Profesional, Transparan, dan Akuntabel

Kebijakan:

- **Pelayanan Publik yang Prima:** Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang terintegrasi dengan teknologi digital, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan berorientasi pada kepuasan warga.
- **Tata Kelola Pemerintahan yang Baik:** Memastikan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi melalui penguatan sistem manajemen dan pengawasan.

Misi 4: Menciptakan Atmosfir Pembangunan yang Kondusif melalui Perwujudan Keamanan Daerah Tangguh dan Demokrasi yang Berkeadilan

Kebijakan:

- **Sistem Keamanan Daerah yang Tangguh:** Membangun sistem keamanan yang proaktif, kolaboratif, dan berteknologi tinggi untuk menjaga ketertiban dan keamanan daerah.
- **Demokrasi yang Berkeadilan:** Memastikan keberlanjutan sistem demokrasi yang inklusif, adil, dan partisipatif dengan memperkuat institusi demokrasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Misi 5: Pembangunan Sosial Budaya dan Ekologi

Kebijakan:

- **Pembangunan Sosial Budaya yang Berkelanjutan:** Melanjutkan upaya pelestarian warisan budaya dan pengembangan program sosial budaya yang inklusif dan berkelanjutan.

- **Konservasi Ekologi:** Mendorong praktik konservasi ekologi yang inovatif dan berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup dan ekosistem.

Misi 6: Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan

Kebijakan:

- **Perluasan Sinergi Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan:** Memastikan semua wilayah di Provinsi Bengkulu mendapatkan manfaat dari pembangunan dengan memperkuat sinergi dan kolaborasi antarwilayah.
- **Pengembangan Infrastruktur untuk Keseimbangan Wilayah:** Memperluas dan meningkatkan kualitas infrastruktur dasar di seluruh wilayah untuk mendukung pembangunan yang merata dan berkeadilan.

Misi 7: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan untuk Mendukung Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru

Kebijakan:

- **Perluasan dan Peningkatan Infrastruktur yang Ramah Lingkungan:** Membangun dan memperbaiki infrastruktur dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan ramah lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
- **Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Baru:** Mendorong pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui investasi infrastruktur yang strategis dan berkelanjutan.

Misi 8: Mewujudkan Sinergi dan Kesenambungan Pembangunan

Kebijakan:

- **Penguatan Kebijakan dan Regulasi Lingkungan:** Memastikan kebijakan dan regulasi lingkungan yang progresif untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- **Integrasi Inovasi Teknologi Hijau dalam Pembangunan:** Mengintegrasikan teknologi hijau dalam semua aspek pembangunan untuk mendukung keberlanjutan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Periode perwujudan ini bertujuan untuk mencapai visi jangka panjang Provinsi Bengkulu sebagai wilayah yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Upaya ini mencakup peningkatan kualitas manusia dan infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, dan penguatan tata kelola pemerintahan. Fokus pada keberlanjutan dan inklusivitas diharapkan dapat membawa manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat Bengkulu dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.

5.2. Arah Kebijakan Transformasi

Dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan jangka panjang, Provinsi Bengkulu telah merumuskan berbagai arah kebijakan transformasi yang komprehensif. Arah kebijakan ini mempedomani Buku II Lampiran Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, yang diterbitkan pada 10 Januari 2024. Kebijakan-kebijakan ini mencakup berbagai aspek sosial, ekonomi, tata kelola, keamanan, ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta implementasi transformasi. Setiap kebijakan dirancang untuk menjawab isu-isu strategis yang dihadapi oleh Provinsi Bengkulu dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Tabel IV.2 berikut ini menyajikan arah kebijakan transformasi daerah yang diidentifikasi dalam rancangan RPJP Daerah Provinsi Bengkulu.

Tabel 5. 2 Arah Kebijakan Transformasi Daerah Provinsi Bengkulu

Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJP Daerah Provinsi)	
Transformasi	Arah Kebijakan
(1)	(2)
Transformasi Sosial	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.
	Pemerataan dan penyelenggaraan layanan kesehatan universal yang berkualitas dan berkeadilan.
	Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.
	Pemerataan dan Peningkatan kesejahteraan, kompetensi dan distribusi tenaga kesehatan.
	Percepatan penuntasan <i>stunting</i> dan pencegahan <i>stunting</i> .
	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.
	Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.

Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJP Daerah Provinsi)	
Transformasi	Arah Kebijakan
	Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.
	Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.
	Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.
	Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.
	Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
	Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.
	Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.
	Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.
	Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan
	Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik)
	Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi
	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui <i>upskilling</i> maupun <i>reskilling</i> .
	Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok Masyarakat
	Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian serta jaminan hari tua
	Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis Kerakyatan
	Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.

Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJP Daerah Provinsi)	
Transformasi	Arah Kebijakan
Transformasi Ekonomi	Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah.
	Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (<i>smart farming</i> , teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).
	Pengembangan <i>closed loop model</i> perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan perluasan akses pembiayaan kredit, penyediaan infrastruktur serta pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dalam upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan.
	Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang untuk Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah yang dikembangkan pada kawasan strategis industri Bengkulu.
	Penguatan infrastruktur dan penguatan koordinasi dan kerjasama antar wilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan dalam mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan.
	Percepatan pengembangan SPAM regional.
	Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan <i>hybrid (green & grey infrastructure)</i> pada kawasan perkotaan.
	Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju <i>zero solid waste city</i> dan mendukung <i>circular economy</i> pada kawasan perkotaan.
	Peningkatan <i>coverage</i> dan kecepatan akses internet melalui penggelaran <i>fixed connection</i> dan/atau pembangunan infrastruktur <i>mobile connection</i> pada area-area <i>weak coverage</i> .
	Pembangunan dan perluasan <i>coverage</i> sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Bengkulu.
	Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi

Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJP Daerah Provinsi)	
Transformasi	Arah Kebijakan
	Penataan dan penguatan daya tarik wisata dan pemasarannya, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif.
	Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.
	Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah
	Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya.
	Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, <i>offsetting</i> , dan pajak karbon.
	Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.
	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.
	Pembangunan ketenagalistrikan energy baru dan terbaruk serta rendah emisi
	Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan <i>broadband</i> hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital <i>skill</i> (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).

Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJP Daerah Provinsi)	
Transformasi	Arah Kebijakan
Transformasi Tata Kelola	Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah.
	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
	Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat.
	Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
	Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah Bengkulu, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah Bengkulu yang profesional dan bebas korupsi.
	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital
	Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, <i>reward</i> , dan <i>punishment</i> , termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.
	Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.
	Penguatan integritas partai politik.
Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah	Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas.
	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.
	Penguatan pengendalian inflasi daerah.

Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJP Daerah Provinsi)	
Transformasi	Arah Kebijakan
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Dukungan terhadap pengembangan pusat pendidikan & pelatihan militer/pangkalan komposit/pangkalan/pos militer/sarana & prasarana pertahanan lainnya di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Pulau Enggano).
	Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila.
	Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.
	Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis.
	Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami.
	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.
	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.
	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.
	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.
	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.
	Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.

Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJP Daerah Provinsi)	
Transformasi	Arah Kebijakan
	Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan <i>circular economy</i> .
Implementasi Transformasi	Penguatan kerjasama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.
	Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb).
	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir.
	Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (<i>Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated</i>) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas
	Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke <i>green/low-cost financing</i> , bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor- sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan.
	Percepatan pelaksanaan reforma agraria.
	Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor- sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri.

Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJP Daerah Provinsi)	
Transformasi	Arah Kebijakan
	Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.
	Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan <i>blended finance</i> .
	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.
	Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi.
	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.
	Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan.
	Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.

5.3. Sasaran Pokok Pembangunan

Tujuan pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Bengkulu tahun 2025-2045 adalah mewujudkan Bengkulu yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan yang merupakan bagian dari dukungan menuju Indonesia Emas 2045.

Sebagai ukuran tercapainya Bengkulu yang maju, sejahtera dan berkelanjutan dalam dua puluh tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran – sasaran pokok sebagai berikut:

5.2.1 Sasaran Pokok 1: Meningkatnya Pelayanan dan Penyediaan Kualitas serta Akses Kesehatan Masyarakat

Sasaran Pokok 1: Meningkatnya Pelayanan dan Penyediaan Kualitas dan Akses Kesehatan Masyarakat

Arah Pembangunan: IE1. Kesehatan Untuk Semua

Usia Harapan Hidup (UHH) (i1)

Usia Harapan Hidup (UHH) mengukur rata-rata usia yang diharapkan dicapai oleh penduduk suatu wilayah. Target peningkatan dari 73,56 tahun pada tahun 2025 menjadi 79,23 tahun pada tahun 2045 mencerminkan upaya untuk meningkatkan

kualitas pelayanan kesehatan, akses terhadap layanan kesehatan, dan kondisi hidup yang lebih baik. Peningkatan ini menunjukkan perbaikan dalam penanganan penyakit, peningkatan gizi, dan akses ke fasilitas kesehatan.

Kesehatan Ibu dan Anak (i2)

- **Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) (i2a):** Penurunan dari 109 pada tahun 2025 menjadi 15 pada tahun 2045 mencerminkan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu, perawatan prenatal, dan akses terhadap fasilitas kesehatan yang aman.
- **Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) (i2b):** Penurunan dari 13,5% pada tahun 2025 menjadi 5% pada tahun 2045 mencerminkan upaya peningkatan gizi balita, program intervensi gizi, dan penyediaan layanan kesehatan yang lebih baik untuk anak-anak.

Penanganan Tuberkulosis (i3)

- *Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%) (i3a):** Peningkatan dari 91% pada tahun 2025 menjadi 100% pada tahun 2045 mencerminkan upaya untuk memastikan semua pasien tuberkulosis mendapatkan pengobatan yang efektif dan sembuh total.
- *Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%) (i3b):** Peningkatan dari 91% pada tahun 2025 menjadi 100% pada tahun 2045 menunjukkan komitmen untuk mendeteksi dan mengobati semua kasus tuberkulosis secara menyeluruh.

Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (i4)

Persentase kepesertaan jaminan kesehatan nasional mengukur sejauh mana penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang dijamin. Target peningkatan dari 95,67% pada tahun 2025 menjadi 99,5% pada tahun 2045 mencerminkan upaya untuk memastikan hampir seluruh penduduk memiliki jaminan kesehatan yang memadai.

Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per Wanita Usia Subur 15-49 Tahun

Angka kelahiran total mengukur rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa suburnya. Penurunan dari 2,29 pada tahun 2025 menjadi 2,23 pada tahun 2045 menunjukkan pengendalian angka kelahiran melalui program keluarga berencana yang efektif.

Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) (%)

Angka prevalensi kontrasepsi modern mengukur persentase pasangan usia subur yang menggunakan metode kontrasepsi modern. Peningkatan dari 61,7% pada tahun

2025 menjadi 65,2% pada tahun 2045 mencerminkan upaya peningkatan akses dan kesadaran penggunaan kontrasepsi modern.

Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) (%)

Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi mengukur persentase pasangan yang ingin ber-KB tetapi tidak mendapatkan akses terhadap layanan yang diperlukan. Penurunan dari 16,1% pada tahun 2025 menjadi 7,5% pada tahun 2045 menunjukkan peningkatan akses dan kualitas layanan keluarga berencana.

Angka Kelahiran Remaja Usia 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)

Angka kelahiran remaja mengukur jumlah kelahiran per 1000 wanita usia 15-19 tahun. Penurunan dari 34,5 pada tahun 2025 menjadi 17,5 pada tahun 2045 menunjukkan upaya untuk mengurangi angka kehamilan remaja melalui pendidikan kesehatan reproduksi dan peningkatan akses layanan kesehatan bagi remaja.

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Indeks Pembangunan Keluarga mengukur kualitas hidup keluarga secara keseluruhan. Peningkatan dari 58,20 pada tahun 2025 menjadi 90 pada tahun 2045 mencerminkan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui program-program kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang terintegrasi.

Dengan indikator-indikator ini, Provinsi Bengkulu berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan dan penyediaan kualitas serta akses kesehatan masyarakat. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih sehat, sejahtera, dan berdaya saing tinggi.

5.2.2 Sasaran Pokok 2: Meningkatnya Pelayanan, Penyediaan, dan Pemerataan Kualitas serta Akses Pendidikan

Arah Pembangunan: IE2. Pendidikan Berkualitas yang Merata

Hasil Pembelajaran (i5)

Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional (i5a):

- Literasi Membaca (i5ai):**

Target peningkatan dari 9,09 - 11,09 pada tahun 2025 menjadi 69,66 - 71,66 pada tahun 2045 menunjukkan upaya untuk meningkatkan kualitas literasi di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan dalam kualitas pengajaran, akses terhadap bahan bacaan, dan program-program literasi yang efektif.
- Numerasi (i5aai):**

Target peningkatan dari 0,00 - 2,00 pada tahun 2025 menjadi 61,50 - 63,50 pada tahun 2045 mencerminkan upaya untuk meningkatkan kemampuan numerasi di seluruh kabupaten/kota. Ini menunjukkan perbaikan dalam metode pengajaran

matematika dan peningkatan akses terhadap alat bantu pembelajaran numerasi.

Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional (i5b):

- **Literasi Membaca (i5bi):**

Target peningkatan dari 26,02 - 28,02 pada tahun 2025 menjadi 65,88 - 67,88 pada tahun 2045 mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa lebih banyak sekolah memenuhi standar kompetensi literasi. Ini mencakup peningkatan kualitas guru, kurikulum yang lebih baik, dan sumber daya pendidikan yang memadai.

- **Numerasi (i5bii):**

Target peningkatan dari 13,24 - 15,24 pada tahun 2025 menjadi 59,22 - 61,22 pada tahun 2045 menunjukkan komitmen untuk meningkatkan standar kompetensi numerasi di sekolah-sekolah. Ini menunjukkan fokus pada pelatihan guru dan peningkatan metode pengajaran numerasi.

Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun (i5c)

Rata-rata lama sekolah mengukur jumlah tahun pendidikan yang diselesaikan oleh penduduk usia di atas 15 tahun. Target peningkatan dari 9,67 - 9,68 tahun pada tahun 2025 menjadi 12,27 - 12,35 tahun pada tahun 2045 mencerminkan upaya untuk meningkatkan akses dan partisipasi pendidikan di semua tingkatan, terutama di tingkat menengah dan tinggi.

Harapan Lama Sekolah (i5d)

Harapan lama sekolah mengukur jumlah tahun pendidikan formal yang diharapkan akan diikuti oleh anak-anak. Target peningkatan dari 13,96 tahun pada tahun 2025 menjadi 15,43 - 15,48 tahun pada tahun 2045 menunjukkan upaya untuk memastikan bahwa anak-anak di Provinsi Bengkulu memiliki akses penuh ke pendidikan dasar dan menengah, serta dorongan untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi.

Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (i6)

Proporsi ini mengukur persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi. Target peningkatan dari 12,87% pada tahun 2025 menjadi 14,00 - 14,26% pada tahun 2045 mencerminkan upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan tinggi di Provinsi Bengkulu, sehingga lebih banyak penduduk memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk pekerjaan yang lebih baik.

Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (i7)

Indikator ini mengukur persentase lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang yang sesuai dengan keahlian mereka. Target peningkatan dari 58,94% pada tahun 2025 menjadi 75,00% pada tahun 2045 menunjukkan upaya untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan relevan dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga lulusan dapat bekerja sesuai dengan keahlian mereka dan berkontribusi secara maksimal pada perekonomian.

Dengan indikator-indikator ini, Provinsi Bengkulu berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan, penyediaan, dan pemerataan kualitas serta akses pendidikan. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih terdidik, berdaya saing tinggi, dan mampu berkontribusi secara optimal dalam pembangunan daerah dan nasional.

5.2.3 Sasaran Pokok 3: Meningkatnya Pelayanan, Perlindungan, dan Jaminan Sosial

Arah Pembangunan: IE3. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Tingkat Kemiskinan (%) (i8)

Tingkat kemiskinan mengukur persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Target penurunan dari 13,6 - 13,1% pada tahun 2025 menjadi 5 - 7% pada tahun 2045 menunjukkan upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin melalui berbagai program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan akses terhadap layanan dasar. Penurunan tingkat kemiskinan mencerminkan keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkecil kesenjangan sosial.

Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%) (i9)

Indikator ini mengukur persentase pekerja yang terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Target peningkatan dari 16,06% pada tahun 2022 menjadi 85,22% pada tahun 2045 menunjukkan usaha untuk memastikan bahwa semakin banyak pekerja yang terlindungi oleh jaminan sosial. Peningkatan cakupan ini mencerminkan upaya untuk memberikan perlindungan terhadap risiko sosial dan ekonomi seperti kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, dan pensiun.

Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%) (i10)

Indikator ini mengukur persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal. Target peningkatan dari 23% pada tahun 2025 menjadi 55% pada tahun 2045 mencerminkan upaya untuk meningkatkan inklusi sosial dan ekonomi bagi penyandang disabilitas. Hal ini mencakup pemberian akses terhadap pelatihan keterampilan, peluang kerja, dan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah disabilitas. Dengan adanya indikator-indikator ini, Provinsi Bengkulu berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan, perlindungan, dan jaminan sosial yang adaptif. Hal ini

mencakup pengurangan tingkat kemiskinan melalui program pemberdayaan dan bantuan sosial, peningkatan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk melindungi pekerja, serta pemberdayaan penyandang disabilitas melalui peningkatan akses terhadap pekerjaan di sektor formal. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan inklusif.

5.2.4 Sasaran Pokok 4: Meningkatnya Implementasi Integrasi Teknologi dan Inovasi

Arah Pembangunan: IE4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) (i11)

Rasio PDRB Industri Pengolahan mengukur kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Target peningkatan dari 5,50 – 6,00% pada tahun 2025 menjadi 10 – 12% pada tahun 2045 menunjukkan upaya untuk memperkuat sektor industri pengolahan di Provinsi Bengkulu. Peningkatan ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk industri lokal di pasar nasional maupun internasional.

Pengembangan Pariwisata (i12)

- *Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) (i12a):** Target peningkatan dari 1,83% pada tahun 2025 menjadi 3,11% pada tahun 2045 mencerminkan upaya untuk memperkuat sektor pariwisata melalui peningkatan kapasitas dan kualitas fasilitas akomodasi serta layanan makanan dan minuman.
- *Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang) (i12b):** Target peningkatan dari 0,7 juta orang pada tahun 2025 menjadi 1,75 juta orang pada tahun 2045 menunjukkan upaya untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara melalui promosi pariwisata yang efektif dan peningkatan kualitas destinasi wisata.

Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%) (i13)

Data untuk baseline dan target indikator ini masih dalam proses penghitungan hingga dokumen ini disusun, karena data awal dan penghitungan target masih baru. Indikator ini akan dimasukkan ketika dokumen ini direvisi.

Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD (i14)

- **Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi (%) (i14a):** Target peningkatan dari 11,55% pada tahun 2025 menjadi 17,01% pada tahun 2045 mencerminkan upaya untuk memperkuat sektor UMKM sebagai pilar utama perekonomian lokal.
- **Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%) (i14b):** Target peningkatan dari 2,13% pada tahun 2025 menjadi 7,00% pada

tahun 2045 menunjukkan upaya untuk meningkatkan jumlah dan kapasitas industri kecil dan menengah.

- **Rasio Kewirausahaan Daerah (%) (i14c):** Target peningkatan dari 3,85% pada tahun 2025 menjadi 8,00% pada tahun 2045 mencerminkan upaya untuk mendorong kewirausahaan di kalangan masyarakat.
- **Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%) (i14d):** Target peningkatan dari 0,8 – 1,0% pada tahun 2025 menjadi 5,5 – 6,0% pada tahun 2045 mencerminkan upaya untuk memperkuat peran koperasi dalam perekonomian lokal.
- *Return on Aset (ROA) BUMD (%) (i14e):** Target peningkatan dari 1,32% pada tahun 2025 menjadi 4,55% pada tahun 2045 menunjukkan upaya untuk meningkatkan kinerja keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Tingkat Pengangguran Terbuka (%) (i15)

Tingkat pengangguran terbuka mengukur persentase angkatan kerja yang tidak bekerja. Target penurunan dari 3,50 – 3,4% pada tahun 2025 menjadi 2,5 – 3,0% pada tahun 2045 menunjukkan upaya untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan mengurangi pengangguran di Provinsi Bengkulu.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) (i16)

Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan mengukur persentase perempuan yang aktif dalam angkatan kerja. Target peningkatan dari 61,8% pada tahun 2025 menjadi 73,4% pada tahun 2045 menunjukkan upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pasar kerja dan memperkuat peran perempuan dalam perekonomian.

Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Nasional (peringkat) (i17)

Indeks Daya Saing Digital mengukur kemampuan Provinsi Bengkulu dalam bersaing di bidang teknologi digital. Target peningkatan dari peringkat 15 besar pada tahun 2025 menjadi 10 besar pada tahun 2045 menunjukkan komitmen untuk memperkuat infrastruktur digital dan meningkatkan kemampuan digital masyarakat serta sektor bisnis.

Arah Pembangunan: IE6. Transformasi Digital

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (i19)*

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi mengukur kemajuan dalam pengembangan infrastruktur dan penggunaan teknologi informasi di berbagai sektor. Target peningkatan dari skor 6 pada tahun 2025 menjadi 7,5 pada tahun 2045 mencerminkan upaya untuk meningkatkan adopsi teknologi informasi dan komunikasi di Provinsi Bengkulu, sehingga mendukung transformasi digital yang lebih luas.

Dengan indikator-indikator ini, Provinsi Bengkulu berkomitmen untuk meningkatkan implementasi integrasi teknologi dan inovasi. Hal ini mencakup pengembangan sektor industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, serta pemberdayaan UMKM, koperasi, dan BUMD. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Provinsi Bengkulu.

5.2.5 Sasaran Pokok 5: Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup serta Ketahanan Iklim dan Bencana

Arah Pembangunan: IE5. Penerapan Ekonomi Hijau

Indeks Ekonomi Hijau Daerah (i18a)

Indeks Ekonomi Hijau Daerah mengukur sejauh mana prinsip-prinsip ekonomi hijau diterapkan di daerah. Target peningkatan dari 63,49 pada tahun 2025 menjadi 81,81 pada tahun 2045 menunjukkan komitmen untuk memperkuat ekonomi hijau melalui kebijakan dan program yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan efisiensi sumber daya.

Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%) (i18b)

Porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer merupakan indikator penting dalam menilai transisi menuju energi bersih. Target peningkatan dari 41,40% pada tahun 2025 menjadi 68,52% pada tahun 2045 mencerminkan upaya untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan.

Arah Pembangunan: IE15. Lingkungan Hidup Berkualitas

Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (i41)

Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati mengukur efektivitas pengelolaan keanekaragaman hayati di daerah. Target peningkatan dari 0,616 pada tahun 2025 menjadi 0,648 pada tahun 2045 menunjukkan komitmen untuk melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati melalui kebijakan konservasi dan pengelolaan yang berkelanjutan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (i42)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (i42a): Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mengukur kualitas lingkungan secara keseluruhan. Target peningkatan dari 71-72 pada tahun 2025 menjadi 80-82,1 pada tahun 2045 mencerminkan upaya untuk meningkatkan kualitas udara, air, dan tanah melalui berbagai program pengendalian polusi dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%) (i42b): Indikator ini mengukur persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi yang aman. Target peningkatan dari 5,00% pada tahun 2025 menjadi 50,00% pada tahun 2045

menunjukkan upaya untuk meningkatkan akses sanitasi dan kualitas hidup masyarakat.

Pengelolaan Sampah (i42c):

- **Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%):** Target peningkatan dari 5-10% pada tahun 2025 menjadi 70-80% pada tahun 2045 mencerminkan upaya untuk meningkatkan pengelolaan sampah dan mengurangi timbulan sampah yang tidak terolah.
- **Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT):** Target peningkatan dari 27,5-30% pada tahun 2025 menjadi 90-100% pada tahun 2045 menunjukkan upaya untuk memastikan semua rumah tangga mendapatkan layanan pengumpulan sampah yang memadai.

Arah Pembangunan: IE17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Indeks Risiko Bencana (IRB) (i44)

Indeks Risiko Bencana mengukur tingkat risiko bencana di daerah. Target penurunan dari 155,35 pada tahun 2025 menjadi 126,61 - 102,06 pada tahun 2045 mencerminkan upaya untuk meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana dan mengurangi risiko bencana melalui berbagai program mitigasi dan adaptasi.

Persentase Penurunan Emisi GRK (%) (i45)

Penurunan Emisi GRK Kumulatif (i45a): Target peningkatan dari 20,37% pada tahun 2025 menjadi 36,36% pada tahun 2045 menunjukkan komitmen untuk mengurangi emisi GRK secara bertahap.

Penurunan Emisi GRK Tahunan (i45b): Target peningkatan dari 30,35% pada tahun 2025 menjadi 59,21% pada tahun 2045 mencerminkan upaya untuk mencapai penurunan emisi tahunan yang signifikan melalui berbagai program dan kebijakan mitigasi perubahan iklim.

Dengan adanya indikator-indikator ini, Provinsi Bengkulu berkomitmen untuk meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana. Hal ini mencakup pengembangan ekonomi hijau, pengelolaan keanekaragaman hayati, peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan sampah yang lebih baik, serta penurunan risiko bencana dan emisi gas rumah kaca.

5.2.6 Sasaran Pokok 6: Meningkatnya Produktivitas Ekonomi melalui Transformasi Ekonomi

Arah Pembangunan: IE7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi (i20)*

Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi mengukur variasi harga antarwilayah di tingkat provinsi. Target penurunan dari 2,56 pada tahun 2025 menjadi

2,21 pada tahun 2045 menunjukkan upaya untuk mengurangi disparitas harga antarwilayah, sehingga menciptakan pasar yang lebih terintegrasi dan efisien.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) (i21)

Pembentukan Modal Tetap Bruto mengukur persentase investasi terhadap PDRB. Target peningkatan dari 38,7% pada tahun 2025 menjadi 39,4% pada tahun 2045 mencerminkan upaya untuk meningkatkan investasi dalam infrastruktur dan sektor-sektor produktif lainnya guna mendukung pertumbuhan ekonomi.

Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) (i22)

Persentase ekspor barang dan jasa terhadap PDRB mengukur kontribusi ekspor dalam perekonomian daerah. Target peningkatan dari 5,8% pada tahun 2025 menjadi 7,3% pada tahun 2045 mencerminkan upaya untuk meningkatkan daya saing produk daerah di pasar internasional melalui peningkatan kualitas dan diversifikasi produk.

Arah Pembangunan: IE11. Stabilitas Ekonomi Makro

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) (i31)

Rasio pajak daerah terhadap PDRB mengukur kontribusi pajak daerah dalam perekonomian. Target peningkatan dari 1,3% pada tahun 2025 menjadi 1,7% pada tahun 2045 mencerminkan upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi penerimaan pajak.

Tingkat Inflasi (%) (i32)

Tingkat inflasi mengukur stabilitas harga barang dan jasa. Target penurunan tingkat inflasi dari 2,6-3,5% pada tahun 2025 menjadi $2,0 \pm 1\%$ pada tahun 2045 mencerminkan upaya untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan (i33)

- **Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) (i33a):** Target peningkatan dari 30,44% pada tahun 2025 menjadi 63,5% pada tahun 2045 menunjukkan upaya untuk meningkatkan peran sektor keuangan dalam perekonomian.
- **Aset Dana Pensiun/PDRB (%) (i33b):** Target peningkatan dari 0,13% pada tahun 2025 menjadi 0,18% pada tahun 2045 mencerminkan upaya untuk memperkuat sistem dana pensiun dan keamanan finansial masyarakat.
- **Nilai Transaksi Saham Per Provinsi (i33c):** Target peningkatan dari 423,74 miliar pada tahun 2025 menjadi 2.018,02 miliar pada tahun 2045 menunjukkan upaya untuk meningkatkan aktivitas pasar modal di provinsi.
- **Total Kredit/PDRB (%) (i33d):** Target peningkatan dari 29,1% pada tahun 2025 menjadi 62,5% pada tahun 2045 mencerminkan upaya untuk meningkatkan akses kredit dan pembiayaan bagi sektor usaha.

- **Inklusi Keuangan (%) (i34):** Upaya untuk meningkatkan inklusi keuangan melalui perluasan akses terhadap layanan keuangan formal bagi seluruh lapisan masyarakat.

Arah Pembangunan: IE16. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Ketahanan Energi, Air, dan Pangan (i43)

Ketahanan Energi (i43a):

- **Konsumsi Listrik per Kapita (kWh):** Target peningkatan dari 750 kWh pada tahun 2025 menjadi 1.830 kWh pada tahun 2045 mencerminkan upaya untuk meningkatkan akses dan konsumsi energi listrik per kapita.
- **Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar):** Target penurunan dari 198 SBM/Rp milyar pada tahun 2025 menjadi 158 SBM/Rp milyar pada tahun 2045 mencerminkan upaya untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi.

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%) (i43b): Target penurunan dari 11,66% pada tahun 2025 menjadi 2,40% pada tahun 2045 mencerminkan upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi prevalensi kekurangan pangan.

Ketahanan Air (i43c):

- **Kapasitas Air Baku (m3/detik):** Target peningkatan dari 0,07 m3/detik pada tahun 2025 menjadi 2,82 m3/detik pada tahun 2045 mencerminkan upaya untuk meningkatkan kapasitas penyediaan air baku.
- **Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%):** Target peningkatan dari 27,92% pada tahun 2025 menjadi 100% pada tahun 2045 menunjukkan upaya untuk memastikan semua rumah tangga perkotaan memiliki akses terhadap air siap minum.

Dengan indikator-indikator ini, Provinsi Bengkulu berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas ekonomi melalui transformasi ekonomi yang terintegrasi secara domestik dan global, menjaga stabilitas ekonomi makro, serta meningkatkan ketahanan energi, air, dan pangan. Upaya ini mencakup pengurangan disparitas harga antarwilayah, peningkatan investasi dan ekspor, optimalisasi pendapatan daerah, stabilitas harga, peningkatan akses terhadap layanan keuangan, serta pengelolaan sumber daya energi dan pangan yang berkelanjutan.

5.2.7 Sasaran Pokok 7: Meningkatnya Pembangunan Kota dan Desa sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Arah Pembangunan: IE8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan (i23)

Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Kota terhadap Provinsi (%) (i23a) Proporsi kontribusi PDRB wilayah kota mengukur kontribusi ekonomi kota terhadap keseluruhan ekonomi provinsi. Target peningkatan dari 19% pada tahun 2025 menjadi 60% pada tahun 2045 menunjukkan komitmen untuk memperkuat ekonomi perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, dengan meningkatkan produktivitas dan daya saing wilayah perkotaan.

Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%) (i23b) Indikator ini mengukur persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Target peningkatan dari 61,57% pada tahun 2025 menjadi 100% pada tahun 2045 mencerminkan upaya untuk memastikan semua warga memiliki tempat tinggal yang memadai dan berkelanjutan, yang mendukung kualitas hidup yang lebih baik.

Persentase Desa Mandiri (%) (i23c) Persentase desa mandiri mengukur tingkat kemandirian desa dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, dan lingkungan. Target peningkatan dari 6,6-7,3% pada tahun 2025 menjadi 32,7-41,7% pada tahun 2045 menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kemandirian dan keberlanjutan desa, sehingga desa-desa dapat berkembang secara mandiri dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan adanya indikator-indikator ini, Provinsi Bengkulu berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan kota dan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini mencakup peningkatan kontribusi ekonomi wilayah perkotaan, memastikan akses hunian layak bagi semua rumah tangga, serta meningkatkan kemandirian desa melalui berbagai program pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, berdaya saing, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu.

5.2.8 Sasaran Pokok 8: Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Layanan Publik

Arah Pembangunan: IE9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif *Indeks Reformasi Hukum* (i24)*

Indeks Reformasi Hukum mengukur kemajuan dalam reformasi hukum yang bertujuan untuk meningkatkan integritas dan adaptabilitas sistem hukum. Target peningkatan dari 42,55 pada tahun 2025 menjadi 68,55 pada tahun 2045 menunjukkan komitmen untuk memperkuat sistem hukum melalui reformasi regulasi, peningkatan kapasitas lembaga hukum, dan peningkatan akses terhadap keadilan.

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (i25)

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mengukur kemajuan dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan. Target peningkatan dari 3,2-3,3 pada tahun 2025 menjadi 5,00 pada tahun 2045 mencerminkan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintahan melalui digitalisasi proses administrasi dan layanan publik.

Indeks Pelayanan Publik (i26)

Indeks Pelayanan Publik mengukur kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Target peningkatan dari 4,4 pada tahun 2022 menjadi 5,00 pada tahun 2045 menunjukkan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas, efisiensi, dan aksesibilitas layanan publik bagi masyarakat.

Indeks Integritas Nasional (i27)

Indeks Integritas Nasional mengukur tingkat integritas dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Target peningkatan dari 72,58 pada tahun 2025 menjadi 87,43 pada tahun 2045 mencerminkan upaya untuk memperkuat integritas dan akuntabilitas dalam pemerintahan melalui berbagai program anti-korupsi, peningkatan transparansi, dan akuntabilitas publik.

Dengan adanya indikator-indikator ini, Provinsi Bengkulu berkomitmen untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang berintegritas dan adaptif, serta meningkatkan kualitas layanan publik yang efisien dan transparan. Hal ini mencakup reformasi hukum, digitalisasi pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan penguatan integritas dalam tata kelola pemerintahan. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, transparan, dan terpercaya, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

5.2.9 Sasaran Pokok 9: Meningkatnya Keamanan Masyarakat dan Penegakan Demokrasi

Arah Pembangunan: IE10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Angka Kriminalitas (i28)

Angka kriminalitas mengukur jumlah kejadian kriminal yang dilaporkan. Target penurunan dari 175-200 pada tahun 2025 menjadi 50-100 pada tahun 2045 menunjukkan komitmen untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di masyarakat melalui upaya pencegahan kejahatan, penegakan hukum yang efektif, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan.

Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%) (i29)

Indikator ini mengukur persentase penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. Target peningkatan dari 67,42% pada tahun 2020 menjadi 84,8% pada tahun 2045 mencerminkan upaya untuk meningkatkan rasa aman di masyarakat melalui peningkatan keamanan lingkungan dan pelayanan kepolisian yang responsif.

Indeks Demokrasi Indonesia (i30)

Indeks Demokrasi Indonesia mengukur kualitas demokrasi di daerah. Target peningkatan dari status "sedang" pada tahun 2025 menjadi "tinggi" pada tahun 2045 menunjukkan komitmen untuk memperkuat demokrasi substantif melalui peningkatan partisipasi politik, transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Dengan adanya indikator-indikator ini, Provinsi Bengkulu berkomitmen untuk meningkatkan keamanan masyarakat dan penegakan demokrasi yang berkeadilan dan substansial. Hal ini mencakup penurunan angka kriminalitas, peningkatan rasa aman di masyarakat, dan peningkatan kualitas demokrasi melalui berbagai program dan kebijakan yang mendukung keamanan dan demokrasi. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi pembangunan serta memastikan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi yang transparan dan akuntabel.

5.2.10 Sasaran Pokok 10: Meningkatnya Inovasi Daerah

Arah Pembangunan: IE12. Peran Kepala Daerah dalam Menciptakan Inovasi dan Daya Saing Daerah

Indeks Inovasi Daerah (i35)

Indeks Inovasi Daerah mengukur kemampuan daerah dalam menciptakan dan mengimplementasikan inovasi yang mendukung pembangunan dan daya saing daerah. Target peningkatan dari 50-55 pada tahun 2025 menjadi 75-80 pada tahun 2045 mencerminkan komitmen untuk mendorong inovasi di berbagai sektor melalui kebijakan yang mendukung kreativitas, penelitian, dan pengembangan teknologi. Peningkatan ini juga menunjukkan upaya untuk meningkatkan kerjasama antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan akademisi dalam menciptakan ekosistem inovasi yang dinamis.

Indeks Daya Saing Daerah (i36)

Indeks Daya Saing Daerah mengukur kemampuan daerah dalam bersaing di tingkat nasional dan internasional. Target peningkatan dari 3,33-3,35 pada tahun 2025 menjadi 3,80-4,02 pada tahun 2045 menunjukkan upaya untuk meningkatkan daya

saing daerah melalui penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penciptaan iklim usaha yang kondusif. Peningkatan ini juga mencerminkan komitmen untuk memperkuat sektor-sektor ekonomi unggulan dan meningkatkan efisiensi birokrasi serta layanan publik.

Dengan adanya indikator-indikator ini, Provinsi Bengkulu berkomitmen untuk meningkatkan inovasi daerah dan daya saing yang tinggi. Hal ini mencakup penguatan peran kepala daerah dalam menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi, mendorong kerjasama antara sektor pemerintah, swasta, dan akademisi, serta meningkatkan investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi. Inovasi yang berkelanjutan diharapkan dapat memperkuat daya saing daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

5.2.11 Sasaran Pokok 11: Meningkatnya Kehidupan Sosial Kemasyarakatan yang Berbudaya dan Religius

Arah Pembangunan: IE13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) (i37)

Indeks Pembangunan Kebudayaan mengukur kemajuan dalam pengembangan dan pelestarian kebudayaan di daerah. Target peningkatan dari 57,73 - 57,77 pada tahun 2025 menjadi 70,77 - 71,81 pada tahun 2045 menunjukkan komitmen untuk memperkuat kebudayaan lokal melalui berbagai program dan kebijakan yang mendukung pelestarian warisan budaya, seni, dan tradisi lokal. Peningkatan ini juga mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan kebudayaan.

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) (i38)

Indeks Kerukunan Umat Beragama mengukur tingkat kerukunan dan toleransi antar umat beragama di masyarakat. Target peningkatan dari 75,26 - 75,31 pada tahun 2025 menjadi 82,37 - 82,83 pada tahun 2045 mencerminkan upaya untuk meningkatkan harmoni sosial dan toleransi beragama melalui dialog antaragama, pendidikan toleransi, dan kerjasama antar komunitas. Peningkatan ini juga menunjukkan komitmen untuk menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis di mana berbagai kelompok agama dapat hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati.

Dengan adanya indikator-indikator ini, Provinsi Bengkulu berkomitmen untuk meningkatkan kehidupan sosial kemasyarakatan yang berbudaya dan religius. Hal ini mencakup penguatan kebudayaan lokal dan peningkatan kerukunan umat beragama, yang diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang harmonis, toleran, dan berdaya saing tinggi. Upaya ini akan dilakukan melalui berbagai program dan kebijakan yang

mendukung pengembangan kebudayaan dan meningkatkan toleransi beragama di kalangan masyarakat.

Sasaran Pokok 12: Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga dan Pemberdayaan Gender

Arah Pembangunan: IE14. Keluarga Berkualitas, Kesejahteraan Gender dan Masyarakat Inklusif

Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (i39)

Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga mengukur kualitas hidup keluarga di Provinsi Bengkulu. Target peningkatan dari 72,36 - 72,37 pada tahun 2025 menjadi 77,5 - 77,57 pada tahun 2045 menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui berbagai program yang mendukung kesehatan, pendidikan, dan ekonomi keluarga. Peningkatan ini mencerminkan upaya untuk menciptakan keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas, yang menjadi fondasi bagi pembangunan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (i40)

Indeks Ketimpangan Gender mengukur kesenjangan gender dalam berbagai aspek kehidupan, seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Target penurunan dari 0,44 pada tahun 2025 menjadi 0,21 - 0,19 pada tahun 2045 mencerminkan upaya untuk mengurangi ketimpangan gender melalui peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Penurunan indeks ini menunjukkan komitmen untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara, di mana perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi dalam pembangunan.

Dengan adanya indikator-indikator ini, Provinsi Bengkulu berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan pemberdayaan gender. Hal ini mencakup peningkatan kesejahteraan keluarga melalui program-program kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, serta pengurangan ketimpangan gender melalui peningkatan akses dan kesempatan bagi perempuan. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan sejahtera, di mana setiap individu, tanpa memandang gender, dapat berkontribusi secara optimal dalam pembangunan daerah.

Tabel 5. 3 Sasaran Pokok Pembangunan Provinsi Bengkulu 2025-2045

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target					Ket
				Baseline 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya Pelayanan dan Penyediaan Kualitas dan Akses Kesehatan Masyarakat	IE1. Kesehatan Untuk Semua	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) <i>(i1)</i>	73,56	74,98	76,40	77,81	79,23	
			Kesehatan Ibu dan Anak <i>(i2)</i> :						
			Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) <i>(i2a)</i>	109	85	62	38	15	
			Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) <i>(i2b)</i>	13,5	11,38	9,25	7,13	5	
			Penanganan Tuberkulosis <i>(i3)</i> :						

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target					Ket
				Baseline 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045	
			Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)* (<i>i3a</i>)	91	93,25	95,50	97,75	100	
			Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)* (<i>i3b</i>)	91	93,25	95,50	97,75	100	
			Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%) (<i>i4</i>)	95,67	96,63	97,59	98,54	99,5	
			Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun, Satuan: Rata-rata anak per Wanita,	2,29	2,28	2,26	2,25	2,23	
			Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contrsceptive Prevelance Rate/mCPR) (%)	61,7	62,4	63,3	64,1	65,2	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target					Ket
				Baseline 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045	
			Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) (%)	16,1	13,2	10,7	8,9	7,5	
			Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19), Satuan: Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun;	34,5	25,4	25,4	21,5	17,5	
			Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga), Satuan. Indeks (Skala 0-100)	58,20	68	78	85	90	
2.	Meningkatnya Pelayanan, Penyediaan dan Pemerataan Kualitas dan Akses Pendidikan	IE2. Pendidikan Berkualitas yang Merata	Hasil Pembelajaran <i>(i5)</i>						

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target					Ket
				Baseline 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045	
			Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk* (i5a):						
			Literasi Membaca	9,09 – 11,09	24,23 – 26,23	39,38 – 41,38	54,52 – 56,52	69,66 – 71,66	
			Numerasi	0,00 – 2,00	15,38 – 17,38	30,75 – 32,75	46,13 – 48,13	61,50 – 63,50	
			Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk* (i5b):						
			Literasi Membaca (i5bi)	26,02 – 28,02	26,02 – 28,02	35,99 – 37,99	55,92 – 57,92	65,88 – 67,88	
			Numerasi (i5bii)	13,24 – 15,24	24,74 – 26,74	36,23 – 39,23	47,73 – 49,73	59,22 – 61,22	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target					Ket
				Baseline 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045	
			Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun) <i>(i5c)</i>	9,67 - 9,68	10,32 – 10,33	10,97 – 10,98	11,62 – 11,63	12,27 - 12,35	
			Harapan Lama Sekolah (tahun) <i>(i5d)</i>	13,96 - 13,96	14,33	14,70	15,06	15,43 - 15,48	
			Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)* <i>(i6)</i>	12,87	13,15	13,44	13,72	14,00 - 14,26	
			Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%) <i>(i7)</i>	58,94	62,96	66,97	70,99	75,00	
3.	Meningkatnya Pelayanan, Perlindungan, dan Jaminan Sosial	IE3. Perlindungan Sosial yang Adaptif	Tingkat Kemiskinan (%) <i>(i8)</i>	13,6-13,1	11,45 – 10,95	9,30 – 8,80	7,15 – 6,65	5-7	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target					Ket
				Baseline 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045	
			Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%) (i9)	16,06 (2022)	15,52	14,99	14,45	85,22	
			Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%) (i10)	23	31	39	47	55	
4.	Meningkatnya Implementasi Integrasi Teknologi dan Inovasi	IE4. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) (i11)	5,50 – 6,00	6,63 – 7,13	7,75 – 8,25	8,88 – 9,38	10-12	
			Pengembangan Pariwisata (i12)						
			Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)* (i12a)	1,83	2,15	2,47	2,79	3,11	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target					Ket
				Baseline 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045	
			Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)* <i>(i12b)</i>	0,7	0,96	1,23	1,49	1,75	
			Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%) <i>(i13)</i>	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
			Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD <i>(i14)</i>						
			Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi (%) <i>(i14a)</i>	11,55	12,92	14,28	15,65	17,01	
			Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%) <i>(i14b)</i>	2,13	3,35	4,57	5,78	7,00	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target					Ket
				Baseline 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045	
			Rasio Kewirausahaan Daerah (%) <i>(i14c)</i>	3,85	4,89	5,93	6,96	8,00	
			Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%) <i>(i14d)</i>	0,8-1,0	1,98 – 2,18	3,15 – 3,35	4,33 – 4,53	5,5-6,0	
			<i>Return on Aset (ROA) BUMD (%)*</i> <i>(i14e)</i>	1,32	2,13	2,94	3,74	4,55	
			Tingkat Pengangguran Terbuka (%) <i>(i15)</i>	3,50-3,4	3,25 – 3.15	3,00 – 2,90	2,75 – 2,65	2,5-3,0	
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) <i>(i16)</i>	61,8	64,70	67.60	70,50	73,4	
			Indeks Daya Saing Digital di tingkat nasional (peringkat) <i>(i17)</i>	15 besar	14 besar	12 besar	11 besar	10 besar	
		IE6. Transformasi Digital	Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi* <i>(i19)</i>	6	6,38	6,75	7,13	7,5	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target					Ket
				Baseline 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045	
5.	Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup serta ketahanan iklim dan bencana	IE5. Penerapan Ekonomi Hijau	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau (18)						
			Indeks Ekonomi Hijau Daerah <i>(i18a)</i>	63,49	68,07	72,65	77,23	81,81	
			b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%) <i>(i18b)</i>	41,40	48,18	54,96	61,74	68,52	
		IE15. Lingkungan Hidup Berkualitas	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (i41)	0,616	0,624	0,632	0,640	0,648	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target					Ket
				Baseline 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045	
			Kualitas Lingkungan Hidup <i>(i42)</i>						
			Indeks kualitas lingkungan hidup <i>(i42a)</i>	71-72	73,25 – 74,25	75,50 – 76.50	77,75 – 78,75	80-82,1	
			Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%) <i>(i42b)</i>	5,00	16,25	27,5	38,75	50,00	
			Pengelolaan Sampah <i>(i42c)</i>						
			Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	5-10	21,25 – 26,25	58,75 – 61,25	74,38 – 76,88	70-80	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target					Ket
				Baseline 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045	
			Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)*	27,5-30	43,13 – 45,63	58,75 – 61,25	74,38 – 76,88	90-100	
		IE17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Risiko Bencana (IRB)* (i44)	155,35	148,17	140,98	133,80	126,61 - 102,06	
			Persentase Penurunan Emisi GRK (%) (i45)						
			Kumulatif (i45a)	20,37	24,37	28,37	32,36	36,36	
			Tahunan (i45b)	30,35	31,85	33,36	34,86	59,21	
6.	Meningkatnya produktivitas ekonomi melalui transformasi ekonomi	IE7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi* (i20)	2,56	2,47	2,39	2,30	2,21	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target					Ket
				Baseline 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045	
			Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) <i>(i21)</i>	38,7	38,88	39,05	39,23	39,4	
			Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) <i>(i22)</i>	5,8	6,18	6,55	6,93	7,3	
		IE11. Stabilitas Ekonomi Makro	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) <i>(i31)</i>	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	
			Tingkat Inflasi (%) <i>(i32)</i>	2,6-3,5	2,45 – 3,35	2,30 – 3,20	2,15 – 3,05	2,0 ± 1	
			Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan <i>(i33)</i>						
			Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) * <i>(i33a)</i>	30,44	38,71	46,97	55,24	63,5	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target					Ket
				Baseline 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045	
			Aset Dana Pensiun/PDRB (%) (i33b)	0,13	0,14	0,16	0,17	0,18	
			Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan* (i33c)	423,74 b)	822,31	1.220,88	1.619,45	2.018,02 b)	
			Total Kredit/PDRB (%) (i33d)	29,1	37,45	45,80	54,15	62,5	
			Inklusi Keuangan (%) (i34)						
		IE16. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	Ketahanan energi, air, dan pangan (i43)						
			Ketahanan Energi (i43a)						

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target					Ket
				Baseline 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045	
			Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)* Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)*	750 198	1.020 188	1.290 178	1.560 168	1.830 158	
			Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%) (<i>i43b</i>)	11,66	9,35	7,03	4,72	2,40	
			Ketahanan Air (<i>i43c</i>)						
			Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	0,07	0,76	1,45	2,13	2,82	
			Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	27,92	45,94	63,96	81,98	100	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target					Ket
				Baseline 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045	
7.	Meningkatnya pembangunan kota dan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	IE8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan (<i>i23</i>)						
			Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Kota terhadap Provinsi (%) (<i>i23a</i>)	19	30	40	50	60	
			Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%) (<i>i23b</i>)	61,57	71,18	80,79	90,39	100	
			Persentase Desa Mandiri (%) (<i>i23c</i>)	6,6-7,3	13,13 – 13,83	19,65 – 20,35	26,18 – 26,88	32,7-41,7	
8.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Peningkatan	IE9. Regulasi dan Tata Kelola yang	Indeks Reformasi Hukum* (<i>i24</i>)	42,55	49,05	55,55	62,05	68,55	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target					Ket
				Baseline 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045	
	Kualitas Layanan Publik	Berintegritas dan Adaptif							
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (<i>i25</i>)	3,2-3,3	3,65 – 3,78	4,10 – 4,23	4,55 – 4,68	5,00	
			Indeks Pelayanan Publik (<i>i26</i>)	4,4 (2022)	4,55	4,70	4,85	5,00	
			Indeks Integritas Nasional (<i>i27</i>)	72,58	76,29	80,01	83,72	87,43	
9.	Meningkatnya keamanan masyarakat dan penegakan demokrasi	IE10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah Tangguh dan Demokrasi Substansial	Angka Kriminalitas (<i>i28*</i>)	175-200	143,75 – 168,75	112,50 – 137,50	81,25 – 106,25	50-100	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target					Ket
				Baseline 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045	
			Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%) (i29)	67,42 (2020)	71,77	76,11	80,46	84,8	
			Indeks Demokrasi Indonesia (i30)	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	
10.	Meningkatnya inovasi daerah	IE 12. Peran Kepala Daerah Dalam Menciptakan Inovasi dan Daya Saing Daerah	<i>Indeks Inovasi Daerah (i35*)</i>	50-55	56,25 – 51,25	62,50 – 67,50	68,75 – 73,75	75-80	
			<i>Indeks Daya Saing Daerah (i36*)</i>	3,33-3,35	3,45 – 3,47	3,57 – 3,59	3,68 – 3,70	3,80-4,02	
11.	Meningkatnya kehidupan sosial kemasyarakatan yang berbudaya dan Relligius	IE13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) (i37)	57,73 - 57,77	60,99 – 64,29	67,51 – 67,55	67,51 – 67,55	70,77 - 71,81	

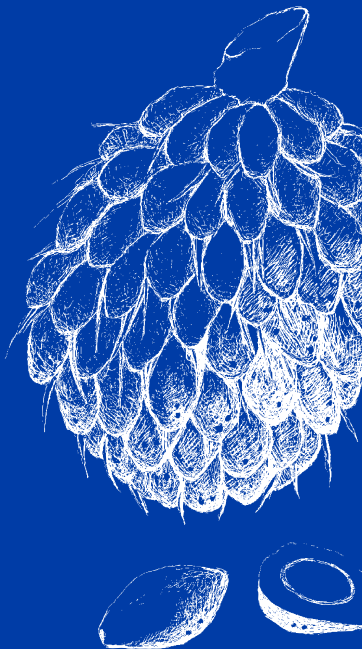
No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target					Ket
				Baseline 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045	
			Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) <i>(i38)</i>	75,26 - 75,31	77,04 – 77,09	78,82 – 78,87	80,59 – 80,64	82,37 - 82,83	
12.	Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga dan Pemberdayaan Gender	IE14. Keluarga Berkualitas, Kesejahteraan Gender dan Masyarakat Inklusif	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga <i>(i39)</i>	72,36 - 72,37	73,65 – 73,66	74,93 – 74,94	76,22 – 76,23	77,5 - 77,57	
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG) <i>(i40)</i>	0,44	0,38	0,33	0,27	0,21 - 0,19	

5.3. Muatan Ekonomi Syariah dalam RPJPD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045, ekonomi syariah diintegrasikan sebagai salah satu pilar penting dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan dan inklusif. Ekonomi syariah, yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam, mendorong praktik bisnis yang adil, transparan, dan beretika. Dalam kerangka RPJPD ini, pengembangan ekonomi syariah diarahkan untuk:

1. **Meningkatkan Inklusi Keuangan Syariah:** Pemerintah Provinsi Bengkulu berkomitmen untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah melalui pendirian dan pengembangan bank syariah, koperasi syariah, dan lembaga zakat, infak, dan sedekah. Langkah ini diharapkan dapat mendorong inklusi keuangan dan memberikan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.
2. **Pengembangan Industri Halal:** Upaya untuk meningkatkan daya saing produk lokal dilakukan dengan mendorong sertifikasi halal dan pengembangan ekosistem industri halal. Sektor makanan, kosmetik, obat-obatan, dan pariwisata halal menjadi fokus utama dalam menciptakan produk dan jasa yang sesuai dengan standar halal internasional.
3. **Pendidikan dan Literasi Keuangan Syariah:** Provinsi Bengkulu akan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ekonomi syariah melalui program-program pendidikan dan literasi keuangan. Kurikulum pendidikan di berbagai jenjang akan disesuaikan untuk mencakup materi ekonomi syariah, sehingga generasi muda dapat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari.
4. **Kolaborasi dan Kerjasama:** Pemerintah akan membangun kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk lembaga keuangan syariah, akademisi, dan sektor swasta, untuk mendorong inovasi dan pengembangan ekonomi syariah. Forum-forum dialog dan kerjasama antar komunitas juga akan difasilitasi untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan mengintegrasikan ekonomi syariah dalam RPJPD, Provinsi Bengkulu berkomitmen untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang adil dan berkelanjutan, yang dapat memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat fondasi ekonomi daerah dan mendukung pencapaian visi jangka panjang Provinsi Bengkulu sebagai wilayah yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.



BAB VI

PENUTUP



BAB VI

PENUTUP

6.1. Manajemen Resiko Pembangunan

Manajemen Risiko Pembangunan merupakan komponen penting dalam pelaksanaan berbagai kebijakan pembangunan yang akan ditindaklanjuti untuk mencapai sasaran jangka panjang yang ditetapkan dalam RPJPD Provinsi Bengkulu 2025-2045. Komponen utama dari manajemen risiko ini mencakup mekanisme perubahan, sistem pengendalian pelaksanaan, penerapan insentif dan disinsentif, komunikasi publik, mekanisme pendanaan pembangunan, dan konsistensi pelaksanaan RPJPD.

Mekanisme perubahan dirancang untuk memastikan bahwa setiap perubahan dalam rencana pembangunan dapat dikelola dengan baik, sementara sistem pengendalian pelaksanaan bertujuan untuk memastikan semua kegiatan pembangunan berjalan sesuai rencana dengan memberikan insentif dan disinsentif yang tepat. Komunikasi publik yang efektif akan menjamin partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan melalui transparansi informasi dan forum konsultasi publik. Pendanaan pembangunan yang berkelanjutan dan efektif dicapai melalui penyusunan anggaran yang rinci, pemanfaatan sumber pendanaan alternatif, dan pengelolaan dana yang transparan. Konsistensi dalam pelaksanaan RPJPD dijaga melalui koordinasi antar lembaga, sistem monitoring dan evaluasi yang komprehensif, dan pelibatan semua pihak terkait.

Manajemen Risiko Pembangunan ini disusun secara terpisah dari dokumen RPJPD ini dan akan diatur lebih lanjut melalui regulasi yang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Regulasi tersebut akan memberikan landasan hukum yang kuat untuk penerapan berbagai mekanisme dan sistem yang telah dirumuskan, memastikan pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan dalam RPJPD 2025-2045, dan mewujudkan visi "Bengkulu Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan."

6.2. Kesimpulan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2045 menjadi pijakan utama bagi perencanaan pembangunan wilayah ini selama dua dekade ke depan. Visi yang terkandung di dalamnya, yakni "Bengkulu Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan," memandu seluruh pemangku kepentingan dalam mengarahkan pembangunan daerah. RPJPD ini bukan hanya sebagai landasan bagi

Pemerintah Provinsi Bengkulu, tetapi juga menjadi referensi penting dalam penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu. Selain itu, RPJPD menjadi panduan esensial bagi calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dalam menyusun visi, misi, dan program prioritas yang akan menjadi dasar RPJMD Provinsi Bengkulu, yang berlaku dalam periode lima tahunan, dan RKPD Provinsi Bengkulu, yang bersifat tahunan.

Keberhasilan implementasi RPJPD ini sangat bergantung pada beberapa faktor kunci. Pertama, diperlukan komitmen kuat dan demokratis dari kepemimpinan daerah untuk melaksanakan rencana pembangunan tersebut. Konsistensi kebijakan pemerintah dan daerah juga menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa tujuan jangka panjang dapat tercapai secara berkelanjutan. Selanjutnya, perlu adanya keberpihakan pembangunan kepada rakyat, yang berarti kebijakan dan program pembangunan harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama yang berada di lapisan masyarakat yang lebih marginal. Peran serta aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, sektor swasta, dan lembaga kemasyarakatan, sangat diperlukan untuk mencapai kesuksesan pembangunan Provinsi Bengkulu.

Terakhir, dalam upaya menjaga keseimbangan pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, perlu dilakukan evaluasi dan pembaruan secara berkala terhadap RPJPD. Ini bertujuan agar rencana pembangunan selalu relevan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta dapat mengakomodasi perubahan kebijakan nasional maupun regional. Dengan demikian, RPJPD Provinsi Bengkulu tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga instrumen dinamis yang responsif terhadap perkembangan dan kebutuhan masyarakat selama periode perencanaan yang ditetapkan.

GUBERNUR BENGKULU

DR. H. ROHIDIN MERSYAH